



EKONOMIKA GIZI

Dimensi Baru di Indonesia

DIO CAISAR DARMA
PURWADI
TRI CICIK WIJAYANTI



Ekonomika Gizi: Dimensi Baru di Indonesia

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ekonomika Gizi: Dimensi Baru di Indonesia

Dio Caisar Darma
Purwadi
Tri Cicik Wijayanti

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Ekonomika Gizi: Dimensi Baru di Indonesia

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2020

Penulis:

Dio Caisar Darna

Purwadi

Tri Cicik Wijayanti

Editor: Alex Rikki

Desain Cover: Janner Simarmata

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

Kontak WA: +62 858-3552-3449

Dio Caisar Darna, Purwadi dan Tri Cicik Wijayanti

Ekonomika Gizi: Dimensi Baru di Indonesia

Yayasan Kita Menulis, 2020

xx; 262 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-7645-29-0

Cetakan 1, Januari 2020

- I. Ekonomika Gizi: Dimensi Baru di Indonesia
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa

ijin tertulis dari penerbit maupun penulis

Ucapan Terima Kasih

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil' alamin.

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun sebuah karya berjudul “Ekonomika Gizi: Dimensi Baru di Indonesia” yang merupakan buah pemikiran selama kurun waktu 1 belakang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuan dalam proses penyelesaian buku. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang beberapa pihak, yakni: Ir. H. Syahril, ASK, M.Si (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda), Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Rektor Universitas Mulawarman), Pror. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman), Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, MS (Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik), Anwar Hariyono, SE, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik), Kedua orang tua penulis tercinta yang telah menjadi sosok panutan yang luar biasa (terima kasih atas dukungan yang tiada henti dan doa-doa yang dipanjatkan untuk anakmu), atensi dari Penerbit “Kita Menulis” atas kesempatannya, Buah hati penulis, serta seluruh keluarga kami yang selalu mencurahkan doa dan dukungannya, motivasi spesial oleh Perwakilan PT. KPC (Sangatta), Rektor Universitas Mulawarman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, serta M. Samsun, SE, M.Si dan Sigit Wibowo, SE (Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim) atas support materi ataupun moril atas terbitnya karya ini, Sahabat terhebat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan hiburan, serta membantu dalam menyelesaikan buku ini.

Karya cipta telah bertepatan dengan usia penulis (Dio Caisar Darma) ke-30, lahirnya sosok puteri tercinta (anak ke-2), serta harapan Liverpool untuk menjuarai English Premier League ke-19, pasca puasa selama hampir 3 dekade sejak era 1990-an. Sementara, tak kalah spesial dengan penulis ke-2 (Purwadi) sebagai hadiah genap berumur 50 tahun dan persembahan nawacita luar biasa dari penulis ke-3 (Tri Cicik), untuk menuangkan beberapa ide sederhana menjadi luaran ilmiah.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi kami berharap semoga kelak berguna dan bermanfaat bagi Bangsa Indonesia.

Amin.

Salam hormat

Penulis

Prolog

Banyak buku dan berbagai studi yang menggabungkan antara konsep ekonomi dan sumber daya manusia, namun dirasa belum cukup untuk menghadirkan gagasan menarik dalam menjawab berbagai peluang dan tantangan Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab itu, maha karya ini teripta sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi dan gizi yang selama ini terjadi. Ekonomi dan gizi, merupakan dua rumpun ilmu yang berbeda. Pembahasan akan ekonomi SDM sejauh ini telah banyak dibahas di berbagai belahan Dunia, namun hal ini dirasa tidaklah cukup, karena proses pembentukan manusia agar bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja semuanya membutuhkan kecukupan gizi.

Ekonomi dan gizi sangatlah erat kaitanya, meskipun secara garis besar ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang dalam memuhi kebutuhan yang tidak terbatas, maka ia memerlukan pola untuk menselaraskan mana kebutuhan pokok dan prioritas, mana yang tidak, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini manusia sudah pasti memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam pengelolaan (manajemen), modal, waktu, serta beragam indikator lain. Disatu sisi, ilmu gizi membahas bagaimana ketercukupan sumber pangan untuk yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga.

Seperti yang kita pahami, bahwa usia (umur) dan kesehatan manusia untuk menghasilkan energi yang berguna sebagai modal aktivitas sehari-hari dalam rangka menghasilkan produktivitas (pendapatan, dan sebagainya) sangat terintergrasi. Percaya atau tidak, seseorang selama masa hidupnya bisa menghabiskan setidaknya 60-70% untuk kebutuhan primer saja (makanan, minuman, vitamin, serta sumber protein) yang dibutuhkan oleh tubuh. Ekonomi dan gizi ini seperti keterikatan antara sebuah kendaraan dan bahan bakar. Bagaimana mungkin, saat seseorang bekerja untuk mengejar nilai ekonomi, tetapi

tidak memperharikan kecukupan sumber gizi?. Apakah kalori, vitamin, dan protein sudah selaras terhadap keinginan tubuh?, atau sebaliknya, kita tidak melakukan kegiatan yang produktif, sementara hasil atau output yang didapat sedikit, sehingga upah yang didapat tidak cukup untuk memenuhi sumber makanan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Di era digital, beban kerja diberbagai lapangan usaha sangatlah menuntut manusia untuk bisa mengejar target tertentu. Untuk itu, kegiatan kita sehari-hari harus memperharikan asupan makanan, sehingga dapat diserap tubuh dengan baik, dan menghasilkan kembali energi bermanfaat.

Produktivitas tenaga kerja adalah sinyal bahwa sebuah wilayah atau negara maju, karena pasar persaingan sangatlah ketat. Bagaimana tidak, pembangunan manusia yang diukur melalui Human Development Index (HDI) atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai pilar penting untuk mengukur tingkat produktivitas itu sendiri. Apabila seseorang telah memperhatikan berbagai aspek dan komponen dalam meraih keberhasilan kinerja, maka secara tidak langsung bukankah kita telah ikut bertaspasi guna mewujudkan kemandirian Bangsa?.

Menariknya, kesadaran manusia akan peranan konsep ekonomi dan gizi, terkadang luput dari kebijakan Pemerintah untuk membuat sebuah aturan maupun hal-hal teknis dilapangan sebagai acuan memperbaiki kualitas SDM. Terkait dengan peradaban manusia yang memainkan peranan utama dalam kehidupan semesta ini, sudah semestinya kita sebagai objek dan bahkan subjek pemerataan pembangunan, sadar betapa pentingnya luaran sederhana yang tertuang dalam ide penulis.

Buku ini terdiri atas 6 (enam) bagian, yang mencoba menuntun Anda untuk memahami memahami konsep dan terapan dari Ekonomika Gizi. Bagi seorang akademisi, kiranya membutuhkan sebuah suplemen baru dalam menulis artikel, jurnal, dan mengembangkan pemikiran sesuai dengan kondisi terkini. Tak kalah pentingnya, untuk

Pemerintahan sangat penting sekali dalam merubah pola pikir berupa program yang harus bersentuhan langsung dengan ilmu aplikatif seperti yang tertuang dalam pokok bahasan Buku ini.

Chapter 1, akan mengupas hal paling mendasar dari konsep ekonomi dan gizi. Definisi bidang ini punya kaitan dengan definisi dari cakupan ilmu ekonomi dan ilmu gizi itu sendiri. Selanjutnya, akan dipertegas oleh sub-bahasan ruang lingkup (subjek dan objek), yang menjelaskan tentang jangkauan dari konsep itu sendiri. Peran dari ilmu ekonomi gizi terhadap pembangunan sumberdaya manusia melengkapi pokok bagian akhir Bab.

Chapter 2, secara gamblang menunjukkan bagaimana para pembaca untuk bersentuhan secara langsung mengenai keterkaitan antara Ekonomi Gizi terhadap sumberdaya alam. Sejak lahir, tumbuh berkembang hingga dewasa, manusia pasti membutuhkan asupan gizi dan ketergantungan akan pangan. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan proses yang panjang sesuai dengan tingkat ekonomi per kapita masing-masing rumah tangga. Bila ingin mencapai tingkatan gizi yang baik, maka nilai pengorbanan juga tinggi, dan sebaliknya. Keterkaitan dengan bidang ketenagakerjaan pada sub-bahasan kedua, dimana kapasitas kerja dari seorang tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dapat berpengaruh dari segi gizi yaitu status gizi. Status gizi merupakan pengukuran dari sejauh mana terpenuhinya kebutuhan fisiologi individu akan zat gizi. Disisi lain, hal yang perlu ditambahkan terdapat pada sub-bab ketiga, yaitu hubungannya terhadap pengembangan wilayah. Intensitas sumber daya manusia untuk memenuhi kecukupan masalah gizi terkandung dalam sebuah aktivitas daya tampung dan daya dukung wilayah. Terakhir, hubungan ekonomi gizi dan kebijakan fiskal dititik beratkan melalui perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat atau status gizi masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan asupan gizi yang diperoleh. Sebagai pelengkap bahasan, dalam kaitannya, masalah kesehatan dan lingkungan ada segelintir masalah yang perlu

dicermati yaitu masalah gizi pada individu. Pada era global saat ini, perlu dicermati di Indonesia.

Chapter 3, memfokuskan pada faktor pendorong kecukupan gizi. Beberapa faktor dalam mendukung pemenuhan gizi tidak terlepas dari kebijakan dan strategi pembangunan disektor pertanian. Sektor pertanian yang terdiri dari: kehutanan, perikanan, tanaman pangan dan bahan makanan, budidaya perkebunan, dan sebagainya merupakan kunci utama dalam penyediaan kebutuhan manusia sehari-hari. Sub-bahasan kedua dari bagian ini akan membahas kebutuhan gizi per kapita. Seperti yang kita ketahui, bahwa penetapan standar makanan untuk pemeliharaan kesehatan telah mengalami perkembangan karena pemahaman peran gizi dalam kesehatan menjadi semakin baik. Oleh karenanya, diperlukan data base yang berisikan komposisi dan kandungan zat gizi yang terkandung di dalam suatu pangan dan merupakan instrument dasar dalam penilaian konsumsi zat gizi, baik pada individu maupun masyarakat. Ketiga, ditunjang oleh hipotesa "Life Cycle", dimana pendapatan yang bervariasi secara sistematis sepanjang hidup orang dan tabungan memungkinkan konsumen untuk membuat pendapatan menjadi flexible, karena dapat dipindahkan penggunaannya dari waktu ketika pendapatan tinggi ke saat-saat ketika pendapatan rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada level mikro rumah tangga salah satunya adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan disamping pengeluaran makanan yang berkalori dan berprotein. Pokok yang ke-4 adalah model perhitungan baru dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas pembangunan manusia tercermin dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, maupun pola hidup penduduknya. Apabila komponen itu berkesinambungan, maka seseorang akan berpeluang untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak, termasuk pemenuhan konsumsi melalui perbaikan gizi yang baik. Jika tidak, masyarakat disuatu wilayah tidak dapat mengambil kesempatan kerja dan bersaing, sehingga terjadi pengangguran dan kemiskinan, sehingga menyebabkan kelaparan. Bagian terakhir yakni Indeks Ketahanan Pangan, berisikan pengabaian hak atas pangan merupakan penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan berakibat kepada munculnya

kelaparan yang merupakan bentuk kemiskinan paling buruk. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, dengan sub-sistem utama adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil sinergi dari interaksi ketiga sub-sistem tersebut.

Chapter 4, secara khusus konsep status gizi dalam perencanaan tenaga kerja menerangkan jika calon tenaga kerja yang tidak memiliki standar gizi, dipastikan akan susah untuk memasuki lapangan pekerjaan dan bersaing untuk mengisi kesempatan kerja tersebut. Fisik dan pola pikir seseorang sangat ditentukan oleh cakupan gizi yang diperoleh, baik itu yang berasal dari sumber makanan, vitamin, dan pemenuhan lainnya. Pada bagian ke-2, akan menguraikan manfaat ekonomi gizi membentuk pasar tenaga kerja. Kesiapan seseorang menghadapi persaingan ketat di era millennial ini, jika ditunjang dengan fisik yang sehat. Selain latar pendidikan yang memadai, cakupan gizi sehari-hari yang dikonsumsi menjadi peran utama jika ingin memenangkan persaingan untuk memperoleh penghasilan. Disisi lain, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melengkapi pokok bahasan peranan gizi pada penawaran tenaga kerja. Sementara itu, determinan gizi dalam elastisitas tenaga kerja untuk mempertegas bahasan tentang pendapatan masyarakat yang diterima tiap kurun waktu atau periode tertentu, berdampak pada tingkat konsumsi per kapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Bila kebutuhan bahan makanan atau pangan tenaga kerja terpenuhi akan gizi, maka skill yang dihasilkan dan tingkat produktivitas semakin bertambah. Di sub-bahasan yang lain, sistem pengupahan melalui ekonomi gizi dapat diartikan sebagai seseorang yang mendapatkan upah dibawah rata-rata ketetapan Pemerintah dan tingkat kebutuhan (pola konsumsi terhadap makanan, kebutuhan jasmani/kesehatan, dan pendidikan) yang tidak tercukupi, maka bisa dipastikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh akan minim dan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja ataupun aktivitas sehari-hari. Terakhir, kemiskinan merupakan

dampak oleh melemahnya ekonomi gizi. Ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat miskin terus dilanjutkan upaya penyediaan beras bersubsidi yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan.

Chapter 5, menitikberatkan pada ekonomi gizi untuk pembangunan wilayah. Dibidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lain menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Sub-bahasan ke-2, menjabarkan jika manusia memerlukan zat gizi untuk kelangsungan hidupnya, yang dapat diperoleh dari makanan atau minuman. Zat gizi yang diperoleh dari makanan digunakan untuk tumbuh, bereproduksi, dan memelihara kesehatan yang baik sebagai pelengkap. Suatu negara atau daerah hadir dan berperan penting dalam melaksanakan kebijakan yang secara langsung memperhatikan faktor kesehatan penduduk melalui standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hal ini sebagai pelengkap dalam pokok karakteristik wilayah melalui status kecukupan gizi. Dari dimensi pelengkap, terdapat substansi dari struktur demografi berdasarkan ekonomi gizi. Sikap konservatif yang belum memasukkan perubahan dan kemajuan teknologi sebagai bagian penting. Modernisasi dalam bidang ekonomi kini telah mendorong perbaikan standar hidup manusia dan mengharuskan manusia bekerja mencari pendapatan. Hal tersebut yang menyebabkan menurunnya angka fertilitas maupun natalitas, karena kecenderungan menikah muda menurun karena tuntutan pekerjaan. Dimensi yang harus kita cermati dari bagian ke-4 tentang aspek gizi pada pertumbuhan ekonomi. Kekurangan dan kelebihan zat gizi yang diterima tubuh seseorang, akan sama mempunyai dampak yang negatif, perbaikan konsumsi pangan dan peningkatan status gizi sesuai atau seimbang dengan yang diperlukan tubuh jelas merupakan unsur penting yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia, sehat, kreatif, dan produktif untuk mengejar pendapatan per kapita, dimana item tersebut sebagai aspek utama dalam kinerja pertumbuhan ekonomi. Substansi akhir dari chapter 5 adalah capaian pertumbuhan penduduk, dimana saat bonus demografi

tiba, penduduk usia produktif akan benar-benar menjadi produktif karena memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualitas skill mereka. Jangan sampai penduduk usia produktif gagal menjadi produktif lantaran tidak mendapatkan kesempatan. SDM Indonesia yang berkualitas, produktif, dan inovatif dinilai menjadi kunci sukses memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.

Chapter 6, kualitas ekonomika gizi di Indonesia dapat kita telaah dari beberapa item, yakni: transformasi ekonomi gizi, menuju Sustainable Development Goals (SDGs), dan implikasi kebijakan secara terarah. Satu diantara upaya yang mempunyai dampak cukup penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk menciptakan kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi yang tidak terkontrol, penggunaan sumberdaya alam dan energi untuk produksi maupun konsumsi, yang tidak berhati-hati, hingga melebihi kapasitas bumi, dapat merusak kondisi lingkungan sosial dan ekosistem, sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup populasi. Arah kebijakan yang dapat ditempuh dengan adanya konsep ini adalah memerhatikan asupan pangan dan gizi itu sendiri, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, serta menghasilkan pola perekonomian secara berkualitas. Adapun implikasi kebijakan merupakan komponen utama sebagai pijakan untuk mendorong pertumbuhan seseorang dalam meraih produktivitas.

Daftar Isi

Pengantar Eksekutif	v
Prolog	vii
Daftar Isi	xv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Tabel.....	xix

CHAPTER 1: SELAYANG PANDANG

A. Pengembangan Konsep	2
B. Ruang Lingkup (Subjek dan Objek).....	4
C. Peran Ilmu Ekonomi Gizi	6

CHAPTER 2: HAKIKAT EKONOMIKA GIZI

A. Keterkaitan Terhadap Sumber Daya Manusia.....	10
B. Keterkaitan Terhadap Ketenagakerjaan	19
C. Keterkaitan Terhadap Pengembangan Wilayah.....	23
D. Keterkaitan Terhadap Fiskal	31
E. Keterkaitan Terhadap Lingkungan Hidup	39

CHAPTER 3: SUBSTANSI EKONOMIKA GIZI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Faktor Pendorong Cakupan Gizi.....	50
B. Kebutuhan Gizi per Kapita	62
C. Life Cycle Hypothesis: suatu Penunjang.....	69
D. Model Baru Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	85
E. Indeks Ketahanan Pangan (IKP).....	96

CHAPTER 4: SUBSTANSI EKONOMIKA GIZI DAN KETENAGAKERJAAN

A. Konsep Status Gizi dalam Perencanaan Tenaga Kerja.....	102
B. Manfaat Ekonomi Gizi membentuk Pasar Tenaga Kerja	106
C. Peranan Gizi pada Permintaan Tenaga Kerja.....	109
D. Peranan Gizi pada Penawaran Tenaga Kerja.....	114

E. Determinan Gizi dalam Elastisitas Tenaga Kerja	117
F. Sistem Pengupahan melalui Ekonomi Gizi.....	119
G. Kemiskinan: Dampak Melemahnya Ekonomi Gizi.....	131

CHAPTER 5: SUBSTANSI EKONOMIKA GIZI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

A. Ekonomi Gizi untuk Pembangunan Wilayah.....	146
B. Karakteristik Wilayah melalui Status Kecukupan Gizi	155
C. Struktur Demografi Berdasarkan Ekonomi Gizi.....	166
D. Aspek Gizi pada Pertumbuhan Ekonomi	171
E. Capaian Pertambahan Penduduk	192

CHAPTER 6: KUALITAS EKONOMIKA GIZI INDONESIA

A. Transformasi Ekonomi Gizi: Catatan Utama	202
B. Menuju Sustainable Development Goals (SDGs).....	205
C. Implikasi Kebijakan	219

Daftar Pustaka.....	225
Indeks	249
Biodata Penulis	257

Daftar Gambar

Gambar 1.1: Cakupan Ilmu Ekonomi Gizi dari Berbagai Kondisi....	5
Gambar 1.2: Peranan Ilmu Gizi dari Masa ke Masa	7
Gambar 1.3: Goals Ekonomi dan Gizi dalam Pembangunan.....	8
Gambar 2.1: Faktor Penyebab KEP pada Anak	11
Gambar 2.2: Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019 (Juta Jiwa)	17
Gambar 2.3: Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, 2015-2045 (Juta Jiwa)	18
Gambar 2.4: Anggaran Kesehatan Indonesia, 2011-2018 Rp Triliun).....	36
Gambar 2.5: Peta dan Peringkat IKLH Indonesia, 2017	47
Gambar 3.1: Hubungan Konsumsi dan Pendapatan	70
Gambar 3.2: Average Propensity to Consume.....	71
Gambar 3.3: Kerangka Penyusunan IPM	89
Gambar 3.4: Perbandingan Metode Perhitungan IPM Lama dan Baru.....	91
Gambar 3.5: Tren dan Pertumbuhan IPM, 2010-2018	94
Gambar 3.6: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2018	94
Gambar 3.7: Indeks Ketahanan Pangan Negara-Negara Asia Tenggara, 2018.....	98
Gambar 3.8: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia, 2018	99
Gambar 4.1: Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja di Asia Tenggara, 2020-2050	108
Gambar 4.2: Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja	112
Gambar 4.3: Fungsi Permintaan Tenaga Kerja.....	113
Gambar 4.4: Kurva Penawaran Tenaga Kerja	117
Gambar 4.5: Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja.....	118
Gambar 4.6: Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja	125
Gambar 4.7: Penetapan Upah Minimum di Pasar Monopsoni.....	126
Gambar 4.8: Paradigma - Lingkaran Kemiskinan	134

Gambar 4.9: Paradigma Baru Kemiskinan	136
Gambar 4.10: Tingkat Kemiskinan 34 Provinsi di Indonesia, 2019...	142
Gambar 5.1: Hubungan Infrastruktur dan Pembangunan Manusia.....	154
Gambar 5.2: Visualisasi Piramida Makanan.....	169
Gambar 5.3: Kebutuhan Energi bagi Pekerja.....	161
Gambar 5.4: Bayi dengan Berat Lahir Rendah (2,5 Kg), 2018.....	163
Gambar 5.5: Perawatan Bayi dengan Berat Lahir Rendah (2,5 Kg), 2018	165
Gambar 5.6: Jumlah Penduduk Kurang Gizi di Asia Tenggara	169
Gambar 5.7: Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang Anak Balita Umur 0-23 Bulan Menurut Provinsi, 2017.....	170
Gambar 5.8: Hubungan Variabel Demografi dan Non Demografi ..	176
Gambar 5.9: Penduduk Dunia menurut Kelompok Pendapatan, 1960-2016	179
Gambar 5.10: Persentase Penduduk Indonesia menurut Kelompok Usia, 1960-2035	181
Gambar 5.11: Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan di Indonesia, 2010	182
Gambar 5.12: Piramida Penyebaran Populasi Dunia, 2017	185
Gambar 5.13: Negara dengan Penduduk Migran Internasional Terbesar, 2019	187
Gambar 5.14: Laju Pertumbuhan PDB Indonesia, 2011-2018	189
Gambar 5.15: Perekonomian Indonesia secara Spasial, Triwulan II-2019	191
Gambar 5.16: Proyeksi Angka Kelahiran Kasar di Indonesia, 1950-2100 (kelahiran per 1.000 penduduk)	196
Gambar 5.17: Proyeksi Harapan Hidup Saat Lahir (e0) menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 1950-2100.....	198
Gambar 6.1: GII di berbagai Negara Dunia berdasarkan data UNDP, 2011	207
Gambar 6.2: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2030	210

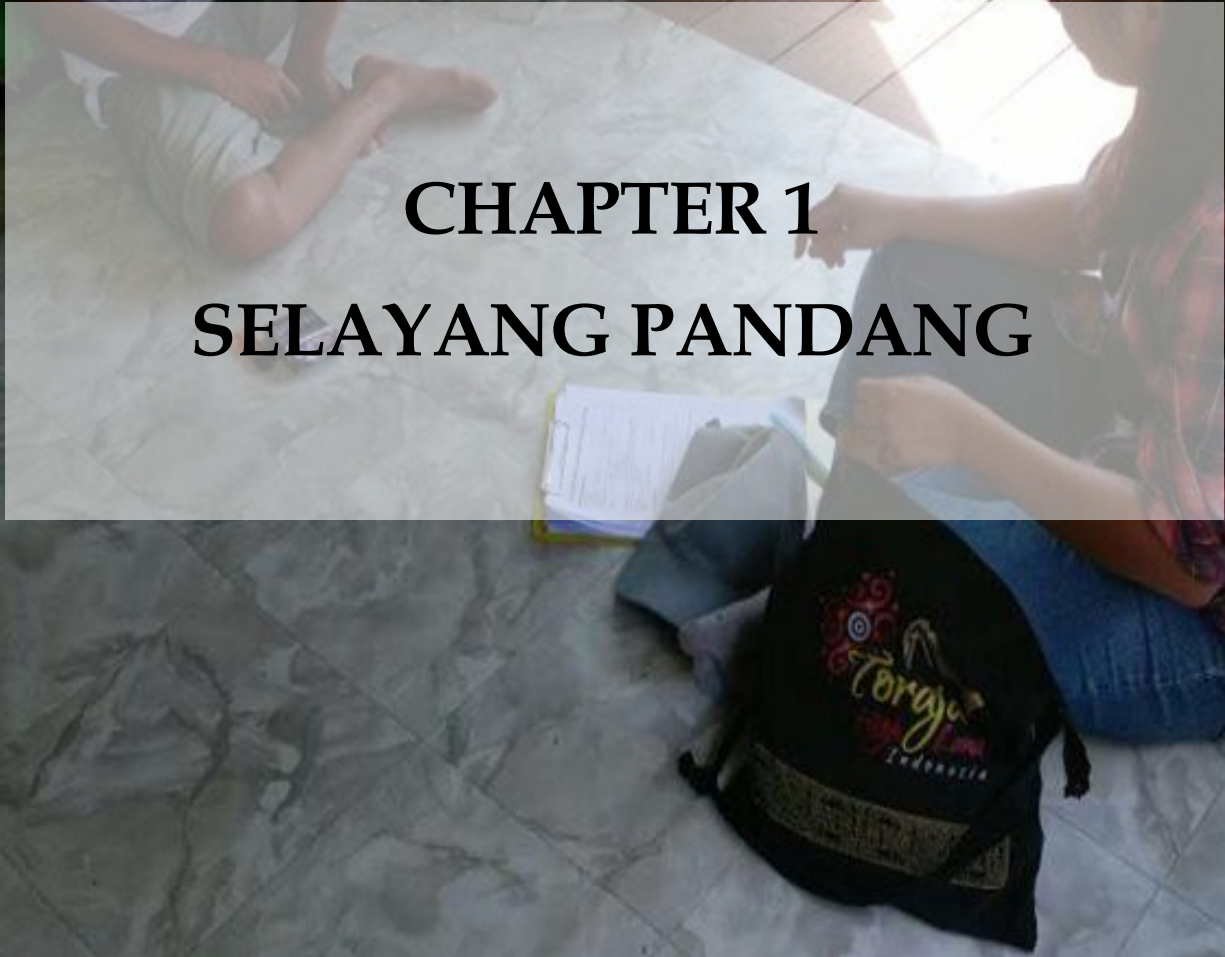
Daftar Tabel

Tabel 2.1: Penduduk Indonesia Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017-2018.....	20
Tabel 2.2: Penduduk Berumur 15 Tahun ke-Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2018	23
Tabel 2.3: Persentase Terhadap Luas Indonesia, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk dan Keluar Risen, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Provinsi, 2016.....	28
Tabel 2.4: Pengertian Indikator Status Gizi.....	46
Tabel 3.1: Perkembangan Harga Komoditas Sembako dan Tingkat Inflasi Nasional, Juni 2017 - Juni 2018 (MoM)	61
Tabel 3.2: Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Penggunaan	79
Tabel 3.3: Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Provinsi dan Daerah, September 2017	83
Tabel 3.4: Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM ..	90
Tabel 4.1: Perbandingan UMP antar Provinsi di Indonesia, 2017-2018	129
Tabel 5.1: Anjuran Angka Kecukupan Gizi dan Indikator lainnya ..	158
Tabel 5.2: Proyeksi Populasi Terbanyak dari 15 Negara, 2019	186
Tabel 6.1: Relevansi SDGs terhadap Ekonomi dan Gizi	211



CHAPTER 1

SELAYANG PANDANG



A. Pengembangan Konsep

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi secara drastis memastikan para ilmuwan (pakar) berbagai ahli dari penjuru dunia berfikir keras untuk terus berinovasi dalam mengembangkan keilmuannya tersebut. Penciptaan suatu alat maupun aplikasi terapan dirancang untuk umat manusia, agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Teknologi berupa digital memang tidak terelakkan lagi, sebab harapan utama adalah sebagai input (objek) yang berguna dimasa mendatang. Manusia sebagai subjek tentu berharap besar dalam pemanfaatannya, agar menambah produktivitas kerja, pendapatan, dan kelanjutan proses pembangunan.

Serupa dengan ilmu, seiring dengan perkembangan teknologi (daya dorong utama), tercipta pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah spesifik dianggap sebagai kebutuhan utama. Bisa kita ambil contoh, seperti manfaat dengan adanya dunia teknologi berdampak bagi perekonomian di suatu Negara. Sehingga, timbul sebuah ilmu baru bernama ekonomi digital. Belum efek yang ditimbulkan dari digital dalam perekonomian, mengakibatkan pada pencemaran lingkungan (karena over ekspansi) dan muncul kajian bernama valuasi ekonomi. Terdapat pula ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dalam sub-sektor perikanan/kelautan atau pertanian, kehutanan, serta, perkebunan, karenanya perlu diperjelas ke dalam lingkup *blue economic* dan *green economic*.

Mengacu pada kebutuhan transformasi ilmu yang substansi, penulis mencoba untuk meramu pemikiran ilmu ekonomi secara umum dengan cakupan gizi di masyarakat atau bisa disebut ekonomi gizi. Di Indonesia, bahasan ini masih asing dan terbatas, belum mendarah daging di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (tepatnya Jurusan Ilmu Ekonomi), yang menjadikan ekonomi gizi sebagai suatu mata kuliah atau telaah konsentrasi alternatif bagi Mahasiswa. Kalangan akademisi maupun praktisi pun, kurang menganggap bahwa ekonomi gizi sebagai suatu kajian yang berfokus menjadi penelitian, bahan pertimbangan, dan perencanaan kebijakan.

Hingga saat ini, jika ditelusuri dari berbagai media (buku ajar, jurnal, artikel, hingga pernyataan/pendapat para pakar) mengenai ekonomi gizi, memang belum ada suatu pemahaman yang pasti mengenai definisi dari konsep ini. Namun, dalam bacaan ini, penulis mencoba untuk meramunya supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ekonomi gizi yang terpisah menjadi 2 (dua) kata, yakni “Ekonomi” dan “Gizi” mempunyai artian yang luas. Ekonomi oleh Samuelson (Peraih Nobel Prize dibidang Ilmu Ekonomi, 1970) bahwa adalah cara-cara yang dilakukan oleh individu atau manusia dan kelompoknya (ways that are performed by an individual or a man and his group) untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas atau langka untuk memperoleh berbagai barang produksi (to utilize limited resources or scarce to obtain various goods production), dan mendistribusikannya kepada masyarakat (and distribute it to the public). Secara garis besar, ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan atau tanpa uang dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Disisi lain, gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti zat makanan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *nutrition* yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga (Irianto, 2006).

Supariasa dkk (2002) menjelaskan bahwa gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses degesti, absorpsi, transportasi. Penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Menurut Almtsier (2009), zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein, oksidasi zat-zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Ketiga zat gizi

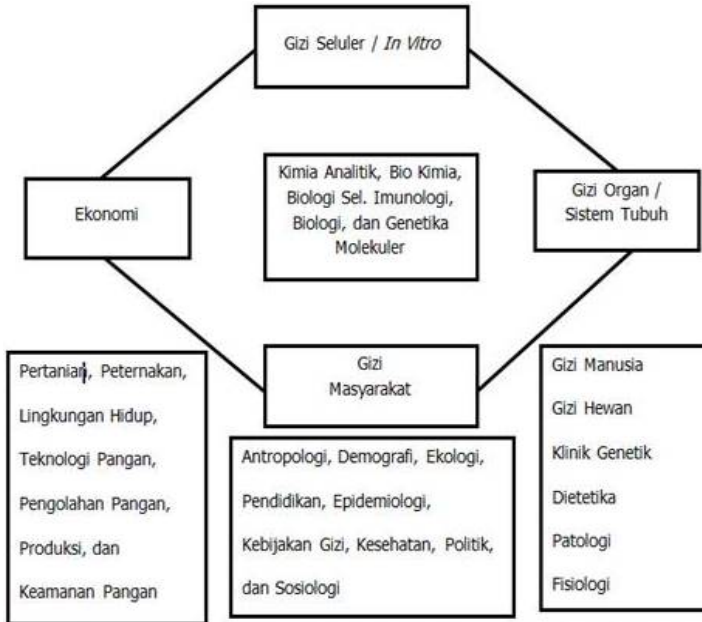
termasuk zat organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar, jumlah zat tersebut yang paling banyak terdapat dalam pangan dan dikenal sebagai zat pembakar.

Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan dari beberapa pendapat pada sebelumnya bahwa ekonomi gizi yakni suatu literatur yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan atau tanpa uang dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui pemenuhan akan gizi yang bersumber dari zat karbohidrat, lemak, protein, oksidasi zat-zat gizi lainnya guna menghasilkan energi.

B. Ruang Lingkup (Subjek dan Objek)

Jangkauan ilmu ekonomi gizi tidak terlepas dari faktor *input* dan *output* mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan. Terkait hal ini, subjek yang dimaksud adalah masyarakat di suatu wilayah dan objeknya adalah ketersediaan gizi dan tingkat kesejahteraan yang merata.

Sebelum lebih jauh mengkaji ruang lingkungannya, terdapat perbedaan antara konsep ekonomi dan gizi. Konsep ekonomi berkaitan dengan sejauh mana tingkat perekonomian di Negara/Wilayah maupun kemampuan ekonomi seseorang untuk menjangkau komoditas maupun sistem ekonomi pangan yang terdiri atas proses produksi (termasuk industri pengolahan, penyediaan, distribusi, maupun konsumsi). Sedangkan, konsep gizi dikaitkan dengan kesehatan tubuh, yaitu penyediaan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses dalam tubuh. Dewasa ini gizi dikaitkan dengan potensi ekonomi karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar dan produktivitas kerja.



Gambar 1.1: Cakupan Ilmu Ekonomi Gizi dari Berbagai Kondisi

Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pada batasan ini kesehatan mencakup empat aspek yaitu fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi. Keempat aspek kesehatan itu saling memengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok atau masyarakat.

Konsep baru yang dikemukakan dewasa ini berkaitan dengan ruang lingkup ilmu ekonomi gizi sebagai sains adalah sebagai berikut: (1) Hubungan gizi dengan sumber daya manusia (SDM); (2) Hubungan gizi dengan tenaga kerja; (3) Hubungan gizi dengan pengembangan wilayah; (4) Hubungan gizi dengan daya fiskal.

Ruang lingkup ilmu gizi sendiri, mengacu pada Komisi Pangan dan Gizi Amerika tahun 1995 (Soekirman, 2001) dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok seperti pada Gambar 1.1. Atas dasar pemahaman tersebut, WHO menyatakan bahwa gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan

kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Dengan pengertian itu WHO membagi ruang lingkup Ilmu Gizi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: (1) Kelompok gizi biologi dan metabolic; (2) Kelompok gizi perorangan sepanjang siklus hidup; dan (3) Gizi masyarakat baik bersifat lokal, nasional, regional dan global.

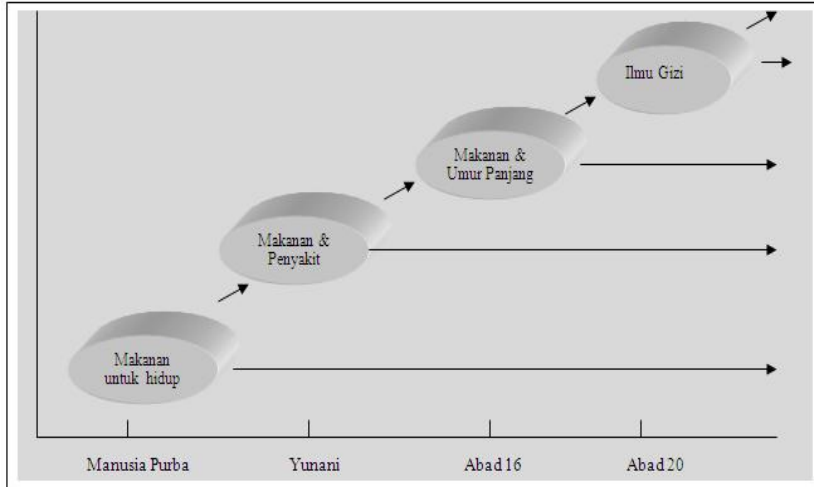
C. Peran Ilmu Ekonomi Gizi

Manfaat dalam mempelajari ilmu ini dalam pembangunan adalah: (1) Memberikan kontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; (2) Sebagai kebutuhan dan modal dasar pembangunan; dan (3) Sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Secara aplikatif, ilmu ekonomi gizi bertujuan untuk mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia. Proses itu mencakup pengambilan dan pengolahan zat padat dan cair dari makanan yg diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, hingga menghasilkan energi pada manusia dalam aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi).

Hingga sekarang, memang masih sulit menguraikan arti dan kegunaan dari ekonomi gizi dari berbagai pendapat para ilmuwan, karena 2 (dua) kosak kata yang berbeda. Sehingga, diperlukan penguraian istilah secara terpisah. Namun, Todhunter (1969) menyatakan bahwa titik tolak perkembangan Ilmu Ekonomi dan Gizi sendiri dimulai pada masa manusia purba, pertengahan, hingga munculnya ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dan 20.

Ilmu gizi bersinggungan erat dengan teknologi pangan. Ruang lingkup ilmu gizi dan ilmu teknologi pangan dibagi ke dalam kelompok yang tumpang tindih, namun kaitannya terhadap ekonomi juga tidak dapat dipisahkan, karena setiap aktivitas manusia pasti memerlukan prinsip (lihat Gambar 1.2).



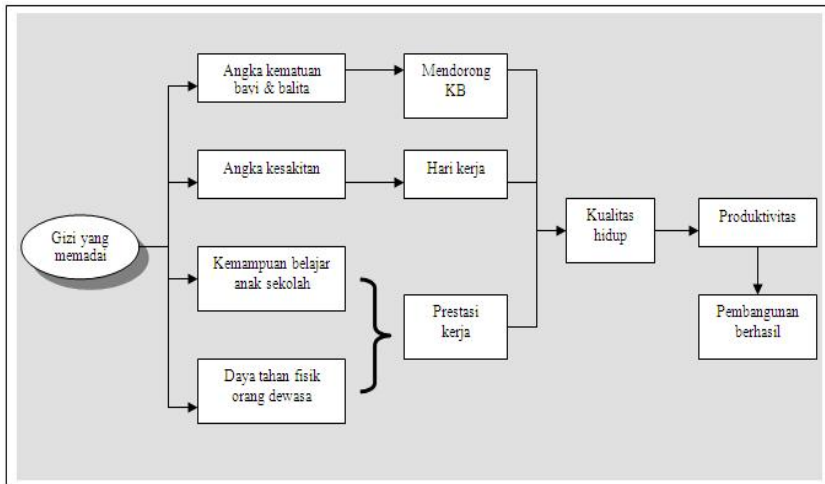
Gambar 1.2: Peranan Ilmu Gizi dari Masa ke Masa
Sumber: Farida, 2010

Integrasi ekonomi dan gizi dalam pembangunan (termasuk pertanian) merupakan perkembangan baru dalam ilmu terapan. Deklarasi HAM tahun 1948 menyatakan “setiap orang berhak memperoleh pangan yang cukup”. Hal itu telah ditegaskan dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1972; Konvensi Hak-hak Anak tahun 1990; Deklarasi Gizi Dunia tahun 1992; *World Conference on Human Right* tahun 1993; Deklarasi Ketahanan Pangan Dunia tahun 1996 dan Simposium “Pendekatan HAM dalam Kebijakan dan Program Pangan dan Gizi” oleh PBB tahun 1999.

Ekonomi gizi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, karena dibahas dalam Kongres Gizi Internasional tahun 1993 yang bertema “Nutrition in a Sustainable Environment”. Didasarkan pada pemikiran bahwa gizi salah (malnutrition) disebabkan oleh kemiskinan, ketidakseimbangan sosial, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan daya dukung lingkungan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber gizi menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Pangan sebagai tujuan

dalam ekonomi gizi merupakan indikator masyarakat yang berkelanjutan. Berg & Muscat (1973) mengembangkan konsep peran gizi pada pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa (lihat Gambar 1.3).



Gambar 1.3: Goals Ekonomi dan Gizi dalam Pembangunan
Sumber: Farida, 2010

A photograph showing a woman in a yellow shirt holding a baby in a floral patterned outfit. She is sitting on a patterned mat on a wooden floor. A person wearing a red plaid cap and a dark jacket is kneeling in front of her, holding a clipboard and writing. The scene appears to be a field research or data collection session.

CHAPTER 2

HAKIKAT EKONOMIKA GIZI

A. Keterkaitan Terhadap Sumber Daya Manusia

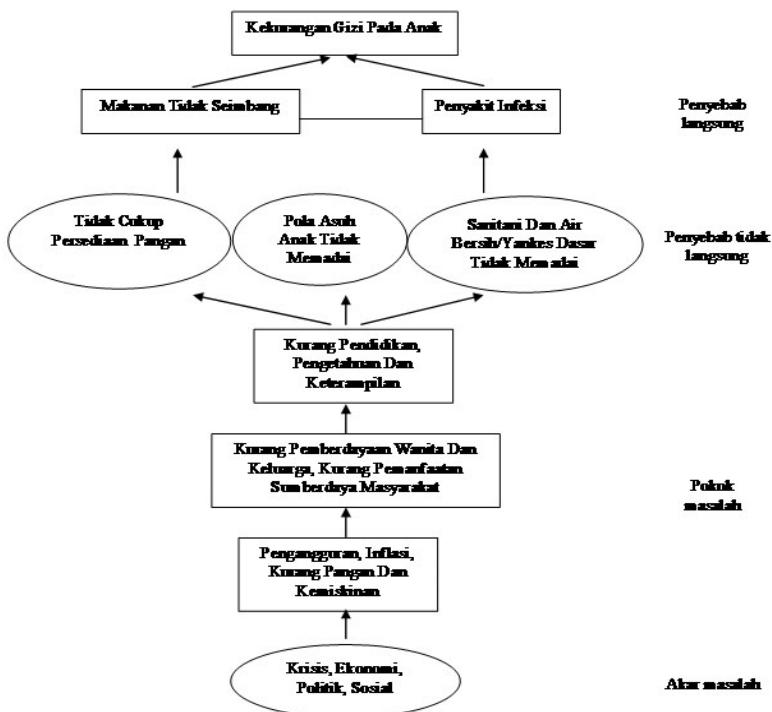
Sejak lahir, tumbuh berkembang hingga dewasa, manusia pasti membutuhkan basic needs (asupan gizi dan ketergantungan akan pangan). Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan proses yang panjang sesuai dengan tingkat ekonomi per kapita masing-masing rumah tangga. Nilai ekonomi seseorang pun berbeda pula, mulai dari kelas atas, menengah, hingga bawah. Tak khayal, kebutuhan dasar juga bergantung pada faktor tersebut. Bila ingin mencapai tingkatan gizi yang baik, maka nilai pengorbanan juga tinggi, dan sebaliknya. Dengan demikian, perwujudan masyarakat sehat diharapkan memiliki peluang untuk meraih nilai ekonomi yang besar, dibanding tingkat pengorbanan yang rendah.

Hubungan ekonomi gizi terhadap SDM sangat erat. Bagaimana tidak, usia dini (balita dan anak-anak) menjadi locus utama agar berkembang dengan sehat dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Ini sebagai bentuk perhatian agar manusia diusia dini tidak mengalami Kurang Energi Protein (KEP).

KEP adalah seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan atau gangguan penyakit tertentu. Anak disebut KEP apabila berat badannya kurang dari 80% indeks berat badan menurut umur (BB/U) baku WHO-NCHS. KEP merupakan defisiensi gizi (energi dan protein) yang paling berat dan meluas terutama pada balita. Pada umumnya penderita KEP berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah (Supariasa, 2001).

Menurut Soekirman (2000), KEP yakni keadaan kurang gizi yang dianggap oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Anak disebut KEP apabila berat badannya kurang dari 80% indeks berat badan menurut umur (BB/U) baku WHO-NCHS. KEP merupakan defisiensi gizi (energi dan protein) yang paling berat dan meluas terutama pada balita.

Penyakit KEP atau *Protein Energy Malnutrition* dapat diartikan sebagai satu di antara penyakit gangguan gizi yang penting di mana pada penyakit KEP ditemukan berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang bermacam-macam. Akibat kekurangan tersebut timbul keadaan KEP pada derajat yang sangat ringan sampai berat (Pudjiadi, 2001).



Gambar 2.1: Faktor Penyebab KEP pada Anak

Sumber: Soekirman, 2000

Penyebab penting terjadinya KEP adalah di mana kesadaran akan kebersihan baik personal *hygiene*, maupun kebersihan lingkungan yang masih kurang, sehingga memudahkan balita untuk terserang penyakit infeksi (Nency & Thohar, 2005). Terlihat pula adanya sinergisme antara status gizi dan infeksi. Keduanya dipengaruhi oleh makanan, kualitas mengasuh anak, kebersihan lingkungan, dan lain-lain yang

kesemuanya mencerminkan keadaan sosial-ekonomi penduduk serta lingkungan pemukimannya. Menurut Soekirman (2000) beberapa faktor yang dapat menyebabkan KEP, yaitu penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah, pokok masalah, seperti yang tampak pada Gambar 2.1.

Penyebab langsung terjadinya KEP yaitu makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Timbulnya KEP tidak hanya makanan yang kurang tetapi karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang cukup baik tetapi sering menderita diare atau demam, akhirnya akan menderita KEP. Sebaliknya anak yang makan tidak cukup baik daya tahan tubuhnya (imunitas) dapat melemah. Dalam keadaan demikian mudah diserang infeksi, kurang nafsu makan, dan akhirnya mudah terserang KEP. Dalam kenyataan keduanya (makanan dan penyakit) secara bersama-sama merupakan penyebab KEP (Soekirman, 2000). Sementara, penyebab tidak langsung seperti diuraikan di atas timbul karena tiga faktor penyebab tidak langsung yaitu:

1. Tidak cukup tersedia pangan atau makanan keluarga. Tidak cukupnya persediaan pangan dikeluarga menunjukkan adanya kerawanan ketahanan pangan keluarga (household food insecurity). Artinya kemampuan keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan, baik jumlah maupun mutu gizinya. Ketahanan pangan keluarga terkait dengan ketersediaan pangan (baik dari hasil produksi sendiri maupun dari pasar atau sumber lain), harga pangan dan daya beli keluarga yang dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, serta pengetahuan tentang gizi dan keluarga.
2. Pola pengasuhan anak yang tidak memadai. Pola pengasuhan anak adalah sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal dekatnya dengan anak memberikan makanan, merawat menjaga kebersihan, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Semuanya itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pola asuh yang tidak memadai dapat menyebabkan anak tidak suka makan atau tidak diberi makanan seimbang, dan juga dapat memudahkan terjadinya infeksi. Pola asuh anak berhubungan dengan keadaan ibu seperti kesehatan (fisik dan mental), status gizi, pendidikan umum, pengetahuan tentang

pengasuhan anak yang baik. Gizi buruk akibat kurang makan biasanya terjadi pada keluarga miskin, sedangkan untuk pola asuh yang salah terjadi pada keluarga mampu yang kurang memperhatikan keseimbangan gizi makanan anaknya. Pola asuh anak berpengaruh secara signifikan terhadap timbulnya kasus gizi buruk. Menurut Roesli (2004), pola asuh yang berpengaruh terhadap kebutuhan dasar anak adalah asah, asih dan asuh. Asah, menunjukkan kebutuhan akan stimulasi atau rangsangan yang akan merangsang perkembangan kecerdasan anak secara optimal. Ibu yang menyusui merupakan guru pertama yang terbaik bagi bayinya. Seringnya bayi menyusu membuatnya terbiasa berhubungan dengan manusia lain dan dalam hal ini dengan ibunya. Dengan demikian, perkembangan sosialnya akan baik dan ia akan mudah berinteraksi dengan lingkungannya kelak. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan psikomotor dalam perkembangan anak. Asih, menunjukkan kebutuhan bayi untuk perkembangan emosi dan spiritualnya. Yang terpenting disini adalah pemberian kasih sayang dan perasaan aman yang diwujudkan dalam kontak fisik dan psikis sedini mungkin. Seorang bayi yang merasa aman, karena merasa dilindungi, akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dengan emosi yang stabil. Asuh, menunjukkan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan otaknya. Untuk pertumbuhan suatu jaringan sangat dibutuhkan nutrisi atau makanan yang bergizi. Selain itu asuh juga mencerminkan kebutuhan fisik biomedis lainnya yang meliputi perawatan kesehatan primer seperti imunisasi, papan, hygiene dan sanitasi, sandang, kesegaran jasmani, serta rekreasi.

3. Keadaan sanitasi yang buruk dan tidak tersedia air bersih serta pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai. Akses atau keterjangkauan anak dan keluarga terhadap air bersih dan kebersihan lingkungan besar pengaruhnya terhadap pengasuhan anak. Demikian juga pengasuhan anak yang baik memerlukan pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, pendidikan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti posyandu, puskesmas, praktek bidan atau

dokter, dan rumah sakit. Makin tersedia air bersih yang cukup untuk keluarga serta makin dekat jangkauan keluarga terhadap pelayanan dan sarana kesehatan, ditambah dengan pemahaman ibu tentang kesehatan dan gizi, makin kecil risiko anak terkena penyakit dan kekurangan gizi termasuk KEP. Keterjangkauan dan ketersediaan keluarga terhadap air bersih sangat berhubungan erat dengan kebersihan lingkungan. Kesadaran akan kebersihan lingkungan yang meliputi hygiene perorangan/ personal *hygiene* dan sanitasi lingkungan yang masih kurang, menjadi penyebab kekurangan gizi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Nency & Thohar, 2005).

Demografi memegang peranan urgent sebagai tujuan dalam pembangunan. Faktor ekonomi dan gizi menjadi pondasi utama, supaya terciptanya penduduk yang sehat, cerdas, serta memiliki daya konsumsi yang cukup. Indonesia adalah suatu Negara dengan bonus demografi dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang juga berlimpah. Tantangan dan peluang didepan mata, diperlukan berbagai dukungan singergitas program yang berkelanjutan.

Demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Demografi meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, serta bagaimana faktor faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Archille Guillard pada tahun 1855 dalam karyanya yang berjudul "elements de statistique humaine, ou demographie comparree" atau elements of human statistics or comparative demography (Iskandar, 1994).

Pengetahuan tentang kependudukan adalah sangat penting untuk lembaga-lembaga swasta maupun Pemerintahan baik ditingkat Nasional maupun daerah, di mana masalah kependudukan saat ini telah memegang peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah terutama yang berhubungan dengan pendataan penduduk melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, pemindahan penduduk dan sebagainya. Hal mengenai

kependudukan adalah Studi tentang penduduk di dalam kerangka sosiologi dan ada jalinannya dengan ekonomi, biologi dan ilmu sosial yang lain.

Pengertian dari penduduk sendiri sangatlah banyak, Dalam ilmu sosiologi penduduk adalah Kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 26, ayat 2) menyatakan "Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Dan secara umum, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di Wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Wilayah Republik Indonesia.

Bicara mengenai penduduk tak pernah lepas dari pertumbuhan penduduk tersebut. Menurut Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI (2000) pertumbuhan penduduk di suatu wilayah di pengaruhi oleh 4 faktor yaitu kelahiran (fertilasi), kematian (mortalitas), *in migrasion* (migrasi masuk), *out migrasion* (migrasi keluar).

Faktor paling dominan yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran dan kematian, sedangkan migrasi masuk dan migrasi keluar sangatlah rendah. Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya Fertilasi dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umur, status perkawinan dan umur kawin, sedangkan faktor non demografi nya antara lain keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi.

Komposisi umur penduduk merupakan salah faktor komponen penduduk antara lain penduduk berusia antara 0-4 tahun akan banyak memengaruhi tingkat kematian sedangkan tingkat kelahiran sangat dipengaruhi oleh penduduk wanita pada usia 15-49 tahun.

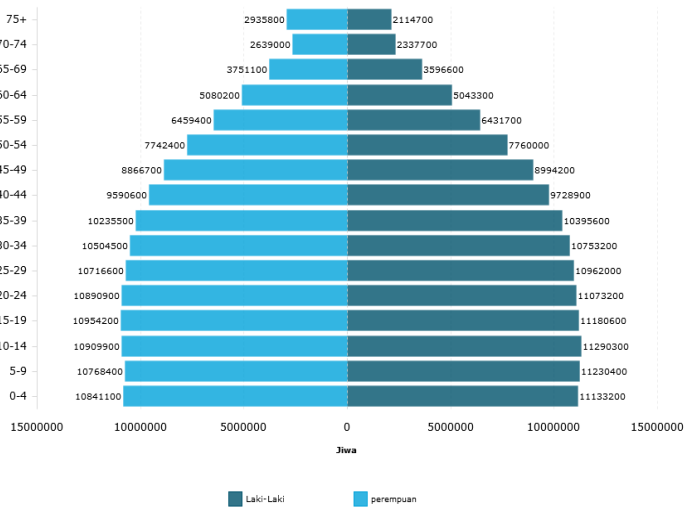
Teori kependudukan dikembangkan oleh 2 (dua) faktor yang sangat dominan yaitu, yang pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk terutama di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi penduduk. Sedangkan, faktor yang kedua adalah

adanya masalah masalah yang bersifat universal, yang menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Teori-teori penduduk dibagi menjadi beberapa teori yaitu (Mantra, 2000):

1. Marxist. Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang dihasilkan.
2. Paul Edric. Dalam bukunya yang berjudul (The Population Bomb) menggambarkan bahwa penduduk dan lingkungan yang ada didunia ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Kedua, Keadaan bahan makanan sudah terbatas; Ketiga, Karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun 1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru (The Population Explotion), yang isinya adalah bom penduduk yang dikhawatirkan pada tahun 1968, kini sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang parah karena sudah terlalu banyaknya penduduk yang sangat merisaukan.
3. Robert Thomas Malthus. Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan Prinsip Kependudukan (The Prinsiple of Population) yang menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini dan ia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan. Sementara, laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, sehingga inilah yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia.

Berdasarkan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa

laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi.



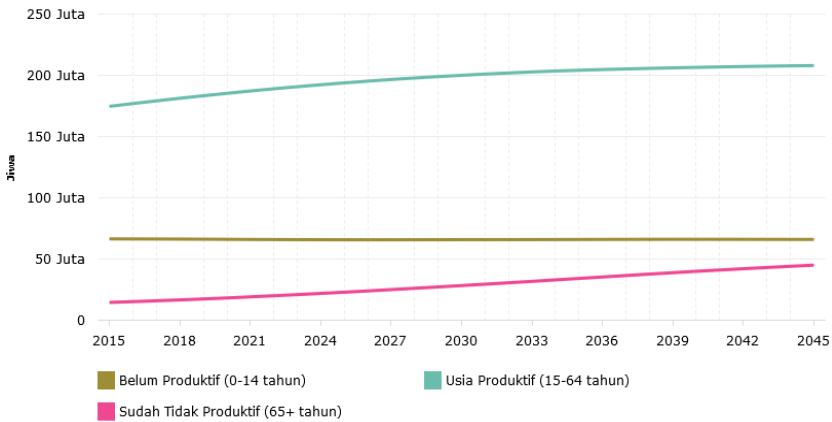
Gambar 2.2: Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019 (Juta Jiwa)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2018

Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian, penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi (lihat Gambar 2.2).

Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus (Supas 2015) jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Jumlah tersebut terdiri atas kategori usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,07 juta jiwa, usia produktif (15-64 tahun) 185,34 juta jiwa, dan usia sudah tidak produktif (65+ tahun) 18,2 juta jiwa. Jumlah

penduduk Indonesia diproyeksikan terus bertambah menjadi 318,96 juta pada 2045



Gambar 2.3: Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, 2015-2045 (Juta Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Mengacu data tersebut, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi hingga 2045. Di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk tidak produktif (belum produktif dan sudah tidak produktif). Jumlah usia produktif pada 2020 mencapai 68,75% dari total populasi. Melimpahnya sumber daya manusia usia produktif ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan peningkatan kualitas, baik pendidikan maupun ketrampilan guna menyongsong era industri 4.0.

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar tersebut maka angka ketergantungan penduduk (dependency ratio) Indonesia sebesar 45,46. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 46 jiwa penduduk usia tidak produktif. Secara aplikatif, dengan bonus demografis di Indonesia yang tergolong Negara berkembang, selayaknya menjadi tantangan dan peluang yang harus dimaksimalkan untuk memperbaiki gizi penduduk itu sendiri, serta dalam rangka meningkatkan produktivitas SDM.

B. Keterkaitan Terhadap Ketenagakerjaan

Kualitas pekerja dapat dilihat dari kapasitas kerja dan hasil produktivitas kerjanya. Kapasitas kerja merupakan kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam suatu lingkungan kerja tertentu. Kapasitas kerja dapat dilihat dari lama waktu pekerja tersebut dapat bertahan melakukan pekerjaannya. Kapasitas kerja dari seorang tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang dapat berpengaruh dari segi gizi yaitu status gizi. Status gizi merupakan pengukuran dari sejauh mana terpenuhinya kebutuhan fisiologi individu akan zat gizi (Hammond, 2008).

Menurut Setyaningsih (2008), pemenuhan gizi yang tidak sesuai dengan beban kerjanya, dapat menyebabkan penurunan kapasitas dan produktivitas kerja. Selain itu pula dengan dengan asupan zat gizi yang baik yang akan menghasilkan pekerja yang lebih tahan terhadap suatu penyakit yang berdampak pada meningkatnya ketahanan pekerja untuk dapat bekerja pada waktu kerja yang ditetapkan ataupun bekerja lebih dari pada yang telah ditetapkan.

Pekerja atau buruh atau pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pihak lain, baik individu atau perusahaan atau instansi dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (BPS, 2016). Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun untuk masyarakat. Individu yang secara resmi dapat bekerja yaitu penduduk yang sudah masuk dalam usia kerja, berumur 15-64 tahun.

Sektor industri garmen dan alas kaki sedang berkembang di wilayah Asia Pasifik dan terus berkinerja baik hingga tahun 2014, termasuk pula di Indonesia. Ekspor garmen di Asia-Pasifik tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2013 dan mencapai angka yang mencengangkan yaitu \$601 miliar atau tiga per lima total angka global (ILO, 2015). Untuk Indonesia sendiri, jumlah total ekspor dari sektor industri garmen hingga tahun 2014 mencapai ±US\$20 miliar. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 9,8% dari seluruh ekspor barang perdagangan pada tahun 2014. Saat ini

sektor garmen mempekerjakan lebih dari 40 juta pekerja di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Sektor industri garmen di Indonesia telah menyerap 3,8 juta jiwa sebagai tenaga kerja. Tingginya ketidakhadiran pekerja akibat sakit dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Kesehatan pekerja sangat penting dalam menentukan kemampuan karyawan untuk mempertahankan produktivitas kerja. Meningkatkan produktivitas di industri ini sangat penting untuk peningkatan daya saing dengan negara industri lain.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh, atau membantu memperoleh penghasilan, maupun keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu diberbagai sektor ekonomi (dengan usia 15 tahun ke-atas).

Tabel 2.1: Penduduk Indonesia Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, 2017-2018

Status Pekerjaan Utama	2017		2018	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Berusaha Sendiri	21.849.573	23.147.482	23.615.379	23.622.984
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	21.275.899	18.024.632	20.938.152	19.547.562
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	4.446.024	3.954.629	4.673.338	4.290.123
Buruh/Karyawan/Pegawai	47.420.633	48.047.068	48.421.053	49.231.568
Pekerja Bebas di Pertanian	5.360.306	5.848.256	4.582.344	5.205.794
Pekerja Bebas di Non Pertanian	6.021.760	7.158.103	6.339.777	6.973.409
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Tak Terjawab	18.164.654	14.842.253	18.497.792	15.133.510
Total	124.538.849	121.022.423	127.067.835	124.004.950

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2018

Tampak dari Tabel 2.1, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia (berumur 15 tahun) yang telah bekerja minimal selama seminggu terjadi peningkatan cukup signifikan. Hal ini ditandai dari Februari-2017, jumlah penduduk produktif yang bekerja mencapai 123.538.849 jiwa dan meningkat pada tahun setelahnya, tepatnya pada Februari-2018 menjadi 127.067.835 jiwa (naik 2,03%). Selaras dengan Bulan Agustus-

2017, dari penduduk yang bekerja berjumlah 121.022.423 jiwa menjadi 124.004.950 jiwa untuk Agustus-2018 atau bertambah 2,46%.

Sebagai wilayah penghasil tambang batu bara, komoditi pertanian, migas dan non-migas dengan wilayah yang sangat luas, maka tidak mengherankan jika beragam etnis mendiami Negara Indonesia. Kedatangan etnis lain, selain Suku asli Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesin dan sebagainya), beberapa diantaranya (semisal dari dalam dan luar Negara Indonesia) mengikut program transmigrasi, juga didorong oleh terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha yang didorong oleh sektor berbagai sektor utama, yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah bermigrasi ke antar, atau satu pulau, dan menetap di wilayah tersebut.

Pendidikan, pengalaman kerja, dan usia akan memengaruhi juga terhadap kapasitas kerja dari pekerja. Pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih tinggi juga secara tidak langsung akan memengaruhi pendapatan yang diterima oleh pekerja. Pekerja yang memiliki kapasitas bekerja yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas kerjanya yang juga akan meningkatkan pendapatan yang diterima. Perusahaan pada umumnya memberikan upah tambahan kepada pekerja yang melakukan kerja di luar jam kerja normal atau lembur. Nominal upah di luar jam kerja normal pekerja dapat berbeda di tiap perusahaan karena merupakan kebijakan perusahaan masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Chowdury & Ullah (2010) terhadap pekerja garmen wanita di Negara Banglades menunjukkan 95,36% responden bekerja lebih dari 8 jam/hari untuk dapat meningkatkan pendapatannya.

Sepanjang tahun 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di antar Provinsi di Indonesia dalam trendline yang beragam. Adapun TPAK Indonesia secara umum bertengger di angka 67,26%. Ini merupakan hasil dari pembagian dari jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 131.005.641 jiwa terhadap penduduk tergolong usia kerja (produktif) yakni 194.779.441 jiwa. Jumlah orang bekerja pada masa 2018 mencapai 124.004.950 jiwa, sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) hanya diangka 63.773.800 jiwa (penduduk yang bersekolah

16.532.322 jiwa; mengurus rumah tangga berjumlah 39.647.690 jiwa; dan kegiatan lainnya sekitar 7.593.788 jiwa).

Kemampuan berbagai sektor ekonomi (17 lapangan usaha) di Indonesia untuk menyerap penduduk produktif pada angkatan kerja belum dapat dikatakan mampu. TPAK tertinggi berada pada Provinsi Papua adalah 79,11% dan terendah di wilayah Maluku yaitu 62,90%. Disisi lain, Tabel 2 juga memperlihatkan Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penyumbang penduduk terbanyak yang tergolong angkatan bekerja (22.628.122 jiwa), sedangkan kontribusi AK terkecil terdapat di Provinsi terbaru, yakni Kalimantan Utara yakni 341.197 jiwa. Fakta ini juga senada pada sisi BAK (bersekolah; mengurus RT; hingga lainnya), Provinsi Jawa Barat adalah penyumbang tertinggi untuk Indonesia yaitu 13.335.063 jiwa, serta 161.950 jiwa penduduk Kalimantan Utara terbilang BAK terendah dibanding daerah lainnya.

Tabel 2.2: Penduduk Berumur 15 Tahun ke-Aatas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2018

Provinsi	Angkatan Kerja (AK)		Bukan Angkatan Kerja (BAK)			TPAK (%)	
	Bekerja	Jumlah AK	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya		
11. Aceh	2.203.717	2.353.440	405.696	734.161	169.953	1.309.810	64,24
12. Sumut	6.726.431	7.124.458	865.344	1.588.765	341.097	2.795.206	71,82
13. Sumbang	2.410.450	2.552.130	421.945	656.756	163.567	1.242.268	67,26
14. Riau	2.915.597	3.108.398	430.110	1.076.566	150.362	1.657.038	65,23
15. Jambi	1.721.362	1.790.437	202.141	527.061	95.651	824.853	68,46
16. Sumsel	3.963.870	4.138.957	497.672	1.154.127	235.150	1.886.949	68,69
17. Bengkulu	963.463	998.524	139.441	239.583	47.682	426.706	70,06
18. Lampung	4.060.377	4.232.066	423.093	1.230.800	188.730	1.842.623	69,67
19. Babel	701.366	727.918	81.716	226.808	37.419	345.943	67,79
21. Kepri	901.019	970.132	133.156	346.678	49.093	528.927	64,72
31. DKI Jakarta	4.726.779	5.041.620	696.361	1.723.008	423.030	2.842.399	63,95
32. Jabar	20.779.888	22.628.122	3.036.782	8.985.323	1.312.958	13.335.063	62,92
33. Jateng	17.245.548	18.059.895	2.162.301	4.918.746	1.200.602	8.281.649	68,56
34. DIY	2.118.382	2.191.742	247.191	452.310	96.087	795.588	73,37
35. Jatim	20.449.949	21.300.423	2.327.947	5.899.262	1.176.853	9.404.062	69,37
36. Banten	5.332.496	5.829.228	875.123	2.098.139	378.244	3.351.506	63,49
51. Bali	2.490.870	2.525.355	255.929	423.083	84.541	763.553	76,78
52. NTB	2.154.124	2.237.381	234.977	742.147	179.933	1.157.057	65,91
53. NTT	2.411.533	2.486.281	388.407	547.798	120.633	1.056.838	70,17
61. Kalbar	2.346.881	2.451.399	286.333	697.165	135.885	1.119.383	68,65
62. Kalteng	1.301.002	1.355.399	142.306	388.927	48.688	579.921	70,03
63. Kaltel	2.021.666	2.116.944	226.018	570.694	98.741	895.453	70,27
64. Kaltim	1.618.285	1.732.598	238.947	593.523	100.841	933.311	64,99
65. Kaltara	323.400	341.197	45.089	98.718	18.143	161.950	67,81
71. Sulut	1.095.145	1.175.809	143.337	441.804	105.105	690.246	63,01
72. Sulteng	1.451.491	1.502.972	195.248	401.321	62.329	658.898	69,52
73. Sulsel	3.774.924	3.988.029	615.134	1.431.526	293.890	2.340.550	63,02
74. Sulteng	1.207.488	1.248.212	165.099	318.807	56.757	540.663	69,78
75. Gorontalo	555.533	578.880	69.552	182.091	29.078	280.721	67,34
76. Sulbar	619.395	639.622	86.869	176.342	31.448	294.659	68,46
81. Maluku	700.143	755.034	152.272	236.457	56.631	445.360	62,90
82. Maluku	515.615	541.446	87.421	166.527	34.913	288.861	65,21
91. Papua Utara Barat	417.544	445.630	77.322	116.418	17.147	210.887	67,88
94. Papua	1.777.207	1.835.963	176.043	256.249	52.607	484.899	79,11
Total	124.004.950	131.005.641	16.532.322	39.647.690	7.593.788	63.773.800	67,26

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2018

Seperti yang diketahui, jumlah provinsi di Kalimantan sudah menjadi 5 bagian, setelah munculnya Provinsi baru yang lahir dari hasil pemekaran yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang berpisah dari Provinsi Kalimantan Timur dengan Ibukota Tanjung Selor (pemekaran tahun 2012). Ini menandakan bahwa masih banyak penduduk yang tergolong di angkatan kerja, apakah itu yang telah terserap dalam berbagai lapangan usaha, maupun sedang menganggur (sementara). Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya dan bisa disebabkan penimbangnya yakni jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Status gizi akan mencerminkan derajat pemenuhan kebutuhan fisiologi akan zat gizi. Status gizi merupakan hasil keseimbangan antara intake zat gizi dengan kebutuhan zat gizinya. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, sebagian besar pekerja di industri garmen di Bengaluru, India, dan pada daerah semi-urban di Bangladesh memiliki status gizi di bawah normal (Joseph et al., 2005; Dipti et al., 2008).

Pekerja diharapkan menjaga asupan yang baik sesuai kecukupannya dan tetap memperhatikan berat badannya, sehingga tetap memiliki status gizi yang normal. Perusahaan sebaiknya dapat memfasilitasi pekerja dengan pemberian makanan dari perusahaan, sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi harian pekerja. Perusahaan juga memberikan penyuluhan yang berisi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, agar para pekerja dapat selalu menerapkan pola hidup sehat dan berimbang.

C. Keterkaitan Terhadap Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan kualitas hidup masyarakat dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi sosial ekonomi dan sisi ekologis.

Menurut Prod'homme dalam Triutomo (2001) pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Sumber daya yang dimaksud terletak pada manusia atau masyarakat itu sendiri, baik sebagai subjek maupun objek pengembangan suatu wilayah. Beberapa kata kunci yang terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu: (1) Program yang menyeluruh dan terpadu; (2) Sumber daya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah, serta (3) Suatu wilayah tertentu.

Sedangkan, menurut Kamus Tata Ruang perkembangan wilayah adalah pertumbuhan fisik suatu wilayah yang disertai dengan perkembangan keadaan ekonomi dan sosial wilayah tersebut. Pengembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan didalam ataupun yang memengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks melibatkan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik (pemerintahan) sehingga pada hakikatnya pengembangan wilayah adalah suatu sistem pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Nugroho & Dahuri, 2004).

Riyadi (2002) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor dan teori tahapan pengembangan. Teori sektor di adopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangannya wilayah atau perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier dan meningkat pada suatu tingkat tertentu di sector sekunder. Sementara itu teori tahapan pengembangan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti: Rostow, Fisher, Hoover, Perloff, dan Stabler.

Menurut Marion (1994) dalam pelaksanaan pengembangan wilayah perlu ditempuh pendekatan yang cocok sesuai dengan potensi, kondisi dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga pendekatan yang diterapkan akan cocok dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan dalam pengembangan wilayah ada 2 yaitu: pendekatan sisi permintaan dan pendekatan sisi penawaran.

Pendekatan sisi permintaan merupakan suatu pendekatan pengembangan ekonomi wilayah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan lokal atas barang dan jasa, maka akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan industri barang dan jasa akan mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga akan terjadi proses *multiplier effect* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Marion, 1994).

Menurut teori sektor yang dikemukakan oleh Clark dan Fisher, perkembangan wilayah ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita berbagai wilayah pada berbagai waktu yang kemudian diiringi oleh adanya relokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja dalam kegiatan sekunder (industri) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi angkatan tenaga kerja dalam sektor tersier (Glasson, 1978). Perluasan dari teori sektor adalah teori tahap (stages theory) yang menyebutkan bahwa perkembangan wilayah terdapat dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama. Adalah tahap perekonomian sub sistem swasembada, di mana hanya terdapat sedikit investasi dan perdagangan. Penduduk sektor pertanian menjadi basis distribusi menurut lokasi sumber daya alam. Tahap kedua, dengan adanya kemajuan.
2. Tahap kedua. Adalah pengangkutan, wilayah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi, maka muncullah lapisan kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar dan tenaga kerja

- disediakan oleh penduduk petani, maka lapisan baru ini bertempat pada lokasi yang berkaitan dengan lapisan basis.
3. Tahap ketiga. Dengan semakin bertambahnya perdagangan interregional, wilayah yang bersangkutan maju, melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian dan peternakan, yaitu dari tanaman biji-bijian dan peternakan yang ekstensif ke tanaman buah-buahan dan peternakan intensif.
 4. Tahap keempat. Dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya hasil pertanian wilayah yang bersangkutan, maka wilayah tersebut terpaksa mengadakan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula mengolah produksi primer tetapi kemudian berubah menjadi terspesialisasi.
 5. Tahap kelima. Adalah pengembangan industri tersier yang memproduksi untuk ekspor. Wilayah seperti ini mengeksport ketrampilan jasa-jasa yang berkembang (Glasson, 1978).

Sementara, berdasarkan pendekatan sisi penawaran merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas-komoditas tertentu yang diproses dari sumber daya lokal. Dengan adanya ekspor ke luar wilayah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Intensitas sumber daya manusia untuk memenuhi kecukupan masalah gizi terkandung dalam sebuah aktivitas daya tampung dan daya dukung wilayah. Terbukti bahwa Negara Indonesia yang memiliki cakupan luas wilayah mencapai 1.913.578,68 Km² dan dengan jumlah 17.504 pulau, serta terdiri dari 34 Provinsi baru telah menampung kepadatan penduduk sekitar 135 jiwa per Km². Tak heran jika pemerataan penduduk belum tampak terpola dengan baik. Apabila menelaah dari Tabel 3, bahwa Provinsi Papua Barat yang mempunyai luas area 16,67% terhadap Indonesia (tertinggi), justru kapasitas penduduk 1,24% dari jumlah penduduk Indonesia dan tingkat kepadatan penduduknya hanya 10 jiwa per Km², sehingga penduduk dari wilayah lainnya yang bermigrasi masuk ke Papua Barat masih terbilang rendah yakni 61.203 jiwa dan yang melakukan migrasi

diangka 47.849 jiwa. Faktor pemenuhan kesehatan menjadi hal yang utama, sehingga masih banyak penduduk dari Papua Barat pindah dan menetap di daerah lain untuk mendapatkan cakupan gizi yang layak. Jika melihat karakteristik pada Provinsi ini, sangat mencengangkan apabila kesejahteraan masyarakatnya yang dikur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hanya berkisar Rp 44.341.000, meskipun capaian itu diatas angka rata-rata nasional (Rp 36.720.000). PDRB per kapita Papua Barat yang tidak terlalu menggemberikan adalah sebagai cerminan, bahwa 3 aspek selain kesehatan, yakni pendidikan dan pendapatan penduduk masih perlu diperhatikan, mengingat bahwa daerah ini sebagai penghasil sumber daya alam terbesar bagi Indonesia, seperti pada sektor pertambangan dan penggalian yang dominan dikelola oleh PT. Free Port. Kenyataan investasi yang dipegang oleh pihak asing dalam mengelola SDA, ternyata belum sepenuhnya memberikan *multiplie effect* bagi masyarakat Papua Barat, apakah itu dalam bentuk pemberdayaan, penyerapan tenaga kerja, *Coorporate Social Responsibility* (CSR), dan sebagainya, khususnya dalam andil penurunan gizi buruk.

Tabel 2.3: Persentase Terhadap Luas Indonesia, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Migrasi Masuk dan Keluar Risen, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Provinsi, 2016

Provinsi	% terhadap Luas Indonesia	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Migrasi Masuk (Jiwa)	Migrasi Keluar (Jiwa)	PDRB per Kapita (Rp 000)
11. Aceh	3,03	1,97	88	40.616	39.649	22.837
12. Sumut	2,81	5,45	193	142.774	270.157	32.885
13. Sumbar	2,20	2,03	125	138.826	139.548	28.165
14. Riau	4,55	2,51	75	215.350	131.711	70.604
15. Jambi	2,62	1,34	69	67.574	66.794	37.729
16. Sumsel	4,79	3,15	89	75.760	110.308	32.669
17. Bengkulu	1,04	0,74	96	38.574	27.477	21.042
18. Lampung	1,81	3,17	237	81.200	124.478	25.571
19. Babel	0,86	0,54	85	32.417	21.554	34.135
21. Kepri	0,43	0,78	247	189.498	67.520	80.331
31. DKI Jakarta	0,03	3,97	15.478	499.101	706.353	149.848
32. Jabar	1,85	18,31	1.339	750.999	506.573	26.992
33. Jateng	1,71	13,15	1.037	518.103	647.482	24.996
34. DIY	0,16	1,44	1.188	208.257	84.915	23.566
35. Jatim	2,50	15,10	817	315.543	421.349	35.971
36. Banten	0,50	4,72	1.263	324.472	207.385	31.781
51. Bali	0,30	1,62	727	139.849	50.887	32.687
52. NTB	0,97	1,89	264	105.470	46.504	19.309
53. NTT	2,55	2,01	107	66.123	66.115	11.474
61. Kalbar	7,70	1,88	33	37.359	34.994	24.311
62. Kalteng	8,02	0,99	17	78.396	52.463	32.903
63. Kalsel	2,02	1,57	105	86.621	55.117	28.539
64. Kaltim	6,74	1,35	27	120.005	101.169	125.409
65. Kaltara	3,94	0,26	9	34.691	18.478	76.786
71. Sulut	0,72	0,94	176	33.559	35.851	30.683
72. Sulteng	3,23	1,13	47	62.862	37.416	31.164
73. Sulsel	2,44	3,33	184	136.430	177.336	31.305
74. Sultengg	1,99	0,99	67	57.523	46.234	30.477
75. Gorontalo	0,59	0,44	102	15.034	17.110	20.428
76. Sulbar	0,88	0,51	78	33.941	27.439	21.068
81. Maluku	2,45	0,66	37	25.317	37.157	15.321
82. Maluku Utara	1,67	0,46	37	20.173	14.617	18.177
91. Papua Barat	5,21	0,35	9	59.777	20.188	61.242
94. Papua	16,67	1,24	10	61.203	47.849	44.341
Indonesia	100,00	100,00	135	-	-	36.720

Sumber: Kementerian Dalam Negeri & BPS Indonesia, 2018

Berbeda halnya daerah dengan daya dukung rendah seperti Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai luas wilayah 0,03% dari total daratan Indonesia atau termasuk paling rendah, justru menampung 3,97%

penduduk Indonesia dan tingkat kepadatan penduduknya paling fantastis atau dikatakan tidak layak melihat keterbatasan lahan pemukiman, yaitu 15.478 jiwa per Km². Daya tarik Ibukota Indonesia ini rupanya tak pernah surut dan setidaknya sejak tahun 2016 silam, migrasi penduduk dari luar wilayah yang masuk ke DKI Jakarta tercatat sejumlah 499.101 jiwa. Angka tersebut selaras terhadap kondisi-kondisi pasca hari raya (Idul Fitri), libur Natal dan tahun baru, ataupun tiap tahunnya selalu meningkat dari arus migrasi penduduk yang ingin memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Ibarat 2 (dua) mata sisi uang koin, 706.353 jiwa dari total penduduknya ditahun yang sama telah migrasi keluar daerah. Padahal, sebanding dengan daya tarik pusat pertumbuhan ekonomi (economic growth) tertinggi di Indonesia yang mempunyai PDRB per kapita menyentuh Rp 149.848.000, artinya level kesejahteraan penduduk yang diakumulasikan dari distribusi pendapatan, pengeluaran, hingga konsumsi menandakan capaian tersebut tertinggi se-Indonesia. Ini menandakan jika indikator pendapatan per kapita bukanlah satu-satunya yang menyebabkan sebagian penduduk Ibukota bermigrasi ke luar daerah, melainkan terdapat faktor lain seperti pindah pekerjaan, tidak merasa bahagia, polusi udara, kualitas air dan sanitasi lingkungan buruk, ataupun kondisi kesehatan yang menurun akibat asupan gizi dari makanan (pengolahan dan bahan baku) terkadang kurang higienis.

Menurut teori basis ekspor yang dikemukakan oleh Douglas dalam Glasson (1992), disebutkan bahwa perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh suatu eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan dan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari wilayah-wilayah lain. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal, dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan perkembangan wilayah lebih lanjut. Teori ini memandang tingkat permintaan luar wilayah terhadap produk dari industri-industri ekspor suatu wilayah sebagai penentu bagi perkembangan wilayah.

Berdasarkan pada pendapat North tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya teori basis ekspor mengemukakan keyakinan sebagai berikut:

1. Laju pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh lajunya ekspor wilayah tersebut;
2. Peranan ekspor dalam pembangunan wilayah akan bertambah penting apabila penduduk dan modal tidak mengalir masuk/keluar secara berlebihan ke wilayah tersebut dan sektor ekspor memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah.

Setelah menunjukkan peranan ekspor dalam perkembangan wilayah, kemudian North menganalisa sebab-sebab perkembangan selanjutnya. Sesuai dengan pandangannya mengenai peranan ekspor dalam perkembangan wilayah, terutama diakibatkan oleh bertambahnya kedudukan ekspor wilayah tersebut di pasaran luar wilayah bersangkutan, dan dapat menandingi dengan baik barang-barang ekspor yang sama atau lebih baik dari wilayah lain. Dalam menganalisa mengenai faktor-faktor yang menentukan perkembangan wilayah, selanjutnya North juga menelaah mengenai perlunya industrialisasi diciptakan untuk mengubah struktur ekspor terutama dari ekspor hasil produksi primer menjadi produksi barang industri.

Metode lain yang dikemukakan, yang dimasukkan faktor eksternal dalam perkembangan wilayah adalah model alokasi sumber daya interregional yang dikemukakan oleh Ohlin. Dalam model yang diasumsikan bahwa faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal, akan mengalir dari wilayah yang imbalannya rendah ke wilayah yang imbalannya tinggi. Jadi, jika suatu wilayah lebih rendah dari pada semua wilayah lain, maka ada kemungkinan terjadinya arus keluar modal yang hendak memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja tersebut, atau juga merupakan kombinasi dari kedua kemungkinan tersebut (Glasson, 1992).

Faktor lain yang tidak kalah menentukan dalam perkembangan suatu wilayah adalah faktor kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini meliputi kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan sosial dan budaya serta kebijaksanaan wilayah lainnya.

D. Keterkaitan Terhadap Fiskal

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat atau status gizi masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan asupan gizi yang diperoleh. Sementara itu, tingkat gizi akan terkait dengan tingkat kesejahteraan.

Bidang kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas (Mahmudi, 2007).

Kesehatan juga sebagai satu indikator keberhasilan pembangunan di daerah Samarinda. Kesehatan yang baik memberikan kesempatan kepada penduduk untuk aktif bekerja dan berkreasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Samarinda senantiasa melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya. Penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyuluhan kesehatan merupakan contoh usaha yang diambil oleh Pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pada umumnya pengeluaran agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow, fungsi produksi sederhana dari teori ini adalah $Y = a K$, di mana Y adalah output, (a) adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, sedangkan (K) adalah persediaan modal. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006).

Modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas dalam Barro & Sala-i-Martin (1995) dinyatakan sebagai berikut: $Y = a L^{1-\alpha} G^\alpha$, di mana $0 < \alpha < 1$ persamaan ini menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan pada constant return to scale pada input L dan K . Asumsinya adalah angkatan kerja agregat (L) adalah konstan. Modal (K) digantikan oleh Pengeluaran Pemerintah (G) berada pada diminishing return untuk modal agregat (K). Oleh karena itu, perekonomian berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi endogen.

Satu di antara komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand/AD) adalah pengeluaran pemerintah. Mankiw (2006) menyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas.

Peranan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB, maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan.

Sedangkan, teori untuk pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Model perkembangan pengeluaran pemerintah oleh Rostow Musgrave. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah

harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Musgrave & Musgrave (1989) dalam Norista (2010) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "The Law of Expanding State Expenditure". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organisasi mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota), pengeluaran dibedakan menjadi:

1. **Belanja Operasi**, rincian kegiatan belanja operasi antara lain digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, pinjaman, subsidi, hibah, dan belanja operasional lainnya.
2. **Belanja Modal**, digunakan untuk pembelian atau pembentukan aset tetap seperti gedung, jalan (infrastruktur) dan aset tetap lainnya.
3. **Belanja Tak Terduga/Tersangka**, merupakan belanja tidak terduga yang sebelumnya tidak dianggarkan seperti penanganan bencana.

Untuk mempermudah mengevaluasi penggunaan belanja atau pengeluaran, mulai tahun 2007 sistem penganggaran mulai diperjelas rinciannya menurut fungsi/sektor, yaitu:

1. Fungsi pelayanan umum, dengan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta seperti untuk pembayaran gaji, akses layanan/perijinan, kemudahan informasi, dan belanja operasi kebutuhan perkantoran sehari-hari.
2. Fungsi ekonomi, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini ditujukan agar mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai multiplier effect yang besar.
3. Fungsi kesehatan, merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanannya seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan (alat medis maupun penunjang), dan gedung kesehatan.
4. Fungsi pendidikan, merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah, maupun gedung sekolah.

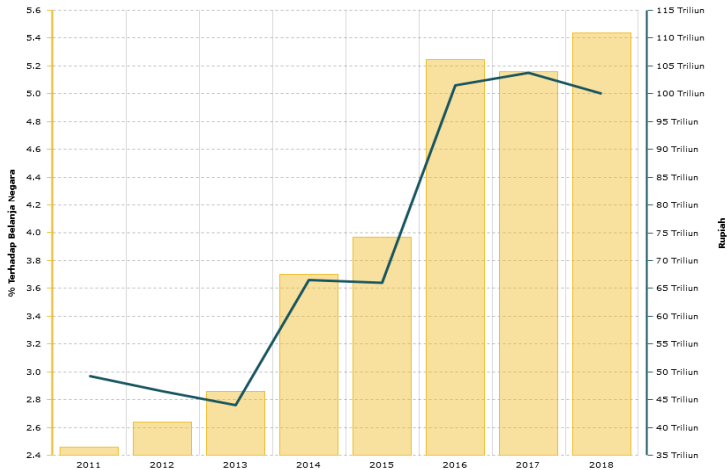
5. Fungsi ketertiban dan keamanan, merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan dalam mendukung ketahanan dan keamanan kondisi daerah.
6. Fungsi pariwisata dan lingkungan hidup, merupakan pengeluaran untuk peningkatan kegembiraan/hiburan bagi masyarakat seperti promosi dan pemeliharaan tempat wisata sekaligus dalam mempertahankan kelestaian dan kualitas lingkungan hidup agar tercipta kenyamanan.
7. Fungsi perlindungan/jaminan sosial, merupakan pengeluaran untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial dan lingkungan (panti dan perlindungan orang terlantar).

Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah mencerminkan mafaat dari adanya anggaran daerah. Tentulah tenaga kerja terdidik akan menaikkan produktivitas suatu perekonomian.

Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain: pemadam kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-taman dan rekreasi, dan sebagainya. Semuanya ini adalah barang-barang umum dalam pengertian yang sebenarnya. Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, maka tidak ada cara apapun yang dapat mengecualikan siapa saja didalam daerah ini yang dapat menggunakannya. Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mustopadidjaja (2002) menyatakan bahwa penyusunan rencana Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian

pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran-sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu.



Gambar 2.4: Anggaran Kesehatan Indonesia, 2011-2018 (Rp Triliun)
Sumber: Menteri Keuangan RI, Februari 2018

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran kesehatan tahun 2019 diarahkan untuk: (1) Percepatan peningkatan kepesertaan; (2) Peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN; (3) Mendorong supply side melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah; (4) Mendorong pola hidup sehat melalui Germas; (5) peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; (6) Percepatan penurunan stunting melalui skema Program for Result (PforR); dan (7) pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema KPBU.

Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran kesehatan tersebut meningkat 5,8% dari tahun sebelumnya, yakni Rp 104 triliun untuk tahun 2017. Jika dibandingkan dengan RAPBN 2018, anggaran kesehatan tahun ini naik Rp 800 miliar. Dana anggaran kesehatan 2018 dialokasikan sebesar Rp 81,5 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp

29,5 triliun untuk transfer ke daerah. Anggaran kesehatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, menunjang terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan menguatkan program upaya kesehatan promotif preventif. Adapun indikator kesehatan ditargetkan pada tahun ini antara lain angka persalinan di fasilitas kesehatan menjadi 82% dari sebelumnya 81%. Kemudian, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi 86% dari 83%, serta perbaikan gizi anak dengan penurunan tingkat stunting menjadi 28,8% dari 29,6% (lihat Gambar 7).

Perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah sebenarnya telah diberikan bukan hanya dari realisasi anggaran kesehatan secara umum, juga melainkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 (pasal 4, ayat 1-3) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah desa, di mana desa harus bisa mengelola dengan baik. Namun, sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa tersebut, maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal.

Mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan sebaik mungkin, yang mana dalam pelaksanaan program pembangunan desa dengan dana desa juga harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan dana desa. Demi terciptanya desa mandiri, maka peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat harus di munculkan. Secara tidak langsung, ADD juga dapat mengakomodir sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan melalui canangan program wilayah terpencil seperti desa dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) per 5 tahun. Seperti halnya pada daerah berkembang seperti Provinsi Kalimantan Timur, di mana terdapat wilayah pemekaran yakni Kabupaten Mahakam Ulu (otonomi sendiri pasca melakukan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat) dengan segala keterbatasan fisik dan non fisik.

Wijayanti & Darma (2019) dalam jurnalnya berjudul "The Role of Investment and Government Expenditure on GRDP and Human Development in East Kalimantan" mengungkapkan bahwa: (1) *Investment directly has a positive and significant effect, while Government Expenditure has a negative and significant effect on GRDP*; (2) *Investment directly has a negative and insignificant effect, while Government Expenditure and GRDP both have a positive and not significant effect on Human Development*; and (3) *Investment indirectly has a positive and significant effect, but Government Expenditure actually has a negative and significant effect towards Human Development through GRDP. The government can provide more stimulus for the development of GRDP and Human Development outside Java, such as East Kalimantan Province by creating a conducive investment climate and mapping of fiscal degrees (division of regional expenditure) according to the proportion of income of abundant natural resource producing regions from the oil and gas and non oil and gas sector. As a subject and object in development, the community should be more participatory, so that the economic performance of East Kalimantan Province is more productive by aiming at various business sectors.*

Sementara, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aslan et al. (2019) dengan judul "Have Village Funds Impact Growth Economy and Poverty Rate?". *The results of the analysis of model 1, the allocation of village funds (significant positive) and village expenditure (insignificant and negative) on economic growth. In model 2, the allocation of village funds (significant positive), village expenditure (insignificant and negative), and economic growth (significant negative) on the rate of poverty. The indirect effect proves that the allocation of village funds (negative significant) and village expenditure (insignificant and positive) on the rate of poverty through economic growth in Mahakam Ulu Regency. The regional government of Mahakam Ulu Regency should be more responsive in reducing poverty rate by providing policies that are more in favor of human empowerment. In conditions of economic growth oriented to labor-intensive, has resulted in the population classified as a workforce increased. However, the basic homework is more efficient allocation of village spending, and needs to increase and improve the fields of employment and technology. Referring to the results of the statistical analysis, which states that if the allocation of village funds has a less significant and negative influence on economic growth and on poverty rate through economic growth, the*

government of Mahakam Ulu Regency should review with the program and policies in the field through the stages of the planning process. This must be done carefully involving various parties, so that based on the characteristics of village areas that have different budgetary needs, depending on the population, poverty pockets, and economic potential.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 H; ayat 1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Kuncoro, 2013). Pemerintah wajib membangun segala sarana dan pra-sarana kesehatan melalui belanja pemerintah pada sektor ini mengacu peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji” (Sanggalorang dkk, 2015).

Dengan demikian, sekurangnya ada sektor kesehatan (asupan gizi) yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu dengan kesehatan yang memadai. Dalam hal ini, bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor publik tersebut, maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini, pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada peningkatan status gizi seseorang.

E. Keterkaitan Terhadap Lingkungan Hidup

Kesehatan menurut dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok (Bab 1, pasal 2) didefinisikan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang ini adalah

kegiatan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan”.

Kesehatan yang berada dalam diri individu/kelompok tak luput dari perhatian karena itu menjadi faktor kelangsungan hidup manusia, biasanya individu melangsungkan hidup di suatu tempat yang mana itu berada di lingkungan yang berbeda, jadi pengaruh lingkungan yang sangat esensial bagi kesehatan manusia. Dalam kaitannya, masalah kesehatan dan lingkungan ada segelintir masalah yang perlu dicermati yaitu masalah gizi pada individu. Pada era global saat ini, perlu dicermati pada beberapa daerah di Indonesia.

Namun istilah ini sedikit berubah didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Bab 1, pasal 1) sebagai berikut: “Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial ekonomis”. Kedua definisi tersebut, diatas memberi arti yang luas pada kata kesehatan. Berdasarkan definisi tersebut, seseorang belum dianggap sehat sekali pun ia tak berpenyakit jiwa dan ataupun raga, hal ini dianggap perlu karena penyakit yang diderita seseorang/sekelompok masyarakat umumnya ditentukan sekali oleh perilakunya/keadaan sosial budayanya yang tidak sehat (Soemirat, 1994).

Implikasi definisi tersebut pun sangat besar. Pekerjaan bidang kesehatan menjadi sangat luas. Ia berada dari ilmu kedokteran pencegahan yang terutama ditujukan kesehatan perseorangan. Kesehatan yang berada dalam diri individu/kelompok tak luput dari perhatian karena itu menjadi faktor kelangsungan hidup manusia, biasanya individu melangsungkan hidup di suatu tempat yang mana itu berada di lingkungan yang berbeda, jadi pengaruh lingkungan yang sangat esensial bagi kesehatan manusia. Seperti telah diuraikan terdahulu, usaha kesehatan lingkungan merupakan salah satu usaha dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat. Dari uraian tentang usaha dasar terlihat bahwa kesehatan lingkunganpun erat sekali hubungannya dengan usaha kesehatan lainnya. Usaha ini merupakan usaha yang perlu didukung oleh ahli rekayasa secara umum dan secara khusus oleh ahli rekayasa lainnya. Ini di utarakan Ehlers & Steel (1927) dalam bukunya yang berjudul “Municipal and Rural Sanitation”.

Dalam kaitannya, masalah kesehatan dan lingkungan ada segelintir masalah yang perlu dicermati yaitu masalah gizi pada individu. Pada era Global saat ini perlu dicermati pada daerah di Indonesia Khususnya. Dengan berkembangnya ilmu gizi dan perubahan pola makan serta gaya hidup pada tahun 1980-an terjadi transisi pola masalah gizi dari masalah gizi kurang ke masalah gizi lebih. Di negara berkembang khususnya Indonesia masa transisi ini oleh Soekarman (1991) disebutnya masalah gizi ganda. Strategi perubahan dalam masalah ini perlu memerlukan penyesuaian, di mana di amerika pada tahun 1980 ada yang namanya "Pedoman Gizi Seimbang", yang mana ditujukan untuk pengelompokan makanan dalam asupan untuk gizi masyarakat yang ada di Amerika Serikat.

Pada dasarnya lingkungan yang berada dalam ruang lingkup manusia sangat berperan dalam aspek kehidupan manusia, maka perlu dicermati bahwa lingkungan yang baik berarti mengindikasikan bahwa kesehatannya juga baik, dan juga mengindikasikan pada gizi yang baik. Faktor yang memengaruhinya juga banyak yang paling sering adalah dari makanan. Makanan adalah sumber energi satu-satunya bagi manusia (Soemirat, 1994). Karena jumlah penduduk yan terus berkembang, maka jumlah produksi makananpun harus terus bertambah melebihi jumlah penduduk ini, apabila kecukupan pangan harus tercapai. Permasalahan yang timbul dapat diakibatkan karena ada kualitas dan kuantitas bahan pangan, hal ini bermaksud untuk mendapatkan energi agar tetap bertahan hidup dan tidak untuk menjadi sakit karenanya. Dengan demikian, sanitasi makanan menjadi sangat penting. Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan perorangan dan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan gizi yang diperoleh dari makanan (Soekirman, 1999).

Kemampuan manusia untuk mengubah atau memodifikasi kualitas lingkungannya tergantung sekali pada taraf sosial budayanya (Soemirat, 1994). Masyarakat jaman dulu yang tinggal di hutan dan lahan berpindah hanya mampu membuka hutan yang mereka tinggali untuk memberikan perlindungan pada kelangsungan hidup mereka tersebut, beda halnya dengan masyarakat modern yang sosial ekonomi lebih maju seperti halnya kita sekarang ini bisa mengubah apa saja sesuai

kehendak yang kita mau seperti hutan dijadikan perumahan atau sebuah daerah tempat tinggal.

Perubahan lingkungan hidup seperti itu, dengan tujuan memperbaiki nasib manusia tidak selalu berhasil dengan baik jika kita tidak melihat bagaimana proses-proses itu berlangsung. Proses-proses itu terjadi dalam ekosistem yang mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Apabila perubahan lingkungan sedemikian rupa sampai terjadi pergeseran ekosistem, maka alam tidak dapat lagi memepertahankan keseimbangannya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tanah longsor, banjir, gunung meletus itu semua bisa merugikan kita bersama.

Manusia sebagai makhluk hidup selain mendayagunakan unsur-unsur dari alam, mereka juga membuang kembali apa yang telah, mereka gunakan yang tidak dipakainya lagi kembali ke alam. Hal semacam tersebut bisa berdampak buruk terhadap manusia, apabila jumlah buangan bertambah banyak sehingga alam pun tidak dapat lagi membersihkannya lagi, lalu dengan demikian lingkungan yang ada di lingkungan bisa kotor dan sumber daya alam yang biasa kita gunakan menjadi kotor dan bisa berdampak buruk jika kita menggunakannya. Akibatnya, kesehatan manusia akan terganggu, jadi jelas bisa dilihat bahwa kelangsungan hidup manusia sangat tergantung pada adanya interaksi dalam ekosistem.

Pada jaman dahulu banyak menunjukkan adanya kurang pengertian masyarakat akan hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya ini dan kurangnya pengertian tentang sifat-sifat manusia itu sendiri, yang dapat menyebabkan bencana alam terjadi. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya di mana manusia akan membutuhkan akan kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, serta kepuasan yang berkembang secara kontinyu, lain halnya dengan kedudukan manusia sebagai makhluk biologis yang mana membutuhkan makan dan minum dengan sendirinya hubungan manusia sebagai makhluk berbudaya dengan makhluk biologis sangat berpengaruh dengan adanya keinginan kebutuhan kekuasaan yang bisa menimbulkan kerusakan ekosistem dan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia dalam

mencari sumber daya alam dalam memperoleh makanan dan minuman.

Pencemaran lingkungan yang halnya dilakukan oleh manusia tidak diperhatikan maka akan terjadi penurunan kesehatan pada masyarakat, oleh karena itu usaha di bidang kesehatan perlu didasarkan akan pengetahuan ekologi manusia. Adapun pengertian ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari antara setiap segi kehidupan manusia (fisik, mental, dan sosial) dengan lingkungan hidupnya (biofisis, psikososial) secara keseluruhan dan bersifat sintesis (Boughey, 1973). Soemirat (1994) menjelaskan bahwa hubungan ekologi manusia dengan usaha kesehatan lingkungan dapat dianalogikan dengan hubungan antara ekologi dengan pertanian, kehutanan, dan sebagainya, sebagai contoh, ekologi manusia diterapkan dalam berbagai bidang kesehatan sebagai berikut, dalam ilmu kedokteran pencegahan, meningkatkan daya tahan manusia terhadap faktor disgenik. Dalam ilmu kesehatan meningkatkan faktor menguntungkan dan mengurangi pengaruh faktor merugikan.

Perkembangan epidemiologi menggambarkan secara spesifik peran lingkungan dalam terjadinya penyakit dan wabah. Bahwasanya lingkungan berpengaruh pada terjadinya penyakit sudah sejak lama diperkirakan orang (Fox, 1989). Kita bisa ambil contoh pada daerah lembab dan banyak genangan air di sekitar kita pasti ada tempat berkembang biak nyamuk baik itu berpotensi menyebabkan penyakit malaria maupun demam berdarah, disitulah letak penyakit bisa muncul karena lingkungannya tidak baik dan tidak bersih. Dalam konteks makanan yang kita makan banyak pedagang kaki lima yang berjualan tidak mengkondisikan dengan lingkungannya sehingga tak jarang pula setelah memakan di tempat yang seperti itu bisa menimbulkan sakit perut.

Seorang tokoh kedokteran, Hippocrates (460-377) adalah tokoh pertama-tama berpendapat bahwa penyakit itu ada hubungan dengan fenomena alam dan lingkungannya. Dilihat dari segi ilmu kesehatan lingkungan, penyakit terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari proses interaksi ini disebut Ekologi dan secara khusus Ekologi Manusia, apabila

perhatian studi itu adalah manusia (Boughey, 1973). Interaksi antara manusia dan lingkungannya sangatlah wajar mengingat bahwa manusia hidup berada dalam ekosistem yang mengharuskannya berinteraksi dengan lingkungan sampai meninggal dunia.

Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya pendukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Unsur udara, air, makanan, dan sandang yang diambil dari lingkungan hidupnya, namun proses interaksi itu tak selalu mendapatkan keuntungan, bahkan kadang-kadang bisa mendapatkan kerugian, sebagai contoh jika manusia makan dan minum untuk menghilangkan rasa haus dan lapar namun jika terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menimbulkan kelainan nutrisi, begitu juga jika makan tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Zat-zat tersebut dapat berupa racu asli ataupun akibat kontaminasi makanan tersebut dengan zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat terjadi keracunan atau penyakit.

Makanan adalah sumber energi satu-satunya bagi manusia (Soemirat, 1994). Karena jumlah penduduk yang terus berkembang, maka jumlah produksi makanan pun harus terus bertambah melebihi jumlah penduduk ini, apabila kecukupan pangan harus tercapai. Permasalahan yang timbul dapat diakibatkan karena ada kualitas dan kuantitas bahan pangan, hal ini bermaksud untuk mendapatkan energi agar tetap bertahan hidup dan tidak untuk menjadi sakit karenanya. Dengan demikian sanitasi makanan menjadi sangat penting.

Jika, dilihat dari kuantitas, baik yang berlebih maupun yang kekurangan akan menyebabkan kelainan gizi. Penyakit yang berhubungan dengan kegemukan disebabkan oleh jumlah makanan yang berlebih, juga kualitas nyayang tidak seimbang contohnya penyakit jantung, diabetes, dan penyakit darah tinggi, demikian pula kekurangan gizi, ada yang hanya kekurangan kuantitas makanan saja, tapi juga seringkali kualitasnya kurang. Di Indonesia, sebagian besar penyakit yang didapat berhubungan dengan kekurangan gizi, terutama pada anak-anak. Taraf kekurangan gizi pada balita di Indonesia untuk tahun 1988 kurang lebih 10% (Ignatius, 1988). Menurut Soemirat (1994), keadaan kurang gizi juga sangat dipengaruhi oleh:

1. Pengetahuan masyarakat tentang yang kurang, berbagai kepercayaan tentang makanan, sehingga anak-anak tidak mendapatkan makanan yang bergizi;
2. Kontaminasi makanan dan minuman bayi akibat lingkungan yang tidak sehat, bayi menderita penyakit bawaan makanan, sehingga pertumbuhan anak terganggu;
3. Prioritas hidup lainnya selain makanan bergizi memiliki barang elektronik atau kendaraan bermotor yang membawa akibat luas. Pendapatan tidak lagi diprioritas untuk membeli makanan bergizi.

Makanan tidak saja bermanfaat bagi manusia tetapi juga sangat baik untuk perumbuhan zat-zat lainnya seperti mikroba dalam tubuh, jadi untuk untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari makanan, perlu dijaga kebersihan makanan. Gangguan kesehatan terjadi akibat bawaan makanan dan keracunan makanan.

Masalah gizi adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan perorangan dan atau masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan gizi yang diperoleh dari makanan (Soekirman, 1999). Masalah gizi ada dua yaitu masalah gizi makro dan masalah gizi mikro. Masalah gizi makro biasanya zat gizi sumber energi seperti: karbohidrat, lemak, dan protein, serta an zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral.

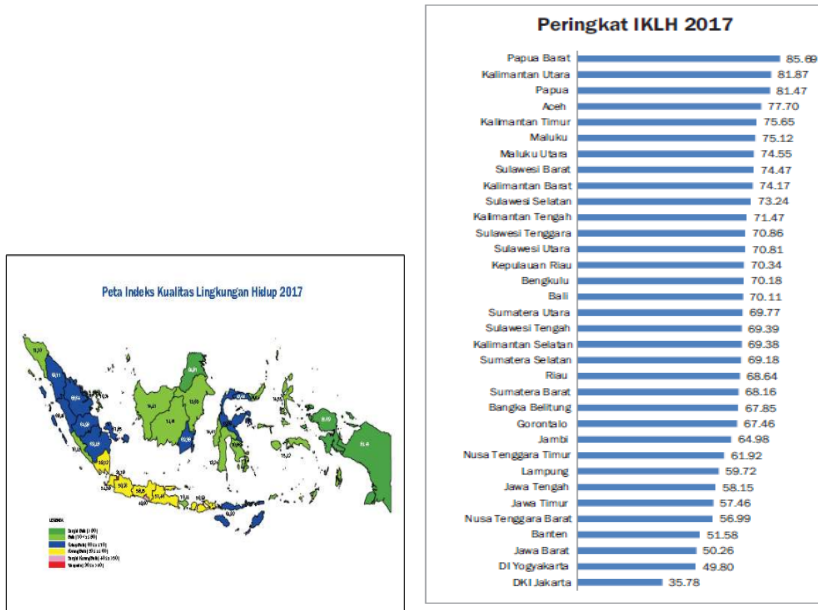
Masalah gizi makro dapat berbentuk gizi dapat berbentuk gizi kurang dan gizi lebih, sedangkan untuk masalah gizi mikro hanya dikenal gizi kurang. Dalam masalah gizi mikro ada istilah yang dikenal dengan Kurang Energi Protein (KEP). KEP adalah salah satu masalah gizi akibat kurangnya konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein serta karena gangguan kesehatan (Soekirman, 1999). Jadi, untuk mengetahui ada tidaknya KEP perlu dilakukan pengukuran keadaan status gizinya. Ada beberapa cara untuk mengukur status gizi pada anak yaitu pengukuran Antropometrik, pengukuran Klinik dan Laboratik diantara ketiganya antropemetrik adalah yang relatif lebih sederhana (Soekirman, 1999).

Tabel 2.4: Pengertian Indikator Status Gizi

Indikator BB/U	Indikator TB/U	Indikator BB/TB	Kesimpulan
Rendah	Rendah	Normal	Keadaan gizi pada anak saat ini baik, tetapi anak tersebut mengalami masalah gizi kronis. BB anak proposional dengan TB nya.
Normal	Rendah	Lebih	Anak mengalami masalah gizi kronis dan pada saat ini anak menderita kegemukan karena BB lebih dari proposional terhadap TB nya.
Rendah	Rendah	Rendah	Anak mengalami kurang gizi berat dan kronis artinya pada saat ini keadaan gizi pada anak tidak baik dan riwayat masa lalunya juga tidak baik.
Normal	Normal	Normal	Keadaan gizi anak "baik" pada saat ini dan pada masa lalu.
Rendah	Normal	Rendah	Anak mengalami kurang gizi berat (kurus).
Normal	Normal	Rendah	Keadaan gizi anak secara umum baik tetapi berat badannya kurang proposional terhadap TB-nya karena tubuh anak jangkung.

Sumber: Soekirman, 2000

Kata antropometrik berasal dari bahasa latin antropos yang berarti manusia. Berdasarkan laporan Microsoft Encarta (1998), pengukuran tubuh manusia dengan antropometrik dipelopori oleh seorang ahli antropologi terkenal di Amerika Serikat bernama Ales Hridlicka (1869-1943), yang pada tahun 1920 menulis buku tentang "Antropomentrik". Dalam pengukuran antropomentrik dapat dilakukan beberapa pengukuran seperti pengukuran terhadap berat badan (BB), tinggi badan (TB), dan lingkaran lengan (Soekirman, 2000). Sebelumnya, telah dijelaskan tentang pengertian indikator status gizi dengan berat badan dan tinggi badan yang menjadi tolak ukurnya dan umur yang menjadi pembagiannya. Dapat dilihat ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur bagaimana perkembangan gizi pada khusus anak, jika indikator berat badan dan tinggi badan normal maka anak itu bisa dibilang baik, serta tidak memiliki kekurangan gizi. Dan disamping ada pembagi, yaitu umur yang juga bisa memengaruhi itu (Tabel 2.4).



Gambar 2.5: Peta dan Peringkat IKLH Indonesia, 2017

Sumber: MENLHK, 2018

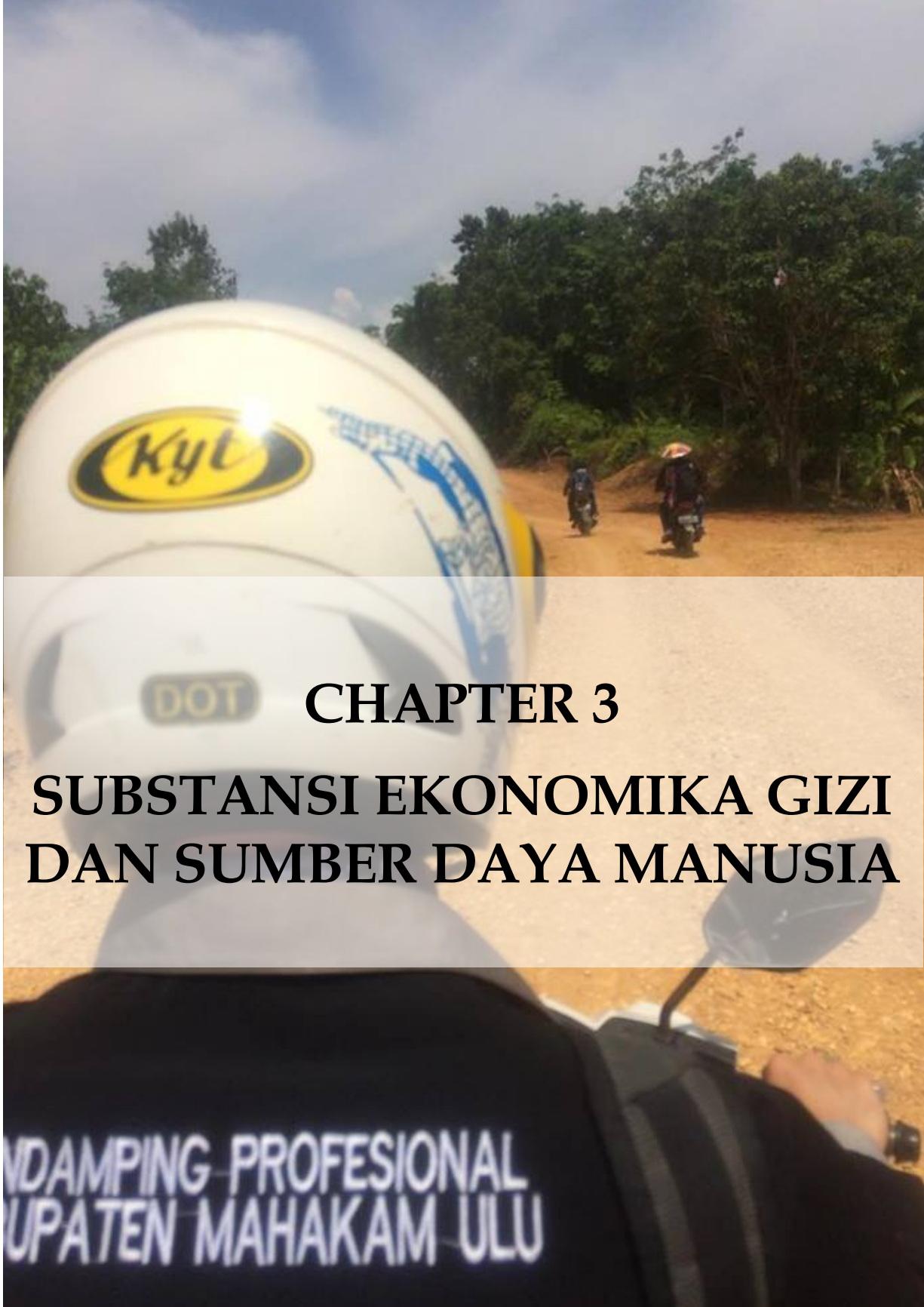
IKLH atau yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terhimpun dari 3 indikator utama yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Dengan keterangan Indikator Kualitas Air 2017 terhadap 2016 bernilai 21,33 dengan presentase -4,02%, Indeks Kualitas Udara nilai 53,50 sebesar -0,97%, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan nilai 33,32, sedangkan capaiannya menyentuh -5,56 %. Gambar 7 memaparkan bahwa Papua Barat (85,69), Kalimantan Utara (81,87), dan Papua (81,47) merupakan Provinsi di Indonesia dengan 3 posisi teratas yang menempati kualitas lingkungan hidup terbaik. Disisi lain, Provinsi Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta memiliki kualitas lingkungan terburuk (3 posisi terbawah) dengan catatan indeks masing-masing: 50,26; 49,80; dan 35,78.

Penambahan populasi masyarakat turut menyumbang semakin banyaknya timbulan sampah yang ada. Semakin padat populasi disuatu tempat, selaras dengan jumlah sampah yang di hasilkan. Setiap rumah tangga/penduduk di Indonesia dapat menghasilkan sampah

sebanyak 0,52 kg/jiwa/hari (Jambeck et al., 2015). Dapat dibayangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta yang mencapai 10,37 juta jiwa (BPS DKI Jakarta, 2017).

Lingkungan pada sekitar kita turut berandil besar dalam masalah kesehatan, jika dilihat dari apa yang ada dalam pembahasan dalam makalah ini. Lingkungan yang kita ketahui terdapat unsur-unsur yang menjadi sesuatu bahan yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia seperti: tanah, udara, dan air. Dari unsur-unsur itulah manusia bisa bertahan hidup. Dalam kaitannya dalam kesehatan dijelaskan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, dari segi lingkungan sekitar maupun lingkungan makanan yang mana kita konsumsi sehari-hari, berkaitan dengan itu bahwa lingkungan bisa memengaruhi gizi manusia, jika dilihat dari lingkungan makanannya, makanan sangat penting untuk tubuh karena makanan adalah sumber energi untuk manusia melakukan aktifitasnya, biasanya manusia mencoba berbagai macam hal, bisa makan ditempat yang lingkungannya tidak higienis contohnya itu bisa menyebabkan penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan gizi khususnya pada anak yang sangat rawan jika dikaitkan dengan gizi. Karena pada masa anak-anak adalah dalam masa perkembangan tubuh serta otaknya jika terhambat gizinya, maka akan terhambat pula pertumbuhan otaknya.

Sebagian besar lingkungan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, dilihat dari susana yang menyelimuti daerah-daerah di Tanah air ini. Disini harus ada perhatian khusus dari Pemerintah dan Individu yang ada dalam sistem yang menyertainya. Lingkungan yang pasti berhubungan langsung dengan kesehatan dan dampaknya langsung terhadap gizi pada masyarakat.



DOT

CHAPTER 3

SUBSTANSI EKONOMIKA GIZI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NDAMPING PROFESIONAL
UPATEN MAHAKAM ULU

A. Faktor Pendorong Cakupan Gizi

Beberapa faktor dalam mendukung pemenuhan gizi tidak terlepas dari kebijakan dan strategi pembangunan disektor pertanian. Sektor pertanian yang terdiri dari: kehutanan, perikanan, tanaman pangan dan bahan makanan, budidaya perkebunan, dan sebagainya merupakan kunci utama dalam penyediaan kebutuhan manusia sehari-hari. Menurut Widodo (2006), kebijakan pembangunan pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan preskripsi atau rekomendasi (prescription or recommendation) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan.

Merumuskan suatu kebijakan untuk pembangunan pertanian berarti menentukan strategi untuk mengkondisikan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan pertanian agar dapat mencapai keadaan yang diinginkan.

Pada dasarnya kebijaksanaan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, serta meraih peluang dan meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan efisiensi sistem distribusi hasil pertanian, meningkatkan penyediaan bahan baku untuk pengembangan industri, mengurangi kesenjangan, memelihara lingkungan hidup, dan meningkatkan peranan usaha pertanian rakyat. Kebijaksanaan selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mutu dan kesempatan kerja di perdesaan, memantapkan kelembagaan pertanian, serta mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Pertanian 2015-2019 diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional. Secara rinci, arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (1) Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian; (2) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian, (3)

Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian, (4) Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan (5) Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Adapun kebijakan pembangunan disektor pertanian 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian;
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi;
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di perdesaan, sebagai dasar/landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan;
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya);
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional;
7. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantina pertanian;
8. Kebijakan mendukung program tematik: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Pengarusutamaan Gender (PUG), Keluarga Sehat Sejahtera (KSS), ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan;
9. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam;
10. Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikkan subsidi pupuk majemuk; (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan

pengembangan pupuk organik; (3) subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit;

11. Kebijakan kredit: (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan; (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor; (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja dan menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit mekanisasi pertanian sangat diperlukan; dan (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Proses dan perjalanan menuju Indonesia tahan pangan dan gizi tentu tidak sederhana, terutama karena karakter multidimensi dari pembangunan ketahanan pangan dan gizi itu sendiri. Disamping itu, pembangunan ketahanan pangan harus dipandang sebagai bagian tidak terlepas dari wawasan ketahanan nasional, sehingga pembangunan ketahanan pangan memiliki fungsi strategis untuk memajukan kesejahteraan umum (dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia).

1. Kebijakan.
 - a. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian. Arah kebijakan: (1) menjamin ketersediaan pangan dari keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang; (2) mengembangkan dan memperkuat kemampuan dalam pemupukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas; (3) meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
 - b. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan. Arah kebijakan: (1) meningkatkan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin; (2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui

- pengembangan sarana dan prasarana distribusi dan menghilangkan hambatan distribusi pangan antar daerah; (3) mengembangkan teknologi dan kelembagaan pengolahan dan pemasaran pangan untuk menjaga kualitas produk pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah; (4) meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan skema distribusi pangan kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang. Arah kebijakan: (1) meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dan halal dikonsumsi dan bergizi seimbang; (2) mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (3) mengembangkan program perbaikan gizi yang *cost effective*, di antaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A; (4) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi; dan (5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang.
- d. Peningkatan status gizi masyarakat. Arah kebijakan: (1) mengutamakan upaya preventif, promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral), (b) memprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya; (c) meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya

keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daerah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah.

- e. Peningkatan mutu dan keamanan pangan. Arah kebijakan: (1) meningkatkan pengawasan keamanan pangan; (2) melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan; (3) meningkatkan kesadaran produsen, importir, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan; (4) meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan; dan (5) mengembangkan teknologi pengawet dan pewarna makanan yang aman dan tidak memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen makanan dan jajanan.

2. Strategi.

- a. Strategi Memantapkan Ketersediaan Pangan berbasis Kemandirian. Peningkatan kapasitas produksi domestik, melalui: (1) pengembangan produksi pangan sesuai dengan potensi daerah; (2) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan teknologi spesifik lokasi; (3) pengembangan dan menyediakan benih/bibit unggul dan jasa alsintan; (4) peningkatan pelayanan dan pengawasan pengadaan sarana produksi; (5) peningkatan layanan kredit yang mudah diakses petani.

Pelestarian sumber daya lahan dan air, melalui: (1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian untuk mewujudkan lahan abadi; (2) sertifikasi lahan petani; (3) konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan air pada Daerah Aliran Sungai (DAS); (4) pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan (agroforestry dan pertanian organik); (5) Pemantapan kelompok pemakai air untuk peningkatan pemeliharaan saluran irigasi; (6) penataan penggunaan air untuk pertanian, pemukiman dan industri; (7) pengembangan sistem informasi bencana alam dalam rangka Early Warning System (EWS); (8) rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; (9) perbaikan; dan (10) peningkatan jaringan pengairan.

- Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan; (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan); (3) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya; (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya.
- b. Strategi Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan daya beli pangan beragam dan bergizi seimbang, peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan, melalui: (1) peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi; (2) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen; (3) pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir; (4) pengembangan sistem informasi pasar; (5) Penguatan Lembaga pemasaran daerah; (6) pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi; (7) pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan; serta (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk, penjaminan stabilitas harga pangan, melalui: (1) Pemberlakuan harga pembelian pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) Perlindungan harga domestik dari pengaruh harga dunia melalui kebijakan tarif, kuota impor, dan/pajak ekspor, kuota ekspor pada komoditas pangan strategis, (3) Pengembangan buffer stock management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (4) Pencegahan impor dan/ekspor illegal komoditas pangan, (5) Peningkatan dana talangan pemerintah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (6) Peningkatan peranan Lembaga pembeli

- gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (7) Pengembangan sistem tunda jual, (8) Pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, dan stok minimal bulanan, peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin), serta mengembangkan pangan bersubsidi bagi kelompok khusus yang membutuhkan terutama anak-anak, dan ibu hamil yang bergizi kurang.
- c. Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal. Beberapa strategi tersebut meliputi: (1) Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta. Pengembangan materi dan cara ajar diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal; (2) Penguatan pola konsumsi pangan lokal yang didaerah dan kelompok masyarakat tertentu telah beragam; (3) Pengembangan aspek kuliner dan daya terima konsumen, melalui berbagai pendidikan gizi, penyuluhan, dan kampanye gizi untuk peningkatan citra pangan lokal, serta peningkatan pendapatan dan pendidikan umum; (4) Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, di antaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.
- d. Strategi Peningkatan status gizi masyarakat. Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu

masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Selanjutnya, adalah peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan guna mendorong terbentuknya keluarga dan masyarakat sadar gizi yang tahu dan berperilaku positif untuk mencegah gangguan kesehatan karena kelebihan gizi seperti kegemukan dan penyakit degeneratif lainnya. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti: Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam promosi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan penapisan serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daerah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah untuk promosi keluarga sadar gizi, pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk secara dini dan terpadu.

- e. Strategi Peningkatan mutu dan keamanan pangan. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan di tingkat rumah tangga, industri rumah tangga dan UKM serta importir, distributor dan ritel serta pemahaman tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan keamanan pangan yang berlaku. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan, law enforcement bagi produsen, importir, distributor dan ritel yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan pangan. Peningkatan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan.
- f. Strategi Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya

- setempat secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari desa lumbung pangan adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di perdesaan. Sasaran desa lumbung pangan yaitu dengan terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Desa rawan pangan yang merupakan titik-titik potensi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia (daerah dan nasional). Melalui desa mandiri pangan diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, dan akhirnya tercapai kemandirian masyarakat.
- g. Strategi Desa Lumbung Pangan. Lumbung desa merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan pembentukan usaha produktif yang berbasis kepada potensi lokal pedesaan, seperti: sawah, kebun, ternak maupun home industry. Upaya ini diwujudkan melalui proses peningkatan produksi. Inti lumbung desa adalah mengembalikan desa kepada khitahnya: desa sebagai sumber pangan Indonesia. Mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan kedaulatan pangan di Negeri tercinta. Lumbung desa sebagai sebuah konsep menawarkan cara pandang baru posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan dinamikasi sosial yang positif-progressif. Lumbung desa dengan konsep welfare society mendorong kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat, kemiskinan berkurang, menguatnya aset desa, meningkatnya produktifitas lahan dan semakin menguatkan kapasitas masyarakat desa dalam berbagai hal. Meningkatkan peran kelembagaan lumbung pangan selain berperan sebagai fungsi sosial dalam

penyediaan cadangan pangan masyarakat diharapkan juga berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar desa sasaran, dengan cara sebagai berikut: (1) Menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya lumbung desa; (2) Menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan; (3) Mengimplementasikan rasa kesalehan sosial. Terhadap masyarakat miskin di lingkungannya; (4) Menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan pangan (kelebihan pangan, kekurangan pangan, ketidak mampuan mengakses pangan); (5) Meningkatkan pemanfaatan pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan untuk produk pangan lokal.

Komoditas bahan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik (Prabowo, 2014). Harga komoditas bahan pangan sendiri sangat dipengaruhi oleh kestabilan distribusi permintaan dan penawaran. Harga komoditas sering mengalami fluktuasi dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu, produksi bahan pokok mengalami gagal panen akibat cuaca, gangguan hama serta faktor perkembangan harga bahan pokok akan mengganggu jalannya distribusi. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa baik atau buruknya gizi masyarakat, sangat bergantung pada sembilan bahan pokok (sembako) utama.

Di Indonesia, harga komoditas bahan pangan yang sering mengalami fluktuasi harga antara lain beras, jagung, kedelai tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabe, telur, daging dan susu (Sumaryanto, 2009). Perubahan harga komoditas bahan pangan dapat menjadi penyumbang terbesar laju inflasi dikarenakan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, permintaan bahan makanan akan menjadi cukup tinggi. Namun terkadang penawaran belum cukup mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga akhirnya mendorong laju inflasi (Santoso, 2011).

Inflasi merupakan salah satu permasalahan perekonomian yang sering terjadi di Indonesia. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Dapat dikatakan terjadi inflasi apabila

kenaikan harga tersebut juga memengaruhi kenaikan harga barang-barang lainnya. Pergerakan harga komoditas dapat dijadikan sebagai leading indicators inflasi. Beberapa alasannya adalah: (1) harga komoditas mampu merespon secara cepat shock yang terjadi dalam perekonomian secara umum seperti peningkatan permintaan (aggregate demand shock); (2) harga komoditas juga mampu merespon terhadap non-economic shocks, seperti: banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya yang menghambat jalur distribusi dari komoditas tersebut.

Kemampuan Bank Indonesia dalam memitigasi faktor-faktor yang berperan terhadap pembentukan inflasi menjadi prasyarat dari keberhasilan upaya pengendalian inflasi. Melalui berbagai penelitian dan permodelan yang telah dilakukan (Majardi & Hartawan, 2002); (Majardi, 2004); (Hutabarat, 2005); serta (Yanuarti & Hutabarat, 2006), Bank Indonesia berhasil mengidentifikasi faktor fundamental yang memengaruhi pergerakan inflasi di Indonesia, seperti: ekspektasi inflasi (adaptive dan forward looking); pergerakan nilai tukar; dan kesenjangan permintaan dan penawaran yang tercermin dari pergerakan output gap. Disamping faktor tersebut, kejutan yang terjadi di perekonomian yang berasal dari sisi penawaran (supply shock) turut memengaruhi pergerakan inflasi di Indonesia. Kejutan tersebut antara lain: shock harga pangan (khususnya beras) baik yang terjadi karena faktor musiman, bencana alam maupun gangguan distribusi, pergerakan harga komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah (administered prices), seperti: BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan shock harga komoditas yang dipicu oleh gejolak faktor eskternal.

Pengaruh faktor pencetus *supply shock* sejauh ini sudah dapat dikuantifikasikan terutama yang terkait dengan *administered prices*, seperti: komoditas sembako dan tarif listrik. Namun demikian, pengukuran terhadap pengaruh dari faktor lainnya terutama pengaruh distribusi terhadap inflasi belum dilakukan. Faktor distribusi dinilai penting karena gangguan distribusi ditengarai berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga dan ekspektasi inflasi masyarakat. Selain faktor gangguan distribusi, pengaruh faktor rantai distribusi dan kenaikan

biaya distribusi juga berpengaruh terhadap pergerakan harga barang dan akan memberikan tekanan terhadap inflasi.

Tabel 3.1: Perkembangan Harga Komoditas Sembako dan Tingkat Inflasi Nasional, Juni 2017 - Juni 2018 (MoM)

Bulan/ Tahun	Sembako (Rp/Kg)										INF (%)
	BR	DA	DS	TA	BM	BP	CM	CR	MG	GP	
Jun-17	10.100	23.700	105.100	20.350	21.750	66.250	32.250	41.150	12.350	12.675	4,37
Jul-17	10.150	25.250	105.750	20.500	22.000	41.250	33.600	45.950	12.400	12.700	3,88
Ags-17	10.350	26.200	108.650	20.650	22.500	26.650	36.600	42.100	12.600	12.850	3,82
Sep-17	10.450	26.800	110.000	20.700	23.350	29.000	37.400	35.700	12.950	12.900	3,72
Okt-17	10.700	27.000	110.550	21.800	24.500	29.500	37.900	33.150	13.100	13.000	3,58
Nov-17	10.750	27.500	112.500	21.850	25.000	27.250	38.400	34.600	13.150	13.250	3,30
Des-17	10.900	27.500	113.250	22.550	25.500	27.950	38.750	36.750	13.050	13.400	3,61
Jan-18	10.950	27.650	113.500	22.700	26.250	26.000	39.700	39.700	13.350	13.600	3,25
Feb-18	11.150	28.000	115.650	23.250	26.650	29.800	40.300	42.750	13.300	13.650	3,18
Mar-18	11.250	28.200	117.000	25.100	26.900	32.400	42.300	44.000	13.300	14.000	3,40
Apr-18	11.350	28.250	117.500	25.400	30.400	32.850	42.600	38.100	13.700	13.700	3,41
Mei-18	11.500	28.500	118.150	26.800	31.300	34.000	43.750	40.350	13.850	13.450	3,23
Jun-18	11.600	29.000	120.000	27.900	32.600	32.800	45.100	42.300	13.850	13.550	3,35
Rerata	10.862	27.196	112.892	23.042	26.054	33.515	39.127	39.738	13.150	13.287	3,55

Sumber: BI dan PHIPS Nasional, diolah (2018)

Catatan: Harga Sembako Pedagang Besar/Grosir Indonesia per Akhir Bulan

BR = Beras; DA = Daging Ayam; DS = Daging Sapi; TA = Telur Ayam; BM = Bawang Merah; BP = Bawang Putih; CM = Cabai Merah; CR = Cabai Rawit; MG = Minyak Goreng; GP = Gula Pasir & INF = Inflasi.

Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari volatile foods. Kebijakan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan sebenarnya solusi jangka panjang dalam penciptaan ketahanan pangan dan pengendalian harga pangan di dalam negeri. Namun upaya peningkatan produksi pertanian tidak dapat dilakukan secara instan karena terkait dengan infrastruktur, luas lahan, teknologi dan keahlian yang memerlukan investasi dan penanganan jangka panjang. Sementara, faktor distribusi dapat dipengaruhi secara lebih cepat dan jumlah investasi yang dibutuhkan relatif lebih kecil.

Selama 13 bulan terakhir (Juni 2017-Juni 2018), daging sapi merupakan komoditas sembako yang selalu mengalami peningkatan cukup drastis dengan rata-rata mencapai Rp 112.892/Kg. Selain itu, cabai merah juga melonjak dan berada diposisi kedua setelah daging sapi (rata-rata Rp

39.738/Kg). Sementara, bawang putih dan cabai rawit merupakan komoditas yang berfluktuatif, serta beras sebagai jenis sembako yang paling murah dibanding lainnya (rata-rata Rp 10.862/Kg). Terbukti bahwa pada periode kenaikan harga sembako yakni sekitar Mei-Juni, di mana waktu tersebut bertepatan dengan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri atau saat demand dititik puncak. Kontribusi 10 komoditi tersebut, sangat berpengaruh signifikan bagi capaian inflasi yang terlihat berfluktuatif. Terbukti berdampak pada kurun waktu penelitian terjadi inflasi berskala kecil. Adapun tingkat inflasi tertinggi berada dilevel 4,37 (Bulan Juni 2017) dan terendah pada Bulan Februari 2018 yaitu 3,18% (lihat Tabel 5).

Peningkatan harga komoditas pangan dan bahan bakar memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena di dorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (floor price). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti: panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

B. Kebutuhan Gizi per Kapita

Penetapan standar makanan untuk pemeliharaan kesehatan telah mengalami perkembangan karena pemahaman peran gizi dalam kesehatan menjadi semakin baik. Sebagian besar negara sekarang memiliki Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan sebagai rekomendasi nasional. Secara tradisional AKG didefinisikan sebagai tingkat asupan gizi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi diketahui hampir semua orang sehat. Definisi ini memiliki arti tingkat gizi yang cukup untuk diperlukan untuk mencegah penyakit akibat kekurangan gizi, seperti gangguan akibat kekurangan iodium, xeroftalmia, dan buta senja untuk vitamin A dan beri-beri untuk untuk thiamin.

AKG adalah angka kecukupan zat gizi setiap hari menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas untuk mencegah terjadinya kekurangan ataupun kelebihan gizi. Secara internasional, berbagai istilah digunakan, di Amerika Serikat dan Kanada disebut *Dietary Reference Intakes (DRIs)*, di Uni Eropa disebut *Population Reference Intakes*, di Jepang disebut *Nutrients-Based Dietary Reference Intakes (NBDRI)*, WHO menggunakan istilah *Recommended Nutrient Intake (RNI)*, di Filipina digunakan istilah *Recommended Energy and Nutrient Intake (RENI)*, di Australia dan Selandia Baru digunakan istilah *Nutrient Reference Values (NRVs)*.

Kriteria rekomendasi kecukupan gizi terus berkembang sehingga dalam jangka waktu 5 tahun hampir selalu ada perubahan kecukupan beberapa zat gizi. Perubahan terjadi karena adanya perkembangan permasalahan kesehatan masyarakat dan semakin baiknya pemahaman terhadap penyakit kronis, seperti penyakit jantung, kanker dan semakin bertambahnya umur harapan hidup. Demikian, maka penetapan AKG perlu dikaitkan dan didasarkan pada kondisi kesehatan masyarakat. Kunci dalam menetapkan AKG adalah pemahaman yang jelas tentang kriteria yang akan digunakan untuk memperkirakan atau menghitung kecukupan gizi. Kecukupan gizi harus didasarkan pada pencegahan penyakit kekurangan gizi, indikator biokimia, atau pengurangan risiko terhadap penyakit kronis. Penetapan AKG dapat merupakan kombinasi ilmiah dan kebijakan. Keputusan harus didasarkan pada analisis masalah kesehatan masyarakat yang penting yang dihadapi bangsa.

AKG digunakan untuk berbagai keperluan: (1) panduan untuk asupan gizi individu dan populasi; (2) pendidikan gizi; (3) penilaian asupan makanan; (4) membantu dalam perancangan program intervensi pangan; dan (5) dalam pelabelan gizi. AKG harus digunakan kehati-hatian dan AKG adalah bukan kecukupan minimum.

Komposisi zat gizi pangan sangat diperlukan untuk penilaian tingkat kecukupan gizi dan perencanaan kebijakan pangan dan gizi. Untuk itu diperlukan Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan (DKZPG) yang merupakan data base yang berisikan komposisi dan kandungan zat gizi yang terkandung di dalam suatu pangan dan merupakan instrument

dasar dalam penilaian konsumsi zat gizi, baik pada individu maupun masyarakat.

Indonesia menggunakan istilah Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai terjemahan dari *Recommended Dietary Allowances* (RDA). Filipina menggunakan istilah *Recommended Energy and Nutrient Intakes* (RENI). Amerika Serikat dan Kanada dalam wadah *Institute of Medicine* (IOM) menggunakan istilah *Dietary Reference Intake* (DRI) yang terdiri dari: (1) Kecukupan gizi rata-rata (*Estimated Average Requirement* (EAR)); (2) Konsumsi gizi yang dianjurkan (*Recommended Dietary Allowance* (RDA)); (3) Kecukupan asupan gizi (*Adequate Intake*, AI); dan (4) batas atas yang diperbolehkan (*Tolerable Upper Level/TUL*).

Food and Agriculture Organization (FAO) dan *World Health Organization* (WHO) menggunakan istilah RNIs. Jepang menggunakan istilah NBDRI mirip dengan DRIs Amerika-Kanada tetapi dengan tambahan, kisaran asupan aman (*Safe Range of Intake/SRI*). Australia dan Selandia Baru menggunakan istilah NRVs yang terdiri dari: *Estimated Energy Requirements* (EER), EAR, RDI, AI, UL. Terdiri dari 4 komponen: gizi makro (termasuk serat dan air), vitamin larut dalam air, vitamin larut dalam lemak, dan mineral.

Dewasa ini, informasi gizi semakin banyak diberikan pada label gizi. Nilai dari DKPI diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. Tujuan dari pelabelan gizi adalah untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi, serta untuk mencegah klaim menyesatkan. Suatu dilema yang dihadapi oleh Tim AKG Indonesia adalah sangat kurangnya data kebutuhan gizi untuk orang Indonesia. Jadi, seperti di masa yang lalu, data dari luar negeri digunakan dalam mendapatkan AKG. Tim AKG menerima salah satu alasan dari US Food and Nutrition Board (USFNB) untuk harmonisasi global pada pedoman gizi berbasis makanan, yaitu kebutuhan fisiologi untuk kelompok sehat adalah sama di manapun (*physiologic requirements are expected to be similar across healthy population*). Tim AKG, bagaimanapun, menyadari perlunya validasi kelayakan data luar negeri untuk anjuran orang Indonesia karena kecukupan gizi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: genetik, kebiasaan makan, gaya hidup, dan lain-lain.

Beberapa komponen AKG dapat diuraikan kedalam konsep dan istilah sebagaimana berikut:

- a Berat Badan. Data yang digunakan untuk perhitungan rata-rata berat badan, serta tinggi badan normal orang Indonesia adalah data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007 dan 2010 yang dikumpulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Data yang diolah meliputi: umur, jenis kelamin, berat badan (BB), panjang badan (PB) untuk anak berumur di bawah 2 tahun, dan tinggi badan (TB) untuk yang berumur 2 tahun ke atas. Untuk menentukan status normal, maka data BB, PB atau TB dikonversikan menjadi nilai Z-Score (standardized value) menurut umur dan jenis kelamin dengan menggunakan baku pertumbuhan WHO pada 2006 untuk anak umur 0-59 tahun dan baku WHO 2007 untuk anak dan remaja berumur 5-19 tahun. Indikator status gizi yang digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U). Selanjutnya ditetapkan status gizi normal digunakan batasan WHO yaitu bila nilai Z-Score setiap indikator status gizi membentang antara -2 SD (Z-Score = -2) dan +2 SD (Z-Score = +2).
- b Kelompok Umur. Kelompok umur untuk AKG adalah mengikuti pengelompokan umur yang disepakati untuk Asia Tenggara. Batas kelompok umur yang digunakan untuk AKG tahun 2012 mengalami penambahan jika dibandingkan pada AKG tahun 2004. Batas atas kelompok umur pada AKG tahun 2004 adalah 65 tahun keatas, sedangkan untuk AKG tahun 2012 adalah 80 tahun keatas karena umur harapan hidup Indonesia semakin meningkat.
- c Energi. Berbagai faktor yang memengaruhi kecukupan energi adalah berat badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan (usia), jenis kelamin, energi cadangan bagi anak dan remaja, serta *Thermic Effect of Food* (TEF). Escott-Stump & Mahan (2008) mengatakan, TEF adalah peningkatan pengeluaran energi karena asupan pangan yang nilainya 5-10%

dari *Total Energy Expenditure* (TEE). Angka 5 % digunakan bagi anak-anak yang tekstur makanannya lembut dan minum ASI/susu (umur <3 tahun) ; dan 10% pada usia selanjutnya. Perhitungan kecukupan energi yang terkini didasarkan model persamaan IOM (2005) dari meta analisis tim pakar Institute of Medicine (IOM, 2002). Model ini diperoleh dari data energi basal (EB) yang diukur dengan metode doubly labeled water yang lebih valid dibanding model sebelumnya. Kecukupan energi pada anak berbeda dengan kelompok usia lainnya. Pada kelompok usia lanjut (lansia), hasil perhitungan AKE dari persamaan Henry (2005) perlu dikoreksi, karena jumlah subyek yang kecil dan overestimasi berdasarkan hasil kajian Krems et al. (2005), yaitu overestimasi 9 % pada lansia laki-laki dan 11% pada lansia perempuan mulai usia 65 tahun. Pada lansia juga dilakukan koreksi penurunan kebutuhan energi dengan bertambahnya umur yaitu 5% pada usia 50-64 tahun, 7,5 % pada usia 65-79 tahun, dan 10% pada usia >80 tahun sebagai akibat penurunan jumlah sel-sel otot, beragam kompleks penurunan fungsi organ.

d Gizi Makro dan Air.

Gizi makro dan air terbagi menjadi protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, mineral dan elektrolit dengan penjesan dibawah ini:

- a Protein. Kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh berat badan, usia (tahap pertumbuhan dan perkembangan) dan mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Bayi dan anak-anak yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat membutuhkan protein lebih banyak perkilogram berat badannya dibanding orang dewasa (IOM, 2005). Mutu protein makanan ditentukan salah satunya komposisi dan jumlah asam amino esensial. FAO (2013) merekomendasikan pola kebutuhan (referensi) asam amino esensial yang baru, yang pada umumnya sedikit lebih tinggi dari pola kebutuhan asam amino sebelumnya. Pangan hewani mengandung asam amino lebih lengkap dan banyak dibanding pangan nabati, karena itu pangan hewani mempunyai mutu protein yang lebih

baik dibandingkan pangan nabati. Disamping itu, mutu protein juga ditentukan oleh daya cerna protein tersebut, yang dapat berbeda antar jenis pangan. Semakin lengkap komposisi dan jumlah asam amino esensial dan semakin tinggi daya cerna protein suatu jenis pangan atau menu, maka semakin tinggi mutu proteinnya. Demikian pula semakin rendah kandungan serat dan lembut tekstur suatu jenis pangan sumber protein semakin baik mutu proteinnya (Gibney et al., 2002).

- b) Lemak. Seperti halnya kecukupan energi, kecukupan lemak seseorang juga dipengaruhi oleh ukuran tubuh (terutama berat badan), usia atau tahap pertumbuhan dan perkembangan dan aktifitas. Pola umumnya secara kuantitas adalah, bila kebutuhan energi meningkat kebutuhan akan zat gizi makro juga meningkat. Artinya semakin banyak kecukupan energi semakin banyak pula zat gizi makro, termasuk lemak yang dibutuhkan. Pola konsumsi pangan harian yang dianjurkan sebaiknya memenuhi keseimbangan rasio energi dari protein, lemak, dan karbohidrat, atau yang biasa disebut sebagai kisaran distribusi persentase energi dari zat gizi makro atau Average Macronutrients energy Distribution Range (AMDR). Secara umum, pola konsumsi pangan remaja dan dewasa yang baik adalah bila perbandingan komposisi energi dari karbohidrat, protein dan lemak adalah 50-65% : 10-20% : 20-30%. Komposisi ini tentunya dapat bervariasi, tergantung umur, ukuran tubuh, keadaan fisiologis dan mutu protein makanan yang dikonsumsi. Pada bayi usia < 6 bulan, persentase energi dari protein sekitar 7% masih baik, karena proteinnya berasal dari ASI (eksklusif) yang mutu proteinnya 100%.

Lemak dikonsumsi dalam bentuk lemak atau minyak yang tampak (seperti gajih, mentega, margarin, minyak, santan) dan minyak yang tidak tampak (terkandung dalam makanan). Lemak yang tampak dalam bentuk padat, cenderung mengandung lebih banyak asam lemak jenuh. Menurut Simopoulos et al. (2000), proporsi lemak jenuh (saturated fat) dan asam lemak trans masing-masing maksimal 8% dan 1% dari energi total. Ini berarti bagi seorang

remaja atau dewasa dengan kecukupan energi 2000 kkal, perlu membatasi konsumsi lemaknya pada 56 g/hari dan lemak jenuh sekitar 18 g/hari.

Upaya memperbaiki komposisi asam lemak dalam menu harian perlu dilakukan, agar sejalan dengan upaya pencegahan penyakit kronik degeneratif sedini mungkin melalui pengaturan komposisi asam lemak yang dikonsumsi. Perbandingan untuk kandungan n-6 dan n-3 adalah 4-8 : 1. Secara kuantitas, kecukupan n-3 dan n-6 didasarkan pada IOM (2005). Kecukupan bagi ibu hamil dan ibu menyusui adalah sama yaitu 13 g n-6 dan 1,4 g n-3 per hari. Kecukupan bagi bayi 0-5 bulan dan 6-11 bulan masing-masing adalah 4,4 g n-6 dan 0,5 g n-3 per hari

- c Karbohidrat. Kecukupan energi, kecukupan karbohidrat seseorang dipengaruhi oleh ukuran tubuh (berat badan), usia atau tahap pertumbuhan dan perkembangan, dan aktifitas fisik. Ukuran tubuh dalam arti masa otot yang semakin besar dan aktifitas fisik yang semakin tinggi berimplikasi pada kecukupan karbohidrat yang semakin tinggi. Ada dua pendekatan untuk menghitung kebutuhan karbohidrat bagi setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Pertama, didasarkan pada cara by difference. Untuk menghitung kecukupan karbohidrat dilakukan by difference karena kecukupannya energi, protein dan lemak sudah diperoleh. Ini artinya kecukupan karbohidrat dihitung dengan total kecukupan energi dikurangi total energi dari kecukupan protein dan kecukupan lemak. Kedua, adalah dengan menggunakan hasil review yang dilakukan IOM (2005) bahwa kebutuhan karbohidrat bayi yang didasarkan karbohidrat dari ASI yang cukup adalah 60g/orang/hari. Selanjutnya, pada remaja dan dewasa 100 g/orang/hari. Hasil review IOM (2005) menunjukkan kebutuhan karbohidrat remaja dan dewasa laki laki dan perempuan relatif sama yaitu 100 g/orang/hari. Dengan mempertimbangkan perlu ditambah sejumlah dua kali koefisien variasi (30%) untuk menjadikan kecukupannya, maka kecukupan karbohidrat bagi perempuan dan laki-laki remaja atau dewasa adalah 130 g/orang/hari.

Dalam perumusan kecukupan karbohidrat juga dirumuskan kecukupan serat pangan.

C. Life Cycle Hypothesis: suatu Penunjang

Ando & Modigliani (1963) menggunakan model Fisher pada perilaku konsumen untuk mempelajari fungsi konsumsi. Salah satu tujuan mereka adalah untuk memecahkan teka-teki konsumsi yaitu, untuk menjelaskan beberapa fakta yang terungkap ketika fungsi konsumsi Keynes dihadapkan dengan data. Menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Modigliani (1976) menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis sepanjang hidup orang dan tabungan memungkinkan konsumen untuk membuat pendapatan menjadi flexible, karena dapat dipindahkan penggunaannya dari waktu ketika pendapatan tinggi ke saat-saat ketika pendapatan rendah.

Satu diantara alasan penting, bahwa pendapatan bervariasi selama kehidupan seseorang adalah masa pensiun. Kebanyakan orang berencana untuk berhenti bekerja pada usia 60-65, dan mereka berpendapat bahwa pendapatan mereka akan turun ketika mereka pensiun. Namun disisi lainnya mereka tidak ingin penurunan besar dalam standar hidup mereka, yang diukur dengan konsumsi mereka. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi setelah pensiun, orang harus menyimpan selama tahun bekerja mereka.

Misalkan terdapat seorang konsumen yang mengharapkan hidup (T) tahun lagi, memiliki kekayaan (W), dan berharap untuk memperoleh pendapatan (Y) sampai ia pensiun (R) tahun dari sekarang. Sumber pendapatan seumur hidup konsumen terdiri dari kekayaan (W) dan penghasilan seumur hidup awal $R \times Y$ (diasumsikan bahwa tingkat bunga nol, sehingga tidak perlu memperhitungkan bunga yang diperoleh pada tabungan). Konsumen dapat membagi pendapatan seumur hidupnya dengan tahun T sisa hidup. Diasumsikan, bahwa dia

ingin mencapai kemungkinan jalur halus konsumsi selama hidupnya, maka dapat dirumuskan:

$$C = (1/T)W + (R/T)Y$$

Jika setiap individu dalam perekonomian memiliki rencana konsumsi seperti ini, maka fungsi konsumsi agregat sama dengan fungsi konsumsi individu. Secara khusus, konsumsi agregat bergantung pada kekayaan dan pendapatan. Sehingga fungsi konsumsi ekonomi dirumuskan berikut:

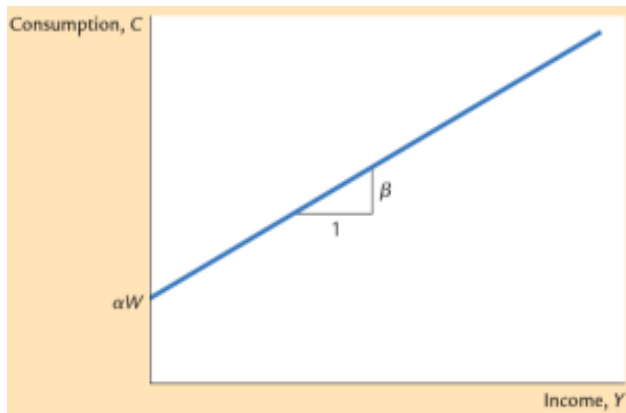
$$C = aW + bY$$

di mana,

aW adalah *marginal propensity to consume* dari kekayaan

bY adalah *marginal propensity to consume* dari pendapatan

Implikasinya terletak dari Gambar di bawah ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang diprediksi oleh "The Lifecycle Hypothesis". Namun perlu diperhatikan bahwa intercept dari fungsi konsumsi, yang menunjukkan apa yang akan terjadi dengan konsumsi jika pendapatan pernah jatuh ke nol, bukan merupakan nilai tetap. Tetapi, merupakan intercept aW , sehingga dapat disimpulkan, bergantung pada tingkat kekayaan seseorang.

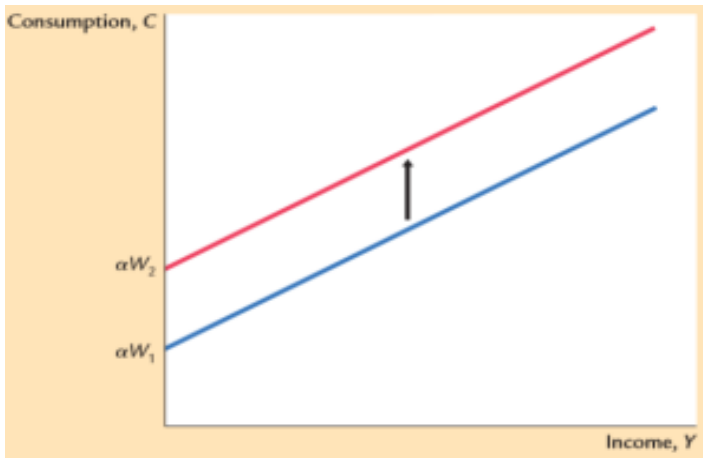


Gambar 3.1: Hubungan Konsumsi dan Pendapatan

Life-cycle model of consumer behavior dapat memecahkan teka-teki konsumsi. Menurut fungsi konsumsi *The life-cycle*, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau *average propensity to consume* adalah:

$$C/Y = a(W/Y) + b$$

Karena kekayaan tidak bervariasi secara proporsional dengan pendapatan dari orang ke orang atau dari tahun ke tahun, kita akan menemukan bahwa pendapatan yang tinggi sesuai dengan kecenderungan rata-rata rendah ketika melihat data antar individu atau selama periode waktu yang singkat. Tapi, selama jangka waktu yang lama, kekayaan dan pendapatan tumbuh bersama, sehingga rasio W/Y dan *average propensity to consume* akan konstan.



Gambar 3.2: Average Propensity to Consume

Dalam jangka panjang, seperti kekayaan meningkat, fungsi konsumsi bergeser ke atas, seperti pada Gambar 3.2. Pergeseran ke atas ini mencegah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata jatuh dengan meningkatnya pendapatan. Dengan cara ini, Modigliani memecahkan teka-teki konsumsi. *The life-cycle model* memiliki prediksi lain yaitu memprediksi bahwa tabungan akan bervariasi selama seumur hidup seseorang. Jika seseorang mulai dewasa tanpa kekayaan, maka dia akan mengumpulkan kekayaan selama bekerja dan menghabiskan kekayaannya selama tahun pensiun.

Namun, banyak ekonom telah mempelajari konsumsi dan tabungan dari orang tua. Tampaknya orang tua tidak seperti bagaimana *the life-cycle model* memprediksi. Dengan kata lain, orang tua tidak menghabiskan kekayaan mereka secepat yang diharapkan jika mereka berencana untuk tetap memiliki tingkat konsumsi seperti biasa selama bertahun-tahun mereka sisa hidup. Terdapat dua faktor mengapa *the life-cycle model* tidak dapat diterapkan, penjelasan pertama adalah bahwa orang tua khawatir tentang biaya tak terduga. Tabungan tambahan yang timbul dari ketidakpastian disebut *precautionary savings*. Faktor lain adalah kemungkinan akan jatuh sakit dan tagihan untuk kesehatan yang besar.

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga (BPS, 2008).

Salah satu teori ekonomi yang sangat erat kaitannya antara pengeluaran dengan tingkat kesejahteraan adalah teori yang dinyatakan oleh Ernst Engel tahun 1857. Dalam teori Engel tersebut, bila selera tidak berbeda, maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan (BPS, 2012). Rumah tangga yang mengeluarkan proporsi lebih banyak untuk makanan biasanya merupakan rumah tangga yang masih pada taraf tingkat subsisten. Sementara rumah tangga yang lebih banyak mengkonsumsi untuk barang-barang mewah dan kebutuhan sekunder merupakan rumah tangga yang lebih sejahtera (Mor & Sethia, 2015).

Untuk melihat taraf hidup dalam masyarakat, kecenderungan pengeluaran untuk konsumsi barang kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan menjadi penting diperhitungkan sesuai dengan penelitian Engel. Penelitian tersebut mengamati enam jenis pengeluaran rumah tangga, yakni: makanan, pakaian, perumahan, kendaraan, transportasi, kesehatan atau gizi, pendidikan, rekreasi, dan tabungan (Ginting dkk, 2008). Hasil studi empiris Engel antara lain menyatakan: (1) kategori/proporsi terbesar dari anggaran rumah tangga adalah untuk makanan dan bukan makanan; (2) proporsi

pengeluaran total untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan; (3) proporsi pengeluaran total untuk pakaian dan perumahan diperkirakan konstan, sementara proporsi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, barang mewah, dan tabungan bertambah ketika pendapatan mulai meningkat (Chakrabarti & Hildenbrand, 2011).

Pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu bentuk pengeluaran bukan makanan dapat termasuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (human capital investment). Sebagai barang konsumsi, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam rumah tangga (Guhardja dkk, 1993), di mana pengeluaran rumah tangga terhadap pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas individu dalam rumah tangga (Tjiptoherijanto & Soemitro, 1998).

Selain sebagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, pendidikan dan kesehatan seringkali dihubungkan dengan investasi dalam peningkatan mutu modal manusia. Menurut Ananta & Hatmadji (1985), peningkatan mutu modal manusia dikatakan sebagai investasi karena memerlukan pengorbanan di masa kini baik pengeluaran alokasi pendapatan maupun waktu untuk memperoleh sesuatu yang lebih tinggi di masa depan. Sementara itu, menurut Ananta & Tjiptoherijanto (1985) disebutkan bahwa derajat kesehatan yang baik memungkinkan orang menerima pendidikan yang baik pula, demikian pula sebaliknya. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, akan tercipta kualitas manusia yang unggul dan memiliki daya saing.

Penduduk Indonesia telah mengalami transisi demografi, dengan semakin menurunnya tingkat kelahiran dan kematian yang membawa dampak pada peningkatan penduduk usia produktif. Peningkatan penduduk usia produktif ini membawa dampak terjadinya bonus demografi dan terbukanya jendela peluang pada tahun 2020-2030, ketika rasio ketergantungan mengalami level yang terendah (Adioetomo, 2013). Terlebih lanjut, persiapan untuk menyambut momen emas ini harus dimulai dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan meningkat

kembali karena peningkatan penduduk usia tua. Sebagai tolok ukur yang dapat berpengaruh untuk mempersiapkan kondisi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada level mikro rumah tangga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada level mikro rumah tangga salah satunya adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan disamping pengeluaran makanan yang berkalori dan berprotein (Tjiptoherijanto & Soemitro, 1998). Menurut Adioetomo (2013), dalam rangka memetik bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2030, investasi pendidikan dan kesehatan yang dimulai dari level mikro dalam rumah tangga serta peningkatan investasi pendidikan dan kesehatan dari pemerintah berupa peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau sangat penting untuk diperhatikan.

Pengeluaran sendiri sebenarnya merupakan suatu konsep multidimensional yang dapat bervariasi dengan pendapatan rumah tangga, komposisi rumah tangga, ataupun periode siklus dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini kondisi sosio demografi suatu rumah tangga sangat memengaruhi pengeluaran dalam rumah tangga, sehingga pengeluaran rumah tangga tidak hanya tergantung dari pendapatan semata.

Perkembangan awal teori perilaku konsumsi ditemukan dalam teori-teori klasik ekonomi mikro. Untuk menggambarkan cara konsumen memilih diantara kemungkinan konsumsi yang berbeda-beda, para ekonom abad lalu mengembangkan dalam teori utility (Mankiw, 2000). Dalam teori ekonomi mikro, perilaku konsumsi berasal dari dalil maksimisasi utilitas dengan kendala anggaran. Menurut Mankiw (2000), batasan anggaran seorang konsumen menunjukkan kombinasi berbagai barang yang mungkin dibelinya dengan melihat pendapatannya dan harga barang-barang tersebut. Konsumen akan berusaha melakukan optimisasi dengan memilih titik pada batas garis anggaran yang terletak pada kurva indifferen yang tinggi, yaitu titik kurva di mana konsumen menggambarkan preferensi pada berbagai kombinasi barang yang menjadi pilihannya pada tingkat harga tertentu.

Menurut Deaton (1998), analisis perilaku konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran secara crosssection pada individu rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, tingkat dan struktur konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan harga, selera yang berbeda dari waktu ke waktu, penelitian empiris yang dilakukan oleh Earnest Engel pada tahun 1857. Engel mempublikasikan hasil penelitiannya yang dilakukan pada 200 rumah tangga buruh di Belgia yang terdiri dari rumah tangga kelas ekonomi rendah-menengah dan tinggi. Dalam penelitiannya, ia merumuskan hukum empiris mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran makanan yang terkenal dengan hukum Engel. Ia menyatakan bahwa proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan menurun ketika pendapatan meningkat. Hukum yang serupa ini juga memformulasikan untuk item pengeluaran lainnya dengan generalisasi, ketika tingkat pendapatan dalam rumah tangga meningkat, proporsi pengeluaran untuk kebutuhan mendesak seperti makanan menurun, sedangkan proporsi untuk barang-barang luxuries dan semi luxuries meningkat.

Konsumsi adalah tindakan menggunakan berbagai komoditi, baik berupa barang maupun jasa dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan. Konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah (government consumption) dan konsumsi rumah tangga/masyarakat (household consumption/private consumption). Konsumsi rumah tangga/masyarakat memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat, mengingat porsinya yang besar tersebut maka konsumsi rumah tangga/masyarakat mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap stabilitas perekonomian (Mankiw, 2012).

Selanjutnya, menurut Tarigan (2005) pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga selama satu tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

- a Pengeluaran untuk non konsumsi atau barang tahan lama, seperti: mobil, alat elektronik, dan sebagainya, sedangkan

- b Pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa yang tidak tahan lama, seperti: makanan, sabun, pakaian, dan jasa lainnya.

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Ada dua cara penggunaan pendapatan. Pertama, membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi. Kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi, terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Kalau perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya.

Kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga responden ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (hutang), maka rumah tanggapun ada yang berhutang, dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga responden yang melakukan kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar rumah tangga maupun dengan sektor ekonomi lain. Investasi finansial dapat berupa uang tunai, simpanan di bank, dan pemilikan surat berharga.

Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing rumah rumah tangga. Sedangkan, dalam hal pendapatan, ada rumah tangga responden yang pendapatannya dari upah/gaji saja, dari usaha saja, atau dari gabungan keduanya. Bahkan ada yang dari selain keduanya, misalnya dari pensiun, bagi hasil, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari keaktifan krt/art dalam kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, maka untuk mengukur penerimaan dan pengeluaran rumah tangga responden secara lengkap perlu diperhatikan bahwa:

- a Selain data komponen pengeluaran bersama di rumah tangga, juga harus ikut dicatat pengeluaran masing-masing art.
- b Selain data pendapatan dari usaha bersama, juga harus ikut dicatat penerimaan masing-masing art yang telah berpenghasilan.

Menurut Mankiw (2012), paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan

pertumbuhan ekonomi. Salah satu definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Metodologi penelitian dilapangan (primer), yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan konsumsi atau pengeluaran per kapita/penduduk melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tiap tahun. Setiap rumah tangga yang terpilih dalam survei ini dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancarai responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang paling mengetahui keadaan di rumah tangga yang bersangkutan. Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu yang lalu untuk konsumsi makanan serta sebulan atau setahun yang lalu untuk konsumsi bukan makanan. Petugas yang melakukan pengumpulan data adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), dengan dibekali instrumen untuk keperluan pengumpulan data, seperti kuesioner dan buku pedoman. Sebelum mengumpulkan data, terlebih dahulu para petugas ini dilatih oleh instruktur (pelatih) tentang tata cara pengisian kuesioner dan pemakaian konsep/definisi yang digunakan dalam kegiatan survei. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh salah satu faktor non sampling error.

Menurut Dumairy (1996), berdasarkan alokasi penggunaannya secara garis besar alokasi konsumsi rumah tangga/per kapita digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan (non) makanan:

Tabel 3.2: Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Penggunaan

Makanan	Bukan Makanan (Non Makanan)
1. Padi-padian	1. Perumahan dan Bahan Bakar
2. Umbi-umbian	2. Aneka Barang dan Jasa
3. Ikan	a. Bahan perawatan badan (sabun, pasta gigi, parfum dan sebagainya)
4. Daging	b. Bacaan (Koran, majalah, buku)
5. Telur dan Susu	c. Komunikasi
6. Sayur-Sayuran	d. Kendaraan Bermotor
7. Kacang-Kacangan	e. Transportasi
8. Buah-Buahan	f. Pembantu dan supir
9. Minyak dan Lemak	3. Biaya Pendidikan
10. Bahan Minuman	4. Biaya Kesehatan
11. Bumbu-bumbuan	5. Pakaian, Alas Kaki, tutup kepala
12. Bahan Pangan lain	6. Barang-barang tahan lama
13. Makanan Jadi	7. Pajak dan Premi asuransi
14. Minuman Beralkohol	8. Keperluan Pesta dan Upacara
15. Tembakau dan Sirih	

Catatan: Penggolongan ini mengikuti publikasi resmi BPS, 1996

Berbeda dengan konsumsi pemerintah yang bersifat eksogenus, konsumsi rumah tangga bersifat endogenus, dalam arti, Besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang dianggap memengaruhinya. Karena itu kita dapat menyusun teori dan model ekonomi yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan tingkat konsumsi dengan faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Teori dan model tersebut dikenal sebagai teori dan model konsumsi. Berikut ini akan diuraikan terori konsumsi dari berbagai ahli ekonomi:

a Teori Konsumsi menurut Keynes (Absolute Income Hypothesis/AIH),

Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes mengatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi outonomous) dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan. Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yaitu: Pertama, penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. Kedua, kecenderungan Mengkonsumsi Marginal (Marginal Propensity to Consume)-

pertambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan sebesar satu satuan. besarnya MPC adalah antara nol dan satu. Dengan kata lain MPC adalah pertambahan atau perubahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan masyarakat sebagai akibat pertambahan atau perubahan pendapatan disposabel atau pendapatan yang siap dibelanjakan (ΔY). Ketiga, rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut dengan Kecenderungan Mengonsumsi Rata-rata (Average Propensity to Consume/ APC), turun ketika pendapatan naik, dengan demikian APC menurun dalam jangka panjang dan MPC lebih kecil dari pada APC ($MPC < APC$). Selain pendapatan, pengeluaran konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kekayaan, tingkat sosial ekonomi, selera, tingkat bunga dan lain-lain. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi konsumsi menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional atau pendapatan disposibel perekonomian tersebut. Dalam ciri-ciri fungsi konsumsi dinyatakan bahwa APC mengukur pendapatan disposable yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. MPC mengukur setiap pertambahan pendapatan disposable yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai konsumsi.

b Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup (Life Cycle Hypothesis),

Teori konsumsi dengan hipotesis ini dikemukakan oleh Ando, Brumberg, dan Modigliani yaitu tiga ekonom yang hidup di abad 18. Menurut teori ini faktor sosial ekonomi seseorang sangat memengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi menjadi tiga bagian berdasarkan umur. Yang pertama yaitu seseorang berumur nol hingga berusia tertentu di mana orang ini dapat menghasilkan pendapatan sendiri, maka ia mengalami *dissaving* (mengonsumsi tapi tidak mendapatkan penghasilan sendiri yang lebih besar dari pengeluaran konsumsinya). Yang kedua, yaitu mengalami persaingan, dan yang terakhir yaitu seseorang pada usia tua di mana ia tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri dan mengalami *dissaving* lagi.

c Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif (Relative Income Hypothesis),

Teori ini dikemukakan oleh James Duesenberry, yang menggunakan dua asumsi yaitu: selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. Artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang disekitarnya (tetangga). Sedangkan, pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Duesenberry menyatakan bahwa teori konsumsi atas dasar penghasilan absolute sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes yang tidak mempertimbangkan aspek psikologi seseorang dalam berkonsumsi. Duesenberry menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh posisi atau kedudukan di masyarakat sekitarnya.

d Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Permanent Income Hypothesis),

Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Friedman. Teori ini mengatakan bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari upah dan gaji. Sedangkan, pendapatan sementara merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, nilainya dapat positif jika nasibnya baik dan dapat negatif jika bernasib buruk.

Adapun menurut Galbraith (1962) satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. Negara sedang berkembang tidak harus demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang dan jasa yang berada dalam jangkauan masyarakat tertentu dan perhatian utama harus ditekankan pada penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi secara

berdayaguna dan berlimpah karena semua itu merupakan keperluan paling mendasar dan untuk dikonsumsi rumah tangga.

Hal-hal yang dapat menentukan besarnya pengeluaran konsumsi. Dalam hal ini yang dimaksud pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor yang dominan memengaruhi besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga itu sendiri.

Rumah tangga menerima pendapatan dari hasil tenaga kerja dan modal yang mereka miliki, kemudian membayar pajak kepada pemerintah lalu memutuskan berapa banyak dari pendapatan setelah pajak yang digunakan untuk konsumsi dan berapa untuk ditabung.

Menurut Boediono (1998), kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok yakni:

1. Menerima penghasilan dari para produsen dari “penjualan” tenaga kerja mereka (upah), deviden, dan dari menyewakan tanah hak milik mereka;
2. Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka;
3. Membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang (sebagai konsumen);
4. Menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan;
5. Membayar pajak kepada pemerintah;
6. Masuk dalam pasar uang karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi sehari-hari.

Tabel 3.3: Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Provinsi dan Daerah, September 2017 (%)

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
11. Aceh	56,55	43,45	66,19	33,81	62,35	37,65
12. Sumut	51,93	48,07	62,69	37,31	56,19	43,81
13. Sumbar	51,14	48,86	59,39	40,61	55,25	44,75
14. Riau	50,89	49,11	54,88	45,12	53,05	46,95
15. Jambi	52,14	47,86	58,38	41,62	55,95	44,05
16. Sumsel	48,17	51,83	55,71	44,29	52,27	47,73
17. Bengkulu	43,53	56,47	55,81	44,19	50,96	49,04
18. Lampung	51,22	48,78	58,30	41,70	55,73	44,27
19. Babel	50,76	49,24	54,43	45,57	52,51	47,79
21. Kepri	49,36	50,64	55,05	44,95	49,89	50,11
31. DKI Jakarta	40,19	59,81	-	-	40,19	59,81
32. Jabar	48,39	51,61	59,80	40,20	50,65	49,35
33. Jateng	48,32	51,68	53,77	46,23	50,64	49,36
34. DIY	39,32	60,68	53,42	46,58	41,79	58,21
35. Jatim	46,74	53,26	59,62	40,38	51,22	48,78
36. Banten	44,98	55,02	60,41	39,59	47,87	52,13
51. Bali	38,99	61,01	48,90	51,10	41,48	58,52
52. NTB	53,81	46,19	59,74	40,26	56,57	43,43
53. NTT	47,03	52,97	64,84	35,16	58,54	41,46
61. Kalbar	49,42	50,58	58,63	41,37	54,81	45,19
62. Kalteng	48,84	51,16	56,65	43,35	55,32	46,68
63. Kalsel	46,20	53,80	57,84	42,16	51,19	48,81
64. Kaltim	43,49	56,51	54,15	45,85	46,26	53,47
65. Kaltara	48,44	51,56	47,49	52,51	48,12	51,88
71. Sulut	48,84	51,16	54,22	45,78	50,97	49,03
72. Sulteng	42,59	57,41	56,43	43,57	51,58	48,42
73. Sulsel	41,40	58,60	55,60	44,40	47,39	52,61
74. Sultengg	44,22	55,78	52,11	47,89	48,41	51,59
75. Gorontalo	43,16	56,84	52,59	47,41	48,02	51,98
76. Sulbar	55,16	44,84	61,44	38,56	59,47	40,53
81. Maluku	50,81	49,19	56,69	43,31	53,62	46,38
82. Maluku Utara	46,67	53,33	56,01	43,99	52,50	47,80
91. Papua Barat	47,85	52,15	59,35	40,65	53,40	46,60
94. Papua	49,03	50,97	61,64	38,36	56,69	43,31
Indonesia	46,72	53,28	57,97	42,03	50,62	49,38

Sumber: SUSENAS, September 2017

Secara garis besar, pengeluaran penduduk per kapita Indonesia pada September 2017 saja, bisa dikatakan masih dominan kepada pengeluaran dalam jenis makanan (50,62%), serta non-makanan (49,38%) pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, jika ditelaah pada lingkup perkotaan, kebutuhan makanan yang dikeluarkan oleh penduduk justru dibawah jenis pengeluaran bukan makanan, yakni 46,72% berbanding dengan 53,28%. Ini membuktikan bahwa pada era

digital saat ini, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsinya terhadap hal-hal yang lebih kepada kebutuhan sekunder dan primer, seperti: pulsa, internet, hand phone, motor, mobil, dan sebagainya. Selain itu, data tersebut juga menggambarkan perkotaan sebagai wilayah heterogen (pengguna) tidak berbasis pada sektor pertanian, ataupun sektor-sektor lain yang bersifat primer. Lahan perkotaan lebih diperuntukkan pada pemukiman penduduk, gedung-gedung mewah, perkantoran, dan area lainnya yang tidak berorientasi untuk menanam tanaman maupun beternak hewan.

Apa yang disajikan dari Tabel 3.3, telah memberi cerminan jika perbedaan antara kedua area jelas sangat berbeda. Lain halnya terhadap wilayah pedesaan, di mana penduduknya lebih mengutamakan keperluan hidupnya untuk bahan makanan sebesar 57,97%, sisanya adalah jenis bukan makanan yakni 42,03%. Karakteristik wilayah pedesaan yang dikenal sebagai area penghasil (homogen) sumber daya alam menjadikan pola ekonomi masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan makanan, dibanding kebutuhan yang dianggap mewah, sehingga masyarakat desa pada umumnya mempunyai tingkat kecukupan gizi layak, sehat jasmani, panjang umur, serta lingkungan yang baik meskipun terkadang fasilitas pendidikan dan infrastruktur tidak selengkap di perkotaan.

Konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat, mengingat porsinya yang besar tersebut, maka konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap stabilitas perekonomian. Keberagaman inilah yang menjadikan Aceh sebagai Provinsi di Indonesia dengan tingkat konsumsi makanan tertinggi berbanding kebutuhan bukan makanan (56,55% : 43,45%), sementara pada kategori yang sama yakni wilayah perkotaan, pola kebutuhan penduduk Provinsi Bali yang mengutamakan kebutuhan makanan sebanyak 38,99%, sisanya 61,01% lebih kepada bukan makanan. Bagi wilayah perkotaan, penduduk di Provinsi Sumatera Utara masih terpola pada kebutuhan makanan (62,69%), ketimbang bukan makanan (37,31%). Menarik jika melihat perkembangan terakhir, Kalimantan Utara adalah Provinsi termuda (ke-34) di Indonesia, justru aliran pengeluaran penduduknya condong terhadap kebutuhan bukan makanan (52,51%) berbanding pengeluaran

makanan (47,49%). Kesimpulan yang didapat adalah jika kedua wilayah (perkotaan dan pedesaan) digabungkan, maka struktur pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh tetap konsisten pada jenis makanan yaitu 62,35%, sementara untuk non makanan sekitar 37,65%. Disatu sisi, kali ini terdapat Provinsi DKI Jakarta yang dominan penduduknya cenderung mengkonsumsi bukan makanan (59,81%) dari pada mendistribusikan pendapatannya untuk jenis makanan (40,19%).

D. Model Baru Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas pembangunan manusia tercermin dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, maupun pola hidup penduduknya. Apabila ketiga komponen tersebut selaras, maka seseorang akan berpeluang untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak, termasuk pemenuhan konsumsi melalui perbaikan gizi yang baik. Jika tidak, masyarakat disuatu wilayah tidak dapat mengambil kesempatan kerja dan bersaing, sehingga terjadi pengangguran dan kemiskinan, sehingga menyebabkan kelaparan dan dalam hal ini Negara punya beban besar untuk menganggulangi masalah-masalah sosial, ekonomi, serta sebagainya.

Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporannya, Global Human Development Report memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (Human Development)" sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia, dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau keterampilan mereka.

Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (1995), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia berikut:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan pada aspek ekonomi semata;
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia secara optimal;
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam Human Development Report (1995), yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas, maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. **Produktivitas (productivity)**. Penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. **Pemerataan (equity)**. Penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut, harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari

- kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. **Kesinambungan (sustainability)**. Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
 4. **Pemberdayaan (empowerment)**. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk atau arah kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat proses pembangunan.

Jika ditelaah lebih dalam, konsepsi pembangunan manusia sesungguhnya memiliki dimensi yang begitu luas. Di mana dimensi tersebut, hampir mencakup seluruh elemen ataupun aspek kehidupan manusia itu sendiri. Mulai dari kebebasan mengungkapkan pendapat, kesetaraan gender, lapangan perkerjaan, gizi anak, kesempatan mengenyam pendidikan, sampai pada hal kemampuan berliterasi. Sedangkan, konsepsi dalam indeks pembangunan manusia memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Di mana indeks ini hanya dapat mengukur sebagian saja dari keadaan manusia ataupun sebagian kecil dari aspek kehidupan manusia. Indeks pembangunan manusia, tidak dapat digunakan untuk mengukur kebahagiaan manusia dengan angka.

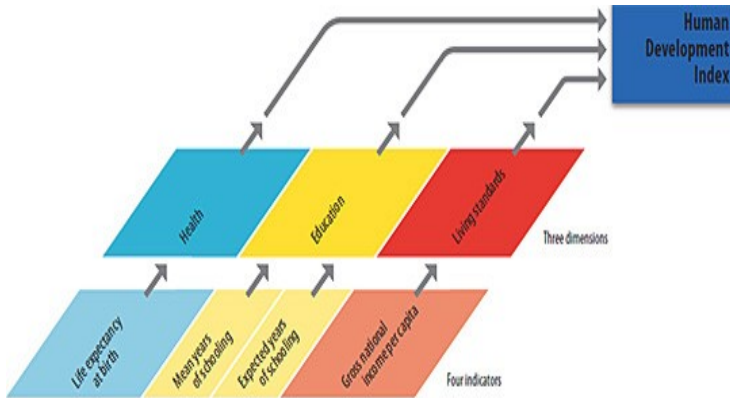
Oleh sebab itu, perhatian mengenai konsepsi pembangunan manusia lebih menitikberatkan pada indeksnya. Hal ini berarti setiap kebijakan pembangunan manusia lebih mendahulukan manusia, dengan menjadikan manusia sebagai tujuan utama dalam pembangunan dan bukan sebagai sarana. Kesimpulannya, setiap pengambilan kebijakan diharuskan memberikan keluasan terhadap pilihan yang tersedia bagi rakyat dan kesemuanya dilaksanakan secara *sustainable* dan *equal*.

Sebagaimana indikator tunggal dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan suatu wilayah, IPM tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia. Meskipun demikian, IPM mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai berdasarkan cerminan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Kemampuan dasar tersebut, meliputi: usia panjang dan

sehat yang diukur dari angka harapan hidup, berkecakupan dan berprestasi yang diukur dari angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah, dan akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup yang diukur melalui pengeluaran konsumsi. Oleh sebab itu, untuk menentukan indikator yang memengaruhi perkembangan IPM harus dilakukankajian dan analisis yang berkorelasi ataupun memengaruhi ketiga komponen tersebut melalui pendekatan logis.

Berdasarkan Gambar 3.3, IPM mengandung 3 (tiga) dimensi pengukuran yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dimensi kesehatan diukur melalui indikator usia harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, dan dimensi standar hidup diukur melalui pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Pada awal masa penyusunan IPM oleh UNDP (yang secara resmi digunakan pada tahun 1990) banyak kritik yang bermunculan pada aspek pengukurannya. Kritik yang cukup menonjol adalah kesederhanaan ukuran “pembangunan” (development) yang hanya terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan pendapatan sehingga seakan-akan titik tekan “pembangunan” kembali lagi pada aspek pertumbuhan ekonomi (Klugman et al., 2011). Penggunaan IPM selama dua dekade terakhir menunjukkan adanya pengakuan dari para penganut hegemoni growth-centric thinking sebagaimana diulas oleh Jon Gertner dalam “The Rise and Fall of the G.D.P.” (Gertner, 2012). Perkembangan selanjutnya muncul beragam indeks komposit yang digunakan untuk melengkapi ukuran pembangunan misalnya: GDI (Gender-related Development Index), GEM (Gender Empowerment Measure), HPI (Human Poverty Index), dan sebagainya. Penggunaan akan makin bertambah jika digunakan jenis indeks lain misalnya: EPI (Environmental Performance Index) yang bisa dikaitkan dengan penggunaan bahan bakar fosil, polusi, emisi CO₂, ancaman perubahan iklim, dan data terkait di sektor utama/penunjang.



Gambar 3.3: Kerangka Penyusunan IPM

Sumber: UNDP, 2012

IPM alat ukur yang digunakan untuk melihat pencapaian suatu wilayah, negara, maupun dunia dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, diantaranya: usia hidup yang diukur dari angka harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup yang diukur melalui pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (purchasing power parity).

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

di mana,

X_1 = lamanya hidup

X_2 = tingkat pendidikan

X_3 = tingkat pendapatan

Indeks X_1 , Indeks X_2 , Indeks X_3 , dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = (X_{(i,j)} - X_{(i \text{ min})}) / (X_{(i \text{ max})} - X_{(i \text{ min})})$$

di mana $X_{(i,j)}$ = indikator ke i dari daerah j

($i = 1,2,3$ $j = 1,2,\dots,n$)

$X_{(i \text{ min})}$ = nilai minimum dari X_1

$X_{(i \text{ max})}$ = nilai maksimum dari X_1

Adapun nilai maksimum dan nilai minimum dari setiap komponen, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4: Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka harapan hidup	85	25	Standar UNDP
Angka melek huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata lama sekolah	100	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrollment ratio</i>
Daya beli	737,72	360	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

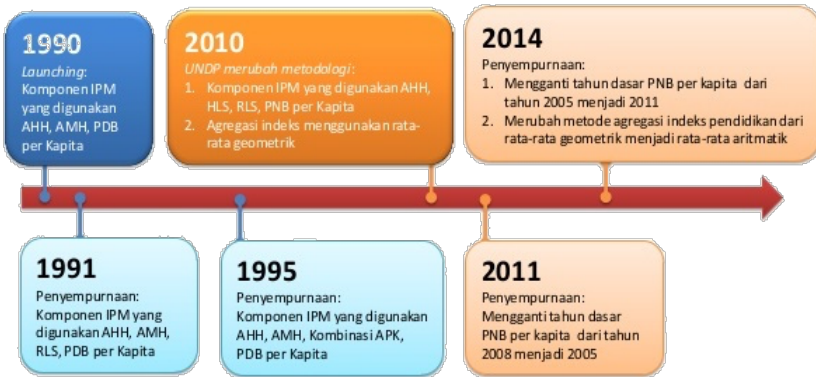
Sumber: Data diolah UNDP, 1990

Suparman (1986) menjelaskan terdapat empat kelompok kategori pencapaian daerah, yaitu:

1. Daerah dengan IPM rendah yaitu $IPM < 50$;
2. Daerah dengan IPM menengah bawah yaitu $50 < IPM < 66$;
3. Daerah dengan IPM menengah atas yaitu $66 < IPM < 80$;
4. Daerah dengan IPM tinggi $IPM > 80$.

Tulisan kali ini akan membahas mengenai IPM dan perubahan metode perhitungannya. Pada tahun 1990, UNDP merilis IPM dalam Human Development Report (HDR). Indeks ini kemudian diadopsi oleh banyak negara untuk mengukur kualitas manusia sebagai dampak dari proses pembangunan. Setelah berjalan dua dekade, UNDP menyempurnakan metode IPM (Metode Baru) pada tahun 2010.

Adapun perbedaan kedua metode perhitungan tersebut adalah:



Gambar 3.4: Perbandingan Metode Perhitungan IPM Lama dan Baru
Sumber: Yuwono, 2015

Beberapa keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode terbaru adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dan PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik. Dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena penting.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, variabel-variabel yang terdapat didalam IPM metode baru dijelaskan berikut:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - e_0). Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan

- suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.
2. Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS). Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
 3. Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS). Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
 4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity - PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level Provinsi hingga level Kab/Kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

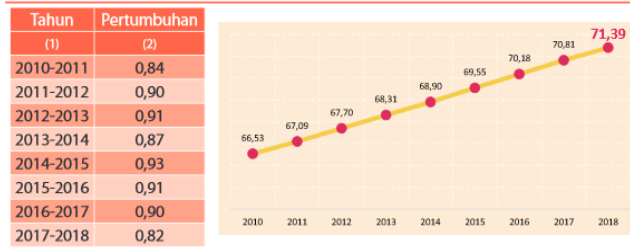
Tambunan (2001) menambahkan bahwa IPM dapat juga digunakan sebagai indikator sosial untuk mengkalkulasi tingkat kesenkangan pembangunan ditataran regional. Dapat dikatakan, semakin tinggi

tingkat IPM suatu daerah, maka semakin baik pembangunan di daerah tersebut.

Secara filosofis, pembangunan manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan yang disesuaikan dengan komponen indeks komposit. Kendati demikian, tidak semua komponen tersebut dapat didapat melalui fasilitas ataupun bantuan dari pemerintah saja, melainkan didapat dari peran serta masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan daya beli maupun komponen IPM.

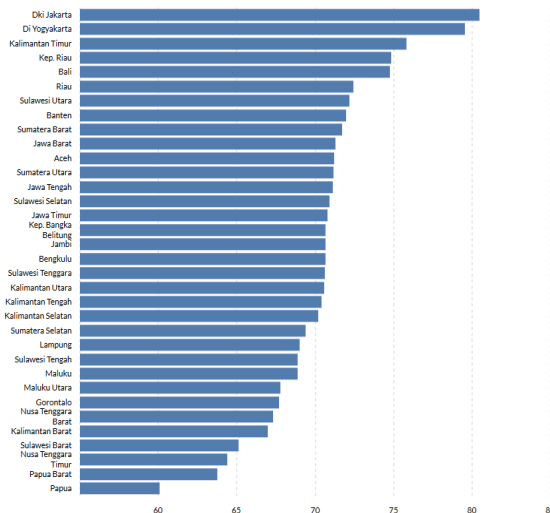
Waluyo (2016) menjelaskan bahwa daya beli masyarakat berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Diduga, hal ini memiliki peranan dominan dalam peningkatan kualitas hidup manusia yang diukur melalui IPM. Sebab itu, ketika pendapatan suatu masyarakat timpang, maka akan berdampak pada kualitas hidup yang timpang juga. Sehingga, jika dihitung secara kumulatif, akan menyebabkan kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah berkurang. Kesenjangan pendapatan akan menghambat pencapaian IPM.

Psacharopoulos (1996) menyatakan pengeluaran oleh pemerintah, maupun rumah tangga diakui sebagai investasi yang dapat membentuk *human capital*. Ditambahkan oleh Babic (2005) tingkatan *human capital* merupakan faktor yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama jika dilihat dari tingkat pendidikan. Dengan begitu, investasi pada sektor pendidikan dapat menjadi faktor percepatan kesejahteraan bagi individu maupun kesejahteraan negara. Sehingga, *human capital* merupakan kunci yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi nantinya akan memberikan kebermanfaatan non ekonomi, misalnya: kesehatan, sebagai orang tua dan warga negara yang lebih baik.



Gambar 3.5: Tren dan Pertumbuhan IPM, 2010-2018
Sumber: BPS, 2019

Laporan resmi BPS pada 2019, tercatat bahwa IPM Indonesia terus meningkat signifikan. Raihan positif ini ditandai sejak ditahun 2010 pada poin 66,53 dan tahun 2018 lalu adalah 71,39. Perhitungan IPM tersebut telah menggunakan model terbaru, di mana terdapat 4 indikator, tepatnya pada bidang pendidikan telah menjadi 2 item (RLS dan HLS). Sejalan dengan hal tersebut, puncak tren pertumbuhan tertinggi tahun 2014-2015, di mana mencapai puncak yakni 0,93% atau dari 68,90 ke 69,55 (lihat Gambar 3.5).



Gambar 3.6: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2018
Sumber: BPS, 2019

IPM di Indonesia tahun 2018 mencapai 71,39 atau tumbuh sebesar 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM dengan status tinggi (70-80) adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,06 atau meningkat 0,41 poin dibandingkan tahun 2017. Sementara, IPM dengan status sedang (60-69) yakni Sumatera Selatan sebesar 69,39 dan Provinsi dengan status IPM rendah (0-59) adalah Papua sebesar 60,06. Seperti yang tampak pada Gambar 3.6, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan *standard hidup layak* (*decent standard of living*).

Berdasarkan statistik WHO tahun 2011, pengklasifikasian penyebab mortalitas dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah dengan membedakannya menurut penyebab: penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kecelakaan. Untuk membatasi cakupan objek, indikator yang dipilih yaitu mortalitas yang disebabkan oleh penyakit menular dan yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Pemilihan indikator ini untuk memberikan gambaran epidemiologi penyakit dan hubungannya dengan IPM.

Peningkatan IPM secara langsung ataupun tidak akan menurunkan prevalensi malnutrisi. Peningkatan pendapatan secara nasional pada umumnya, akan tercermin pada peningkatan pendapatan keluarga dan meningkatnya daya beli (termasuk kemampuan keluarga untuk mengakses sumber pangan yang tersedia). Peningkatan IPM secara statistik terbukti berhubungan dengan persentase overweight pada balita, prevalensi overweight dan obesitas di negara maju hampir dua kali lipat jika dibandingkan di negara berkembang akan tetapi pengamatan selama hampir 2 dekade terakhir menunjukkan penambahan persentase overweight dan obesitas lebih besar terjadi di negara berkembang dengan populasi berisiko terdampak, satu diantaranya adalah anak usia prasekolah. Secara absolut, negara di benua Asia adalah penyumbang terbesar prevalensi overweight dan obesitas pada anak usia pra-sekolah (de Onis et al., 2010).

E. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar, di mana setiap orang berhak memperoleh pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu, untuk hidup sehat dan produktif. Pemenuhan hak atas pangan bagi setiap orang adalah upaya penegakan pilar utama hak azasi manusia yang harus diprioritaskan. Pengabaian hak atas pangan merupakan penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan berakibat kepada munculnya kelaparan yang merupakan bentuk kemiskinan paling buruk. Oleh sebab itu, diperlukan ketahanan pangan yang pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan penanggulangan masalah kemiskinan.

Disisi lain, terdapat konsep ketahanan pangan yang disepakati secara internasional dalam World Conference on Human Right (1993) dan World Food Summit (1996) yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap penduduk baik dalam jumlah maupun mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat. Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan juga menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan ditentukan secara bersama antara ketersediaan pangan dan akses penduduk atau rumah tangga untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, dengan sub-sistem utama adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil sinergi dari interaksi ketiga sub-sistem tersebut. Dalam rangka penghitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), terlebih dahulu dihitung indeks masing-masing dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan baik yang bersumber dari hasil produksi, cadangan maupun impor. Sayangnya, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan kecepatan pertumbuhan impor produk pertanian jauh lebih cepat daripada ekspor

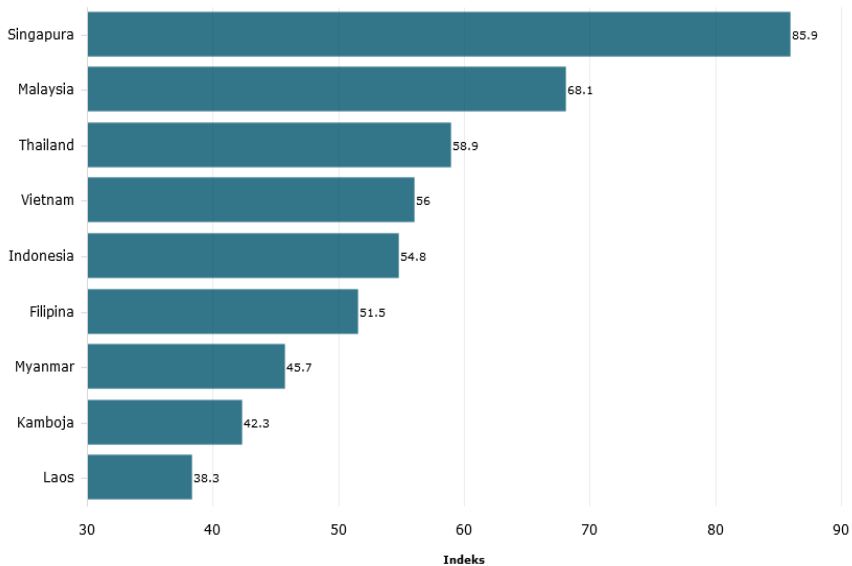
produk serupa. Ketergantungan pemenuhan penyediaan pangan pada impor merupakan indikasi negatif bagi pembangunan

Kelangsungan penyediaan pangan dari dalam negeri dapat ditempuh dengan meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan aneka ragam pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, serta mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok, dengan harga yang wajar dan terjangkau (Suryana, 2013). Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka kondisi ketahanan pangan akan terwujud.

Dimensi ketersediaan pangan merupakan kondisi di mana bahan pangan tersedia, baik bersumber dari produksi sendiri, cadangan maupun impor. Dengan memacu produksi pangan sendiri dan dengan variasi pemanfaatan produk pangan, dampaknya adalah dapat mengurangi ketergantungan impor dari daerah lain ataupun dari luar negeri. Ketergantungan pangan dari luar atau impor merupakan suatu hal yang negatif bagi pembangunan. Presiden pertama Republik Indonesia (Ir. Sukarno) pernah menyatakan bahwa pangan merupakan soal hidup matinya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah malapetaka. Dengan demikian, pemenuhan pangan rakyat menjadi hal yang paling mendasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita perjuangan bangsa yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum, di mana salah satu bentuk nyatanya adalah ketersediaan pangan masyarakat, di samping pakaian dan tempat tinggal.

Aspek yang perlu mendapatkan perhatian lainnya adalah akses terhadap pangan. Akses pangan secara definisi adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik jumlah maupun keragamannya. Oleh karena itu, aksesibilitas pangan sangat erat berhubungan dengan strategi kebijakan kecukupan pangan. Selain itu, tingkat aksesibilitas pangan juga

merupakan salah satu faktor yang mengintai krisis pangan, di mana krisis tidak hanya terlihat dari minimnya jumlah produk atau berkurangnya pangan di lapangan, namun lebih didasarkan atas ketidakmampuan masyarakat untuk membeli dan memperoleh pangan yang berkualitas (Soemarno, 2010).

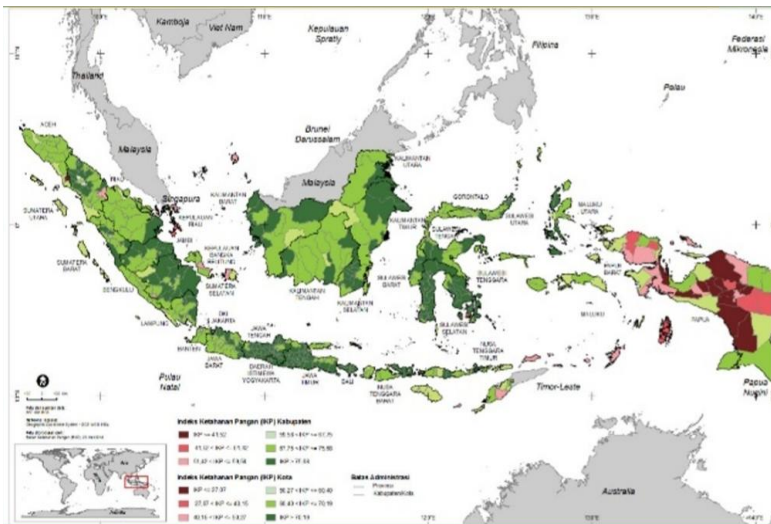


Gambar 3.7: Indeks Ketahanan Pangan Negara-Negara Asia Tenggara, 2018

Sumber: The Economist Intelligence Unit, 2018

Skor ketahanan pangan Indonesia kalah dibanding dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia Bahkan ketahanan pangan nasional di bawah Vietnam. Skor indeks ketahanan pangan global (Global Food Security Index/GSFI) 2018 naik 1,6 poin ke level 54,8. Meskipun skor ketahanan indeks nasional mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, posisi Indonesia tetap berada di urutan ke-5 dari sembilan negara di kawasan Asia Tenggara seperti terlihat pada Gambar 3.7. Singapura masih memimpin ketahanan indeks di ASEAN maupun ditingkat global dengan skor 85,9. Sementara di tingkat global Indonesia berada di posisi ke-65 di bawah Maroko dan Ekuador.

Berdasarkan aspek keterjangkauan, ketahanan pangan Indonesia memperoleh skor 55,2 dan berada diperingkat ke-5 di kawasan Asia Tenggara. Lalu skor dari aspek ketersediaan sebesar 58,2 (peringkat ke-3). Kemudian dari aspek kualitas dan keamanan, Indonesia hanya memperoleh skor 34,5 (peringkat ke-8) sementara dari aspek ketahanan dan sumber daya alam memperoleh skor 43,9 (peringkat ke-9).



Gambar 3.8: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia, 2018
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2019

Sebanyak 117 Kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami peningkatan ketahanan pangan yang cukup signifikan. Status peningkatan ini terlihat dari data dan informasi yang disajikan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* tahun 2018. Dari total tersebut, 75 Kabupaten diantaranya merupakan wilayah rentan pangan yang kini statusnya naik 19%, sedangkan 102 Kabupaten lainnya merupakan wilayah tahan pangan yang kini naik statusnya menjadi 26%.

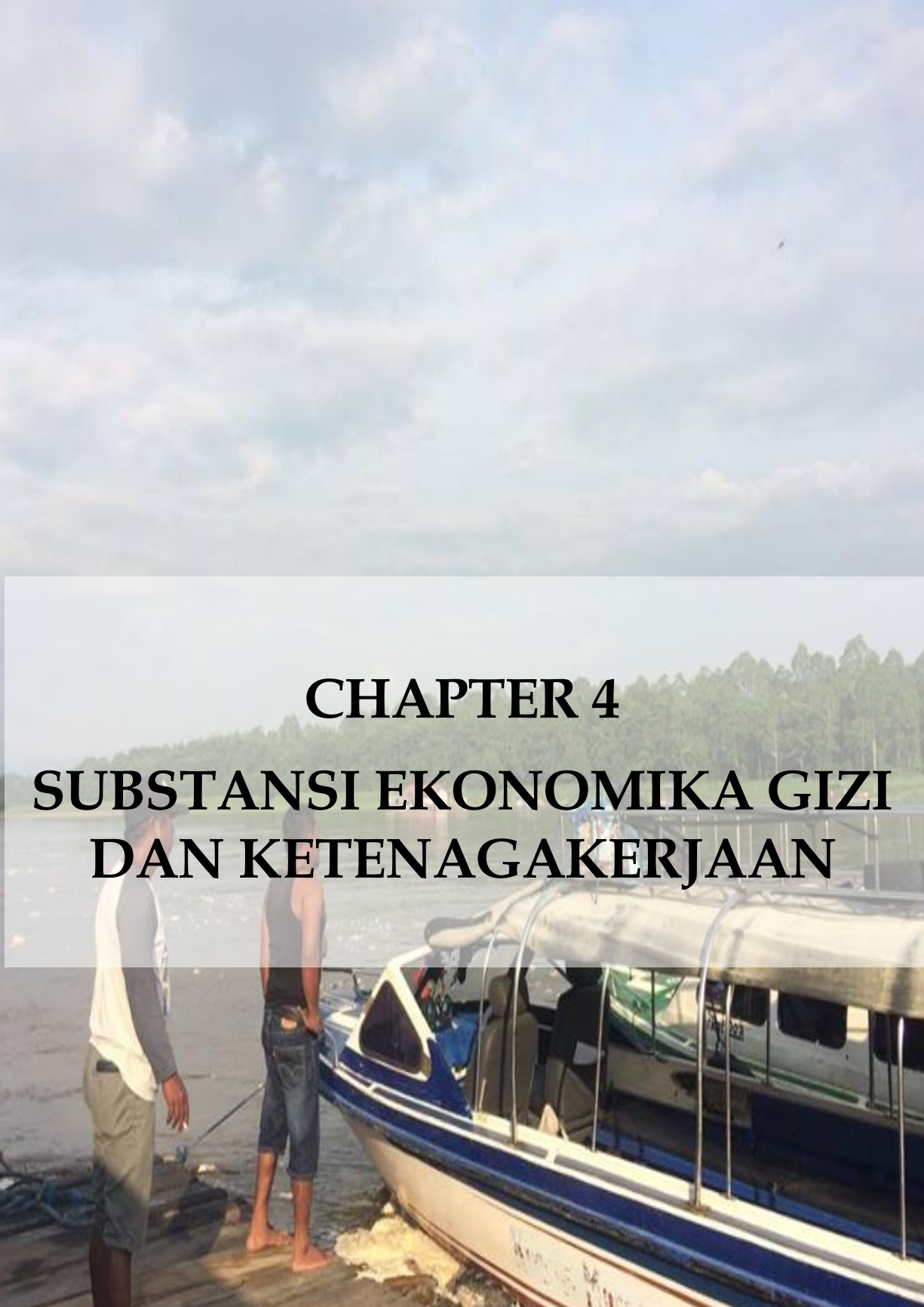
Status ketahanan pangan ini dikelompokkan menjadi 6 bagian. Masing-masing kelompok adalah warna merah untuk menandakan daerah yang rentan rawan pangan, sementara 3 kelompok lainnya berwarna hijau untuk daerah yang tahan pangan sesuai dengan tingkatnya. BKP

Kementeria Pertanian memanfaatkan FSVA ini sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Sekedar diketahui, FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. BKP sendiri telah menerbitkan peta tersebut sejak tahun 2005 dengan tujuan menyediakan informasi seputar situasi ketahanan pangan secara terintegrasi sekaligus menjadi alat kesiapsiagaan terhadap situasi kerentanan rawan pangan. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Sistem FSVA dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Caranya, bisa dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan. Peta FSVA juga sudah digunakan sebagai rujukan penanganan program oleh Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia. FSVA 2018 merupakan hasil pemutakhiran dari FSVA 2015.

Dengan wilayah yang sangat luas, dengan tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda antar wilayah di Negara Indonesia, ditambah lagi dengan bervariasinya kondisi pembangunan pertanian antar wilayah, maka sangat dimungkinkan terjadinya disparitas ketahanan pangan antar wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, semua daerah mempunyai semangat yang sama dalam hal membangun ketahanan pangan di wilayahnya dengasegenap potensi yang dimilikinya, di mana pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta pusat juga sangat mendukung kearah tersebut.



CHAPTER 4
SUBSTANSI EKONOMIKA GIZI
DAN KETENAGAKERJAAN

A. Konsep Status Gizi dalam Perencanaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 (Bab I, pasal 1, ayat 2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 - 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Calon tenaga kerja yang tidak memiliki standar gizi, dipastikan akan susah untuk memasuki lapangan pekerjaan dan bersaing untuk mengisi kesempatan kerja tersebut. Fisik dan pola pikir seseorang sangat ditentukan oleh cakupan gizi yang diperoleh, baik itu yang berasal dari sumber makanan, vitamin, dan pemenuhan lainnya.

Untuk membandingkan kualitas suatu produk diperlukan sebuah ukuran yang sama. Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah delapan dimensi kualitas. Garvin (1984) membagi aspek-aspek kualitas produk dalam delapan kategori (dimensi) yaitu: *performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics, dan perceived quality*. Masing-masing aspek dapat dijabarkan sesuai dengan produk yang ditinjau.

Pengertian 8 (delapan) dimensi ini masih sangat luas meskipun sudah dibatasi dalam lingkup lembaga pendidikan tinggi. Delapan dimensi kualitas akan memiliki penjabaran yang berbeda tergantung dari aspek yang ditinjau, misalnya kualitas tenaga pengajar, administrasi,

perpustakaan, ataupun kualitas lembaga. Bahasan delapan dimensi kualitas di bawah ini merujuk pada kualitas lulusan.

Performansi (performance) adalah ukuran kemampuan dasar lulusan sesuai dengan bidang studinya. Sebagai contoh, jika merujuk pada kriteria menurut *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET) yang harus dimiliki oleh seorang engineer, kemampuan merancang sebuah sistem, komponen, atau proses sesuai dengan kebutuhan tertentu termasuk dalam dimensi performansi (ABET, 1997).

Keahlian (features) adalah ukuran kemampuan personal/tambahan yang dimiliki oleh lulusan suatu perguruan tinggi baik pada bidang keilmuan yang bersangkutan maupun di luar bidang keilmuannya, misalnya keahlian dalam bidang scheduling, keahlian dalam bidang pemodelan, penggunaan program aplikasi. Keandalan (reliability) diartikan sebagai ukuran kemampuan lulusan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya secara konsisten. Sementara, konformansi (conformance) adalah ukuran kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Kesesuaian lebih ditekankan pada kelompok ilmu dibandingkan dengan kelompok bidang studi. Sebagai contoh seorang sarjana teknik industri dapat bekerja dalam bidang apa saja sejauh dia menggunakan pendekatan teknik industri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Lama kerja (istilah yang diusulkan untuk durability) yaitu ukuran kemampuan lulusan untuk bekerja dalam suatu bidang sebelum keahlian yang dimilikinya tidak mampu mengatasi tuntutan pekerjaannya. Lamanya seseorang bertahan dalam satu bidang tergantung dari bekal keilmuan yang menjamin bahwa lulusan dapat bekerja dengan baik pada masa awal kariernya dan memiliki kemampuan mengikuti pendidikan lanjutan.

Mampu ajar (istilah yang diusulkan untuk serviceability) merupakan ukuran kemampuan lulusan untuk belajar dan mengembangkan diri seumur hidupnya. Estetik (aesthetics) mengacu hal-hal di luar kemampuan akademis seperti tingkah laku, penampilan, serta kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Pada dasarnya aspek ini menampilkan sisi manusiawi lulusan sebagai manusia yang utuh. Jika

dibandingkan dengan kriteria menurut ABET (1997), pemahaman kewajiban dan etika profesi termasuk dalam aspek estetik.

Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*) merupakan ukuran kesesuaian antara apa yang dipersepsikan oleh konsumen (pasar tenaga kerja) dengan kualitas lulusan yang diterimanya. Kualitas yang dipersepsikan dapat diartikan sebagai *brand image* dari sebuah lembaga pendidikan tinggi.

Untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan, dibutuhkan sebuah perencanaan yang terukur oleh Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Keputusan Menteri No. 227/MENAKER/2003, telah membuat klasifikasi kompetensi profesi pada masing-masing bidang profesi yang disebut dengan Standar Kompetensi Kerja Indonesia. Yakni berisi kualifikasi kompetensi yang dituntut di dunia kerja pada masing-masing bidang yang disesuaikan dengan pendidikan formal yang dimiliki calon tenaga kerja. Tetapi belum semua bidang profesi memilikinya. Dengan mengacu dari standar kompetensi tersebut pendidikan menengah (SMK) telah memanfaatkan dengan menyusun kurikulum vocational dan technology dengan berbasis kompetensi sesuai dengan standar dunia kerja (*Industry Based Curriculum/IBS*) sedangkan strategi pembelajaran yang dipergunakan adalah *Competency Based Training (CBT)*.

Pelatihan kerja yang diselenggarakan di tempat kerja, dapat diselenggarakan dengan pemagangan. Pelaksanaan pemagangan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER 21/MEN/VIII/2008 tentang Pemagangan. Sementara pemagangan ke luar negeri, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-08/MEN/V/2008 tentang Tata cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menemukan, dari hasil pemetaan pada akhir tahun 2011, bahwa sebagian besar dari 252 unit balai latihan kerja (BLK) milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kondisi infrastruktur dan fasilitasnya ternyata kurang memadai.

Disebutkan, dari 252 buah BLK milik pemda tersebut, hanya 10% saja yang kondisi infrastrukturnya dan fasilitasnya baik. Selebihnya, sebanyak 49% BLK milik pemda kondisinya (dalam kategori) sedang, sedangkan 41% kondisinya dikategorikan buruk. Kontribusi nyata sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat diklasifikasikan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks sebagai berikut:

1. Sektor swasta dapat memberikan sumbangan dan bersifat sukarela. Sumbangannya berupa dana dan peralatan kepada perguruan tinggi, termasuk di dalamnya beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa dan dosen untuk studi lanjut;
2. Sektor swasta dapat mensponsori dan membeli hasil-hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedua belah pihak, mengeluarkan dana untuk mendapatkan layanan pengujian produk, pendidikan, dan pelatihan dari perguruan tinggi. Berbagai kendala yang sering timbul di lapangan, dari kedua belah pihak masih belum menemukan kebersamaan/kesepakatan yang diharapkan;
3. Sektor swasta menyediakan kantor program sponsor yang menyelenggarakan aktivitas kontrak penelitian dan lainnya yang dilaksanakan oleh jurusan atau fakultas untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Pola ini sebenarnya ideal untuk membangun aktivitas yang prospektif dan prestisius di masa depan, tetapi masih belum dianggap penting atau tidak proaktif (hanya menunggu) maka pola ini masih harus diperjuangkan secara terpadu;
4. Sektor swasta dapat memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi dalam bidang perdagangan, aset, dan pertukaran pengetahuan. Programnya dapat berupa alih teknologi dan pemberian royalti.
5. Sektor swasta secara aktif dapat menawarkan program kerjasama sejawat untuk melakukan penelitian bersama, perjanjian penelitian, konsorsium penelitian, pusat penelitian, laboratorium yang berbasis industri, dan penelitian kolektif dalam jangka panjang.

6. Sektor swasta dapat melakukan joint research ventures melalui pembentukan pusat penelitian bersama dan hasilnya didayagunakan baik oleh perguruan tinggi maupun pihak swasta, dan *joint research ventures* untuk mendirikan pusat penelitian dalam rangka mengembangkan berbagai macam temu.

B. Manfaat Ekonomi Gizi membentuk Pasar Tenaga Kerja

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa faktor ekonomi dan gizi merupakan input dalam membentuk pasar tenaga kerja. Keseimbangan antara peluang dan kesempatan untuk memperolehnya bergantung dari calon tenaga kerja itu sendiri. Kesiapan seseorang menghadapi persaingan ketat di era millennial ini, jika ditunjang dengan fisik yang sehat. Selain latar pendidikan yang memadai, cakupan gizi sehari-hari yang dikonsumsi menjadi peran utama jika ingin memenangkan persaingan untuk memperoleh penghasilan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bagi perusahaan-perusahaan (bergerak diberbagai bidang), menetapkan kesehatan jasmani sebagai prasyarat penunjang diawal.

Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan.

Tingkat pengangguran sebenarnya dapat menggambarkan 2 (dua) realita yang sangat berbeda, yakni:

1. Pasar tenaga kerja yang aktif tingginya tingkat separation (pekerja yang berhenti bekerja) dan hire (rekrutmen pekerja baru);

2. *Sclerotic* ditunjukkan oleh sedikitnya pekerja yang berhenti bekerja, sedikit pula rekrutmen pekerja, dan stagnannya pengangguran. Menurut Subekti (2007) terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami mekanisme pasar tenaga kerja, yaitu pendekatan neoklasik dan pendekatan keynesian. Kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan negatif, sedangkan kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan positif.

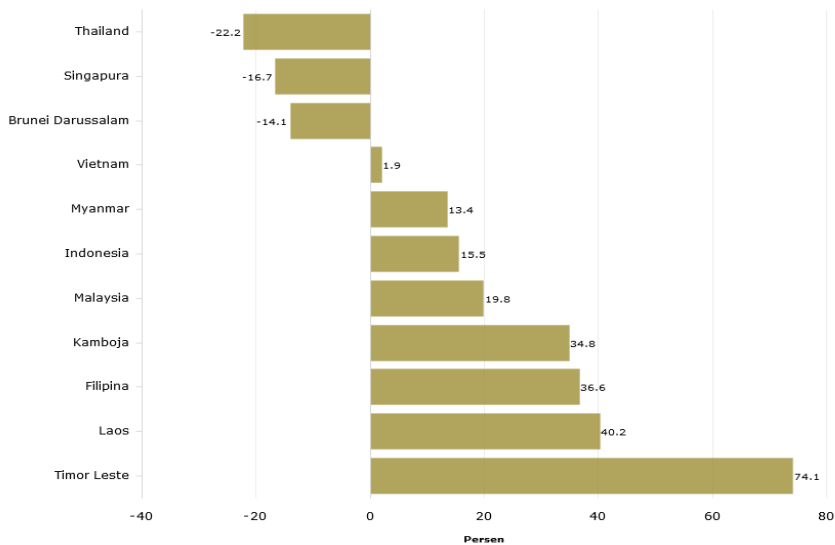
Perpotongan kurva permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja akan menentukan keseimbangan pasar tenaga kerja. Jika upah yang berlaku di pasar lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah yang berlaku pada kondisi keseimbangan maka akan menimbulkan terjadinya pengangguran tidak sukarela. Menurut kaum Neoklasik cara untuk menurunkan pengangguran tidak sukarela adalah dengan menurunkan upah yang berlaku di pasar, sedangkan menurut kaum Keynesian cara untuk menghapus pengangguran tidak sukarela adalah dengan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke atas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sulitnya upah untuk turun adalah: (1) keberadaan serikat pekerja; (2) penentuan upah minimum; dan (3) adanya program subsidi.

Di tingkat regional, jika upah yang berlaku di pasar lebih tinggi daripada upah keseimbangan pasar akan menyebabkan berbagai kemungkinan, yaitu turunnya upah riil dan bekerjanya efek pendapatan-pengeluaran.

Pada pendekatan ke-2 tersebut penyesuaian pasar tenaga kerja bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yakni:

1. Perusahaan menurunkan stok tenaga kerja dengan mempertahankan tingkat upah tetap;
2. Perusahaan akan menurunkan upah dengan tetap mempertahankan tingkat penggunaan tenaga kerja pada kondisi sekarang; dan
3. Perusahaan akan menurunkan upah dan penggunaan tenaga kerja sekaligus.

Penyesuaian upah dalam jangka pendek tergantung ke mana output tersebut akan dijual oleh perusahaan. Pada perusahaan yang produksinya hanya dijual ke pasar domestik maka perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan terkadang juga perusahaan akan menurunkan juga upah pekerja atau melakukan keduanya sekaligus. Bagi perusahaan yang output-nya sebagian besar diekspor maka penurunan upah regional hanya akan berpengaruh kecil terhadap *output* pasar secara keseluruhan. Bagi perusahaan ini, adanya penurunan upah berarti bahwa wilayah tersebut secara aktual menjadi lebih menarik untuk perluasan *output*. Dalam jangka panjang, terjadinya penurunan upah tenaga kerja di tingkat regional akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan stok modalnya. Secara regional hal ini akan menyebabkan pergeseran ke kanan kurva permintaan tenaga kerja. Dampak akhir dalam jangka panjang adanya peningkatan penggunaan kapital disuatu wilayah lokal, akan meningkatkan upah lokal dan tingkat penggunaan tenaga kerja di wilayah tersebut.



Gambar 4.1: Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja di Asia Tenggara, 2020-2050

Sumber: Asean Development Bank (ADB), November 2019

Sebagai contoh, beberapa negara di Asia Tenggara akan mengalami kontraksi pertumbuhan populasi penduduk usia kerja pada 2020-2050. Asian Development Bank (ADB) memprediksi negara-negara tersebut adalah Thailand (-22,2%), Singapura (-16,7%), dan Brunei Darussalam (-14,1%). Di Indonesia, jumlah penduduk usia kerja diperkirakan akan tumbuh sebesar 15,5%. Proyeksi pertumbuhan ini tidak jauh berbeda dengan Myanmar dan Malaysia, yakni sebesar 13,4% dan 19,8%. Menurut ADB, angka tersebut bisa dikatakan pertumbuhan yang berimbang.

Pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja paling besar akan terjadi di TimorLeste sebesar 74,1%. Kemudian Laos 40,2%, Filipina 36,6%, dan Kamboja 34,8% (lihat Gambar 17).

C. Peranan Gizi pada Permintaan Tenaga Kerja

Apabila seorang pengusaha meminta suatu faktor produksi, maka hal itu dilakukannya bukan untuk memperoleh kepuasan langsung yang diharapkannya dari faktor produksi tersebut. Pengusaha tersebut menginginkan faktor-faktor produksi, karena harapan akan hasil yang daripadanya, misalkan permintaan pengusaha akan tenaga kerja (Winardi, 2008). Untuk itu, dibuthkan faktor produksi seperti man power yang berkualitas (fisik, jasmani, manajemen yang handal, dan komponen lainnya), agar memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai target produksi barang maupun jasa yang ditetapkan sebelumnya.

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (utility) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi, pengusaha memperkerjakan seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, tergantung dari pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang

diproduksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu disebut *derived demand* (Simanjuntak, 2005).

Dalam proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari upah yang telah dilakukannya, yaitu berwujud upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah. Menurut Ananta (1993) bahwa permintaan tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat gaji.

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003).

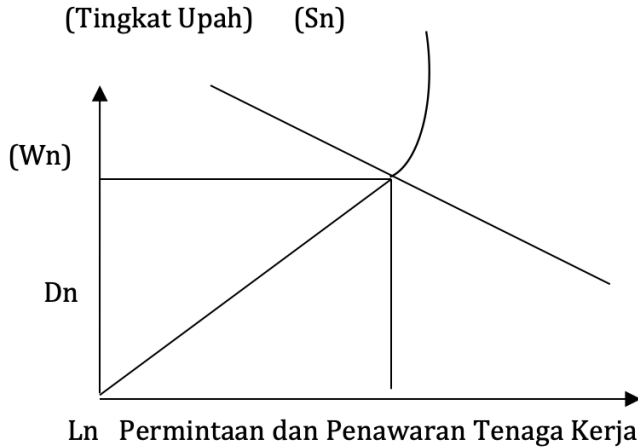
Beberapa faktor lainnya yang dapat memengaruhi tingkat permintaan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pasar. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Keadaan ini mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan;
2. Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung akan meningkatkan produksinya barangnya karena permintaan bertambah besar. Di samping itu permintaan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan produksi. Keadaan ini akan mengakibatkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke arah kanan karena pengaruh skala efek atau substitusi efek. Efek selanjutnya akan terjadi apabila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen

cenderung untuk menambah jumlah barang-barang modal (mesin) sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi, secara relatif penggunaan tenaga kerja berkurang. Hal ini akan mengakibatkan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Apabila seorang pengusaha meminta suatu faktor produksi maka hal itu dilakukan bukan untuk memperoleh kepuasan langsung yang diharapkannya dari faktor produksi tersebut;

Perusahaan dalam melakukan proses produksi disebabkan oleh satu alasan, yaitu karena adanya permintaan akan output yang dihasilkan. Jadi permintaan input muncul karena adanya permintaan akan output. Inilah sebabnya mengapa permintaan input tersebut oleh ahli ekonomi Alfred Marshall sebagai *derived demand* atau permintaan turunan. Permintaan akan output sendiri dianggap sebagai "permintaan asli" karena timbul langsung dari adanya kebutuhan manusia (Boediono, 2000).

Penawaran tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah perjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut (S_n). Demikian juga permintaan akan tenaga kerja dari suatu perusahaan merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah tertentu, adalah perjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut (D). Jumlah penawaran (S) dan permintaan (D) di daerah yang bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan jumlah penempatan untuk waktu-waktu berikutnya. S dan D dalam Gambar tersebut dapat dipandang sebagai penawaran dan permintaan untuk suatu negara.



Gambar 4.2: Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
Sumber: Simanjuntak, 2005

Penawaran tenaga kerja untuk negara dapat dipandang sebagai perjumlahan dari tiap-tiap daerah dalam negara itu atau perjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di negara tersebut. permintaan untuk suatu negara dapat dipandang sebagai jumlah permintaan dari tiap-tiap daerah atau dari seluruh perusahaan yang ada di negara tersebut. Perpotongan antara penawaran (S) dan permintaan (D) disebut titik ekuilibrium, menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja (L) dan tingkat upah yang berlaku (W) yang kemudian dipakai sebagai patokan baik oleh keluarga maupun oleh pengusaha di daerah yang bersangkutan. Adapun bentuk kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Dari teori perilaku produsen diketahui bahwa posisi keuntungan maksimum (posisi keseimbangan) produsen tercapai apabila memenuhi syarat yakni:

$$MR = MC$$

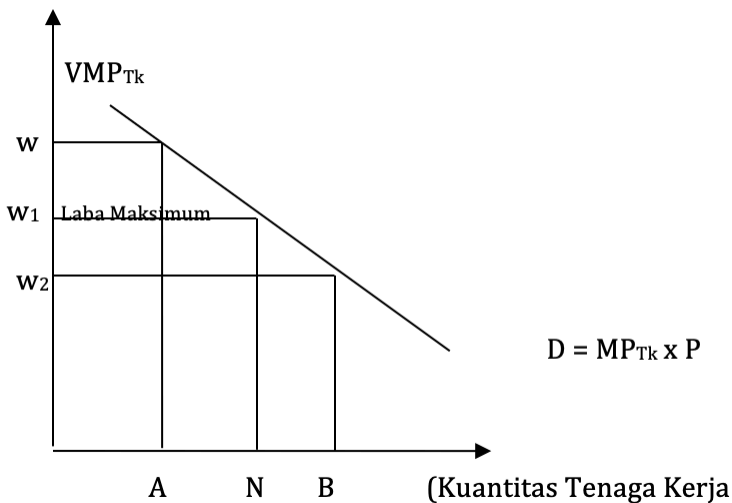
Dalam hal ini, MR merupakan nilai rupiah produksi marginal yang diperoleh dari mengalikan harga produk yang berlaku dengan produksi marginal. Sehingga dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\text{VMP} = P \cdot \text{MP}_{\text{TK}}$$

Jumlah nilai VMP menggambarkan tambahan pendapatan yang diterima oleh pengusaha bila menambah penggunaan tenaga kerja satu unit lagi. Bila perusahaan menggunakan garis wage rate sebagai dasar maka tambahan Bila perusahaan menggunakan garis wage rate sebagai dasar maka tambahan biaya yang harus dibayar perusahaan adalah sama dengan tingkat upah (W) berfungsi sebagai MC adalah W , sehingga posisi optimal adalah:

$$\text{VMP} = w$$

Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan memperkerjakan tenaga kerja hingga ON. Di titik N, pengusaha mencapai laba maksimum dan nilai $\text{MPTK} \times P = W$. Penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari pada ON, misalnya OB, maka akan mengurangi keuntungan pengusaha. Jadi, dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari pada W , sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3: Fungsi Permintaan Tenaga Kerja
Sumber: Simanjuntak, 2005

Garis D menggambarkan nilai hasil marginal karyawan (VMP) untuk setiap kuantitas tenaga kerja. Bila misalnya jumlah karyawan TK yang dipekerjakan sebanyak $OA = 100$ orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan VMP nya dan besarnya sama dengan $MP \times P = W$. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku (W) oleh sebab itu laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru.

Pengusaha membayar upah pada tingkat yang berlaku (W), padahal hasil nilai marginal yang diperolehnya sebesar W yang lebih kecil dari pada W . Jadi, pengusaha cenderung untuk menghindari jumlah karyawan yang lebih besar dari pada ON . Penambahan karyawan yang lebih besar dari ON dapat dilaksanakan hanya bila pengusaha yang bersangkutan dapat membayar upah dibawah W atau pengusaha dapat menaikkan harga jual barang.

Kondisi laba maksimal dapat diperoleh dengan melalui empat persamaan berikut:

$$MPR = (MP_L) \cdot (MR)$$

$$MPR = (MP_L) \cdot P$$

$$P \cdot (MP_L) = W$$

$$MP_L = \frac{W}{P}$$

keterangan,

$$MP_L = \text{Marginal Product Labour}$$

$$MR = \text{Marginal Revenue}$$

$$P = \text{Price}$$

$$W = \text{Wage}$$

D. Peranan Gizi pada Penawaran Tenaga Kerja

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan human resources merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai

faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (man power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Irawan & Suparmoko, 1999).

Sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan kerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok dalam usia tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak, 2005).

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 2005). Sedangkan, menurut Ananta (2000), tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja.

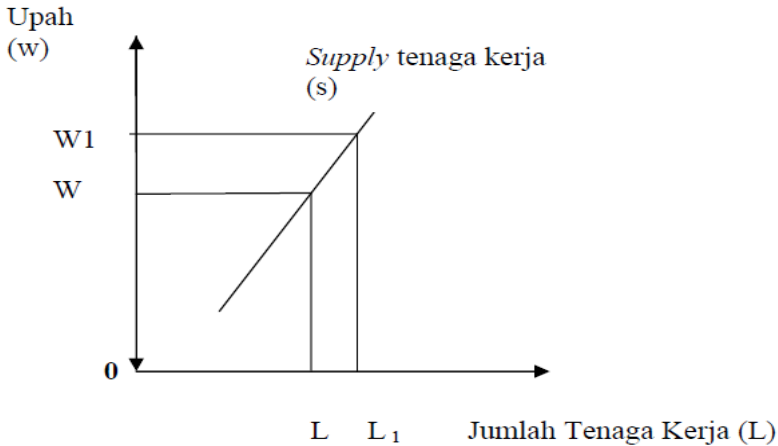
Menurut Simanjuntak (2005), konsep dari tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Adapun masing-masing definisinya secara deskriptif sebagai berikut:

1. Angkatan kerja (labour force) merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlihat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (employed persons) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan, sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur;
2. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan

sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.

Penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu dan biaya produksi yang dikeluarkan (Salvatore, 1997). Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan tenaga kerja yang bersedia ditawarkan oleh supplier (Ananta, 2000). Penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam yang digunakan pada kegiatan untuk menghasilkan sesuatu di pabrik-pabrik, pertanian, bisnis lain, atau usaha nirlaba.

Determinan utama penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk dan cara penduduk menggunakan waktunya (Samuelson & Nordhaus, 1997). Supply tenaga kerja disebut juga jumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapat suatu balas karya (upah/gaji) berupa uang atau berupa barang. Ternyata ada hubungan tertentu antara tinggi rendahnya balas karya dan banyak sedikitnya orang yang mau melaksanakan pekerjaan tertentu (Gilarso, 2003).



Gambar 4.4: Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: Sukirno, 2006

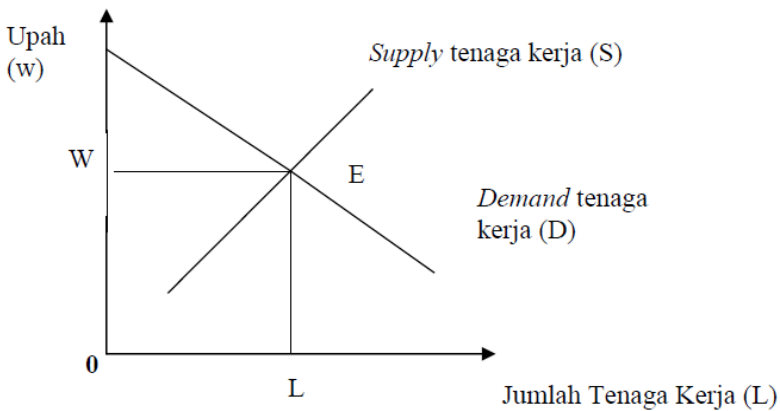
Gambar 4.4 mengilustrasikan mengenai kurva penawaran tenaga kerja baik menggunakan pendekatan secara makro maupun mikro. Kurva tersebut menggambarkan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Kurva penawaran kerja memiliki kemiringan (slope) yang positif, hal ini ditunjukkan dengan upah mula-mula yang ditetapkan sebesar W dan tenaga kerja yang ditawarkan sebesar L . Kemudian ada kenaikan upah sebesar W_1 , sehingga terjadi kenaikan penawaran tenaga kerja sebesar L_1 . Artinya, semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Sebaliknya, jika tingkat upah turun maka penurunan pada jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pun akan terjadi.

E. Determinan Gizi dalam Elastisitas Tenaga Kerja

Para produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, memerlukan sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi: bahan, tanah, bangunan, modal, dan tenaga kerja. Faktor-faktor produksi tersebut diperlukan dan diminta (segi permintaan) oleh

para produsen. Selain itu yang menawarkan (segi penawaran) adalah para pemiliknya, yang mengharapkan suatu balas jasa tertentu untuk pemakaian faktor produksi yang dimiliki dan disediakan. Pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi di pasar faktor produksi, di mana *demand* dan *supply* bersama-sama akan menentukan harga (Gilarso, 2003).

Keseimbangan (equilibrium) adalah kondisi pasar yang sekali dicapai, cenderung untuk bertahan (Salvatore, 1997). Hal ini berarti keseimbangan terjadi apabila penawaran dan permintaan akan barang seimbang. Begitu juga dengan penawaran tenaga kerja, keseimbangan tenaga kerja akan tercapai apabila permintaan akan tenaga kerja, sama atau seimbang dengan tenaga kerja yang ditawarkan.



Gambar 4.5: Kurva Keseimbangan Tenaga Kerja
Sumber: Sukirno, 2006

Berdasarkan Gambar 4.5, dapat dilihat kurva keseimbangan di pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja ditunjukkan dengan kurva permintaan (D) yang kemiringannya (slope) negatif dan penawaran tenaga kerja ditunjukkan dengan kurva penawaran (S) yang memiliki kemiringan positif. Keseimbangan tenaga kerja ditunjukkan dengan titik E (equilibrium) di mana terdapat hubungan tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Titik ini juga menunjukkan perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta menunjukkan keseimbangan pada pasar tenaga kerja dengan melihat besarnya tingkat

upah yang ditunjukkan sebesar W dan jumlah tenaga kerja adalah sebesar L . Keadaan keseimbangan juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang diminta seimbang dengan tenaga kerja yang ditawarkan.

Efek elastisitas atau keseimbangan pasar tenaga kerja yang ditinjau berdasarkan jumlah tenaga kerja yang telah dipenuhi (demand dan supply), akan membantu produsen untuk menjalankan produksi usaha. Nantinya, output produksi berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja, akan menentukan besaran upah yang diterima. Pendapatan yang diterima tiap kurun waktu atau periode tertentu, berdampak pada tingkat konsumsi per kapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Bila kebutuhan bahan makanan atau pangan tenaga kerja terpenuhi akan gizi, maka skill yang dihasilkan dan tingkat produktivitas semakin bertambah.

F. Sistem Pengupahan melalui Ekonomi Gizi

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno, 2004). Pendapat Sumarsono (2003), menyatakan bahwa perubahan tingkat upah akan memengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan;
2. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan.

Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan dari tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal semisal mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (substitution effect).

Menurut Kuncoro (2001), di mana kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Pengertian upah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 (pasal 1) tentang ketenagakerjaan, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jumlah tenaga kerja berkaitan dengan upah yang diterima setelah bekerja berdasarkan aspek atau sistem pengupahan. Aspek teknis pengupahan meliputi perhitungan dan pembayaran upah, serta proses upah ditetapkan. Mulai dari penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP), upah minimum sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), dan upah sundulan. Aspek ekonomis pengupahan lebih melihat pada kondisi ekonomi secara makro dan mikro, yang secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan. Bagi perusahaan, upah merupakan biaya produksi

sehingga kenaikan upah minimum mendorong produktivitas kerja pekerja dan tidak terlalu membebani bagi perusahaan.

Aspek hukum pengupahan meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah. Jika ditinjau dari perspektif pekerja/buruh, upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi mereka, sehingga upah harus mendapat perlindungan secara memadai dari pemerintah. Upah merupakan motivasi pekerja dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Oleh karena pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam proses produksi, maka selayaknya mereka memperoleh imbalan upah yang memadai. Harapan pekerja upah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, yang meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi.

Berdasarkan perspektif pengusaha, upah adalah pengeluaran perusahaan untuk kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian biaya produk yang dihasilkan, yang akhirnya akan memengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Anggaran untuk biaya tenaga kerja berasal dari penerimaan perusahaan sehingga anggaran untuk biaya tenaga kerja sangat bergantung pada kelancaran penerimaan perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan pengusaha pembayaran upah yang tinggi dapat dilakukan tetapi harus seimbang dengan produktivitas pekerja.

Secara teknis dasar hukum pengaturan upah minimum adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VII/2005 (Nopembri, 2007). Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 (pasal 1, angka 1) adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan-tunjangan yang bersifat tidak tetap tidak termasuk dalam upah minimum. Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah:

1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
2. Indeks Harga Konsumen (IHK);
3. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
4. Upah yang umumnya berlaku didaerah tertentu dan antar daerah;
5. Kondisi pasar kerja;
6. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR);
3. Produktivitas marginal tenaga kerja;
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha;
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
2. Upah riil, adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam hal upah dan pembentukan harga upah tenaga kerja, berikut akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latarbelakang terbentuknya harga upah tenaga kerja.

1. Teori upah wajar (alami) dari David Ricardo. Menerangkan upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja;
2. Teori upah besi dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah "teori upah besi", karena itu Ferdinand Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja;
3. Teori dana upah dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja;
4. Teori upah etika menurut kaum Utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal). Tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak "etis". Oleh karena itu, sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan bagi para keluarga.

Sistem penetapan besarnya upah minimum yang harus dibayar perusahaan kepada tenaga kerjanya sangat penting dalam pasar tenaga kerja. Upah minimum menurut Badan Pusat Statistika merupakan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga

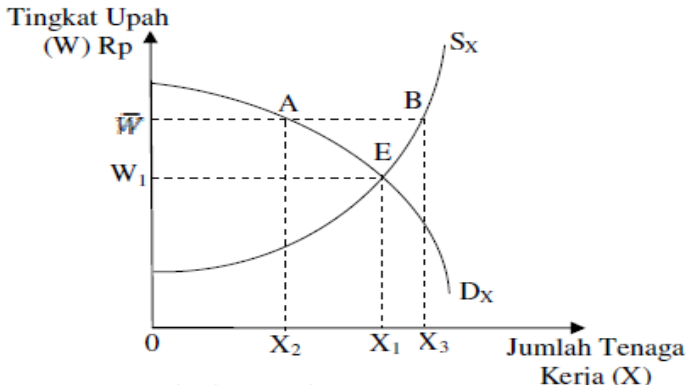
kerja sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku pada setiap region. Upah minimum menurut Badan Pusat Statistik bertujuan untuk mengangkat derajat penduduk terlebih lagi yang berpendapatan rendah.

Kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai upah minimum tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 adalah upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, tunjangan tetap merupakan suatu jumlah imbalan yang diterima oleh tenaga kerja secara tetap dan teratur dalam pembayarannya, di mana tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun tingkat prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum yaitu tercapainya penghasilan yang layak bagi pekerja.

Upah minimum pada awalnya ditentukan secara sektoral secara nasional oleh Departemen Tenaga Kerja. Namun, dalam perkembangan otonomi daerah, pada tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh setiap Provinsi. Upah minimum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Upah minimum regional, merupakan upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi pekerja pada tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku pada suatu daerah tertentu;
2. Upah minimum sektoral, merupakan upah yang berlaku dalam suatu Provinsi berdasarkan kemampuan sektor.

Landasan teori tentang upah minimum yang ada dalam penelitian ini menggunakan konsep teori tentang upah minimum menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku pada setiap region. Upah minimum menurut BPS bertujuan untuk mengangkat derajat penduduk terlebih lagi yang berpendapatan rendah. Pengukuran upah minimum dalam penelitian ini menggunakan Upah Minimum Regional (UMR) berbagai Provinsi di Indonesia.

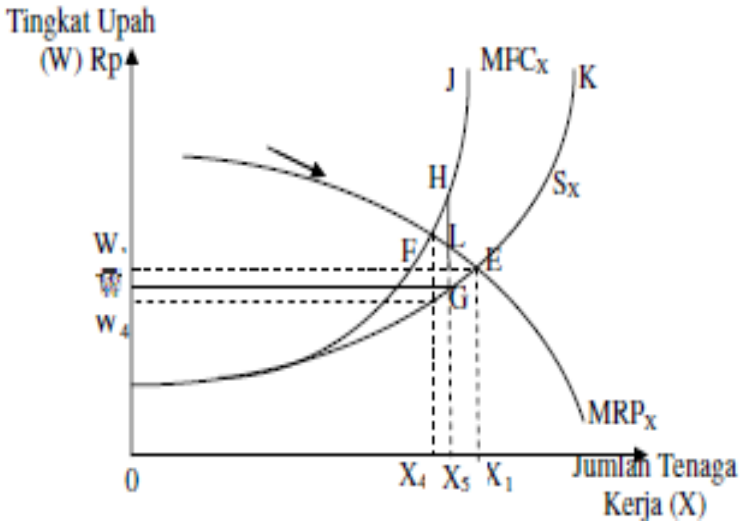


Gambar 4.6: Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja
Sumber: Boediono, 2002

Gambar 4.6 menjelaskan peraturan upah minimum yang dikenakan pada pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Tingkat upah minimum yang berlaku sebelum ada peraturan upah minimum adalah W_1 dan jumlah orang yang dipekerjakan adalah $0X_1$ (yaitu, keseimbangan terjadi pada E). Dengan dikenakannya peraturan upah minimum (W) maka tingkat upah tidak bisa turun dibawah (W) dan ini mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja turun menjadi $0X_2$ sedang jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri adalah $0X_3$. Ini berarti bahwa tingkat upah yang lebih tinggi tersebut harus dibayar dengan ongkos sosial berupa X_2X_1 orang yang semula bekerja sekarang kehilangan pekerjaan dan X_1X_3 orang baru yang mencari pekerjaan. Jadi, jumlah pengangguran total adalah X_2X_3 orang = $(X_2X_1 + X_1X_3)$ orang (Boediono, 2002).

Apabila pasar tenaga kerja yang terjadi adalah pasar monopsoni, di mana hanya ada sebuah perusahaan sebagai satu-satunya tempat bekerja bagi orang-orang di daerah tersebut, posisi keseimbangan sebelum ada peraturan upah minimum (W) bukan pada titik E tetapi pada titik F (Gambar 4.7). Dengan tingkat upah W_4 dan jumlah orang dipekerjakan $0X_4$. Seandainya upah minimum ditetapkan, konsekuensi dari peraturan ini adalah bahwa kurva penawaran akan tenaga kerja tidak lagi kurva SX yang lama, tetapi menjadi garis patah $WGEK$ (karena upah tidak bisa turun di bawah W). Kurva penawaran input

adalah kurva AFC input tersebut. Jadi, WGEK adalah kurva AFC bagi tenaga kerja setelah peraturan upah minimum dikenakan.



Gambar 4.7: Penetapan Upah Minimum di Pasar Monopsoni
Sumber: Boediono, 2002

Sesuai dengan dalil hubungan antara AC dan MC, maka kurva MFC bagi tenaga kerja setelah penerapan peraturan upah minimum adalah garis patah WGLH. Garis inilah yang dilihat oleh perusahaan sebagai MFC perusahaan. Posisi yang paling baik (keuntungan maksimum) bagi perusahaan adalah apabila $MFC = MRP$. Posisi ini adalah titik L (di mana MFC_x, yaitu WGLH berpotongan dengan MRP_x). Jadi dengan dikenakannya peraturan upah minimum tingkat upah adalah W dan jumlah orang yang dipekerjakan adalah OX₅. Perhatikan bahwa dalam pasar monopsoni penerapan upah minimum dapat meningkatkan tingkat upah dan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan

pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Ada 4 macam kategori atau jenis upah minimum, yaitu: Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK); Upah Minimum Sektoral Provinsi; dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota/Kabupaten.

Gubernur sebagai kepala daerah wajib menetapkan Upah minimum Provinsi. Selain itu, Gubernur menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan Provinsi. UMK dan UMS harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di Provinsi yang bersangkutan. Penetapan UMP dan UMK sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan, Upah minimum sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. PP tersebut menegaskan penetapan Upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan formula sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n adalah upah minimum yang akan ditetapkan;

UM_t adalah upah minimum tahun berjalan;

Inflasi adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan;

ΔPDB_t adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari

pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan PDB tahun berjalan.

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% berdasarkan Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan No. B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan PDB Tahun 2017. Kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis BPS. Rinciannya: Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Selanjutnya, gubernur selaku pejabat yang berwenang wajib menetapkan UMP 2018 paling lambat pada 1 November 2017.

Berikut adalah daftar UMP tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2018 (dari tertinggi ke terendah):

Tabel 4.1: Perbandingan UMP antar Provinsi di Indonesia, 2017-2018

No	Provinsi	UMP 2018	UMP 2017	Kenaikan	Keterangan
1	DKI Jakarta	3.648.035	3.355.750	8,71%	Resmi
2	Papua	2.895.650	2.663.646	8,71%	Resmi
3	Sulawesi Utara	2.824.286	2.598.000	8,71%	Resmi
4	Bangka Belitung	2.755.444	2.534.673	8,71%	Perkiraan
5	NAD Aceh	2.717.750	2.500.000	8,71%	Perkiraan
6	Sulawesi Selatan	2.647.767	2.435.625	8,71%	Resmi
7	Papua Barat	2.627.363	2.416.855	8,71%	Perkiraan
8	Sumatera Selatan	2.595.994	2.388.000	8,71%	Resmi
9	Kepulauan Riau	2.563.875	2.358.454	8,71%	Perkiraan
10	Kalimantan Utara	2.559.903	2.354.800	8,71%	Resmi
11	Kalimantan Timur	2.543.001	2.339.556	8,70%	Resmi
12	Riau	2.464.154	2.266.722	8,71%	Resmi
13	Kalimantan Selatan	2.454.671	2.258.000	8,71%	Resmi
14	Kalimantan Tengah	2.421.305	2.227.307	8,71%	Resmi
15	Jambi	2.243.719	2.063.948	8,71%	Resmi
16	Gorontalo	2.206.813	2.030.000	8,71%	Perkiraan
17	Sulawesi Barat	2.193.529	2.017.780	8,71%	Perkiraan
18	Sulawesi Tenggara	2.177.054	2.002.625	8,71%	Perkiraan
19	Maluku Utara	2.147.023	1.975.000	8,71%	Perkiraan
20	Sumatera Utara	2.132.189	1.961.354	8,71%	Resmi
21	Bali	2.127.157	1.956.727	8,71%	Perkiraan
22	Sumatera Barat	2.119.066	1.949.284	8,71%	Resmi
23	Banten	2.099.385	1.931.180	8,71%	Resmi
24	Maluku	2.092.668	1.925.000	8,71%	Perkiraan
25	Lampung	2.074.672	1.908.447	8,71%	Resmi
26	Kalimantan Barat	2.046.900	1.882.900	8,71%	Resmi
27	Sulawesi Tengah	1.965.231	1.807.775	8,71%	Resmi
28	Bengkulu	1.880.000	1.730.000	8,67%	Resmi
29	NTB	1.825.000	1.631.245	11,88%	Resmi
30	NTT	1.793.715	1.650.000	8,71%	Perkiraan
31	Jawa Barat	1.544.360	1.420.624	8,71%	Resmi
32	Jawa Timur	1.508.894	1.388.000	8,71%	Resmi
33	Jawa Tengah	1.486.065	1.367.000	8,71%	Resmi
34	DIY	1.454.154	1.337.645	8,71%	Resmi

Sumber: www.biaya.net, 2019

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, memegang peranan penting dengan aktivitas perekonomian tertinggi diantara daerah lain, sehingga sudah sewajarnya memiliki nominal UMP tertinggi diantara 33 Provinsi lainnya. Tercatat, UMP Ibukota tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035 atau naik 8,71% dari periode sebelumnya (Rp 3.355.750). Disisi lain, dalam Tabel 9 juga terlihat posisi UMP terendah ditempati oleh Provinsi DIY yaitu Rp 1.454.154 (tahun 2018) dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017, adalah Rp 1.337.645.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memutuskan bahwa UMP 2017 naik sebesar 8,25%. Angka tersebut diperoleh dari asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%. Inflasi 3,07% dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi 5,18 dihitung dari PDB kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.

Seseorang yang mendapatkan upah dibawah rata-rata ketetapan Pemerintah dan tingkat kebutuhan (pola konsumsi terhadap makanan, kebutuhan jasmani/kesehatan, dan pendidikan) yang tidak tercukupi, maka bisa dipastikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh akan minim dan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja ataupun aktivitas sehari-hari. Belum lagi, jika seseorang tersebut mempunyai tanggungan keluarga (istri, anak, dan hubungan keluarga lain), maka tingkat kebutuhan gizi dibawah standar rata-rata manusia normal. Berbeda sebaliknya dengan seseorang dengan nominal upah yang didapat sesuai dengan kebijakan Pemerintah, maka pengeluaran dan kebutuhan per kapita bertambah dan diharapkan pola asupan makanan, serta produktivitas terus meningkat.

Secara umum, diketahui bahwa status gizi berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Rendahnya berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), lingkaran lengan atas (LILA) yang kecil, indeks massa tubuh (IMT) dan tinggi badan yang kurang berhubungan dengan rendahnya produktivitas, khususnya pada pekerja berat seperti: kuli bangunan, buruh pabrik, dan tenaga kerja lapangan.

G. Kemiskinan: Dampak Melemahnya Ekonomi Gizi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam mengisi pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan adalah perbaikan gizi masyarakat. Gizi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan tubuh, dapat meningkatkan kecerdasan dan menjadikan pertumbuhan yang normal (Depkes RI, 2004).

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi di Indonesia dan di Negara berkembang pada umumnya masih didominasi oleh masalah Kurang Energi Protein (KEP), Masalah Anemia Besi, masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), masalah Kurang Vitamin A (KVA) dan masalah obesitas terutama di kota-kota besar (Supariasa dkk, 2002).

Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi pertama pada kondisi yang umum. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan (Suhardjo, 1997).

Penyebab timbulnya gizi kurang pada balita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah penyebab langsung, penyebab tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Faktor penyebab langsung yaitu makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita oleh anak. Penyebab tidak langsung diantaranya adalah ketahanan pangan dalam keluarga, pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan serta kesehatan lingkungan (Istiono dkk, 2009).

Status gizi yang buruk mencerminkan ketidak seimbangan dalam asupan makanan dan/atau penyakit menular. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi, seperti status ekonomi rumah tangga, pendidikan ibu, kebersihan rumah tangga, dan akses dalam pelayanan kesehatan (Pongou et al., 2006).

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan Relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira sebanyak 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

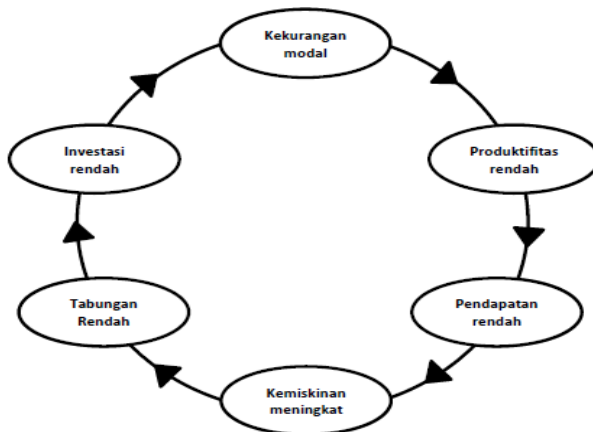
Menurut Sen (1992) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation", di mana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Kebebasan substantif yang dimaksud adalah sebuah rasa kenyamanan yang memiliki dua sisi yakni kesempatan dan rasa aman. Sebuah kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Sehingga, dengan adanya sebuah kesempatan dan kemanan seseorang tersebut bisa terbebas dari lingkaran kemiskinan.

"Kemiskinan adalah "the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other" (World Bank, 2003).

Dari definisi tersebut, diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multi dimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut terminifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat memengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya, baik secara individual maupun kolektif (Simatupang & Dermoredjo, 2003).

Kemiskinan juga menjadi sebuah hubungan sebab akibat dan terdapatnya hubungan kausalitas yang membentuk sebuah lingkaran paradigma kemiskinan. Lingkaran paradigma kemiskinan ini menggambarkan bahwa kemiskinan disebabkan karena kemiskinan itu sendiri "The vicious circle of poverty".



Gambar 4.8: Paradigma - Lingkaran Kemiskinan
Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997)

Lingkaran paradigma kemiskinan merupakan gambaran hubungan kausalitas yang tak terbatas, sehingga dapat dijelaskan karena disebabkan pendapatan masyarakat domestik yang rendah dikarenakan produktifitas yang rendah mengakibatkan semakin meningkatnya kemiskinan, kemiskinan yang semakin meningkat menyebabkan tingkat tabungan domestik menjadi rendah, rendahnya tingkat tabungan domestik akan menyebabkan tingkat investasi domestik menjadi rendah, modal domestik yang mengalir menjadi rendah dalam suatu daerah mengakibatkan dalam suatu daerah kekurangan modal. Hal ini mengakibatkan penurunan pada tingkat produktifitas domestik menjadi rendah, produktifitas domestik yang rendah mengakibatkan pendapatan domestik menjadi rendah, begitu pula seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran paradigma kemiskinan seperti pada Gambar 4.8.

Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor), kemiskinan dalam suatu negara tidak memiliki ujung pangkal, artinya negara miskin itu karena tidak memiliki apa-apa, dan dengan tidak memiliki apa-apa menyebabkan negara menderita akan kemiskinan.

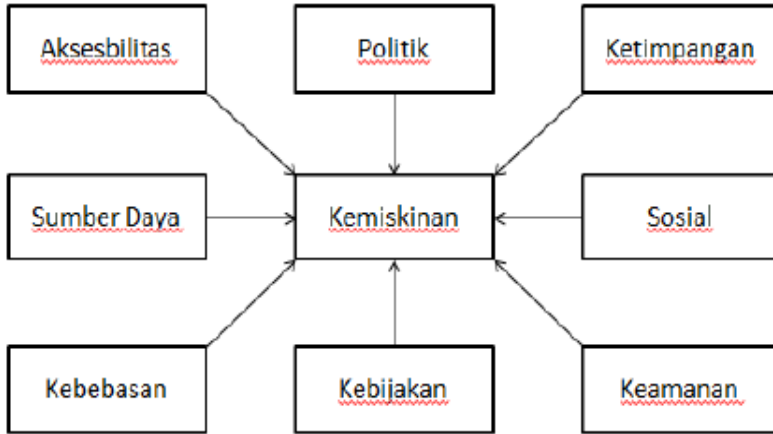
Paradigma kemiskinan baru (modern) merupakan gambaran perkembangan pemikiran kemiskinan, di mana definisi kemiskinan bukan hanya dilihat berdasarkan kondisi fisik seseorang.

Beberapa contoh paradigma kemiskinan baru:

1. **Keamanan.** Tenaga kerja akan bekerja secara produktif apabila lingkungan pekerjaannya aman (tidak terjadi perang atau kerusuhan) sehingga akan memiliki pendapatan, selain itu lingkungan yang aman akan memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya;
2. **Kebijakan.** Keputusan yang diambil oleh pemerintah memengaruhi kemiskinan yang ada, apabila kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, akan mengakibatkan ketidak tepat sasaran target yang diinginkan;
3. **Kebebasan.** Tenaga kerja yang diberikan kebebasan dalam bekerja dan memilih pekerjaannya, akan lebih produktif dan

lebih memungkinkan adanya inovasi dibandingkan dengan yang bekerja dalam tekanan, sehingga dengan lebih produktifnya tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan yang ada;

4. **Sumber daya.** Daerah yang tidak memiliki sumber daya yang mencukupi akan tertinggal dengan daerah lain, karena tidak mampunya bersaing;
5. **Aksesibilitas.** Penduduk yang tidak memiliki atau jauhnya akses untuk menuju tempat di mana terdapat barang kebutuhan hidup, infrastruktur sosial, dan informasi akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
6. **Politik.** Daerah dengan kondisi politik yang tidak baik, di mana pada masing-masing pendukung hanya mementingkan kepentingan golongannya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dengan adanya kekacauan dan terbentuknya berbagai macam kubu;
7. **Ketimpangan.** Penduduk masyarakat dengan ketimpangan yang tinggi di mana tidak terjadi pemerataan akan menimbulkan kemiskinan relatif. Ketimpangan bisa meliputi kurangnya distribusi akan kesehatan, pendidikan, dan lainnya;
8. **Sosial.** Kondisi lingkungan sosial dalam masyarakat juga memengaruhi kemiskinan yang ada dalam masyarakat, apabila kondisi masyarakatnya buruk (penduduk peminum, penjudi, dan lain-lain) akan mengakibatkan buruknya kondisi sosial yang pasti akan menimbulkan permasalahan kemiskinan.



Gambar 4.9: Paradigma Baru Kemiskinan
Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997)

Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997) juga mengemukakan bahwa negara yang miskin itu miskin karena kebijakan yang miskin yang ada di dalamnya (a poor country is poor because a poor policy). Kesalahan pemerintah dalam penetapan kebijakan yang ada menjadi permasalahan yang ada saat ini, terlebih lagi pada negara yang luas dan masih berkembang seperti Indonesia, di mana masalah ketimpangan menjadi permasalahan utama yang ada saat ini. Sehingga, dalam penetapan kebijakan haruslah melihat karakteristik lingkungan dan penduduk yang ada pada daerah tersebut, agar dalam penetapan kebijakan dan program-program pemerintah dapat tepat sasaran.

Menurut Djojohadikusumo (2005) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. **Kemiskinan absolut.** Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya;
2. **Kemiskinan relatif.** Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan

golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin;

3. **Kemiskinan kultural.** Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin, karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan di mana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (consumption based poverty line). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (2007:85) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari 2 (dua) elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya;
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Spicker (2002), dalam tulisannya tentang "Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths, a Catalyst Working Paper, London: Catalyst" penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam 4 mazhab, yaitu:

1. *Individual explanation.* Kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya;
2. *Familial explanation.* Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan;
3. *Subcultural explanation.* Kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat;
4. *Structural explanations.* Menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006) terdapat 3 (tiga) faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.

Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, menurut laporan Badan Pusat Statistik melalui data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011, batas garis kemiskinannya, yaitu sebesar 181.877 rupiah (BPS, 2011).

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan menurut Trisna (2005) adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada

masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Pemerintah sejauh ini telah mempersiapkan program-program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

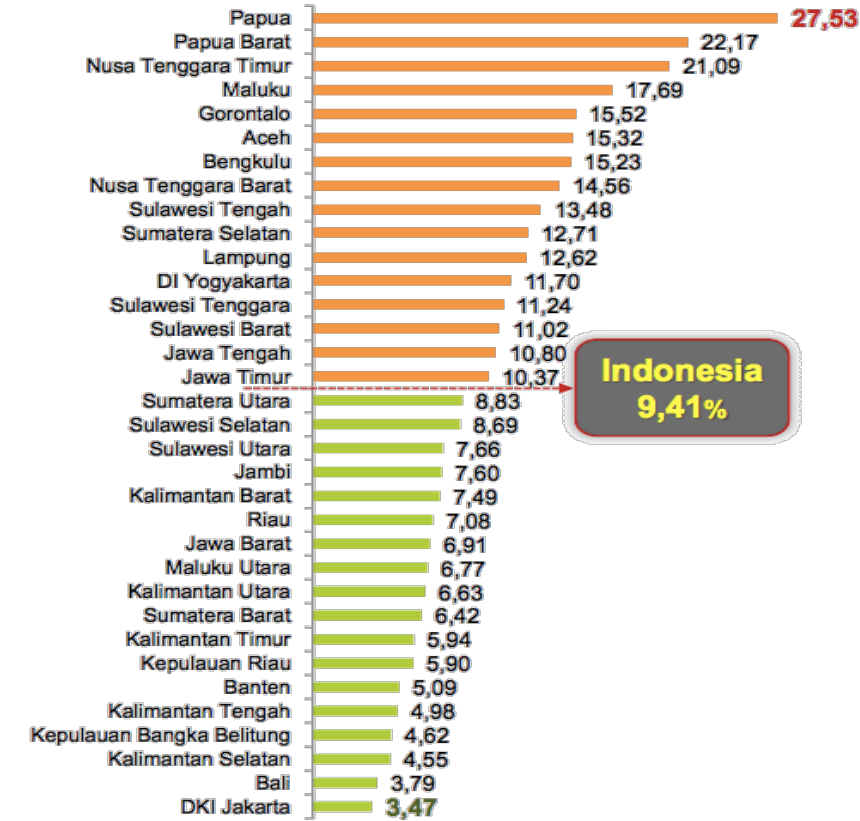
1. Memberdayakan kelompok miskin. Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK;
2. Menerapkan kebijakan ekonomi moral. Melalui pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil dan dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa;
3. Melakukan pemetaan kemiskinan. Yakni sebuah langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami;
4. Melakukan program pembangunan wilayah seperti: Inpres, dan transmigrasi, serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti: BKD, KCK, dan KUD.

Dari gambaran kemiskinan dan masalah gizi, menjadi indikasi keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah atau bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa atau daerah ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat dan kesehatan yang prima serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya meningkatkan produktivitas. Pemecahan masalah gizi tentunya memerlukan program kegiatan yang direncanakan secara tepat. Pendekatan top down dalam perencanaan dan pelaksanaan program dirasakan kurang tepat, mengingat

perbedaan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia, serta masalah yang dialami. Idealnya perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan bottom up, di mana masyarakat setempat diharapkan mampu merumuskan permasalahan yang dihadapi kemudian merancang pendekatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Pendekatan ini membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga unsur lain diluar masyarakat seperti pemerintah maupun lembaga yang menaruh perhatian dalam upaya pemecahan masalah dimasyarakat diharapkan lebih banyak bertindak sebagai fasilitator atau dinamisor (Saragih, 2008).

Secara umum, tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan Maret 2019 memang turun 0,25% poin dibanding September 2018. Sementara jumlah penduduk miskin berkurang 530 ribu jiwa pada periode yang sama. Akan tetapi faktanya, penurunan tingkat kemiskinan tidak dialami oleh seluruh daerah di pelosok Tanah Air. Penurunan tingkat kemiskinan hanya terjadi di 28 Provinsi saja. Sementara enam provinsi lainnya mengalami kenaikan tingkat kemiskinan.

Berikut daftar Provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan sepanjang periode September 2018-Maret 2019, yakni: Nusa Tenggara Timur (0,06% poin); Kepulauan Riau (0,07% poin); Sulawesi Utara (0,07% poin); Papua (0,1% poin); Kalimantan Barat (0,12% poin); Maluku Utara (0,15% poin). Sebagaimana terlihat bahwa sebagian besar provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan ada di wilayah Indonesia Timur. Adapun lima provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo juga berada di wilayah Indonesia bagian Timur.



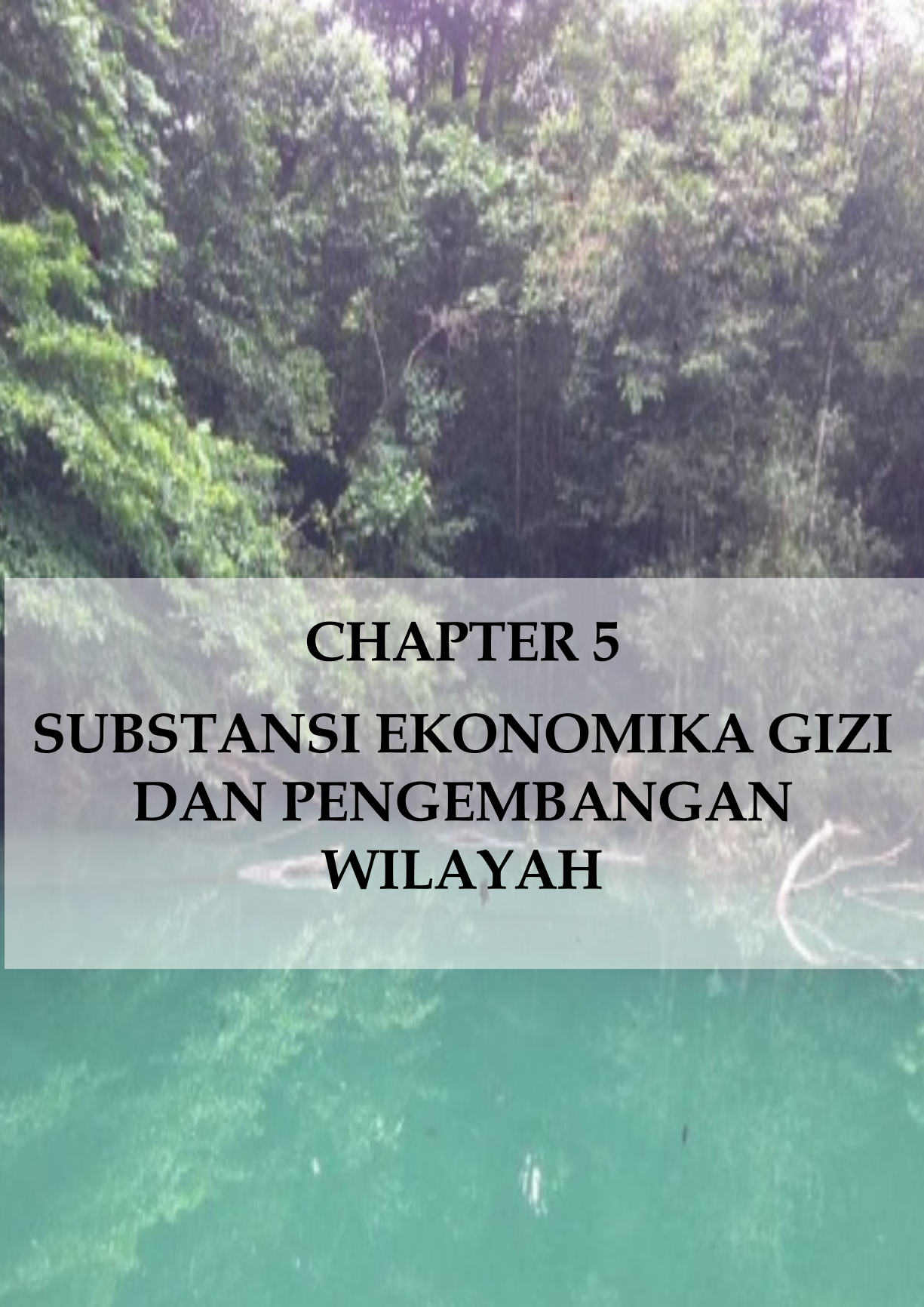
Gambar 4.10: Tingkat Kemiskinan 34 Provinsi di Indonesia, 2019

Sumber: BPS, 2019

Padahal, pemerintah mengklaim distribusi program Beras Sejahtera (Rastra), pada Januari, Februari, dan Maret 2019 masing-masing sebesar 99,47%, 98,8%, dan 98,5%. Selain itu, realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) hingga Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp 37 triliun atau 36,2% terhadap pagu anggaran. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi bansos kuartal I-2018 yang hanya Rp 17,9 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan penanganan kemiskinan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia (lihat Gambar 4.10).

Penyediaan dan perluasan akses pangan dianggap sebagai alternatif utama dalam hal penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan, menyebutkan bahwa pangan yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, telah dilakukan revisi terhadap Inpres No. 9 tahun 2002 dengan Inpres No. 2 tahun 2005. Dalam Inpres tersebut ditegaskan kembali bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan bagi daerah yang mengalami rawan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat miskin terus dilanjutkan upaya penyediaan beras bersubsidi yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan. Beras bagi keluarga miskin (raskin) bertujuan untuk menyediakan beras bersubsidi kepada keluarga miskin sebagai upaya meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pada tahun 2005, raskin dilaksanakan dengan menyalurkan sebesar 1.992.000 ton beras untuk 8,3 juta KK. Realisasinya di seluruh Indonesia sampai Juli 2005 telah mencapai 1.152.306 ton atau 57,85% dari rencana setahun. Selain itu, juga disepakati pengembangan teknologi hibrida (bibit unggul) untuk meningkatkan produksi pertanian melalui kerja sama dengan Republik Rakyat Cina (RRC).



CHAPTER 5
SUBSTANSI EKONOMIKA GIZI
DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH

A. Ekonomi Gizi untuk Pembangunan Wilayah

Sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan negara lain yang sudah lebih maju. Dibidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lain menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan.

Pembangunan sebagai suatu proses dan tahapan yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Setiap bangsa akan menjalani tahap pembangunan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, perilaku dan kelembagaan. Kuncoro (2000) menyatakan bahwa kunci pembangunan menggunakan indikator yang diklasifikasikan sebagai berikut, indikator ekonomi yaitu *Gross National Product* (GNP) per kapita laju pertumbuhan ekonomi, *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dengan *Purchasing Power Parity* (PPP), dan indikator sosial, meliputi: *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI) atau Indeks Mutu Hidup.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pembangunan kesehatan juga merupakan tugas dari seluruh bangsa Indonesia, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Tingginya tingkat kemiskinan masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Masih banyak orang-orang miskin dengan tingkat kesehatan yang buruk sehingga menderita kekurangan gizi (Todaro & Smith, 2006). Pemerintah Indonesia sering menyatakan bahwa telah terjadi penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan di masyarakat, tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Masih banyak ditemukan masalah terkait kemiskinan serta buruknya kesehatan di masyarakat.

Penyebab utama terjadinya gizi buruk adalah kurangnya asupan gizi dari makanan yang mengakibatkan terjadinya penyakit infeksi (UNICEF, 1998). Terbatasnya asupan gizi makanan yang dikonsumsi atau terbatasnya jumlah makanan, umumnya disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi yaitu kemiskinan. Akibat kurangnya asupan zat gizi akan menyebabkan kerusakan beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat makanan secara baik. Penyebab tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi buruk yaitu ketersediaan pangan yang bergizi, terjangkau oleh masyarakat, perilaku, budaya dalam pengolahan pangan, dan pola asuh anak, kurangnya sanitasi lingkungan, serta pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Dilihat dari faktor penyebab gizi buruk di atas, sangat jelas bahwa salah satu penyebabnya adalah dari faktor kemiskinan.

Adanya kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat (Yutimah, 2011). Selain itu, diharapkan program gizi dapat menjadi indikator dalam pembangunan nasional sehingga dapat menyelesaikan masalah gizi di masyarakat. Hal ini dikarenakan masalah gizi merupakan akibat dari kemiskinan yang menimbulkan ketidakcukupan pangan di rumah tangga. Di samping itu, kurangnya tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup sehat juga dapat mengakibatkan permasalahan gizi di masyarakat. Sampai saat ini, masalah gizi buruk yang dialami oleh sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia diakibatkan oleh masih buruknya tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan dan perbaikan pelayanan medis perlu dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai bidang terkait. Selain itu, peran serta aktif masyarakat dan petugas kesehatan dalam melakukan sosialisasi program kesehatan sangat diperlukan dalam menangani permasalahan ini.

Konsepsi pembangunan wilayah yang dimotori 3 (tiga) pilar menurut Hoover & Giarratani (1985), yakni keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*), aglomerasi (*imperfect divisibility*), dan biaya transport (*imperfect mobility of good and services*), masih relevan hingga saat ini. Fenomena globalisasi, otonomi, teknologi, kelembagaan, dan konservasi lingkungan dapat dijelaskan secara

memuaskan melalui *locational factor*. Namun harus diakui, telah lahir fenomena kematian jarak (the death of distance) di mana konsep pembangunan wilayah memerlukan justifikasi untuk menelaahnya. Fenomena ini tidak lagi mementingkan aspek lokasi dan sekaligus menggugurkan konsep *land rent*. Aktivitas ekonomi tidak lagi mengejar akses dan lokasi pusat kota, tetapi mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya sektor jasa. Namun demikian, fenomena ini mungkin melahirkan apa yang disebut jarak sosial, yaitu jarak fisik antar manusia yang hilang karena lebih berkonsentrasi di depan komputer. Perencanaan pembangunan wilayah dipahami sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho & Dahuri, 2004).

Ada 3 (tiga) tahapan dalam pembangunan wilayah, yakni perkembangan industri, efisiensi industri dan keunggulan wilayah (Drabenstott, 2006).

Beberapa tahapan tersebut adalah:

1. **Perkembangan industri dalam suatu wilayah dipicu kegiatan ekspor.** Industri berkembang untuk memenuhi permintaan dari luar wilayah, dipandu oleh teori export base. Keberhasilan tahapan ini ditentukan oleh peran pemerintah dalam berbagai insentif, antara lain pajak, infrastruktur, kawasan industri, dan fasilitas lainnya;
2. **Efisiensi industri.** Dalam tahapan ini industri melaksanakan konsolidasi untuk mengefisienkan sistem produksi dan memperbaiki skala ekonomi. Pemerintah memfasilitasi dengan berbagai deregulasi agar terbentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, sehingga melahirkan pelaku usaha swasta yang tangguh dan mampu bersaing secara global;
3. **Keunggulan wilayah.** Tahapan ini ditandai dengan kekuatan internal yang menghasilkan nilai tambah yang signifikan dalam pasar global. Kekuatan internal tersebut adalah inovasi yang

dilandasi iptek, dan kemampuan kewirausahaan. Inovasi diibaratkan bahan bakar, sementara kewirausahaan adalah mesin. Keduanya menjadi sumber kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan. Ekonomi wilayah tidak lagi diperankan oleh usaha besar, tetapi oleh usaha-usaha kecil dan menengah yang lincah dan efisien. Keberhasilan tahapan ini ditentukan oleh kenyamanan iklim bisnis, riset dan SDM yang bermutu.

Tahapan pertama dan kedua berorientasi eksternal. Pembangunan lebih dikendalikan oleh permintaan dari luar wilayah, sementara keadaan internalnya diasumsikan menyesuaikan keadaan pasar luar wilayah. Dalam posisi ini, pendekatan kebijakan pembangunan “one size fits all” diterapkan. Pengembangan industri dan deregulasi adalah kebijakan universal. Kebijakan ini berpotensi mengancam aset-aset lokal dan kelestarian fungsi oleh pengaruh mekanisme pasar. Tahapan ketiga lebih bersifat internal. Setiap wilayah memiliki karakteristik khas perihal potensi ekonomi dan mutu SDM untuk berinovasi dan berkewirausahaan. Karenanya setiap wilayah akan berbeda dalam kemampuan menangkap pasar. Dalam keadaan ini, pendekatan kebijakan pembangunan berorientasi lokal sangat relevan, seperti halnya semangat otonomi daerah.

Tahapan pembangunan wilayah seperti dikemukakan di atas sering tidak relevan dengan negara berkembang. Karakter lokal sering menjadi *intervening variable* sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai. Kasus Indonesia bisa diambil contoh. Sejak orde baru, dengan dukungan stabilitas ekonomi, politik, dan pangan tidak semua Propinsi atau wilayah menikmati pertumbuhan. Hal tersebut makin jelas dalam awal era otonomi, di mana sebagian besar daerah tidak memiliki kapasitas (*building capacity*) memberdayakan wilayah, ditandai dengan manajemen publik yang buruk dan demoralisasi aparat. Mekanisme kelembagaan dalam manajemen publik dan alokasi sumberdaya wilayah tidak jelas. Rendahnya *building capacity* mengakibatkan iklim investasi dan potensi kewirausahaan tidak berkembang (Mueller, 2006).

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki cita-cita yang tertuang dalam suatu konsep pembangunan, agar wilayah Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota bersemangat bersama-sama menjalankan otonomi daerah. Pembangunan yang dimaksud, tentu tidak terlepas dari pengembangan suatu wilayah dengan suatu ciri tertentu. Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan kualitas hidup masyarakat dari suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi sosial ekonomi dan sisi ekologis. Menurut Prud'homme (1985) dalam Triutomo (2001), pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Beberapa kata kunci yang terdapat dalam pengembangan wilayah, yaitu: (1) Program yang menyeluruh dan terpadu; (2) Sumber daya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah; dan (3) Suatu wilayah tertentu.

Sedangkan, Menurut Kamus Tata Ruang perkembangan wilayah adalah pertumbuhan fisik suatu wilayah yang disertai dengan perkembangan keadaan ekonomi dan sosial wilayah tersebut.

Pengembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan didalam ataupun yang memengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks melibatkan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik (pemerintahan) sehingga pada hakekatnya pengembangan wilayah adalah suatu sistem pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Nugroho & Dahuri, 2004).

Parr dalam Nugroho & Dahuri (2004) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor dan teori tahapan pengembangan. Teori sektor di adopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangannya wilayah atau perekonomian nasional dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam 3 (tiga) sektor utama (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik), dan

tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier dan meningkat pada suatu tingkat tertentu di sector sekunder. Sementara itu, teori tahapan pengembangan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Perloff dan Stabler.

Menurut Tukiyat (1999) dalam pelaksanaan pengembangan wilayah perlu ditempuh pendekatan yang cocok sesuai dengan potensi, kondisi dan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga pendekatan yang diterapkan akan cocok dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan dalam pengembangan wilayah ada 2 (dua) yaitu: pendekatan sisi permintaan dan penawaran.

Pendekatan sisi permintaan merupakan suatu pendekatan pengembangan ekonomi wilayah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan lokal atas barang dan jasa, maka akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan industri barang dan jasa akan mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan terjadi proses multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tukiyat, 2002). Menurut teori sektor yang dikemukakan oleh Clark dan Fisher, perkembangan wilayah ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita berbagai wilayah pada berbagai waktu yang kemudian diiringi oleh adanya relokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja dalam kegiatan sekunder (industri) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi angkatan tenaga kerja dalam sektor tersier (Glasson, 1978).

Perluasan dari teori sektor adalah teori tahap (stages theory) yang menyebutkan bahwa perkembangan wilayah terdapat dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, adalah tahap perekonomian sub sistem swasembada, di mana hanya terdapat sedikit investasi dan perdagangan. Penduduk sektor pertanian menjadi basis distribusi menurut lokasi sumber daya alam.

2. Tahap kedua, dengan adanya kemajuan pengangkutan, wilayah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi, maka muncullah lapisan kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar dan tenaga kerja disediakan oleh penduduk petani, maka lapisan baru ini bertempat pada lokasi yang berkaitan dengan lapisan basis;
3. Tahap ketiga, dengan semakin bertambahnya perdagangan interregional, wilayah yang bersangkutan maju, melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian dan peternakan, yaitu dari tanaman biji-bijian dan peternakan yang ekstensif ke tanaman buah-buahan dan peternakan intensif;
4. Tahap keempat, dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya hasil pertanian wilayah yang bersangkutan, maka wilayah tersebut terpaksa mengadakan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula mengolah produksi primer tetapi kemudian berubah menjadi terspesialisasi;
5. Tahap kelima (terakhir) adalah pengembangan industri tersier yang memproduksi untuk ekspor. Wilayah seperti ini mengeksport ketrampilan jasajasa yang berkembang (Glasson, 1978).

Pendekatan sisi penawaran merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas-komoditas tertentu yang diproses dari sumber daya lokal. Dengan adanya ekspor ke luar wilayah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Teori Basis ekspor yang dikemukakan oleh North dalam Glasson (1978) disebutkan bahwa perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh suatu eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan dan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari wilayah-wilayah lain. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor, akan mengakibatkan

berkembangnya kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan perkembangan wilayah lebih lanjut. Teori ini memandang tingkat permintaan luar wilayah terhadap produk dari industri-industri ekspor suatu wilayah sebagai penentu bagi perkembangan wilayah.

Berdasarkan pada pendapat North tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya teori basis ekspor mengemukakan keyakinan sebagai berikut:

1. Laju pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh lajunya ekspor wilayah tersebut;
2. Peranan ekspor dalam pembangunan wilayah akan bertambah penting apabila penduduk dan modal tidak mengalir masuk/keluar secara berlebihan ke wilayah tersebut dan sektor ekspor memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah.

Setelah menunjukkan peranan ekspor dalam perkembangan wilayah, kemudian North menganalisa sebab-sebab perkembangan selanjutnya. Sesuai dengan pandangannya mengenai peranan ekspor dalam perkembangan wilayah, terutama diakibatkan oleh bertambahnya kedudukan ekspor wilayah tersebut di pasaran luar wilayah bersangkutan dan dapat menandingi dengan baik barang-barang ekspor yang sama atau lebih baik dari wilayah lain. Dalam menganalisa mengenai faktor-faktor yang menentukan perkembangan wilayah, selanjutnya North juga menelaah mengenai perlunya industrialisasi diciptakan untuk mengubah struktur ekspor terutama dari ekspor hasil produksi primer menjadi produksi barang industri.

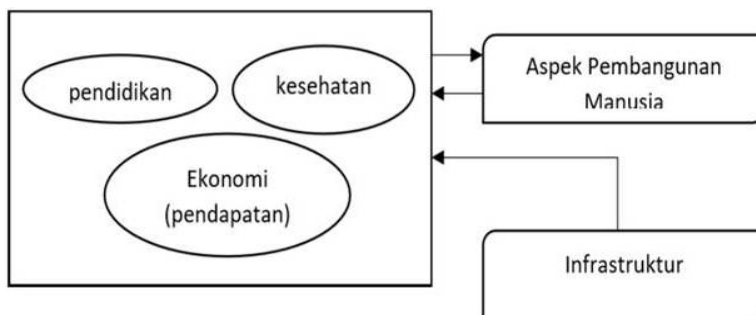
Metode lain yang dikemukakan, yang dimasukan faktor eksternal dalam perkembangan wilayah adalah model alokasi sumber daya interregional yang dikemukakan oleh Ohlin. Dalam model yang diasumsikan bahwa faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal, akan mengalir dari wilayah yang imbalannya rendah ke wilayah yang imbalannya tinggi. Jadi, jika suatu wilayah lebih rendah dari pada semua wilayah lain, maka ada kemungkinan terjadinya arus keluar modal yang hendak memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja

tersebut, atau juga merupakan kombinasi dari kedua kemungkinan tersebut (Glasson, 1978).

Faktor lain yang tidak kalah menentukan dalam perkembangan suatu wilayah adalah faktor kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini meliputi kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan sosial dan budaya serta kebijaksanaan wilayah lainnya.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Herranz-Loncán, 2007) pembangunan infrastruktur yang cakupannya sebatas lokal di wilayah tersebut, maka tingkat pengembalian investasi untuk cakupan nasional tidak signifikan. Tetapi, untuk daerah yang bersangkutan memiliki dampak yang positif. Humantito (2009) menjelaskan, pembangunan infrastruktur dapat mengurangi presentase penduduk miskin.

Patriotika (2011) berpendapat bahwa infrastruktur merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan, melalui pembangunan infrastruktur merupakan penunjang dari pembangunan ekonomi. Seperti diketahui, pertumbuhan atau pembangunan ekonomi merupakan prasyarat guna mencapai pembangunan manusia. Karena hal tersebut menjamin peningkatan produktivitas melalui kesempatan kerja. Berikut ilustrasi dari hubungan infrastruktur dan pembangunan manusia (tampak Gambar 5.1).



Gambar 5.1: Hubungan Infrastruktur dan Pembangunan Manusia
Sumber: Patriotika, 2011

Indratno (2016) menambahkan bahwa kualitas sarana dan prasarana yang prima, akan mendukung tercapainya pembangunan yang

berkelanjutan. Karena, infrastruktur merupakan sektor penunjang utama dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif.

BAPPENAS (2017) perkembangan wilayah yang dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta kesejahteraan masyarakat merupakan ciri utama dari ketersediaan infrastruktur. Karena, infrastruktur seperti: bandara, jalan, pelabuhan, listrik, has, air bersih, dan sebagainya merupakan *social overhead capital* yang saling berkaitan. Secara empiris, kenyataan bahwa daerah yang memiliki sistem dan kelengkapan infrastruktur memadai, biasanya memiliki laju tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang baik pula. Dibandingkan dengan daerah yang kurang pembangunan infrastruktur. Dapat disimpulkan, ketersediaan infrastruktur merupakan kunci penting dalam pembangunan nasional.

Pernyataan di atas, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lewis (1954), yang menyatakan bahwa dalam kondisi pareto optimal akan tercapai. Apabila faktor-faktor produksi memiliki mobilitas yang baik serta minimnya hambatan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2007). Dalam penjelasannya juga, Patriotika (2011) menyebutkan daerah-daerah yang memiliki mobilitas rendah, dikarenakan kondisi infrastrukturnya masih tidak memadai. Oleh karenanya, menyebabkan tingkat produktivitas minim, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan kemiskinan.

B. Karakteristik Wilayah melalui Status Kecukupan Gizi

Kecukupan gizi adalah banyaknya zat-zat minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang adekuat. Kecukupan gizi yang dianjurkan didasarkan pada patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, kondisi khusus (hamil dan menyusui) dan aktivitas fisik (Almatsier, 2002).

Manusia memerlukan zat gizi untuk kelangsungan hidupnya, yang dapat diperoleh dari makanan atau minuman. Zat gizi yang diperoleh dari makanan digunakan untuk tumbuh, bereproduksi, dan memelihara kesehatan yang baik.

Secara definisi, zat gizi merupakan substansi pangan yang memberikan energi; diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan dan/atau pemeliharaan kesehatan; atau bila kekurangan atau kelebihan dapat menyebabkan perubahan karakteristik biokimia dan fisiologis tubuh. Kalau dulu zat gizi tersebut terbatas pada karbohidrat, protein, lemak, vitamin-vitamin dan mineral, namun sekarang air ditetapkan termasuk sebagai salah satu zat gizi.

Konsumsi pangan sangat memengaruhi status gizi seseorang, di mana status gizi baik apabila tubuh memperoleh asupan zat gizi yang cukup, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara optimal. Banyak faktor yang memengaruhi status gizi seperti jumlah dan kualitas pangan serta faktor gangguan dalam sistem pencernaan yang diakibatkan oleh kelainan dan penyakit.

Status gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekurangan atau kelebihan dalam waktu tersebut akan berdampak terhadap kesehatan. Kekurangan salah satu zat gizi dapat menimbulkan dampak berupa penyakit defisiensi.

Asupan yang berlebihan dari salah satu zat gizi juga menimbulkan gangguan kesehatan mulai dari gangguan yang ringan misalnya gangguan fungsi yang menurun bahkan sampai gangguan yang sangat berat atau sifatnya fatal. Oleh karena itu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, diperlukan asupan zat gizi yang harus didapatkan dari pangan dalam jumlah yang sesuai dengan yang dianjurkan setiap harinya. Disinilah diperlukan suatu standar yang digunakan sebagai acuan tentang kebutuhan gizi seseorang.

Pada dasarnya kebutuhan zat gizi setiap individu berbeda tergantung pada jenis kelamin, umur, aktivitas, kondisi kesehatan/penyakit. Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda,

demikian pula bayi, anak-anak, orang dewasa juga mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Orang dengan aktivitas yang banyak akan mempunyai kebutuhan gizi yang lebih besar dibandingkan dengan yang beraktivitas sedikit. Wanita hamil, orang dengan penyakit tertentu pun akan mempunyai kebutuhan gizi yang khusus untuk mempertahankan kesehatannya.

Penentuan kebutuhan gizi berbeda antar zat gizi. Meskipun demikian berangkat dari prinsip yang sama, yaitu penentuan angka atau nilai asupan gizi untuk mempertahankan orang sehat tetap sehat sesuai kelompok umur atau tahap pertumbuhan dan perkembangan, jenis kelamin, kegiatan dan kondisi fisiologisnya.

Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan yaitu suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mengetahui kebutuhan gizi seseorang, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa Menteri Kesehatan perlu menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi Bangsa Indonesia. AKG merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. AKG bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan memenuhi kebutuhan sekitar 97-98% populasi sehat.

Menteri Kesehatan telah menetapkan AKG bagi Bangsa Indonesia yang terbaru melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2013. Peraturan ini mencakup berat dan tinggi badan, kelompok umur, energi, dan zat gizi melalui protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Pada Tabel berikut diuraikan angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan untuk orang Indonesia (per orang dalam 1 hari).

Tabel 5.1: Anjuran Angka Kecukupan Gizi dan Indikator lainnya

Kelompok umur	BB* (kg)	TB* (cm)	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (mL)
					Total	n-6	n-3			
Bayi/Anak										
0 – 6 bulan	6	61	550	12	34	4,4	0,5	58	0	-
7 – 11 bulan	9	71	725	18	36	4,4	0,5	82	10	800
1-3 tahun	13	91	1125	26	44	7,0	0,7	155	16	1200
4-6 tahun	19	112	1600	35	62	10,0	0,9	220	22	1500
7-9 tahun	27	130	1850	49	72	10,0	0,9	254	26	1900
Laki-laki										
10-12 tahun	34	142	2100	56	70	12,0	1,2	289	30	1800
13-15 tahun	46	158	2475	72	83	16,0	1,6	340	35	2000
16-18 tahun	56	165	2675	66	89	16,0	1,6	368	37	2200
19-29 tahun	60	168	2725	62	91	17,0	1,6	375	38	2500
30-49 tahun	62	168	2625	65	73	17,0	1,6	394	38	2600
50-64 tahun	62	168	2325	65	65	14,0	1,6	349	33	2600
65-80 tahun	60	168	1900	62	53	14,0	1,6	309	27	1900
80+ tahun	58	168	1525	60	42	14,0	1,6	248	22	1600
Perempuan										
10-12 tahun	36	145	2000	60	67	10,0	1,0	275	28	1800
13-15 tahun	46	155	2125	69	71	11,0	1,1	292	30	2000
16-18 tahun	50	158	2125	59	71	11,0	1,1	292	30	2100
19-29 tahun	54	159	2250	56	75	12,0	1,1	309	32	2300
30-49 tahun	55	159	2150	57	60	12,0	1,1	323	30	2300
50-64 tahun	55	159	1900	57	53	11,0	1,1	285	28	2300
65-80 tahun	54	159	1550	56	43	11,0	1,1	252	22	1600
80+ tahun	53	159	1425	55	40	11,0	1,1	232	20	1500
Hamil (+an)										
Trimester 1			+180	+20	+6	+2,0	+0,3	+25	+3	+300
Trimester 2			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Trimester 3			+300	+20	+10	+2,0	+0,3	+40	+4	+300
Menyusui (+an)										
6 bln pertama			+330	+20	+11	+2,0	+0,2	+45	+5	+800
6 bln kedua			+400	+20	+13	+2,0	+0,2	+55	+6	+650

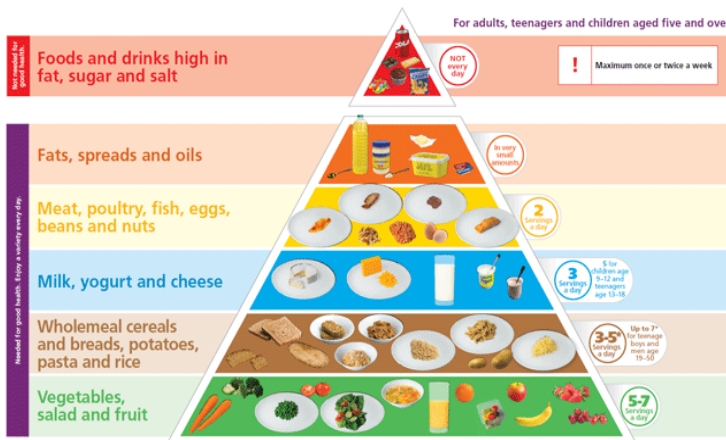
Sumber: Permenkes Nomor No. 75 tahun 2013

Selengkapnya AKG untuk vitamin (14 vitamin) dan mineral (13 mineral) yang dianjurkan untuk orang Indonesia dapat dilihat dalam Permenkes No. 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia. Pada implementasinya, AKG digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menilai kecukupan gizi;
2. Menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan makanan di institusi;
3. Perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional;

4. Pendidikan gizi dan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.

Dalam praktek di masyarakat penerapan AKG memerlukan ukuran porsi pangan untuk menilai maupun merancang konsumsi pangan. Beberapa contoh perkiraan jumlah energi (kkal) pada porsi bahan makanan dalam ukuran rumah tangga (URT) antara lain 1 porsi nasi ($3/4$ gelas = 100 g) memberikan kalori 175 kalori yang juga setara dengan yang diberikan oleh 1 porsi kentang (2 buah), singkong (1 potong), roti (3 iris). URT atau ukuran porsi dapat diperoleh dari berbagai sumber resmi.



Gambar 5.2: Visualisasi Piramida Makanan

Pemenuhan kebutuhan zat gizi dalam sehari dapat dilakukan dengan mengonsumsi 3 (tiga) kali makan besar (nasi, lauk hewani, lauk nabati, buah dan sayur) dan 2 (dua) kali makanan selingan (camilan) atau dikenal juga dengan gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan. Secara umum menu makanan yang seimbang dengan komposisi energi dari karbohidrat 50-65%, protein 10-20%, dan lemak 20- 30%.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat kesehatan zat gizi serta keunikan manfaat masing-masing zat gizi, telah memicu dunia industri menghasilkan dan memasarkan aneka produk pangan yang diperkaya zat gizi atau produk suplemen makanan. Untuk itu masyarakat perlu mencermati kandungannya agar tidak terjadi konsumsi zat gizi terutama vitamin dan mineral secara berlebihan. Kandungan gizi produk pangan dapat diketahui dengan membaca informasi nilai gizi yang tertera pada Gambar 5.2.

Di lain pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan yang diiringi dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah menggiring masyarakat untuk mengonsumsi berbagai makanan siap saji yang berlebihan dan akan berpengaruh negatif terhadap kesehatan.

Konsumsi makanan dengan pola gizi seimbang harus memperhatikan empat prinsip dasar, yaitu keanekaragaman pangan, aktivitas fisik yang teratur dan terukur, kebersihan diri dan lingkungan yang terjaga, serta pantau atau pertahankan berat badan ideal.

Pemenuhan kecukupan gizi pekerja selama bekerja merupakan salah satu bentuk penerapan syarat keselamatan, dan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Gizi merupakan salah satu aspek kesehatan kerja yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama pengelola tempat kerja mengingatkan para pekerja umumnya menghabiskan waktu sekitar 8 jam setiap harinya di tempat kerja. Rendahnya produktivitas kerja dianggap akibat kurangnya motivasi kerja, tanpa menyadari faktor lainnya seperti gizi pekerja. Perbaikan dan peningkatan gizi mempunyai makna yang sangat penting dalam upaya mencegah morbiditas, menurunkan angka absensi serta meningkatkan produktivitas kerja. Berat ringannya beban kerja seseorang ditentukan oleh lamanya waktu melakukan pekerjaan dan jenis pekerjaan itu sendiri. Semakin berat beban kerja, sebaiknya semakin pendek waktu kerjanya agar terhindar dari kelelahan dan gangguan fisiologis yang berarti atau sebaliknya. Pengelompokan aktivitas atau beban kerja (ringan, sedang, dan berat) berdasarkan proporsi waktu kerja.

Penilaian status gizi pekerja perlu dilakukan, karena dengan mengetahui status gizi pekerja dapat ditentukan kebutuhan gizi yang sesuai serta pemberian intervensi gizi bila diperlukan. Penilaian status gizi dilakukan melalui beberapa cara antara lain: pemeriksaan biokimia, pemeriksaan klinis, pemeriksaan biofisik dan antropometri. Antropometri merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penilaian status gizi. Metode ini menggunakan parameter berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) (PUGS, 2005).

Kebutuhan energi selama bekerja (8 jam) adalah 40-50% dari kebutuhan sehari. Bila diterjemahkan kedalam menu menjadi kebutuhan untuk 1 kali makan dan 1 kali snack. Kebutuhan energi dan protein selama bekerja. Adapun kecukupan gizi menurut kondisi khusus pekerja terangkum pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3: Kebutuhan Energi bagi Pekerja

Sumber: Ratnawati, 2011

Kondisi fisiologis selama kehamilan untuk perkembangan janin, pekerja perempuan yang hamil membutuhkan tambahan energi dan zat gizi lainnya seperti zat besi dan asam folat. Perempuan yang berstatus gizi baik dengan tingkat aktivitas ringan-sedang membutuhkan kalori ekstra 180 kkal/hari pada trimester 1, sedangkan pada trimester 2 dan 3 dibutuhkan tambahan 300 kkal/hari. Selama menyusui untuk produksi ASI, pekerja perempuan yang hamil membutuhkan tambahan energi dan zat gizi lainnya. Selama enam bulan pertama, seorang ibu menyusui membutuhkan energi tambahan 500 kkal/ hari dan 550 kkal/hari pada 6 bulan berikutnya. Kondisi tertentu anemia besi, untuk pekerja anemia gizi besi diberikan suplemen tablet besi dengan dosis 60 mg 2 kali seminggu sampai anemia teratasi. Selain itu, pekerja dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya zat besi seperti hati, daging, ikan, ayam, telur, dan sayuran hijau. Khusus bagi pekerja perempuan, untuk

mencegah anemia dianjurkan pemberian tablet besi dengan dosis 60 mg per minggu selama 16 minggu setiap tahun. Selama masa haid diberikan 60 mg zat besi tiap hari. Kelebihan berat badan perlu melakukan perencanaan makan atau diet rendah kalori seimbang. Pengaturan pola makan sehat dilakukan dengan mengurangi asupan lemak dan mencukupi komposisi bahan makanan dengan metode gizi seimbang, yaitu cukup sumber karbohidrat, protein dan lemak serta cukup vitamin, dan mineral.

Porsi kalori terbesar diusahakan dikonsumsi pagi dan siang hari. Konsumsi sayuran dan buah perlu diperbanyak karena buah banyak mengandung serat dan vitamin, namun sedikit kandungan kalornya. Makanan selingan sebaiknya diberikan berupa buah-buahan. Susu yang dikonsumsi sebaiknya adalah susu rendah lemak. Olahraga secara teratur dan rutin perlu dilakukan. Olah raga apapun baik namun jenis yang disarankan adalah olahraga aerobik karena dapat membakar kalori lebih banyak. Sebaiknya olahraga dilakukan 4-5 kali seminggu selama 20-30 menit karena dengan durasi tersebut pembakaran kalori baru dapat terjadi. Kondisi di tempat kerja lembur dan shift kerja bagi pekerja yang lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih diberikan makanan dan minuman tambahan, berupa makanan selingan yang padat gizi. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang menjalani shift kerja malam, termasuk pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 malam sampai 07.00 pagi.

Beberapa faktor risiko lingkungan kerja yang menunjukkan pengaruh terhadap gizi kerja adalah:

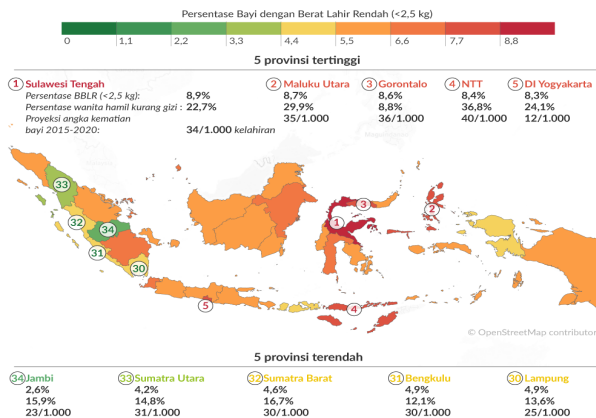
1. Suhu, tempat kerja dengan suhu tinggi akan terjadi penguapan yang tinggi sehingga pekerja mengeluarkan banyak keringat. Karenanya, perlu diperhatikan kebutuhan air dan mineral sebagai pengganti cairan yang keluar dari tubuh. Untuk mencegah dehidrasi disarankan untuk minum air, konsumsi sayur, dan buah;
2. Pengaruh bahan kimia. Bahan-bahan kimia tertentu dapat menyebabkan keracunan kronis, akibatnya: menurunnya nafsu makan, terganggunya metabolisme tubuh, dan gangguan fungsi alat pencernaan sehingga menurunkan berat badan. Oleh

karena itu, dibutuhkan tambahan zat gizi. Hal ini juga terjadi pada para pekerja yang mengalami gangguan psikologis. Bahan radiasi mengganggu metabolisme sel sehingga diperlukan tambahan protein dan antioksidan untuk regenerasi sel;

3. Parasit dan mikroorganisme. Pekerja di daerah pertanian dan pertambangan sering terserang kecacingan yang dapat mengganggu fungsi alat pencernaan dan kehilangan zat-zat gizi, sehingga dibutuhkan tambahan zat gizi.

Meski persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di Indonesia menurun pada 2018, upaya menekan angka ini tetap merupakan suatu urgensi. Pasalnya, BBLR bisa berdampak negatif pada kesehatan anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di Indonesia, bayi terlahir kecil adalah bayi yang berat badannya saat lahir kurang dari 2,5 kg. Kondisi BBLR tidak hanya bisa terjadi pada bayi prematur, bisa juga dialami bayi cukup bulan yang pertumbuhannya terhambat selama dalam kandungan.

Persentase bayi dengan BBLR di Indonesia menurun. Dari 11,3% pada 2013 menjadi 6,2% ditahun 2018. Sebanyak 34 Provinsi, 15 di antaranya punya catatan lebih buruk, yakni >6,2%. Misalnya di Sulawesi Tengah (8,9%), Maluku Utara (8,7%), Gorontalo (8,6%), NTT (8,4%), dan DI Yogyakarta (8,3%).



Gambar 5.4: Bayi dengan Berat Lahir Rendah (2,5 Kg), 2018
Sumber: Kementerian Kesehatan (2018), dan SUPAS (2015)

Penurunan angka BBLR terjadi karena dua faktor. Pertama, ada perbedaan pengukuran. Sebelumnya, bayi dengan berat badan <2,5kg termasuk BBLR. Sementara pada 2018, hanya bayi dengan berat <2,5kg yang tergolong BBLR. Kedua, kondisi kesehatan ibu hamil dan bayi membaik. Ini dilihat dari menurunnya angka ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK), juga jumlah ibu hamil kurang gizi yang berkurang. Selain itu, ada peningkatan pelayanan pemeriksaan pasca-persalinan dan bayi pada golden period (1000 hari pertama).

Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi BBLR. Selain kelahiran prematur-sebelum usia kehamilan 37 minggu, penyebab lain termasuk komplikasi kehamilan, akses yang tidak memadai ke perawatan prenatal, dan gizi buruk. Kurang tidaknya gizi ibu hamil bisa diukur dari lingkaran lengan atas (LILA).

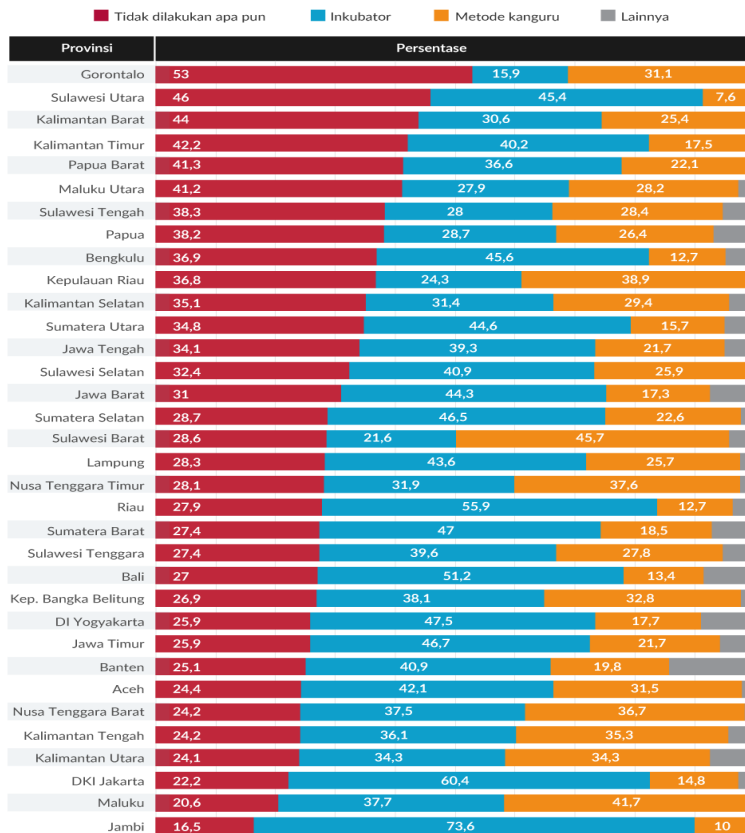
Di sejumlah provinsi dengan prevalensi BBLR terbanyak, angka ibu hamil kurang gizi termasuk tinggi diatas rata-rata nasional yakni 17,1%. Misal di Maluku Utara, sepertiga ibu hamil kurang gizi. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) 36,8% ibu hamil kurang gizi. Sebaliknya, di Jambi jumlah BBLR lebih sedikit, angka ibu hamil kurang gizi juga lebih sedikit.

Menurut riset, bayi lahir kecil (terutama yang sangat kecil), punya kecenderungan lebih tinggi mengalami masalah perkembangan dan penyakit kronis dibandingkan dengan bayi yang lahir di atas berat badan normal. Beberapa masalah kesehatan yang dihadapi bayi dengan BBLR termasuk penyakit kuning, anemia, masalah jantung, gangguan paru-paru kronis, dan infeksi.

Ada beragam cara merawat BBLR, misalnya inkubator (43%), kanguru-memasukkan badan bayi ke dalam baju ibu (21,7%), atau cara lain (5,1%). Data pada Gambar 5.5 menunjukkan 3 dari 10 BBLR di Indonesia tidak menerima perawatan khusus setelah lahir. Mayoritas bayi kecil di provinsi dengan angka BBLR tinggi seperti Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah, tidak mendapat perawatan apa pun, baik dari fasilitas kesehatan maupun dari ibu mereka. Padahal BBLR belum stabil, pun rentan kurang gizi. Sebaliknya, bayi kecil di provinsi dengan angka BBLR rendah, cenderung banyak yang mendapatkan perawatan baik melalui metode

kanguru maupun inkubator. Di Jambi, inkubator menjadi tren dominan untuk bayi kecil (73,6%), begitu juga di DKI Jakarta (60,4%), dan di Riau (55,9%).

Mencukupi kebutuhan gizi menjadi penting bagi ibu hamil, karena ini berhubungan langsung dengan keselamatan bayi. Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko kematian lebih tinggi. Apalagi bayi yang lahir cukup bulan (minimal 37 minggu), tapi gizinya kurang, dan tidak mendapat penanganan intensif pada *golden period*.



Gambar 5.5: Perawatan Bayi dengan Berat Lahir Rendah (2,5 Kg), 2018

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2018

Pada 2017, 82,4% kematian balita terjadi pada bayi usia < 1 tahun. Dari total angka tersebut, mayoritas neonatus kematian sebelum satu bulan terjadi pada usia 0-6 hari. Menurut data SUPAS 2015 dari BPS, proyeksi angka kematian bayi pada 2015-2010 termasuk tinggi di NTT (40 per 1.000 kelahiran), Maluku Utara (35 per 1.000 kelahiran), dan Sulawesi Tengah (34 per 1.000 kelahiran).

Ibu hamil butuh asupan zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro seperti energi dan protein berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, pembentukan plasenta, serta organ janin. Sedangkan, zat gizi mikro terutama zat besi, asam folat, asam lemak Omega 6 & 3, DHA, kalsium, vitamin, dan serat untuk menjamin kehamilan yang sehat dan optimal.

C. Struktur Demografi Berdasarkan Ekonomi Gizi

Isu-isu kependudukan selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya mengenai komponen proses penduduk yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk tetapi juga komponen-komponen struktur penduduk diantaranya yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, persebaran penduduk, kualitas penduduk, kondisi kesejahteraan penduduk, kondisi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama, dan juga lingkungan. Berkaitan dengan struktur demografinya, maka Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang terjadi dalam evolusi kependudukan dengan pola siklus seabad sekali.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi. Hal tersebut terindikasi dari hasil sensus penduduk tahun 2000 memberikan fakta signifikan bahwa program KB memberi dampak yang sangat positif. Sensus tersebut menunjukkan penduduk dibawah usia 15 hampir tidak bertambah dari

jumlah sekitar 60 juta di tahun 1970-1980an. Sampai akhir tahun 2000 penduduk usia hanya menjadi sekitar 63-65 juta saja. Sebaliknya, penduduk usia 15 - 64 tahun pada tahun 1970 jumlahnya mencapai sekitar 63-65 juta telah berkembang menjadi lebih dari 133 - 135 juta, atau mengalami kenaikan dua kali lipat selama 30 tahun. Beban ketergantungan sendiri diukur dari ratio penduduk usia anak-anak dan tua per penduduk usia kerja, telah menurun tajam, dari sekitar 85-90 per 100 di tahun 1970 menjadi sekitar 54-55 per 100 di tahun 2000. Sementara, hasil mutakhir sensus 2010 juga menunjukkan trend positif di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun 2010 mencapai 66 % dari jumlah total penduduk yang mencapai 157 juta jiwa. Adapun pekerja usia muda (15-24 tahun) mencapai 26,8 % atau 64 juta jiwa. Kenaikan angka usia produktif kerja tersebut dinilai dari angka ketergantungan, 100 penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk tak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Adapun transisi demografis yang ditandai dengan kenaikan dua lipat jumlah usia produktif bekerja (15-64 tahun), diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda (di bawah 15 tahun), dan semakin sedikit jumlah penduduk manula (di atas 64 tahun) sebagaimana yang terlihat dari dua hasil sensus tersebut, lazim dikenal sebagai bonus demografi (demographic dividend). Dalam bahasa ekonomi kependudukan, bonus demografi sendiri dimaknai keuntungan ekonomis yang disebabkan semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif, sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut, juga lazim dikenal sebagai jendela kesempatan (windows of opportunity) bagi suatu negara melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut.

Banyak negara menjadi kaya, karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun, yang menjadi efek negatif berikutnya paska bonus demografi adalah meledaknya usia tua, sementara transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna (Adioetomo, 2005). Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan sosial dan pensiunan, sehingga terjadi stagnasi

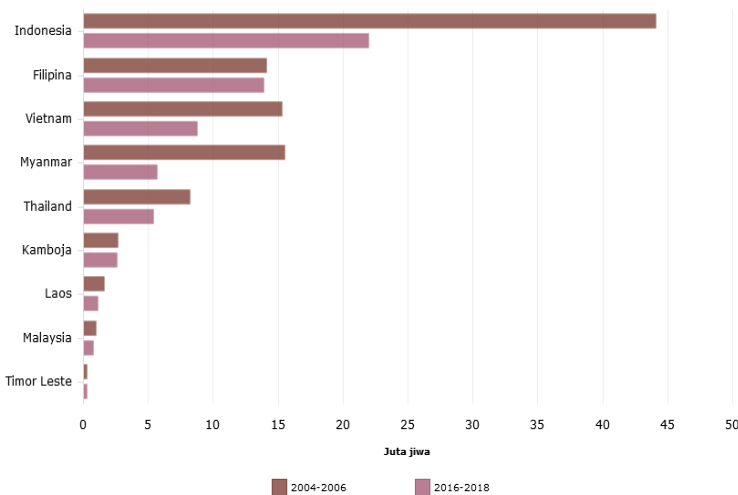
dalam perekonomian nasional karena tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal tersebut.

Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk di mana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk non-produktif (usia tua dan anak-anak), akan sangat rendah atau sekitar 10 penduduk usia produktif akan menanggung 3-4 penduduk usia non produktif. Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara, apabila sumber daya manusia (SDM) terutama usia produktif berkualitas dan sebaliknya akan menjadi boomerang, apabila sumberdaya manusianya tidak dipersiapkan dengan baik.

Kritikan yang dialamatkan pada teori ini lebih mengarah pada sikap konservatif yang belum memasukkan perubahan dan kemajuan teknologi sebagai bagian penting. Modernisasi dalam bidang ekonomi kini telah mendorong perbaikan standar hidup manusia dan mengharuskan manusia bekerja mencari pendapatan. Hal tersebut yang menyebabkan menurunnya angka fertilitas maupun natalitas, karena kecenderungan menikah muda menurun karena tuntutan pekerjaan. Sebenarnya, bonus demografi muncul karena program Keluarga Berencana yang terilhami konsepsi ini dengan membatasi anak hanya dua dan naiknya asupan gizi, maupun semakin membaiknya fasilitas kesehatan, sehingga dapat menunda pertumbuhan penduduk secara prematur dalam dua dekade semenjak program itu dilakukan pada 1974.

Dasar pemikiran dari perspektif optimistik hadir dari pemikiran Sen (2000) mengenai pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi yang selama ini diorientasikan untuk mencari laba semata tanpa ada timbal balik dengan manusia dan alam justru membuat adanya bencana ekonomi manusia. Bencana tersebut seperti: angka ketimpangan besar yang bisa ditunjukkan dengan semakin meroketnya koefisien gini di negara dunia ketiga, kemiskinan akut, maupun kelaparan. Hal itulah yang kemudian memicu terjadinya orientasi dalam pembangunan dari semula ekonomi menjadi manusia. Pembangunan manusia seperti: peningkatan asupan gizi, perbaikan fasilitas kesehatan, terjangkaunya fasilitas pendidikan, serta redistribusi ekonomi yang seimbang

merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi penduduk menjadi potensi ekonomi. Selain kuantitas penduduk, kualitas penduduk juga kian meningkat. Kedua indikasi tersebut yang kemudian menjadi kunci dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi sumber daya manusia (human capital investment).

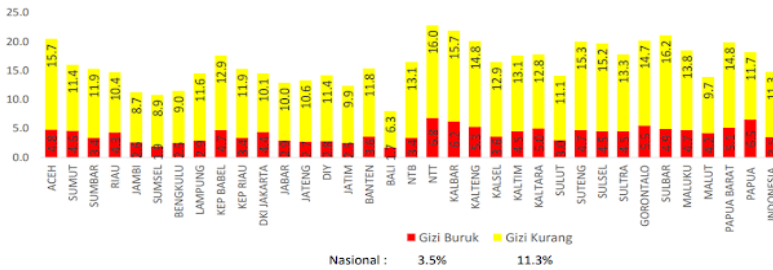


Gambar 5.6: Jumlah Penduduk Kurang Gizi di Asia Tenggara
Sumber: FAO, 2019

Indonesia berhasil menurunkan jumlah penduduk yang kekurangan gizi sebesar 50%. Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat jumlahnya mencapai 44,1 juta jiwa pada periode 2004-2006, lalu berkurang menjadi 22 juta jiwa pada periode 2016-2018.

Selain Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara umumnya mengalami penurunan yang besar. Jumlah penduduk kekurangan gizi di Myanmar merosot 63%, Vietnam 42,5%, Thailand 34%, Laos 31%, dan Malaysia 20%. Sementara, Filipina dan Kamboja belum melakukan perubahan drastis. Jumlah penduduk kekurangan gizi di masing-masing negara hanya turun 1,4% dan 4%. Jumlahnya di Timor Leste bahkan masih sama seperti periode sebelumnya, yaitu 300 ribu jiwa (tertera di Gambar 5.6).

Hasil catatan PSG Kemenkes RI, didapati data laporan tahun 2017 Pemantauan Status Gizi (PSG) 34 Provinsi di Indonesia. Sulbar menurut data tersebut memang cukup memprihatinkan, berada di urutan tertinggi kedua setelah Nusa Tenggara Timur untuk angka stunting anak usia 0 sampai 23 bulan. Berikut data lengkapnya pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7: Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang Anak Balita Umur 0-23 Bulan Menurut Provinsi, 2017
Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2018

Untuk gizi buruk menurut data di atas (perhatikan yang warna merah), Sulbar juga cukup tinggi 4,9 % cukup jauh di atas angka nasional 3,5 %. Beberapa provinsi yang lebih tinggi angka gizi buruk adalah NTT 6,8 %, Papua 6,5 %, Kalbar 6,2 %, Gorontalo 5,5 % dan Papua Barat 5,1 %. Namun, jika melihat angka gizi kurang (stunting dan wasting) anak balita, tidak menutup kemungkinan Sulbar akan berhadapan dengan masalah gizi buruk yang serius.

Berbagai cara yang telah ditempuh Pemerintah adalah mengaktifkan penyuluhan melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di tiap wilayah (Kota, Kabupaten, hingga ke Kelurahan dan Desa/Kampung) telah disosialisasikan ke masyarakat (khususnya ibu hamil), bahwa menjaga gizi bayi sejak dalam kandungan hingga lahir dan tumbuh begitu sangat penting. Adanya PKK mulai dari Desa atau Kelurahan hingga tingkat Provinsi, terus mendorong upaya perbaikan gizi anak-anak Indonesia melalui sosialisasi. Minimal 2 kali dalam 1 bulan, ibu hamil dan balita diajak ke Puskesmas atau Posyandu untuk pemantauan gizi. Sedangkan, ke dokter kandungan bagi ibu hamil, minimal empat kali selama dalam usia kandungan. Kemudian setelah

lahir, di usia 6 bulan diberikan makanan tambahan, 6 bulan sampai 2 tahun harus ASI eksklusif.

Pemerintah telah memberikan paket makanan tambahan kepada balita, baik berupa susu atau biskuit yang juga berfungsi sama sebagai pemenuhan gizi anak. Sementara itu, masyarakat harus giat melakukan program Keluarga Berencana (KB), agar tidak melebihi dari 2 anak. Meskipun demikian, dari berbagai instansi Pemerintah yang terkait telah melakukan *road show* ke pelosok Desa dan tingkat Kelurahan untuk sosialisasi program Dasa Wisma PKK dalam peranannya untuk mengontrol pemenuhan gizi anak. Begitupun dengan pernikahan di usia dini, agar bisa diminimalisir secara menyeluruh, agar bisa berkarya diusia produktif, menghindari perceraian dini, mencegah dan menurunkan angka kematian bayi lahir, serta turut mencerdaskan bangsa dengan bersekolah dan bekerja pada berbagai sektor ekonomi.

D. Aspek Gizi pada Pertumbuhan Ekonomi

Dalam hasil penelitiannya Hartwell et al. (1996), didapatkan bahwa pekerja pabrik yang mendapat makanan siang dari kantin pabrik terlihat status gizinya lebih baik dibanding dengan yang makan siangnya diserahkan pada masing-masing pekerja. Apabila makanan tidak cukup mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan dan keadaan ini berlangsung lama, akan menyebabkan perubahan metabolisme dalam otak berakibat terjadi ketidakmampuan berfungsi normal. Pada keadaan yang lebih berat dan kronis, kekurangan gizi menyebabkan pertumbuhan badan terganggu, badan lebih kecil diikuti dengan ukuran otak yang juga kecil (Husaini, 1997). Lebih jauh disebutkan bahwa keadaan kurang gizi menghasilkan kenaikan emosional dari pada terhadap fungsi kognitif.

Kekurangan dan kelebihan zat gizi yang diterima tubuh seseorang, akan sama mempunyai dampak yang negatif, perbaikan konsumsi pangan dan peningkatan status gizi sesuai atau seimbang dengan yang

diperlukan tubuh jelas merupakan unsur penting yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia, sehat, kreatif, dan produktif.

Produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap organisasi/perusahaan menginvestasikan sumber-sumber vital (sumber daya manusia, bahan, dan uang) untuk memproduksi barang/jasa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia tersebut secara efektif akan memberikan hasil yang lebih baik. Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan antara output (barang dan jasa) dengan input (tenaga kerja, bahan dan uang). Produktivitas yang rendah merupakan pencerminan dari organisasi/perusahaan yang memboroskan sumber daya yang dimilikinya. Dan ini berarti bahwa pada akhirnya perusahaan tersebut kehilangan daya asing dan dengan demikian akan mengurangi skala aktivitas usahanya. Produktivitas yang rendah dari banyak organisasi/perusahaan akan menurunkan pertumbuhan industri dan ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh. Produktivitas merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara modal, tanah, serta energi yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut (Dharmmesta, 2002).

Produktivitas menurut dewan produktivitas nasional adalah sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok hari harus lebih baik dari hari ini (Umar, 2000).

Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi. Tetapi produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas, selain kualitas dan hasil keluarannya. Produksi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan volume produksi, sedangkan produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dalam menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan).

Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat. Walaupun secara teoritis faktor produksi dapat dirinci, pengukuran kontribusinya terhadap output dari suatu proses produksi sering dihadapkan pada berbagai kesulitan. Disamping itu, kedudukan manusia, baik sebagai tenaga kerja kasar maupun sebagai manajer, dari suatu aktivitas produksi tentunya juga tidak sama dengan mesin atau alat produksi lainnya. Seperti diketahui, bahwa output dari setiap aktivitas ekonomi tergantung pada manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut, maka sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Sejalan dengan fenomena ini, konsep produktivitas yang dimaksud adalah produktivitas tenaga kerja. Tentu saja, produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi, dikondisikan atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi komplementernya seperti alat dan mesin. Namun, demikian konsep produktivitas adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber daya manusia. Secara umum, konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input) persatuan waktu.

Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila (Ravianto, 1985):

1. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap;
2. Produktivitas (P) naik, apabila Input (I) turun, Output (O) naik;
3. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik;
4. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) naik, tetapi jumlah kenaikan Output lebih besar daripada kenaikan Input;
5. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi jumlah penurunan Input lebih kecil daripada turunnya Output.

Konsep tersebut tentunya dapat dipakai didalam menghitung produktivitas disemua sektor kegiatan. Menurut Putti (1986), peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (do the right thing) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (do the thing right). Dengan kata lain, bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja secara total. Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas:

1. Efisiensi, produktivitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi pemakaian sumber daya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan;
2. Efektivitas, merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar presentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya;
3. Kualitas, secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas. Meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio output/input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output.

Menurut Blocher et al. (2008), produktivitas adalah hubungan antara berapa output yang dihasilkan dan berapa input yang dibutuhkan untuk memproduksi output tersebut. Menurut Umar (1999) produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Rumus produktivitas sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Efektifitas menghasilkan output}}{\text{Efisiensi menggunakan input}}$$

Di mana, output (jumlah produksi) input (jumlah karyawan)

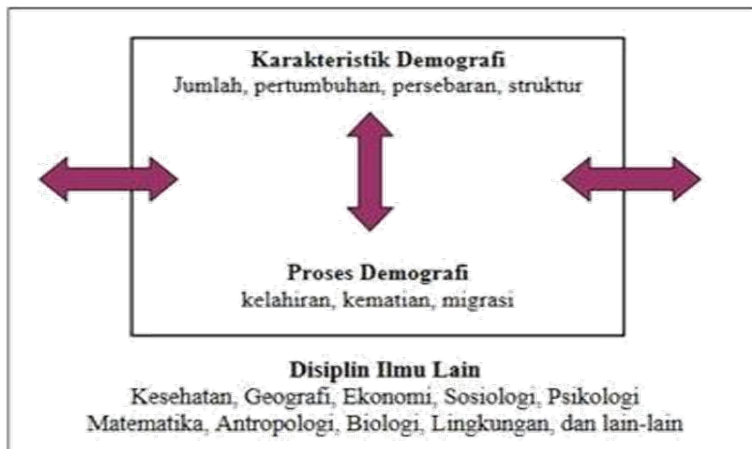
Seorang karyawan dinilai produktif, apabila menghasilkan output yang lebih besar dari karyawan lainnya untuk satuan waktu yang sama. Dan dapat juga dikatakan bahwa karyawan menunjukkan tingkat produktivitas yang ditentukan dalam satuan waktu yang lebih singkat. Terkait dengan hal itu, ukuran produktivitas adalah pada ketenagakerjaan penduduk dalam umur 15-64 tahun, yang bukan saja bekerja pada sektor perusahaan, melainkan juga secara menyeluruh (wirausaha, administrasi pemerintahan, dan jasa lainnya) pada berbagai lapangan usaha ekonomi.

Ilmu kependudukan atau lebih dikenal sebagai ilmu demografi telah berkembang sejak 3 abad yang lalu, Graunt, seorang pedagang pakaian yang hidup pada abad ke-17 di London. Graunt pertama kali melakukan analisis data kelahiran dan kematian, dan dari hasil analisisnya di kemukakan batasan-batasan umum tentang kematian (mortality), kelahiran (fertility), migrasi, dan perkawinan dalam hubungannya proses penduduk. Kependudukan mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan suatu Negara. Biasanya, istilah kependudukan tidak dilihat dari isi kuantitas saja karena kualitas merupakan pendukung penting menunjang kuatnya proses pembangunan. Mantra (2000) menyatakan definisi demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, territorial, dan komposisi penduduk, serta perubahan perubahannya, dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi), dan mobilitas sosial (perubahan status).

1. Fertilitas (natalitas), merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah pertumbuhan penduduk, dalam fertilitas dikenal beberapa konsep tentang kelahiran, yaitu: lahir hidup, lahir mati, dan abortus;
2. Mortalitas, diartikan sebagai kematian yang terjadi pada anggota penduduk;
3. Gerak territorial (migrasi), adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain

- melampaui batas politik/Negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu Negara;
4. Mobilitas sosial, atau perubahan status adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata satu ke strata yang lainnya, baik itu berupa peningkatan atau penurunan dari segi status sosial. Hal itu termasuk pula segi penghasilan, yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok.

Studi antar bidang kependudukan dan proses demografi, serta variabel non demografi banyak digunakan dalam analisis kependudukan. Variabel demografi lebih menekankan pada karakteristik penduduk seperti: jumlah, pertumbuhan, persebaran, serta komposisi umur, jenis kelamin, status perkawinan, tempat lahir, dan tempat tinggal. Proses demografi merupakan variabel yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk yaitu: kelahiran, kematian, dan migrasi. Variabel non demografi cukup banyak, beberapa diantaranya yakni: antropologi, kesehatan, sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan humaniora, biologi/reproduksi, dan lingkungan (lihat Gambar 5.8).



Gambar 5.8: Hubungan Variabel Demografi dan Non Demografi

Adanya hubungan timbal balik yakni variabel pengaruh pada suatu saat atau waktu tertentu, dapat sebagai variabel terpengaruh. Sebaliknya, tergantung asumsi yang digunakan dalam penelitian,

memberikan suatu kebebasan kepada para pakar ilmu lain untuk melakukan studi lintas disiplin ilmu seperti studi ilmu kependudukan. Tersedianya kebebasan melakukan analisis yang lebih mendalam, hubungan antara variabel tersebut, akhirnya memunculkan kajian-kajian yang lebih spesifik seperti: demografi sosial, demografi politik, demografi matematika, demografi ekonomi. Sehingga, studi kependudukan menjadikan disiplin ilmu antar bidang. Disebabkan oleh ilmu antar bidang yang beragam, maka watak pembahasan sering kali dipengaruhi oleh latar belakang bidang ilmu yang melakukan. Metode maupun cara pendekatan untuk mengintegrasikan variabel demografi dan non demografi, dalam perencanaan pembangunan menjadi ciri spesifik studi kependudukan.

Penduduk terbagi menjadi bermacam golongan, diantaranya yaitu: penduduk belum produktif, penduduk usia produktif dan penduduk non produktif.

Adapun ulasannya adalah berikut:

1. Penduduk belum produktif, adalah penduduk yang memiliki usia di bawah 15 tahun. Penduduk usia tersebut diktakan sebagai penduduk yang belum mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam kegiatan ketenaga kerjaan;
2. Penduduk usia produktif, adalah penduduk yang masuk dalam rentang usia antara 15-64 tahun. Penduduk usia itu dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi;
3. Penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun, adalah penduduk yang masuk dalam usia tersebut sudah tidak mampu lagi menghasilkan barang maupun jasa dan hidupnya ditanggung oleh penduduk yang termasuk dalam usia produktif.

Penduduk usia produktif dianggap sebagai bagian dari penduduk yang ikut andil dalam kegiatan ketenagakerjaan yang sedang berjalan. Mereka dianggap sudah mampu dalam proses ketenagakerjaan dan mempunyai beban untuk menanggung hidup penduduk, yang masuk dalam katagori penduduk belum produktif dan non produktif. Penduduk usia produktif saat ini, tidak hanya di dominasi oleh

masyarakat dengan rentang usia diatas 20 tahun yang sudah selesai menempuh pendidikannya. Saat ini, remaja usia muda yang masih bersekolah pun sudah banyak yang memiliki usahanya sendiri. Dibeberapa Kota, kejadian seperti ini sudah biasa terlihat. Keterlibatan kaum muda dalam bekerja diawali sebagai tenaga pembantu di usaha keluarga, sebelum akhirnya mereka berusaha sendiri (BKKBN, 2014).

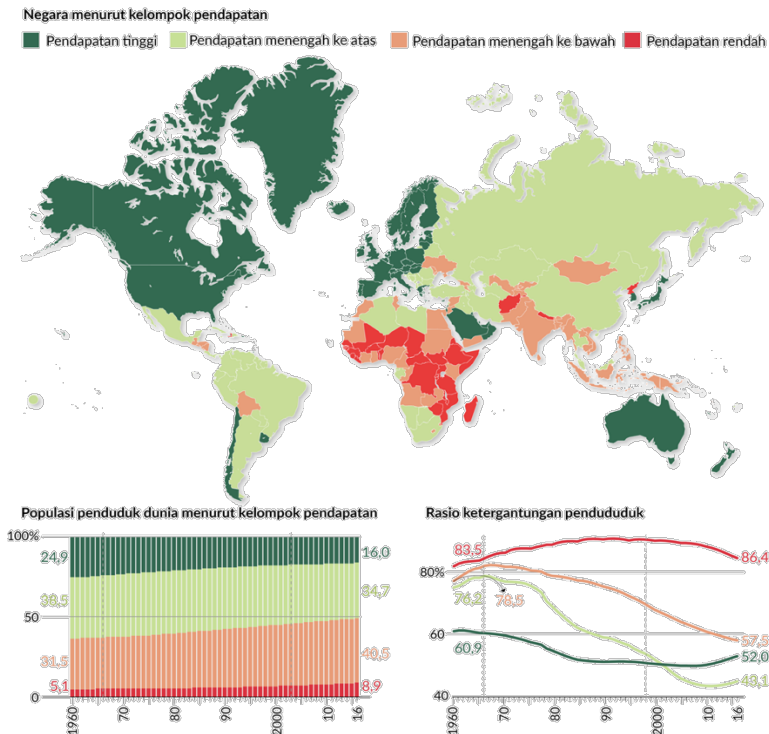
Lonceng peringatan populasi di Jepang sudah terdengar samar-samar sejak 1993. Saat itu, Jepang masih berlimpah dengan penduduk dengan usia produktif. Jumlah penduduk usia non-produktif masih lebih kecil. Sehingga, rasio ketergantungan di Negeri Matahari Terbit itu berada di angka 43,69%. Rasio ketergantungan menunjukkan perbandingan antara penduduk dengan usia tak produktif dengan penduduk usia produktif.

Penduduk usia non-produktif adalah mereka yang berumur 0-14 tahun, dan mereka yang berusia lebih dari 65 tahun. Sedangkan mereka yang di luar rentang usia itu, disebut sebagai usia produktif. Makin rendah persentasenya, maka makin rendah rasio ketergantungannya. Tapi setelah 1993, Jepang pelan-pelan terseret dalam jurang ketergantungan. Sejak itu rasio itu terus melorot. Tahun lalu mencapai 65,29%. Tak hanya itu, Gambar 5.9 memperlihatkan angka kelahiran lebih rendah dari angka kematian. Salah satu sinyalnya adalah, jumlah popok manula terjual lebih banyak dari pada popok untuk balita. Lonceng ini peringatan itu berdentang makin keras.

Studi National Institute of Population and Social Security Research memprediksi dalam 50 tahun ke depan, jumlah penduduk Jepang akan susut 39 juta orang. Dari 127 juta penduduk saat ini, akan sisa 88 juta orang. Jumlah itu diprediksi makin menciut pada tahun 2115, diperkirakan hanya sisa 51 juta orang Jepang. Pemerintah setempat menilai gejala ini adalah bom waktu demografi.

Gejala yang sama juga terjadi di negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan berpendapatan tinggi. Seturut dengan meningkatnya kualitas hidup, penduduk negara-negara makmur makin sehat dan berumur panjang. Porsi penduduk berumur jadi makin banyak. Sebaliknya, angka kelahiran berkurang. Alhasil komposisi penduduk berubah. Penduduk usia produktif makin

berkurang jika dibanding dengan penduduk usia non-produktif. Rasio ketergantungan meningkat. Negara berpendapatan tinggi rasio ketergantungannya naik. Australia pada 1993 rasio ketergantungan 50,03% menjadi 51,86% dan Kanada dari 47,72 % bertambah menjadi 48,24 %.



Gambar 5.9: Penduduk Dunia menurut Kelompok Pendapatan, 1960-2016

Sumber: World Bank, 2017 (diolah)

Sebaliknya, negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan menengah bawah, tren rasio ketergantungan justru turun. Rasio ketergantungan Rusia pada 1993 mencapai 50,93% jadi 45,10% pada 2016. Brazil, dalam rentang 24 tahun berubah dari 62,32% jadi 43,64%. Tiongkok, dari 51,51% menjadi 38,54%. Indonesia, yang masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah juga mengalami

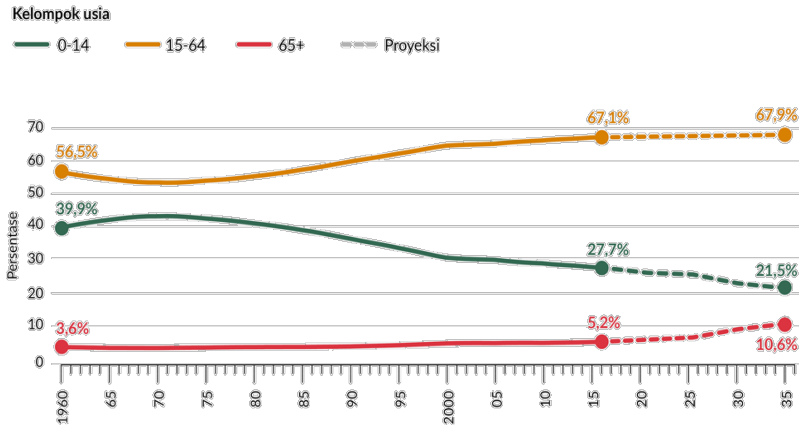
tren serupa. Pada 1993, rasio ketergantungan itu mencapai 63,44%. Angka itu perlahan turun. Tahun 2016, rasio ketergantungannya mencapai 48,92%.

Menurut data yang dihimpun World Bank dan BPS, dalam 20 tahun ke depan jumlah penduduk usia produktif makin bertambah, persentasenya juga naik 0,8 % dari kondisi sekarang menjadi 67,9%. Kondisi ini yang kerap disebut sebagai bonus demografi. Penduduk dengan usia produktif makin banyak.

Bertambahnya kelompok usia produktif ini akan jadi berkah jika mereka telah siap untuk bekerja secara produktif. Syaratnya, mereka memiliki kesehatan yang layak, pendidikan dan keterampilan yang memadai. Hal penting adalah ada lapangan pekerjaan yang mampu memanfaatkan potensi mereka. Bonus demografi bisa menjadi pedang bermata dua. Jadi, anugerah ini tak melahirkan tenaga kerja berkualitas. Jika tidak, akan menjadi bencana kependudukan bagi Indonesia.

Hanya dengan bekerja, bonus demografi itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, bila tidak bekerja maka bonus demografi itu tidak bermanfaat, bahkan dapat menimbulkan bahaya. Kondisi penduduk usia produktif di Indonesia, per Februari 2017 dari penduduk Indonesia ada 260,82 juta orang. Dari jumlah itu, 131,54 juta penduduk berusia produktif. Walau produktif, tak semuanya bekerja. Ada 7 juta pengangguran, yang kerja 124,53 juta orang.

Kualitas angkatan kerja kita masih jauh dari baik. Mayoritas pendidikannya SD ke bawah (42,23%). Lalu SMP (18,16%), SMA (16,48%), SMK (10,87%), Diploma (2,95%), dan Universitas (9,31%). Dari 7 juta pengangguran terbuka di Indonesia, 1,3 juta lulusan SD, jumlah serupa hanya lulusan SMP, lulusan SMA sederajat mencapai 2,9 juta orang, serta ulusan D-3 sebanyak 249 ribu. Sedangkan, sarjana terdapat 606 ribu tergolong sebagai pengangguran terbuka. Dari jumlah itu, 4,25 juta pengangguran itu sedang mencari kerja, sedangkan 2,493 juta pasrah soal pekerjaan dan pasar (peluang) untuk membuka dunia usaha hanya mencapai 205,2 ribu orang. Dengan kondisi ini, tak ada jalan lain selain menggenjot kualitas manusia Indonesia (lihat Gambar 5.10).



Gambar 5.10: Persentase Penduduk Indonesia menurut Kelompok Usia, 1960-2035

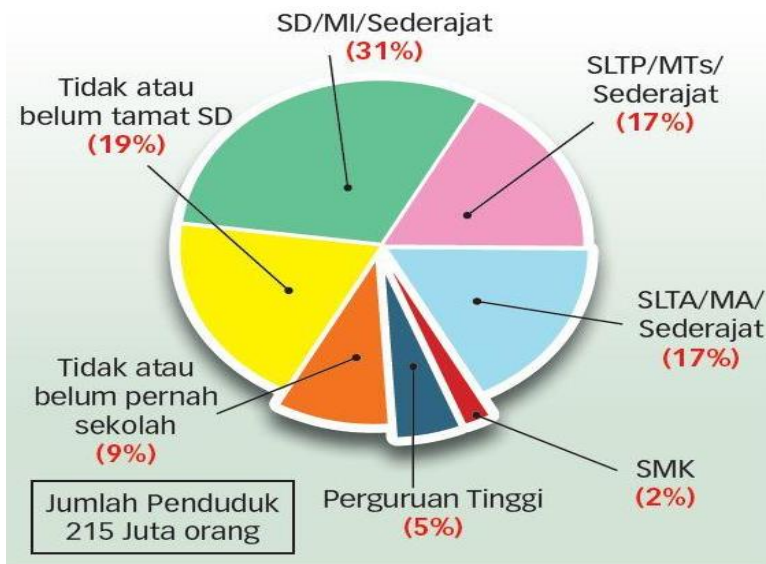
Sumber: World Bank dan BPS, 2017 (diolah)

Bonus demografi akan jadi berkah, jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk dapat terserap baik di pasar kerja. Era otomatisasi yang ditandai dengan penggunaan robot untuk menggantikan pekerjaan manusia, tidak bisa dihindari. Hal ini menuntut tenaga kerja Indonesia bisa berkompetisi dengan perkembangan yang ada. Tantangan tersebut harus ditanggapi serius. Jika tidak, bonus demografi kita bukan hanya akan percuma, tapi justru menjadi beban ekonomi. Sebab, tingkat pengangguran yang tinggi akan mendorong kemiskinan meluas dan kesenjangan melebar.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah untuk serius mengganti-sipasi potensi ancaman terhadap bonus demografi, terkait dengan perkiraan McKinsey & Company (2019), bahwa sebanyak 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia akan hilang dalam sekitar 10 tahun mendatang dan digantikan proses otomatisasi berupa mesin atau robot. McKinsey dalam laporannya, menyatakan adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan, akan mengubah dunia pekerjaan, termasuk di Indonesia. Namun, besarnya peluang ekonomi Indonesia untuk tumbuh di masa depan diproyeksikan juga akan menciptakan 27-46 juta pekerjaan baru pada 2030, saat bonus demografi tiba.

Pada 2030, Indonesia diprediksi mengalami masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun) lebih besar diban-ding penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode itu, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total penduduk yang diproyeksikan sebanyak 297 juta jiwa. Pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM nasional, jika tidak, RI terancam jatuh menjadi negara miskin karena banyak pengangguran. Pasalnya, karakteristik SDM tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Berdasarkan data Sensus BPS 2010 yang terangkum pada Gambar 5.11, 60% tenaga kerja nasional berasal dari lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Konsekuensinya, tenaga kerja akan lebih banyak terserap di industri padat karya, bukan industri berteknologi tinggi. Padahal, bonus demografi bisa menjadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk dapat terserap baik di pasar kerja.



Gambar 5.11: Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan di Indonesia, 2010

Sumber: Sensus BPS, 2010 (diolah)

Pemerintah harus men-dorong berbagai sektor yang sesuai dengan karakter tenaga kerja nasional. Revolusi ekonomi global akan membawa Indonesia berubah menjadi bagian dari perekonomian yang informasional, ekonomi berbasis informasi, tapi di sisi lain masyarakat masih gagap teknologi. Indonesia tidak hanya mengalami masalah ke-miskinan dan kesenjangan ekonomi, tapi juga kesenjangan digital. Yang dapat bersaing hanya orang-orang tertentu, sementara sebagian masyarakat menengah dan kebawah, akan semakin tersingkirkan.

Indonesia perlu mencontoh Tiongkok yang sukses mengoptimalkan jumlah penduduk tidak saja sebagai pasar, namun juga produsen bagi apa pun yang dibutuhkan dunia. Untuk itu, antara industri yang dikembangkan dan pendidikan harus terhubung dengan kuat. Di pengembangan SDM, pemerintah sangat concern dengan sekolah vokasi. Namun, ini tidak bisa dikerjakan biasa-biasa saja, harus serius, luar biasa, dan terhubung dengan industri terutama industri pertanian perdesaan.

Keikutsertaan remaja usia muda dalam kegiatan ekonomi, dapat membantu memudahkan pemerintah mensosialisasikan bonus demografi. Bonus demografi ini dapat dimanfaatkan oleh remaja untuk membuka usaha kreatifnya sendiri. Untuk memanfaatkan bonus demografi, pemerintah tidak hanya dengan menggunakan sektor industri tapi juga dapat menggunakan usaha kreatif yang dikelola oleh para remaja.

Bonus demografi adalah masa di mana angka beban ketergantungan antara penduduk usi produktif dengan penduduk usia tidak produktif paling rendah. Jadi, setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif (Djoko dkk, 2015). Bonus demografi ini, akan menguntungkan pemerintah jika dapat memanfaatkan dan memfasilitasinya dengan baik. Namun, akan menjadi masalah serius jika pemerintah tidak mempersiapkan masyarakatnya menghadapi bonus demografi, yang sebenarnya akan sangat menguntungkan. Penduduk usia produktif, diharapkan mampu ikut berperan dengan baik menghadapi bonus demografi yang akan membantu meringankan beban hidup seseorang (BKKBN, 2014).

Bonus demografi yang muncul melalui transisi demografi tersebut, jelas pada awalnya berasal dari keberhasilan sebuah Negara dalam mengendalikan jumlah penduduk, seperti dengan keberhasilannya menurunkan tingkat fertilitas dan meningkatkan kualitas kesehatan melalui program KB, telah menjadi awal munculnya bonus demografi tersebut. Kesempatan baik yang telah ada ini, tentu tidak boleh berhenti hanya menjadi sebuah wacana, tetapi perlu dilakukan kerja ekstra. Sehingga, kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kondisi ini benar-benar dapat diraih dan dicapai, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Prahas, 2012).

Bonus demografi yang sangat berhubungan erat dengan penduduk usia produktif, akan menjadi keuntungan yang besar bagi pemerintah, jika dapat memanfaatkannya. Proses baik yang dilakukan pemerintah maupun penduduk usia produktif itu sendiri, untuk meraih kesuksesan dalam bonus demografi sangat banyak dan rumit. Pemerintah harus membuat penduduk usia produktif yang masih dalam katagori umur bersekolah, mau untuk mengikuti program wajib belajar yang disediakan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemerintah itu, sangat diperlukan, apalagi untuk kelompok masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya program wajib belajar.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat keterkaitan dan kesesuaian atau *link and match* antara dunia usaha dan pendidikan. Dengan demikian, dinamika perkembangan industri yang mengarah pada penguasaan teknologi tinggi melalui otomatisasi, mesti diantisipasi dengan memacu kenaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan yang sesuai dan memadai.

Hal ini bertujuan memastikan bahwa saat bonus demografi tiba, penduduk usia produktif akan benar-benar menjadi produktif karena memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualitas *skill* mereka. Jangan sampai, penduduk usia produktif gagal menjadi produktif lantaran tidak mendapatkan kesempatan. SDM Indonesia yang berkualitas, produktif, dan inovatif dinilai menjadi kunci sukses memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.



Gambar 5.12: Piramida Penyebaran Populasi Dunia, 2017
Sumber: Population Pyramid, 2017

Terdapat hampir 200 negara yang tersebar di seluruh dunia dan berdasarkan penelitian, jumlah populasi dunia ada sekitar 7,5 miliar yang tersebar dan menempati ratusan negara tersebut. Kita dapat memahami seberapa besar angka 7,5 miliar itu dan berapa negara terbesar yang dapat menaunginya. Hampir 1,4 miliar penduduk dunia berada di India dan China, sementara miliaran orang lainnya tersebar ke beberapa negara lain hingga ke negara dengan ukuran 0,001% dari kedua negara tersebut.

Visualisasi dari situs Population Pyramid dapat memberikan kita sebuah gambaran yang jelas mengenai ketersebaran 7,5 miliar penduduk dunia. Dengan warna dan ukuran berbeda, tampak dari Gambar 5.12 bahwa populasi penduduk berdasarkan wilayah negara.

Hal yang menarik adalah kita dapat mengetahui perkiraan jumlah penduduk di tahun yang akan datang atau di tahun yang lalu. Misalnya, kita dapat mengetahui jumlah populasi dunia di tahun 2024 dengan menekan tombol +5 di pojok kanan atas situs tersebut. Hal pertama yang dapat kita perhatikan dalam grafik tersebut adalah wilayah Asia cukup menyumbang angka yang besar terkait dengan jumlah penduduk dunia. Sekitar 60% dari Tabel 5.2, dipenuhi dengan warga Asia dan negara-negara yang menaunginya.

Tabel 5.2: Proyeksi Populasi Terbanyak dari 15 Negara, 2019

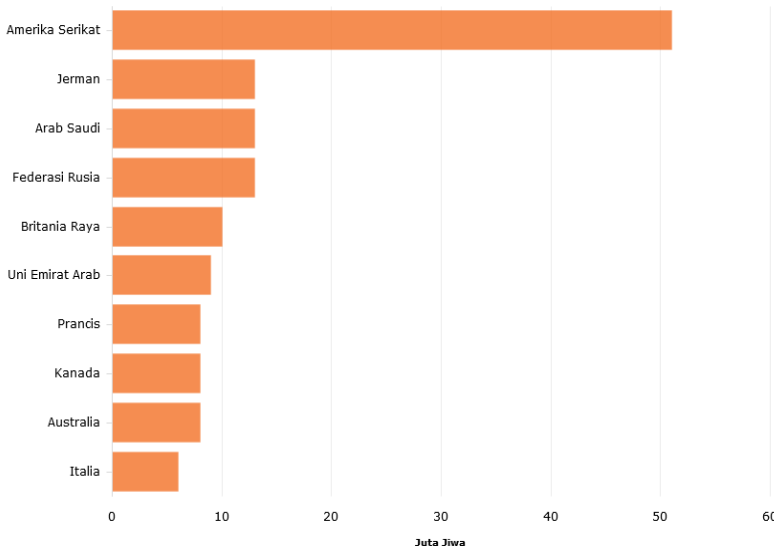
No.	Negara	Populasi (Jiwa)
1.	China	1.398.582.297
2.	India	1.373.605.069
3.	United States of America	331.195.364
4.	Indonesia	269.136.421
5.	Brazil	214.457.810
6.	Pakistan	204.564.744
7.	Nigeria	201.748.560
8.	Bangladesh	168.618.092
9.	Russian Federation	143.101.836
10.	Mexico	133.326.828
11.	Japan	125.402.911
12.	Ethiopia	109.406.328
13.	Philippines	106.886.636
14.	Egypt	98.771.387
15.	Viet Nam	97.270.778

Sumber: Pew Research Center, 2019

Sekitar 75 % orang tinggal di Asia atau Afrika. Sementara wilayah Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania hanya menyumbang 25% dari total jumlah populasi yang ada. Terdapat beberapa negara yang menonjol dalam visualisasi data. Misalnya, China dan India bergabung menjadi 2,7 miliar orang dan menyumbang 36% dari total populasi global. Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan

Pakistan berada di peringkat 3 hingga 6, memiliki satu miliar orang di antara mereka. Bangladesh juga merupakan negara yang cukup menonjol dengan populasi terpadat di dunia. Sebanyak 1.138,9 orang per Km² memadati negara asal Asia tersebut.

Jumlah penduduk dan penduduk umur produktif yang besar, serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah, bila daya dukung ekonomi yang efektif di Negara itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan kesempatan kerja. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan keadaan penduduk Eropa sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, Negara-negara Eropa sudah merasakan kekhawatiran terhadap pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan kebutuhan mereka. Puncaknya dicetuskan dalam teori Malthus yang pada dasarnya menghimbau pengurangan pertumbuhan penduduk karena daya dukung ekonomi sudah semakin terbatas (Afrida, 2003).



Gambar 5.13: Negara dengan Penduduk Migran Internasional Terbesar, 2019

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2019

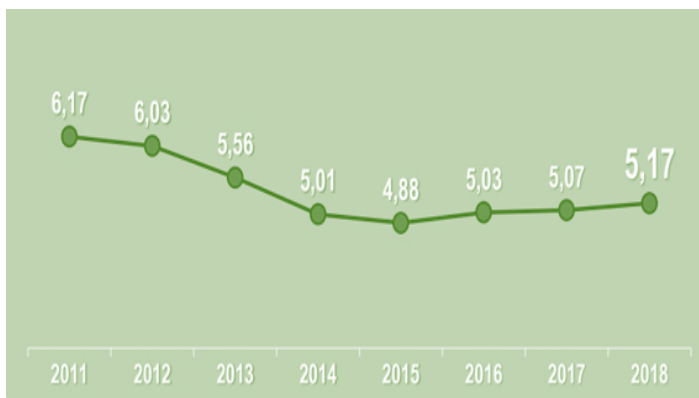
Laporan International Migration 2019, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah penduduk migran internasional terbanyak di dunia. Setidaknya, terdapat 51 juta orang imigran dunia yang hidup di Amerika Serikat pada tahun ini. Jumlahnya bertambah 16 juta orang sejak tahun 2000. Negara kedua dengan penduduk migran terbanyak adalah Jerman. Laporan yang dirilis United Nations menyebutkan negara tersebut diisi oleh 13 juta orang migran. Arab Saudi mengikuti dengan jumlah yang sama.

Definisi migran internasional adalah orang yang tinggal di suatu negara atau area yang berbeda dengan negara tempat lahir. Makna ini juga mengacu pada jumlah orang-orang yang tinggal di sebuah negara yang berbeda dengan kewarganegaraannya.

Tingkat kepadatan penduduk yang diaibatkan oleh peledakan kuantitas SDM itu sendiri, ekspansi arus migrasi, dan faktor lainnya dapat berdampak pada masalah pembangunan sosial seperti: tingginya kriminalitas, angka pengangguran yang merajalela, dan peledakan tingkat kemiskinan. Selain itu, maraknya perdagangan manusia (human trafficking) khususnya di Indonesia, sebagai akumulasi dari permasalahan tenaga kerja yang sebagian besar tidak terserap disektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha. Dengan kata lain, struktur perekonomian yang masih berbasis padat modal, tidak berdampak nyata bagi pertumbuhan angkatan kerja, sehingga banyak dari penduduk golongan miskin (kebawah) mencari peluang dan kesempatan kerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Bagi yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen legal (paspor, visa, TOEFL/IELTS, dan persyaratan penunjang lain), maka kebanyakan mereka akan memilih "jalur hitam" untuk memuluskan bekerja di Negara luar. Belum lagi banyak kasus perdagangan manusia dengan dalih kemudahan (akses) mendapatkan pekerjaan dan gaji atau upah tinggi di luar Negeri, sehingga mendekati mereka sebagai korban dari kejahatan tersebut dan merugikan Indonesia dari sektor devisa tenaga kerja. Hal ini sejalan dalam sebuah jurnal internasional yang ditulis oleh Amalia dkk (2019) berjudul "Underground Economy: The Shadow Effect of Human Trafficking". Temuan penelitian menyatakan bahwa para pekerja tersebut dan Indonesia mengalami kerugian, karena dilakukan secara

ilegal dan terjadi *undergorund economy*. Penyebab terjadinya perdagangan manusia disebabkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Sementara, berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia yaitu: pendanaan, tidak semua instansi pemerintah yang menangani masalah tersebut, mehamami prosedur, dan belum jelasnya kebijakan restitusi.

Lebih lanjut, Tarigan (2012) menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi disuatu wilayah, pertambahan pendapat tersebut adalah kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi). Hal ini berarti dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut, juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.



Gambar 5.14: Laju Pertumbuhan PDB Indonesia, 2011-2018
Sumber: BPS, 2019

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal tetap terjaga pada angka 5%. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada 2020 dan 5,2% ditahun 2021. Sedangkan, konsumsi

rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh mengingat rendahnya inflasi dan kuatnya pasar tenaga kerja.

Dalam laporan tersebut, World Bank memproyeksikan konsumsi rumah tangga bakal terus tumbuh stabil pada angka 5,2% pada 2019 dan bakal terus berlanjut hingga 2021 dengan capaian yang sama. Kebijakan fiskal pemerintah juga diproyeksikan semakin akomodatif dan bakal menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun ke depan. Meski pertumbuhannya cenderung lambat, investasi juga diproyeksikan terus bertumbuh mengingat dengan selesainya penyelenggaraan Pemilu 2019. Selesainya gelaran 5 tahunan tersebut mereduksi ketidakpastian politik dan menumbuhkan sentimen bisnis pada sisa 2019 dan tahun-tahun ke depan.

Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diproyeksikan bakal tumbuh 5% pada 2019 dan diproyeksikan bakal terus tumbuh pada 2020 dan 2021 dengan proyeksi pertumbuhan masing-masing sebesar 5,5% dan 6%. Perlu dicatat, bahwa angka pertumbuhan investasi yang melalui Gambar 40 masih lebih rendah, dibandingkan dengan capaian pertumbuhan investasi pada 2018 yang mencapai 6,7%.

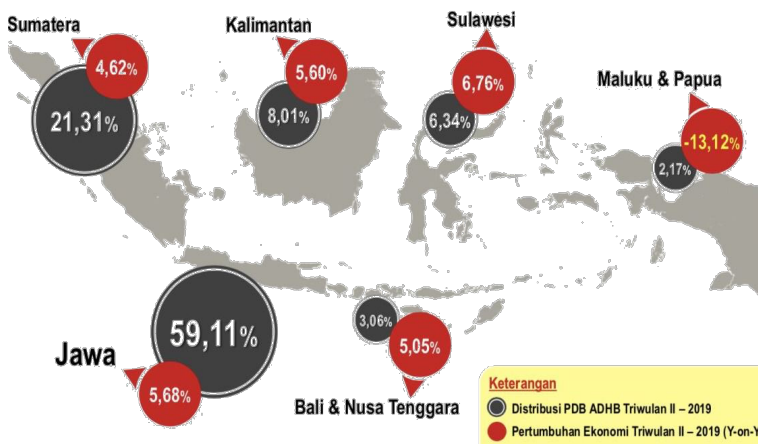
Di tengah perang dagang yang berkejolak, ekspor diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian sebesar -1% pada 2019 dan diproyeksikan akan kembali tumbuh pada 2020 dan 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,5% dan 2,8%. Akibat pertumbuhan investasi yang diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, impor Indonesia juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,5% pada 2019. Meski demikian, impor Indonesia diproyeksikan tetap kembali tumbuh pada 2020 dan 2021 dengan proyeksi pertumbuhan impor mencapai 2% dan 3,7%.

Dari sisi lapangan usaha, 2 sektor yang dinilai yakni agrikultur dan industri diproyeksikan tetap tumbuh pada 2019, meski lebih rendah dibandingkan dengan 2018. Sektor agrikultur diproyeksikan tumbuh 3,3% pada 2019 dan akan terus pada 2020 dan 2021 dengan capaian pertumbuhan sebesar 3,7% dan 3,6%. Sektor industri juga diproyeksikan tumbuh sebesar 3,8% pada 2019 dan akan terus tumbuh

pada 2020 dan 2021 dengan capaian masing-masing sebesar 4,4% dan 4,2%.

Untuk diketahui, pertumbuhan sektor agrikultur dan industri pada 2018 tercatat masing-masing sebesar 3,9% dan 4,3%. Adapun sektor yang diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 adalah sektor jasa yang diproyeksikan dapat tumbuh 6,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 yang tumbuh 5,8%. Meski demikian, sektor jasa diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan pada 2020 dan 2021 dengan proyeksi masing-masing sebesar 6,1% dan 6,5% (perhatikan Gambar 5.15).

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan II-2019 mencapai Rp 3.963,5 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 2.735,2 triliun. Hal tersebut merupakan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru saja merilis ekonomi Indonesia di Kuartal II-2019. Ekonomi Indonesia triwulan II-2019 dibanding triwulan II-2018 tumbuh 5,05 % (year on year). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,73%.



Gambar 5.15: Perekonomian Indonesia secara Spasial, Triwulan II-2019

Sumber: BPS, 2019

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial (per daerah) pada kuartal II-2019 didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,11%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,31%, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,01%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok Provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 6,76% (yoy).

E. Capaian Pertambahan Penduduk

Pertumbuhan penduduk (yang juga mengakibatkan pertumbuhan penduduk umur produktif meskipun dengan tenggang waktu) secara tradisional, dianggap merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jelaslah, bahwa hal ini akan tergantung pada kemampuan sistem ekonomi untuk menyerap dan mempekerjakan secara produktif tenaga kerja tambahan itu. Suatu kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan tingkat dan jenis akumulasi modal, serta tersedianya faktor-faktor lain yang terkait seperti keterampilan manajerial dan administrasi (Todaro, 2000).

Hal ini bertujuan memastikan bahwa saat bonus demografi tiba, penduduk usia produktif akan benar-benar menjadi produktif karena memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualitas skill mereka. Jangan sampai, penduduk usia produktif gagal menjadi produktif lantaran tidak mendapatkan kesempatan. SDM Indonesia yang berkualitas, produktif, dan inovatif dinilai menjadi kunci sukses memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang, maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta ketrampilan mereka (Mulyadi, 2003).

Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap

tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2003).

Dinamika demografis Indonesia pada masa yang akan datang sangat tergantung pada kecenderungan tingkat kelahiran pada masa yang akan datang. Tingkat kelahiran yang turun dan tetap di bawah tingkat penggantian penduduk akan menjamin situasi demografis yang sesuai dengan target-target pembangunan kependudukan, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan 2015-2030. Jadi, penurunan tingkat kelahiran merupakan syarat utama untuk terwujudnya dinamika demografis yang diproyeksikan. Oleh karena itu, upaya pengaturan tingkat kelahiran di Indonesia harus ditingkatkan, terutama melalui pemenuhan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Situasi proses pembangunan akan menentukan luaran pembangunan, seperti jenis dan tingkat output barang dan jasa, tingkat remunerasi, dan jumlah pekerja, partisipasi pendidikan, status kesehatan dan gizi, dan kualitas lingkungan. Selanjutnya, luaran pembangunan akan menentukan proses demografis kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Sebagai contoh, pendidikan perempuan yang rendah dan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi perkotaan modern yang rendah mengindikasikan peran perempuan masih tradisional dalam beberapa masyarakat. Selanjutnya, situasi ini dapat mengakibatkan fertilitas tinggi dan status perempuan dalam masyarakat tetap rendah (Rajagukguk & Samosir, 2015).

Pemahaman tentang hubungan yang penting antara dinamika demografis dan pembangunan telah melahirkan berbagai komitmen pembangunan, baik nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara implisit menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk dinamika demografis dan pembangunan yang dicita-citakan, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia yang pada saat ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bertujuan untuk:

“Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 juga ditegaskan bahwa:

“Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik, akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi”.

Menurut Todaro (2000), pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu:

1. Makanan/*sustenance*, artinya segala sesuatunya yang tidak hanya digunakan untuk mengganjal perut, tetapi juga mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik;
2. Jati diri/*self-esteem*, artinya adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa

pantas dan layak untuk melakukan atau mengejar sesuatu, dan lain-lain;

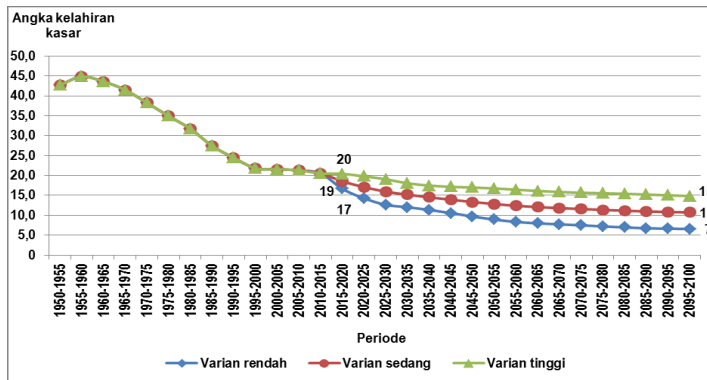
3. Kebebasan/*freedom*, artinya kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini.

Ranis & Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih penuh. Secara sempit, pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia.

Kemudahan manusia dari masa ke masa (khususnya era modern) saat ini dalam mengakses sektor kesehatan dan pendidikan, rupanya telah berpengaruh cukup signifikan dalam melahirkan generasi selanjutnya. Tujuan pembangunan manusia secara tidak langsung adalah membentuk dan melahirkan kembali keturunan, sehingga keberlanjutan pembangunan itu sendiri dapat tercapai. Tetapi, masalah yang terjadi dikemudian hari adalah peledakan penduduk yang tidak terkendali, sebagai akibat dari angka kelahiran (fertilitas) kian menambah dan tanpa diimbangi dengan kelayakan berbagai aspek.

Pada periode 1950-1970 tingkat kelahiran di Indonesia sangat tinggi. Indonesia bahkan mengalami ledakan bayi (baby boom) pada periode 1955-1960. Angka kelahiran kasar lebih dari 40 kelahiran per 1.000 penduduk (Gambar 5.16). Hal ini dapat disebabkan karena pasangan suami istri melanjutkan mempunyai keturunan atau pasangan suami istri yang baru menikah mulai mempunyai keturunan setelah perang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia pada masa lalu juga dapat disebabkan karena struktur perekonomian yang bersifat tradisional yang memerlukan banyak tenaga kerja di sektor pertanian. Akibatnya, keluarga-keluarga memilih mempunyai anak banyak supaya ada cukup tenaga kerja untuk bekerja di sektor pertanian. Budaya "banyak anak, banyak rejeki", serta harapan anak sebagai jaminan masa tua juga mendorong keluarga Indonesia pada masa lalu untuk mempunyai anak banyak.

Angka kelahiran kasar di Indonesia mulai menurun pada periode 1970-1975 setelah program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh Pemerintah mulai dilaksanakan di Jawa dan Bali. Peningkatan akses terhadap informasi dan pelayanan KB berhasil meningkatkan prevalensi kontrasepsi dan selanjutnya menurunkan tingkat kelahiran. Angka kelahiran kasar turun menjadi sekitar 30 kelahiran per 1.000 penduduk pada periode 1970-1985 dengan laju penurunan yang meningkat. Angka kelahiran kasar kemudian menurun menjadi sekitar 20 kelahiran per 1.000 penduduk pada periode 1985-2015. Laju penurunan paling tinggi terjadi pada periode 1980-1990 ketika program KB telah diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia (lihat Gambar 5.16).



Gambar 5.16: Proyeksi Angka Kelahiran Kasar di Indonesia, 1950-2100 (kelahiran per 1.000 penduduk)

Sumber: UN, 2015

Catatan: Angka kelahiran kasar pada periode 1950-2015 merupakan perkiraan dan pada periode 2015-2100 merupakan proyeksi untuk varian rendah, sedang, dan tinggi.

Jika fertilitas terus turun seperti yang diasumsikan (varian proyeksi penduduk sedang) maka angka kelahiran kasar Indonesia diproyeksikan akan turun menjadi 15,9 kelahiran per 1.000 penduduk pada periode 2025-2030, 13,3 pada periode 2045-2050 dan 10,7 pada periode 2095-2100. Jadi, angka kelahiran kasar Indonesia diproyeksikan akan berkurang sekitar separuh antara periode 2005-2010 dan 2095-

2100. Jika tingkat kelahiran lebih rendah (varian proyeksi penduduk rendah) daripada yang diasumsikan maka angka kelahiran kasar Indonesia akan menjadi tujuh (7) pada periode 2095-2100, sementara jika tingkat kelahiran lebih tinggi daripada yang diasumsikan (varian proyeksi penduduk tinggi), maka angka kelahiran kasar Indonesia akan menjadi 15 pada periode 2095-2100.

Pada periode 2010-2015 angka fertilitas total Indonesia lebih tinggi sekitar dua kali angka fertilitas total Singapura. Kemajuan pembangunan yang pesat di Singapura, khususnya pembangunan ekonomi, turut berkontribusi terhadap penurunan fertilitas yang cepat di negara ini.

Harapan hidup saat lahir adalah jumlah tahun rata-rata yang diharapkan akan dihidupi oleh suatu kohor hipotetis individu yang selama hidup akan mengikuti pola kematian pada suatu periode. Angka ini dinyatakan dalam tahun. Harapan hidup saat umur tepat x tahun adalah jumlah rata-rata tahun yang tersisa yang diharapkan akan dihidupi oleh suatu kohor individu pada umur x yang selama sisa hidup mereka akan mengikuti pola mortalitas pada suatu periode. Angka ini dinyatakan dalam tahun.

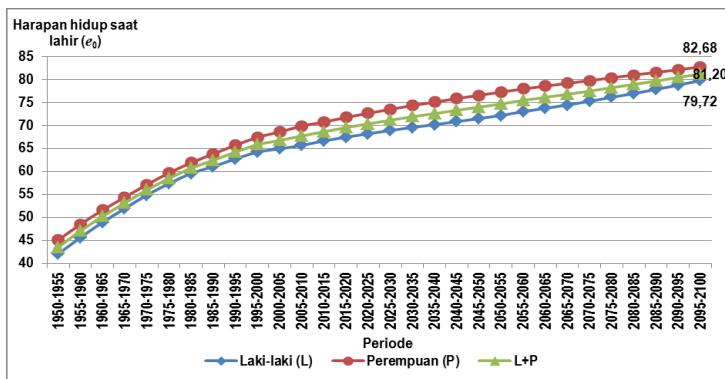
Harapan hidup pada umur 15 tahun adalah jumlah rata-rata tahun yang tersisa yang diharapkan akan dihidupi oleh suatu kohor individu pada umur 15 tahun yang selama sisa hidup mereka akan mengikuti pola mortalitas pada suatu periode. Angka ini dinyatakan dalam tahun.

Harapan hidup pada umur 60 tahun adalah jumlah rata-rata tahun yang tersisa yang diharapkan akan dihidupi oleh suatu kohor individu pada umur 60 tahun yang selama sisa hidup mereka akan mengikuti pola mortalitas pada suatu periode. Angka ini dinyatakan dalam tahun.

Harapan hidup pada umur 80 tahun adalah jumlah rata-rata tahun yang tersisa yang diharapkan akan dihidupi oleh suatu kohor individu pada umur 80 tahun yang selama sisa hidup mereka akan mengikuti pola mortalitas pada suatu periode. Angka ini dinyatakan dalam tahun.

Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) atau Life Expectancy (e_0) merupakan bagian dari komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Angka kematian bayi berbanding terbalik dengan harapan hidup saat lahir. Jika angka kematian bayi menurun, maka harapan hidup saat lahir meningkat. Angka kematian bayi yang tinggi mengakibatkan harapan hidup saat lahir Indonesia rendah pada periode 1950-1955. Secara rata-rata penduduk Indonesia hanya dapat hidup sampai usia 43,5 tahun (Gambar 5.17). Pada periode yang sama, secara rata-rata penduduk Malaysia hidup 11,3 tahun lebih lama dan penduduk Singapura hidup 16,7 tahun lebih lama. Perbaikan tingkat kesehatan penduduk mengakibatkan harapan hidup saat lahir Indonesia meningkat menjadi 68,6 tahun pada periode 2010-2015.



Gambar 5.17: Proyeksi Harapan Hidup Saat Lahir (e_0) menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 1950-2100

Sumber: UN, 2015

Catatan: Harapan hidup saat lahir pada periode 1950-2015 merupakan perkiraan dan pada periode 2015-2100 merupakan proyeksi untuk varian sedang.

Pada periode yang sama, secara rata-rata penduduk Malaysia hidup 5,9 tahun lebih lama dan penduduk Singapura hidup 14,0 tahun lebih lama. Harapan hidup saat lahir Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 71,1 tahun (68,9 tahun untuk laki-laki dan 73,5 tahun untuk perempuan) pada periode 2025-2030, 73,9 tahun pada periode 2045-2050 (71,5 tahun untuk laki-laki dan 76,5 tahun untuk perempuan), dan 81,2 tahun pada periode 2095-2100 (79,7 tahun untuk laki-laki dan 82,7 tahun untuk perempuan). Jadi, secara rata-rata pada akhir abad 21 penduduk Indonesia diproyeksikan akan hidup lebih lama sekitar 12 tahun daripada pada periode 2010-2015. Pertambahan harapan hidup saat lahir akan berimplikasi pada peningkatan penduduk usia lanjut dan pemenuhan kebutuhan perlindungan sosial mereka.

Pola harapan hidup menurut umur mengikuti huruf “J terbalik”. Harapan hidup lebih rendah pada awal kehidupan, mencapai tingkat tertinggi pada kelompok umur tertentu dan kemudian menurun sesuai dengan bertambahnya umur. Harapan hidup Indonesia paling tinggi pada penduduk umur 5-9 tahun pada periode 1950-1970.

Pertambahan jumlah penduduk Indonesia harus diantisipasi dengan penyediaan dan pemenuhan berbagai fasilitas pembangunan yang dibutuhkan oleh setiap kelompok penduduk. Penurunan jumlah penduduk (usia 0-14 tahun), berarti peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan Indonesia pada masa yang akan datang. Peningkatan penduduk usia produktif, merupakan tantangan untuk memanfaatkan jendela kesempatan demografis melalui peningkatan investasi sumber daya manusia khususnya pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap pekerjaan yang produktif dan remuneratif untuk menuai bonus demografis yang lebih besar. Pertambahan yang pesat penduduk usia lanjut, merupakan tantangan untuk peningkatan akses terhadap perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut. Peningkatan rasio feminitas merupakan tantangan untuk peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan dimasa mendatang.



CHAPTER 6
KUALITAS EKONOMIKA GIZI
INDONESIA

A. Transformasi Ekonomi Gizi: Catatan Utama

Tema sentral pembangunan nasional dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerja. Satu diantara upaya yang mempunyai dampak cukup penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Sejalan dengan itu, perlu perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan kerja, serta faktor-faktor yang erat hubungannya seperti keadaan gizi golongan pekerja, dan cara-cara untuk memperbaiki status golongan ini semakin penting untuk diteliti.

Zat gizi adalah kumpulan zat yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi, mempunyai nilai yang sangat penting (tergantung dari macam-macam bahan makanannya) untuk memperoleh energi, guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari bagi para pekerja. Termasuk dalam memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yaitu penggantian sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung dalam tubuh (dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh). Proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terpelihara dengan baik akan menunjukkan baiknya kesehatan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sehat tentunya memiliki daya pikir dan daya kegiatan fisik sehari-hari yang cukup tinggi (Marsetyo & Kartasapoetra, 1991).

Tubuh manusia memerlukan sejumlah pangan dan gizi secara tetap, sesuai dengan standar kecukupan gizi, namun kebutuhan tersebut tidak selalu dapat terpenuhi. Penduduk yang miskin tidak mendapatkan pangan dan gizi dalam jumlah yang cukup. Mereka menderita lapar pangan dan gizi, mereka menderita gizi kurang (Handajani, 1996). Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Bila kekurangan itu ringan, tidak akan dijumpai penyakit defisiensi yang nyata, tetapi akan timbul konsekwensi fungsional yang lebih ringan dan

kadang-kadang tidak disadari kalau hal tersebut karena faktor gizi (Agung, 2002).

Seperti yang disebutkan oleh Karyadi (1987) bahwa prevalensi anemi dan gizi kurang masih tinggi di Indonesia. Dipertegas juga oleh Hartwell et al. (1996) bahwa prevalensi anemi gizi, kekurangan vitamin B1 dan dalam keadaan gizi kurang masih tinggi di Indonesia. Diantara beberapa masalah gizi utama yang terdapat di Indonesia, maka anemia gizi terutama kurang zat besi adalah yang paling umum dijumpai. Prevalensi anemia gizi pada pekerja di Indonesia terdapat sebanyak 40 % dan banyak dijumpai pada pekerja berat. Prevalensi anemia gizi ini tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Prevalensi yang tinggi membawa akibat yang tidak baik terhadap individu maupun masyarakat, karena menurunkan kualitas manusia dan sosial ekonomi, serta menghambat pembangunan bangsa. Hal ini erat hubungannya dengan konsekuensi fungsional anemia gizi tersebut, yaitu menurunkan produktivitas kerja (Husaini, 1997; Handajani, 1996).

Berbagai penelitian baik yang dilakukan di luar negeri, maupun di Indonesia menunjukkan bahwa keadaan gizi kurang dapat menghambat aktivitas kerja yang akan menurunkan produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena kemampuan kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah energi yang tersedia, di mana energi tersebut diperoleh dari makanan sehari-hari dan bilamana jumlah makanan sehari-hari tak memenuhi kebutuhan tubuh, maka energi didapat dari cadangan tubuh (Soegih dkk, 1987).

Kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal menimbulkan rasa lapar dalam jangka waktu tertentu berat badan menurun yang disertai dengan kemampuan (produktivitas) kerja. Kekurangan yang berlanjut akan mengakibatkan keadaan gizi kurang dan gizi buruk. Bila tidak ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang mencukupi, akhirnya akan mudah terserang infeksi dan penyakit (Martianto, 1992).

Dipertegas oleh Mihardja (1994) bahwa telah banyak dilaporkan tentang defisiensi zat gizi besi dapat menimbulkan gangguan pada fungsi ketahanan immunologis, menurunkan konsentrasi belajar, kapasitas kerja, dan lain-lain. DeMaeyer et al. (1989) menyebutkan

bahwa akibat defisiensi zat gizi besi pada orang dewasa pria dan wanita, yakni penurunan kerja fisik dan daya pendapatan, serta penurunan daya tahan terhadap kelelahan.

Prevalensi anemia gizi di Indonesia sangat tinggi dan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan secara terpisah, anemia di Indonesia terutama disebabkan oleh defisiensi gizi besi (Husaini, 1989).

Syarief (1997) menyebutkan bahwa pada usia dewasa, faktor gizi berperan untuk meningkatkan ketahanan fisik, produktivitas kerja, dan selanjutnya disebutkan bahwa tanpa mengabaikan arti penting dari faktor lain. Gizi merupakan faktor kualitas SDM yang pokok, karena unsur gizi tidak hanya sekedar memengaruhi derajat kesehatan dan ketahanan fisik, tetapi juga menentukan kualitas daya pikir atau kecerdasan intelektual yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Dengan status gizi yang rendah, akan sulit untuk hidup secara sehat, aktif, produktif yang secara berkelanjutan, dan akan menjadi penyakit turunan.

Manusia untuk kehidupannya membutuhkan energi, hal ini demi berlangsungnya proses-proses dalam tubuhnya, seperti berlangsungnya proses peredaran/sirkulasi darah, denyut jantung, pemapasan, pencernaan, proses-proses fisiologis lainnya, selanjutnya untuk melakukan berbagai kegiatan atau melakukan pekerjaan fisik. Energi dalam tubuh manusia dapat dihasilkan dari pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan demikian, agar manusia selalu tercukupi energinya diperlukan pemasukan zat-zat makanan yang cukup pula ke dalam tubuhnya. Manusia yang kurang makan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan-pekerjaan fisik, maupun daya pemikirannya, karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Dengan begitu, orang tidak dapat bekerja dengan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan, kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat, yaitu kurang gizi khususnya energi (Marsetyo & Kartasapoetra, 1991).

Anak-anak dipacu oleh orang tuanya agar rajin bekerja, rajin belajar agar kelak menjadi orang yang berguna. Akan tetapi, kurang

diperhatikan makannya yang bergizi, maka harapan orang tua tersebut besar kemungkinannya tidak akan tercapai, bahkan anak tersebut selain pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu, juga akan menjadi anak yang lemah, tidak periang dan tidak bergairah. Demikian pula seorang dewasa yang telah bekerja, dan bekerja keras tanpa diimbangi dengan makanan yang bergizi yang dimakannya setiap hari, maka dalam waktu dekat ia akan menderita kekurangan tenaga, lemas, dan tidak bergairah untuk melakukan pekerjaannya seperti semula. Contoh-contoh tersebut hendaknya diperhatikan oleh orang tua dan oleh pengusaha di mana orang dewasa tadi bekerja, mengapa anak dan orang dewasa tadi menjadi lesu, lemah, kurang berdaya untuk melakukan segala sesuatu kegiatan.

B. Menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs)

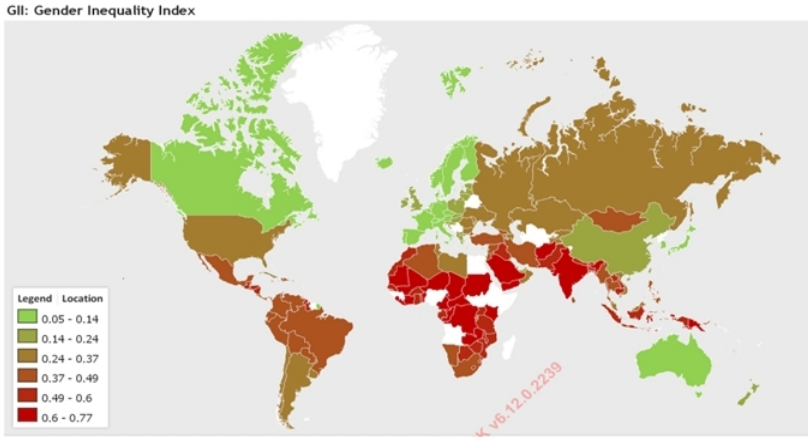
Pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi memengaruhi kesehatan populasi, sebaliknya kesehatan populasi memengaruhi pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan sumberdaya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tingkat kesehatan populasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan PDRB per Kapita. Sebaliknya, pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk menciptakan kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi menggunakan sumberdaya alam, energi, dan sumberdaya manusia secara masif. Pembangunan ekonomi yang tidak terkontrol, penggunaan sumberdaya alam dan energi untuk produksi maupun konsumsi, yang tidak berhati-hati, hingga melebihi kapasitas bumi, dapat merusak kondisi lingkungan sosial dan ekosistem, sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup populasi.

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang baik (good governance). Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan.

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut SDGs. SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari MDGs yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Delapan MDGs sebagai berikut: (1) Mengurangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan yang universal; (3) Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (4) Mengurangi kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan maternal; (6) Membasmi HIV, malaria, dan penyakit lainnya; (7) Menjamin keberlanjutan lingkungan; serta (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Meskipun beberapa target MDGs berhasil dicapai, banyak tujuan dan target lainnya dinilai belum tercapai. MDGs bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi gagal memperhatikan dan mengatasi akar masalah kemiskinan. MDGs tidak secara khusus memperhatikan pentingnya mencapai tujuan perbaikan pembangunan ekonomi. MDGs kurang memperhatikan sifat holistik, inklusif, dan keberlanjutan pembangunan. Demikian juga, MDGs dinilai kurang memperhatikan kesetaraan gender dan hak azasi manusia. Secara teoretis, MDGs ingin diterapkan di semua negara, tetapi kenyataannya MDGs hanya diterapkan pada negara berkembang atau miskin, dengan bantuan pendanaan dari negara kaya (UN, 2016; Guardian, 2016; Knoema, 2016).



Gambar 6.1: GII di berbagai Negara Dunia berdasarkan data UNDP, 2011

Sumber: Knoema, 2016

Gambar 6.1 menyajikan hasil analisis data UNDP yang menunjukkan ketidaksetaraan gender di berbagai negara dunia tahun 2011. Ketidaksetaraan gender diukur dalam Gender Inequality Index (GII), terdiri atas tiga dimensi: (1) Kesehatan reproduksi; (2) Pemberdayaan, dan (3) Lapangan kerja. $GII=0$ menunjukkan, kesetaraan sempurna antara laki-laki dan perempuan. $GII=1$ ketidaksetaraan sempurna, perempuan tidak diuntungkan maksimum. Indonesia termasuk di antara negara berkembang dengan ketidaksetaraan gender tinggi (GII 0.49-0.60) (Knoema, 2016).

Beberapa masalah utama yang belum bisa diatasi sampai dengan berakhirnya era MDGs (UN, 2016) sebagai berikut:

1. Masih terdapat jurang yang lebar antara rumahtangga yang miskin dan rumahtangga, antara daerah pedesaan dan perkotaan;
2. Masih terdapat ketidaksetaraan gender;
3. Banyak terjadi konflik (peperangan dan sebagainya) yang merupakan ancaman nyata bagi pembangunan manusia;
4. Jutaan orang miskin hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tanpa akses terhadap pelayanan dasar;

5. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merongrong kemajuan yang diperoleh dan kelompok masyarakat miskin terkena dampak yang paling besar.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu (sdgsindonesia.or.id, 2019).

Adapun 4 (empat) pilar dalam SDGs itu sendiri terangkum sebagaimana berikut ini:

1. Pilar pembangunan sosial,

Pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Pilar pembangunan lingkungan,

Pembangunan pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

3. Pilar pembangunan ekonomi,

Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola,

Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; (3) Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia; (4) Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan, serta sanitasi bagi semua; (7) Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara; (11) Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; (14) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghambat, membalikkan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati; (16) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel

dan inklusif di semua level; serta (17) Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan (www.sdg2030indonesia.org, 2019).

SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Setelah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Upaya-upaya yang dilakukan INFID meliputi: (1) Mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Sejak tahun 2017, INFID telah mendorong 7 daerah yaitu: Bojonegoro, Pangkajene Kepulauan, Malang, Kubu Raya, Banda Aceh, Jember, Cirebon, Maros, Kupang, dan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengadopsi SDGs disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan SK Bupati Pelaksanaan SDGs yang melibatkan masyarakat sipil; (2) Mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah; dan (3) Melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.



Gambar 6.2: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2030

Sumber: koalisisperempuan.or.id, 2017

Terkait dengan faktor ekonomi dan gizi, dalam mewujudkan SDGs secara terarah, diperlukan integrasi dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri yang terangkum dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1: Relevansi SDGs terhadap Ekonomi dan Gizi

Tujuan	Pokok Utama	Target (Indikator)
01	Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>) atau sekitar Rp 7.800 per hari; 2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional; 3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan; 4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi; 5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan, dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana; 6. Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam

			<p>rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya;</p> <p>7. Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan.</p>
02	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan		<p>1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun;</p> <p>2. Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula;</p> <p>3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan</p>

	<p>nilai tambah, serta lapangan kerja bukan pertanian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplemantasikan paktek-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah; 5. Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetika benih, mengolahtanaman, dan persawahan, serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional dan intensional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional
<p>03 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran; 2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, di mana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran; 3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan

		<p>memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya;</p> <p>4. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan, dan pengobatan, serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan;</p> <p>5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari <i>alcohol</i>;</p> <p>6. Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas;</p> <p>7. Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan <i>sexual</i> dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional;</p> <p>8. Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua;</p> <p>9. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.</p>
05	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua	<p>1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja;</p>

perempuan dan anak perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (<i>trafficking</i>) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya; 3. Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini, dan paksa, serta sunat pada perempuan; 4. Menyadari dan menghargai pelayanandan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur, dan social, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional; 5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik; 6. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi <i>Platform</i> Beijing dan dokumen hasil dari konferensi <i>review</i> keduanya.
08 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan khususnya, setidaknya mempertahankan 7% pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang; 2. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui

- disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya;
3. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan;
 4. Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara-negara maju;
 5. Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama;
 6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih
 7. Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan
-

		serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak;
		8. Mellindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting;
		9. Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal;
		10. Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua.
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	<hr/> 1. Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, di mana seluruh negara melakukan aksi, dengan dipelopori negara-negara maju, dengan melihat pembangunan dan kemampuan dari negara-negara berkembang;
		2. Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam;
		3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen;
		4. Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah

- disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air, dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali;
 6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan skala besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan dan untuk memasukkan informasi yang berkelanjutan di dalam siklus laporan mereka;
 7. Mendukung praktek-praktek pengadaan barang publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional;
 8. Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang di manapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam.
-

www.sdg2030indonesia.org, 2019

SDGs secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan MDGs, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti: pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim, serta proteksi lingkungan.

C. Implikasi Kebijakan

Ini merupakan bagian akhir pada pembahasan kali ini (Chapter 6). Arah kebijakan yang dapat ditempuh dengan adanya “konsep ekonomika gizi” adalah memerhatikan asupan pangan dan gizi itu sendiri, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, serta menghasilkan pola perekonomian secara berkualitas. Adapun implikasi kebijakan merupakan komponen utama sebagai pijakan untuk mendorong pertumbuhan seseorang dalam meraih produktivitas.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung kepada keberhasilan bangsa itu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif (Tanuwijaya, 2002). Walaupun sumber alam yang tersedia bagi suatu bangsa berlimpah tanpa adanya sumber daya manusia yang tangguh, maka sulit diharapkan untuk berhasil membangun bangsa itu sendiri. Kemiskinan dan kurang gizi masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia yang tidak kunjung berkesudahan (Hadi, 2005).

Kurang gizi pada awal kehidupan karena kurangnya zat gizi yang diterima ibu saat mengandung dapat menyebabkan janin mengalami kurang gizi dan lahir dengan berat badan rendah. Anak yang lahir, akan mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya. Sebagai akibat lebih lanjut dari tingginya angka Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan kurang gizi pada masa balita dan tidak adanya pencapaian perbaikan pertumbuhan yang sempurna pada masa berikutnya, maka tidak heran apabila pada usia sekolah banyak ditemukan anak yang kurang gizi (Hadi, 2005).

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, prevalensi kependekan dan kekurusan tertinggi terjadi pada kelompok anak usia sekolah atau anak umur 6-12 tahun. Lebih dari sepertiga (35,6%) anak usia sekolah di Indonesia tergolong pendek yang merupakan indikator adanya kurang gizi kronis. Prevalensi anak pendek, semakin meningkat dengan bertambahnya umur dan gambaran ini ditemukan baik pada laki-laki maupun perempuan (Kemenkes RI, 2010).

Pada masa usia sekolah, anak membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk pertumbuhan dan beraktivitas. Hal ini disebabkan karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik, mental, intelektual, dan sosial secara cepat, sehingga golongan ini perlu mendapat perhatian khusus. Faktor kecukupan gizi ditentukan oleh kecukupan konsumsi pangan dan kondisi keluarga. Johnson dan Rogers (1993) membuat model interelasi tumbuh kembang anak dengan melihat penyebab langsung, sebab tidak langsung dan penyebab dasar. Sebab langsung adalah kecukupan makanan dan keadaan kesehatan. Penyebab tidak langsung meliputi ketahanan makanan keluarga, asuhan bagi ibu dan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penyebab yang paling mendasar dari tumbuh kembang anak adalah masalah struktur politik dan ideologi serta struktur ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya. Disamping itu, berbagai faktor sosial ekonomi ikut memengaruhi pertumbuhan anak. Faktor sosial ekonomi tersebut antara lain: pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, budaya, dan teknologi. Faktor-faktor tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat memengaruhi masukan zat gizi dan infeksi pada anak. Pada akhirnya, ketersediaan zat gizi pada tingkat seluler rendah dan mengakibatkan pertumbuhan terganggu (Supariasa, 2001).

Jumlah dan kualitas makanan keluarga ditentukan oleh tingkat pendapatan keluarga. Pada umumnya, kemiskinan menduduki posisi pertama sebagai penyebab gizi kurang, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius karena kemiskinan berpengaruh besar terhadap konsumsi makanan (Suhardjo, 2005). Hal ini pun berhubungan dengan prevalensi kurang gizi yang lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Kemenkes RI pada 2010 mencatat anak yang pendek di perkotaan sebesar 29,3% dan 41,5% anak di pedesaan. Anak yang kurus di perkotaan sebesar 11,9% dan di pedesaan sebesar 12,5%.

Kemiskinan atau pendapatan keluarga yang rendah sangat berpengaruh kepada kecukupan gizi keluarga. Kekurangan gizi berhubungan dengan sindroma kemiskinan. Tanda-tanda sindroma kemiskinan antara lain berupa: penghasilan yang sangat rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan, sandang, pangan, dan perumahan, kuantitas dan kualitas gizi makanan yang rendah, sanitasi lingkungan yang jelek dan sumber air bersih yang kurang, akses

terhadap pelayanan yang sangat terbatas, jumlah anggota keluarga yang banyak, serta tingkat pendidikan yang rendah (Arlim, 2002).

Masyarakat yang tergolong miskin dan berpendidikan rendah merupakan kelompok yang paling rawan gizi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan untuk menjangkau pangan yang baik secara fisik dan ekonomis (Roedjito, 1989). Kelompok anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok rentan gizi. Meskipun kelompok umur ini mempunyai kesehatan yang lebih baik dibandingkan kesehatan anak balita, tetapi kelompok ini dapat timbul masalah-masalah kesehatan, seperti: berat badan rendah, defisiensi zat besi, dan defisiensi vitamin E8.

Anak usia sekolah dengan kondisi ekonomi keluarga baik yang bersekolah di pusat kota memungkinkan anak memiliki status kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang bersekolah dan tinggal di pinggiran kota. Pusat kota merupakan tempat yang memiliki pusat pelayanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan, seperti: fasilitas pertokoan, perbelanjaan, fasilitas untuk mengakses informasi dan kesehatan. Disatu sisi, anak yang bersekolah dan tinggal di daerah pinggiran kota dengan segala fasilitas yang tersedia dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang terbatas memungkinkan anak mempunyai status kesehatan dan gizi yang buruk dibandingkan dengan anak yang tinggal di pusat kota.

Menurut Yudesti & Prayitno (2012) dan Ernawati (2006), semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua semakin baik pertumbuhan anaknya. Schultz (1993) menjelaskan setidaknya ada lima upaya yang merupakan imbas dari pendidikan ibu dan ayah yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yakni:

1. Pendidikan akan meningkatkan sumberdaya keluarga;
2. Pendidikan akan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Pendidikan akan meningkatkan alokasi waktu untuk pemeliharaan kesehatan anak;
4. Pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan efektifitas pemeliharaan kesehatan;
5. Pendidikan akan meningkatkan referensi kehidupan keluarga.

Faktor ekonomi merupakan suatu penentu status gizi yang dapat memengaruhi status gizi anak. Status ekonomi yang rendah atau kemiskinan menduduki posisi pertama pada masyarakat yang menyebabkan gizi kurang (Suhardjo, 2005).

Gusman (2002) dan Khair (2007) pernah melakukan penelitian yang sama dan didapatkan hubungan yang nyata antara status ekonomi dan status gizi. Faktor sosial ekonomi meliputi pendidikan, pekerjaan, teknologi, budaya, dan pendapatan keluarga ikut memengaruhi pertumbuhan anak. Faktor ini akan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga memengaruhi masukan zat gizi (Supariasa, 2001). Keadaan ekonomi keluarga yang baik dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota keluarga (Suryanah, 1996). Kekurangan gizi pada anak-anak merupakan masalah kesehatan masyarakat, karena sumber daya negara yang miskin. Sebuah studi multinegara mengenai status antropometri anak sekolah pedesaan di Ghana, Tanzania, Indonesia, Vietnam, dan India ditemukan prevalensi pendek dan kurus, mulai dari 48% menjadi 56% untuk pendek dan dari 34% menjadi 62 % untuk kurus (Osei et al., 2010).

Terdapat hubungan yang nyata antara status gizi dengan status ekonomi keluarga murid sekolah dasar di pusat dan pinggiran kota. Di Negara-negara yang berpenghasilan rendah (terutama diperkotaan,) dua pertiga bagian dari jumlah pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan. Masalah ekonomi, sosial, dan politik dapat mengakibatkan meningkatnya inflasi (harga makanan naik). Inflasi harga pangan dapat mengakibatkan kegagalan dalam segi distribusi bahan makanan dan daya beli masyarakat menjadi rendah (Suhardjo, 2005). Status ekonomi yang rendah atau kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, dan ketidaktahuan akan berakibat terhambatnya pertumbuhan anak (Tanuwijaya, 2002).

Secara garis besar, pemerintah perlu membuat kebijaksanaan berupa program terarah (memperhatikan hubungan wilayah desa-perkotaan), mulai dengan menekan kepadatan penduduk, pola perpindahan penduduk yang teratur, lahan pertanian dan perkebunan produktif, gizi balita, ketersediaan pangan yang seimbang, harga sembako, tingkat

inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan aspek lain yang sangat bersetuhan antara sumber daya manusia dan ekonomi.

REFERENSI

- Accreditation Board for Engineering and Technology. (1997). *Engineering Criteria 2000*, 3rd ed. Baltimore, MD: ABET.
- Adioetomo, S.M. (2005). *Bonus Demografi: Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: BKKBN.
- Adioetomo, S.M. (2013). *Memanfaatkan Jendela Peluang Memetik Bonus Demografi. Diskusi Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Puslitbang Ketenagakerjaan, Kemenakertrans.
- Afrida, B.R. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Almatsier, S. (2002). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Almatsier, S. (2009). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amalia, S., Maria, S., Roy, J., Darma, D.C., & Pusriadi, T. (2019). *Underground Economy: The Shadow Effect of Human Trafficking*. *LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences*, 5(1), 137-153.
- Ananta, A. (1993). *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Ananta, A. (2000). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Ananta, A., & Harmadji, H.S. (1985). *Mutu Modal Manusia: Suatu Analisis Pendahuluan*. Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Ananta, A., & Tjiptoherijanto, P. (1985). *Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ando, A., & Modiglian, F. (1963). The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests. *The American Economic Review*, 53(1), 55-84.
- Anonimous. (1988). Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. Penelusuran pada <https://winworldpc.com/product/encarta/1998>.
- Anonimous. (2018). Berapa Jumlah Penduduk Jakarta?. Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta>.
- Anonimus. (1945). *Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945*. Jakarta.
- Anonimus. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 26, ayat 2) tentang Kependudukan*. Jakarta.
- Anonimus. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 H, ayat 1) tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Anonimus. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1960 (Bab 1, pasal 2) tentang Definisi Kesehatan*. Jakarta.
- Anonimus. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Anonimus. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan*. Jakarta.
- Anonimus. (1999). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 (pasal 1, angka 1) tentang Pengertian Upah Minimum*. Jakarta.
- Anonimus. (1999). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum*. Jakarta.
- Anonimus. (2000). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum*. Jakarta.
- Anonimus. (2002). *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2002 tentang Jaminan Persediaan dan Pelaksanaan Penyaluran*

- Beras bagi Kelompok Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Jakarta.
- Anonimus. (2003). Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 227/MENAKER/2003 tentang Kualitas Ketenagakerjaan. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Anonimus. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Anonimus. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 (Bab I, pasal 1 ayat 2) tentang Definisi Tenaga Kerja. Jakarta.
- Anonimus. (2005). Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2005 tentang Jaminan Persediaan dan Pelaksanaan Penyaluran Beras bagi Kelompok Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Jakarta.
- Anonimus. (2005). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-17/MEN/VII/2005 tentang Upah Minimum. Jakarta.
- Anonimus. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-08/MEN/V/2008 tentang Tata cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Jakarta.
- Anonimus. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER 21/MEN/VIII/2008 tentang Pemagangan. Jakarta.
- Anonimus. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.
- Anonimus. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Kesehatan. Jakarta.
- Anonimus. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.
- Anonimus. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Jakarta.
- Anonimus. (2015). Peraturan Pemerintah Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jakarta.

- Anonimus. (2017). Kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Commuterline Jabodetabek. Penelusuran pada <http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/09/05/kampanye-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-commuterline-jabodetabek/>.
- Anonimus. (2017). Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. Penelusuran pada <https://www.populationpyramid.net/indonesia/2017/>.
- Anonimus. (2017). Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia No. B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan PDB Tahun 2017. Jakarta.
- Anonimus. (2017). Sustainable Development Goals. Penelusuran pada http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/.
- Anonimus. (2018). Gizi Buruk, Ancaman Serius Masa Depan Sulawesi Barat. Penelusuran pada <https://www.masalembo.com/2018/09/gizi-buruk-ancaman-serius-masa-depan.html>.
- Anonimus. (2018). Inilah Peringkat UMP 2018 Seluruh Indonesia, DIY Terendah. Penelusuran pada <https://www.biaya.net/2015/11/inilah-daftar-upah-minimum-provinsi-ump.html>.
- Anonimus. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 (pasal 4, ayat 1-3) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta.
- Anonimus. (2019). Tujuan Pembangunan Keberlanjutan. Penelusuran pada <http://sdgsindonesia.or.id/>.
- Anonimus. (2019). Tujuan SDG. Penelusuran pada <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>.
- Arlim, S.M. (2002). Pengaruh perbandingan tingkat sosial ekonomi keluarga terhadap status gizi murid kelas 1 pada beberapa SD di kota Padang. Skripsi (terpublikasi). Padang: Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

- Asean Development Bank (ADB). (2019). Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia Kerja di Asia Tenggara 2020-2050. Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/14/berapa-pertumbuhan-penduduk-usia-kerja-di-asia-tenggara-pada-2020-2050>.
- Aslan., Darma, D.C., & Wijaya, A. (2019). Have Village Funds Impact Growth Economy and Poverty Rate?. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 2601-2605.
- Babić, Z. (2005). Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj. *Privredna kretanja i ekonomska politika*, 14(101), 28-53.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2014). Kerjasama pendidikan kependudukan jalur non formal materi presentasi dari paper. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan kependudukan.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2018. Penelusuran pada <https://economy.okezone.com/read/2018/12/13/320/1990934/ketahanan-pangan-indonesia-terus-meningkat>.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2007). Riset Kesehatan Dasar 2007. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2010). Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2017). Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Laporan Kinerja PPN/BAPPENAS 2017. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018a). Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Penelusuran pada <https://www.bappenas.go.id/files/rkp/PEMUTAKHIRAN%20RKPD%20TAHUN%202019.pdf>.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018b). Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>.
- Badan Pusat Statistik. (2019d). Tingkat Kemiskinan 34 Provinsi di Indonesia. Penelusuran pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190715164211-85070/miris-tingkat-kemiskinan-di-6-provinsi-ini-meningkat>.
- Badan Pusat Statistik. (2008). Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia. Berdasarkan Hasil Susenas Panel Maret 2008. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Jumlah dan Distribusi Penduduk. Sensus Penduduk Indonesia 2010. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011. Jakarta: Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial, BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2012. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta: Dharmaputra.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Jumlah Tenaga Kerja: Konsep dan Definisi. Penelusuran pada <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html#subjekViewTab1>.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2017. Jakarta: Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018a). Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Dharmaputra.
- Badan Pusat Statistik. (2018b). Pedoman Pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019e). Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 1986-2018. Survei Angkatan Kerja

- Nasional (Sakernas). Penelusuran pada <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/971/penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut-status-pekerjaan-utama-1986---2018.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2019f). Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008-2018. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Penelusuran pada <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2018.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2019c). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi, 2018. Penelusuran pada <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-2018-1555991727>.
- Bank Indonesia. (2018). Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen) Berdasarkan Perhitungan Inflasi Bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2018. Penelusuran pada <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>.
- Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic Growth*. New York: McGraw Hill.
- Berg, A., & Muscat, R. (1973). *Nutrition Program Planning: An Approach*. In A. Berg, N. S. Scrimshaw, and D. Call (eds). *Nutrition, National Development, and Planning*. Cambridge: MIT Press.
- Biro Pusat Statistik. (1996). *Survei Sosial Ekonomi Nasional. Buku I. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*. Susenas. Jakarta: BPS.
- Blocher, E., Stout, D., Cokins, G., & Chen, K. (2008). *Cost management, a strategic Emphasis*. Fourth ed. England: Mc Graw Hill.
- Boediono. (1998). *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. (2000). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.

- Boediono. (2002). *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1, Edisi 2*. Yogyakarta: BPEE.
- Boughey, A.S. (1973). *Ecology of Populations*, 2nd ed. New York: MacMillan.
- Chakrabartya, M., & Hildenbrand, H. (2011). Engel's Law Reconsidered. *Journal of Mathematical Economics*, 47(3), 289-299.
- Chowdhury, N.J., & Ullah, M.H. (2010). Socio-Economic Conditions of Female Garment Workers in Chittagong Metropolitan Area-An Empirical Study. *Journal of Business and Technology (Dhaka)*, 5(2), 53-70.
- de Onis, M., Blössner, M., & Borghi, E. (2010). Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. *Am J Clin Nutr*, 92(5), 1257-1264.
- Deaton, A.S. (1997). *The Analysis of Household Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy (English)*. Washington, D.C: The World Bank.
- DeMaeyer, E.M., Dallman, P., Gurney, J.M., Hallberg, L., Sood, S.K., & Srikantia, S.G. (1989). *The prevalence of anaemia in the world. Preventing and controlling iron deficiency anaemia through primary health care: a guide for health administrators and programme managers*. Geneva: World Health Organization.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2004). *Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan.
- Dharmmesta, B.S. (2002). *Azas-azas marketing*. Yogyakarta: Liberty.
- Dipti, S.S., Tuzon, M.A.G., & Kabir, K.A. (2008). Nutritional status of the members of the factory worker-headed households of four villages of Gazipur District. *Journal of Agriculture & Rural Development*, 6(1), 119-124.
- Djojohadikusumo, S. (2005). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Djoko, M.A.S.S., Karyana, Y., Karim, N.A., Mirdad, A.J., Fatah, R.H.A., Kusdiana, D., Pamungkas, P., & Badranaya, D. (2015). *Mobilitas Penduduk Dan Bonus Demografi*. Bandung: Unpad Press.

- Drabenstott, M. (2006). Rethinking federal policy for regional economic development. *Economic Review*, issue qi, 115-142.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ehlers, V.M., & Steel, E.W. (1927). *Municipal and Rural Sanitation*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Engel, E. (1857). Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen. *Zeitschrift des statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministerium des Inneren*, 8(9), 28-29.
- Ernawati, A. (2006). Hubungan faktor sosial ekonomi, higiene sanitasi lingkungan, tingkat konsumsi, dan infeksi dengan status gizi anak usia 2-5 tahun di Kabupaten Semarang tahun 2003. Tesis (terpublikasi). Semarang: Program Pasca Sarjana, Magister Gizi Masyarakat, Universitas Diponegoro.
- Escott-Stump, S., & Mahan, L. (2008). Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Intakes for Individuals, Vitamin/Mineral. In: Escott-Stump, S. and Mahan, L., Eds., *Krause's Food & Nutrition Therapy*. 12th Edition. Philadelphia: Saunders Elsevier.
- Farida, I. (2010). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Remaja di Indonesia Tahun 2007. Skripsi (terpublikasi). Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Food and Agriculture Organization of United Nation. (2019). Jumlah Penduduk Kurang Gizi di Asia Tenggara. Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/08/jumlah-penduduk-kurang-gizi-di-indonesia-turun-50>.
- Food and Agriculture Organization. (1996). *Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. Rome: World Food Summit.
- Food Security and Vulnerability Atlas. (2018). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
- Fox, D.M. (1989). Policy and Epidemiology: Financing Health Services for the Chronically Ill and Disabled, 1930-1990. *The Milbank Quarterly*, 67(2), 257-287.

- Galbraith, J.K. (1962). *American Capitalism: The Concept of Countervailing Power*. New Brunswick: White Plains.
- Garvin, D.A. (1984). What does 'product quality' really mean? *Sloan Management Review*, 26(1), 25-43.
- Gertner, J. (2012). *The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation*. New York: Penguin Press.
- Gibney, M.J., Vorster, H.H., & Kok, F.J. (2002). *Introduction to Human Nutrition*. Oxford: Blackwell Science.
- Ginting C.K.S., Lubis, I., Mahalli, K. (2008). Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, 4(1), 17-24.
- Glasson, J. (1978). *An introduction to regional planning: concepts, theory and practice*. 2nd ed. London: Hutchinson.
- Glasson, J. (1992). The Fall and Rise of Regional Planning in the Economically Advanced Nations. *Urban Studies*, 29(3-4), 505-531.
- Guhardja, S., Hartoyo, S., & Puspitawati, H. (1993). *Pengembangan Sumberdaya Keluarga*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia.
- Gusman, Y. (2002). Perbandingan tinggi serta berat badan murid SD pada beberapa sekolah dasar di kecamatan Lubuk Kilangan kodya Padang. Skripsi (terpublikasi). Padang: Universitas Andalas.
- Hadi, H. (2005). *Beban ganda masalah gizi dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan kesehatan nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Hammond, K. (2008). Assessment: Dietary and Clinical Data. In Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's *Food & Nutrition Therapy*, 12th Edition, International Edition. Philadelphia: Saunders Elsevier.
- Handajani, H. (1996). *Pangan, Gizi dan Masyarakat*. Solo: Sebelas Maret University Press.
- Hartwell, T.D., Steele, P., French, M.T., Potter, F.J., Rodman, N.F., & Zarkin, G.A. (1996). Aiding Troubled Employees: The Prevalence, Cost, and Characteristics of Employee Assistance Programs in the United States. *American Journal of Public Health*, 86(6), 804-808.

- Henry, C.J.K. (2005). Basal Metabolic Rate Studies in Humans: Measurements and Developmnet of New Equations. *Public Health Nutrition*, 8(7), 1133-1152.
- Herranz-Loncán, A. (2007). Infrastructure investment and Spanish economic growth, 1850-1935. *Explorations in Economic History*, 44(3), 452-468.
- Hoover, E., & Giarratani, F. (1985). *Introduction to regional economics* (3rd Ed.). New York: Knopf.
- Humantito, I.J. (2009). Analisis keterkaitan ketersediaan infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia (Model regresi data panel 26 provinsi tahun 2001-2007). Tesis (terpublikasi). Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Husaini, M.A. (1989). *Study Nutritional Anemia, an Assessment of Information. Compilation for Supporting and Formulating National Policy and Program*. Jakarta: Kerjasama Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi.
- Husaini, M.A. (1997). *Gizi, Perkembangan Intelektual dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hutabarat, A. (2005). *Determinan Inflasi di Indonesia*. Working Paper. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ignatius, T. (1988). Hubungan Makanan Tercemar Dengan Keadaan Gizi. Makalah Disajikan pada Workshop on National Food Contamination. Ciloto.
- Indriatno, N. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi (terpublikasi). Surakarta: Program Studi Akuntansi, Muhammadiyah Surakarta.
- Institute of Medicine of the National Academies. (2005). *Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intake for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Copper, Chromium*. Washington: National Academies Press.
- Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. (2002). *Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron,*

- Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington: National Academy Press.
- International Labour Organization. (2015). *Pertumbuhan Ekspor dan Lapangan Kerja yang Kuat di Sektor Garmen dan Alas Kaki di Asia. Penelusuran pada ilo.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro.../---ilo.../wcms_432373.pdf.*
- Irawan., & Suparmoko, M. (1999). *Ekonomika Pembangunan.* Yogyakarta: BPFPE.
- Irianto, D.P. (2006). *Panduan Gizi Lengkap (Keluarga Dan Olahragawan).* Cetakan 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Iskandar, N. (1974). *Beberapa Aspek Permasalahan Kependudukan di Indonesia. Special Reprint Series, 4(1).*19.
- Istiono, W.W., Suryadi, H., Haris, M., Irmizarifka, Tahi, A.D. Hasdianda, M.A, Fitria, T., & Sidabutar, T.I.R., (2009). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita. Berita Kedokteran Masyarakat, 25(3), 150-155.*
- Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K.L. (2015). *Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771.*
- Jhingan, M.L. (2007). *The Economics of Development and Planning.* 39th Edn. Delhi: Vrinda Publications.
- Johnson, F.C., & Rogers, B.L. (1993). *Children's nutritional status in female-headed households in the Dominican Republic. Social Science and Medicine, 37, 12-93.*
- Joseph, B., Chanda, A., Oommen, A., d'Almeida. (2005). *Poor intake of selected nutrients by women workers in a garment factory. Health and Population-Perspective and Issue, 28(1), 26-31.*
- Julita, L.S. (2019). *Cuma Tumbuh 5,05%, PDB Indonesia Kuartal II-2019 Rp 3.963 T. Penelusuran pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805124008-4-89867/cuma-tumbuh-505-pdb-indonesia-kuartal-ii-2019-rp-3963-t>.*

- Karyadi, D. (1997). Hubungan ketahanan fisik dengan keadaan gizi dan anemi gizi besi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Kajian Migrasi Internasional Indonesia. Jakarta: Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Riset kesehatan indonesia (RISKESDAS) 2010. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar, 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Pemerintah Komitmen Alokasikan 5% Anggaran Kesehatan (2011-2018). Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/pemerintah-komitmen-alokasikan-5-anggaran-kesehatan>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Anggaran Kesehatan 2010-2020. Direktorat Penyusunan APBN. Penelusuran pada <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2017. Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi 2018. Penelusuran pada <http://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1551337405.pdf>.
- Khair, N.E. (2007). Status gizi murid kelas 1 sekolah dasar di kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Kota Tangah. Skripsi (terpublikasi). Padang: Universitas Andalas.
- Klugman, J., Rodríguez, F., & Choi, H.J. (2011). The HDI 2010: new controversies, old critiques. *Journal of Economic Inequality*, 9(2), 249-288.

- Krems, C., Luhrmann, P.M., Strassburg, A., Hartmann, B., & Neuhäuser-Berthold, M. (2005). Lower resting metabolic rate in the elderly may not be entirely due to changes in body composition. *Eur J Clin Nutr*, 59(2), 255-262.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2001). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan kebijakan)*, Edisi ke Empat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusnandar, V.B. (2019). Berapa Jumlah Penduduk Usia Produktif Indonesia?. Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia>.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. (1981). *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Lewis, W.A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22, 139-191.
- Maharrani, A. (2019). Penuhi gizi ibu hamil untuk selamatkan bayi. Penelusuran pada <https://beritagar.id/artikel/berita/penuhi-gizi-ibu-hamil-untuk-selamatkan-bayi>.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Majardi, D., & Hartawan, A. (2002). *Small Scale Macro Model-EXTENDED*. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.
- Majardi, F. (2004). *Administered Price dan Pola Penetapan Harga BBM*. Occasional Paper No: OP/02/09. Jakarta: Bank Indonesia.
- Mankiw, N.G. (2000). The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy. *American Economic Review*, 90(2), 120-125.

- Mankiw, N.G. (2006). The Macroeconomist as Scientist and Engineer. *Journal of Economic Perspectives American Economic Association*, 20(4), 29-46.
- Mankiw, N.G. (2012). *Macroeconomics (7th Edition)*. New York: W.H. Freeman & Co Ltd.
- Mantra, I.B. (2000). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marion, T. (1994). *Regional Economics*. New York: St. Martin's Press.
- Marsetyo, H., & Kartasapoetra, G. (1991). *Ilmu gizi: korelasi gizi, kesehatan dan produktifitas kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martianto, D. (1992). *Gizi Terapan*. Bogor: PAU Pangan dan Gizi IPB.
- Marulitua, B. (2019). Tren dan Pertumbuhan IPM, 2010-2018. Penelusuran pada <https://news.trubus.id/baca/31180/bps-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-naik-jadi-7139>.
- McKinsey & Company. (2019). *Global Energy Perspective 2019: Reference Case*. Penelusuran pada https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx.
- Modigliani, F. (1976). Life-cycle, individual thrift, and the wealth of nations. *American Economic Review*, 76(3), 297-313.
- Mor, K., & Sethia, S. (2010). An Investigation of Consumer Buying Behavior for Food Products: An Empirical Study of Rural and Urban Areas of Haryana. *Global Journal of Management and Business Research*, 15(8), 7-11.
- Mueller, P. (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university-industry relationships drive economic growth. *Research Policy*, 35, 1499-1508.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public finance in theory and practice (5th ed)*. New York: McGraw-Hill.

- Mustopadidjaja, A.R. (2007). *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja)*. Jakarta: Lembaga Administrasi.
- Nency, Y.M., & Thohar, M.A. (2005). Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang. *Jurnal Inovasi*, 5(17), 1-4.
- Nopembri. (2007). *Ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Norista, G.P. (2010). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi (terpublikasi). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Osei, A., Houser, R., Bulusu, S., Joshi, T., & Hamer, D. (2010). Nutritional status of primary school children in Garhwali Himalayan villages of India. *Food and Nutrition Bulletin*, 31(2), 221-233.
- Patrioka, P.M. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat*. Tesis (terpublikasi). Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Pedoman Umum Gizi Seimbang. (2005). *13 Pedoman Umum Gizi Seimbang*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pew Research Center. (2019). *Demographics*. Penelusuran pada <https://www.pewresearch.org/topics/demography/>.
- Pongou, R., Ezzati, M., & Salomon, J.A. (2006). Household and community socioeconomic and environmental determinants of child nutritional status in Cameroon. *BMC Public Health*, 6(1), 1-19.
- Prabowo, D.W. (2014). Classification of Staple Food Commodity Using Analytical Hierarchy Process. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(2), 163-182.
- Prahas, A.T. (2012). *Memaknai Bonus Demografi*. Jakarta: Media Indonesia.
- Pratnyawan, A., & Rachmanta, R.D. (2019). 7,5 Miliar Orang di Dunia dalam Satu Bagan, Begini Penampakkannya. Penelusuran pada

- <https://www.hitekno.com/sains/2019/04/04/154500/75-miliar-orang-di-dunia-dalam-satu-bagan-begini-penampakannya>.
- Prud'homme, R. (1995) The dangers of decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201-220.
- Psacharopoulos, G. (1996). Public spending on higher education in developing countries: Too much rather than too little. *Economics of Education Review*, 15(4), 421-422.
- Pudjiadi, S. (2001). *Ilmu Gizi Klinis pada Anak*. Edisi Keempat. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia.
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. 2018. Informasi Harga Pangan Antar Daerah Bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2018. Penelusuran pada <https://hargapangan.id/>.
- Pusparisa, Y. (2019). Amerika Serikat Jadi Tujuan Terbesar Imigran Dunia. Penelusuran pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/02/amerika-serikat-tujuan-terbanyak-penduduk-migran-internasional>.
- Putti, J.M. (1986). *Memahami Produktivitas*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rajagukguk, W., & Samosir, O.B. (2015). *Dinamika Demografis Indonesia 1950-2100*. Jakarta: UKI Press.
- Ranis, G., & Stewart, F. (2001). *Growth and Human Development: Comparative Latin American Experience*. Yale Economic Growth Center Discussion Paper No. 826. Social Science Research Network. Penelusuran pada http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=275294.
- Ratnawati, I. (2011). Pemenuhan Kecukupan Gizi Bagi Pekerja. Penelusuran pada <http://www.kemas.kemkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/021411-pemenuhan-kecukupan-gizi-bagi-pekerja>.
- Ratnawati, L. (2011). Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Tingkat Depresi pada Pasien Gagal Ginjal yang menjalani Terapi Hemodialisis di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. *Jurnal Health and Sport*, 3, 285-362.

- Ravianto, J. (1985). *Produktivitas dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Riyadi, D.S. (2002). *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.
- Rochmi, M.N. (2017). *Generasi muda, ancaman atau bonus demografi*. Penelusuran pada <https://beritagar.id/artikel/berita/generasi-muda-bahaya-atau-bonus-demografi>.
- Roedjito, D. (1989). *Kajian penelitian gizi*. Edisi ke-1. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Roesli, U. (2004). *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Salvatore, D. (1997). *Microeconomics: Theory and Applications*. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Samuelson, A.P., & Nordhaus, W.D. (1997). *Mikroekonomi*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, P. (1970). The Fundamental Approximation Theorem of Portfolio Analysis in terms of Means, Variances and Higher Moments. *Review of Economic Studies*, 37(4), 537-542.
- Sanggalorang, S., Rumat, V., & Siwu, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 1-11.
- Santoso, T. (2011). Aplikasi Model GARCH pada Data Inflasi Bahan Makanan Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(1), 38-52.
- Saragih, B. (2008). Mengatasi Masalah Gizi dan Pangan Di Kalimantan Timur Dengan Pendekatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Bulletin Bappeda Kaltim*, 9(8), 24-27.
- Schultz, T.P. (1993). Investments in the Schooling and Health of Women and Men: Quantities and Returns. *The Journal of Human Resources*, 28(4), 694-734.
- Sen, A. (1992). *Inequality Re-examined*. Oxford: Oxford University Press.

- Sen, A. (2000). A Decade of Human Development. *Journal of Human Development*, 1(1), 17-23.
- Setyaningsih, Y. (2008). *Gizi Kesehatan Kerja*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, P.J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Simatupang, P., & Dermoredjo, S.K. (2003). Produk Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis "Trickle Down" Dikaji Ulang. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 51(3), 191-324.
- Simopoulos, A.P., Leaf, A., & Salem, N.Jr. (2000). Workshop Statement on the Essentiality of and Recommended Dietary Intakes for Omega-6 and Omega-3 Fatty Acids. *Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA)*, 63(3),119-121.
- Soegih, R., Sayogo, S., & Erina. (1987). Perbandingan Efek Makan Siang dari Kantin dan makan Siang "Kemasan Khusus" pada Pekerja Pabrik. *Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia*, XVI(12). Jakarta.
- Soekarman. (1991). *Energi dan Sistem Energi Predominan pada Olahraga*. Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.
- Soekirman. (1999). *Besar dan Karakteristik Masalah Gizi di Indonesia*. Jakarta: Akademi Gizi, Depkes RI.
- Soekirman. (2000). *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Soemarno. (2010). *Strategis Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Pendesaan*. Prosidding Widyakarya Nasional pangan dan Gizi VI. Jakarta: LIPI.
- Soemirat, S. (1994). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Spicker, P. (2002). *Poverty and the welfare state: Dispelling the myths*. London: Catalyst.
- Subekti. (2007). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suhardjo, A.J. (1997). Stratifikasi Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Perdesaan: Kasus Tiga Dusun Wilayah Lereng Selatan Gunung Merapi Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, 11(19), 69-86.
- Suhardjo. (2005). *Perencanaan pangan dan gizi*. Edisi ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supariasa, I.D.N., Bakri, B., & Fajar, I. (2002). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC.
- Supariasa, I.D.N. (2001). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC.
- Suparman, N.P. (1986). *Teras Komposisi*. Jakarta: Intermedia.
- Suryana, A. (2013). *Policy Partnership on Food Security (PPFS) Report to C-SOM*. Presented at Special Senior Official Meeting (C-SOM) APEC, 2 October 2013. Bali.
- Suyanto, B. (2019). *SDM Berkualitas Kunci Sukses Bonus Demografi*. Penelusuran pada <http://www.koran-jakarta.com/sdm-berkualitas-kunci-sukses-bonus-demografi/>.
- Syarief, H. (1997). *Membangun SDM Berkualitas*. Suatu Telaahan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Orasi Ilmiah, Guru Besar. Bogor: IPB.
- Tambunan, T. H. (2003). *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tanuwijaya, S. (2002). *Kebutuhan dasar tumbuh kembang anak*. Dalam: (Ikatan Dokter Anak Indonesia) *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Edisi ke-1. Jakarta: Sagung Seto.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

- Tarigan, R. (2012). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- The Economist Intelligence Unit. (2018a). *Indeks Ketahanan Pangan Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2018*. Penelusuran pada https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/02/di-asean-ketahanan-pangan-indonesia-di-bawah-vietnam?fbclid=IwAR0auW_iZw4HhUmxb38so8ScEFmQj2fjYMXr1deQbTZKX-ydP3gcE7a7YU.
- The Economist Intelligence Unit. (2018b). *Global Food Security Index 2018: Building Resilience in the Face of Rising Food-Security Risks*. Indianapolis: Corteva Agriscience.
- The Guardian. (2016). *Sustainable development goals: all you need to know*. Penelusuran pada <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations>.
- The State of Food and Agriculture. (2013). *The State of Food Insecurity in the World The multiple dimensions of food security*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Penelusuran pada <http://www.fao.org/3/a-i3434e.pdf>.
- The United Nations Children's Fund. (1998). *Integration of vitamin A supplementation with immunization: policy and programme implications*. New York: UNICEF.
- Tjiptoherijanto, P., & Soemitro, S. (1998). *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cita Putra Bangsa.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*. 7th ed. Harlow: Addison-Wesley.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Economic Development*. 8th Edition. Reading: Addison-Wesley.
- Todhunter, E.N. (1969). *Approaches to nutrition education*. *Journal of Nutrition Education*, 1(1), 8-9.
- Trisna, I. (2005). *Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif di kabupaten*

- bengkalis. Tesis (terpublikasi). Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Triutomo, S. (2001). Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Terpadu dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. Jakarta: BPPT.
- Tukiyat. (2002). Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT.
- Umar, H. (1999). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, H. (2000). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Edisi Revisi dan Perluasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations Development Programme. (1990). Human development report 1990. New York: Oxford University Press. Penelusuran pada http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf.
- United Nations Development Programme. (1995). Human development report 1995. New York: Oxford University Press. Penelusuran pada http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/256/hdr_1995_en_complete_nostats.pdf.
- United Nations Development Programme. (2012). Asia-Pacific Human Development Report 2012. Penelusuran pada <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/asia-pacific-human-development-report-2012.html>.
- United Nations. (1993). Vienna Declaration and Programme of Action. Vienna: World Conference on Human Rights.
- United Nations. (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- United Nations. (2016). Global Sustainable Development Report 2016. New York: Department of Economic and Social Affairs.

- Waluyo, D.E. (2016). *Ekonomika Makro*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Widodo, S.K. (2006). Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Perkembangan Sektor Perikanan. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII, 14-17 November 2006. Jakarta.
- Wijayanti, T.C., & Darma, D.C. (2019). The Role of Investment and Government Expenditure on GRDP and Human Development in East Kalimantan. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(9), 1232-1237.
- Wildan, M. (2019). Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Terjaga pada Level 5 Persen. Penelusuran pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/9/1157640/bank-dunia-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-terjaga-pada-level-5-persen>.
- Winardi, J. (2008). *Entrepreneur & entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- World Bank. (1993). *World Bank Policy Research Report 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. New York: Oxford University Press.
- World Health Organization. (2011a). *World Health Statistics 2011. Geneva: Trace Elements in Human nutrition and Health*.
- World Health Organization. (2011b). *The state of the world's children 2011. Adolescence: an age of opportunity*. New York: United Nations Children's Fund.
- Yudesti, I., & Prayitno, N. (2012). Perbedaan status gizi anak SD kelas IV dan V Di SD Unggulan (06 Pagi Makasar) dan SD Non Unggulan (09 Pagi Pinang Ranti) Kecamatan Makasar Jakarta Timur Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1), 1-5.
- Yutimah. (2011). Pembangunan Bidang Kesehatan (Kemiskinan dan Buruknya Tingkat Kesehatan). Penelusuran pada <http://yutimahdamazier.blogspot.co.id/2011/05/pembanguna-n-bidang-kesehatan-artikel-1.html>.
- Yuwono, M. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender*. Jakarta: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS.

INDEKS

ΔC	: <i>Disposabel Consumption</i>
ΔPDB_t I-II berjalan)	: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Kwartal III-IV ke Kwartal I-II berjalan)
ΔY	: <i>Disposabel Output (Income)</i>
a	: <i>Constanta</i>
aW	: <i>Constanta Marginal Propensity to Consume</i>
A	: Vitamin A*
ABET	: <i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>
AD	: <i>Aggregate Demand</i>
ADB	: <i>Asean Development Bank</i>
ADD	: Alokasi Dana Desa
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AI	: <i>Adequate Intake</i>
AIDS	: <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
AC	: <i>Average Cost</i>
AHH	: Angka Harapan Hidup
AIH	: <i>Absolute Income Hypothesis</i>
AK	: Angkatan Kerja
AKE	: Angka Kecukupan Energi
AKG	: Angka Kecukupan Gizi
AMDR	: <i>Average Macronutrients energy Distribution Range</i>
APC	: <i>Average Propensity to Consume</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>

ASI	: Air Susu Ibu
bY	: <i>Constanta Marginal Propensity to Consume</i>
B	: Nomor (Seri) Surat
B1	: Tiamin
Bab	: Bagian (<i>Chapter</i>)
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAK	: Bukan Angkatan Kerja
BB	: Berat Badan
BB/TB	: Berat Badan menurut Tinggi Badan
BB/U	: Berat Badan menurut Umur
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BKD	: Badan Kredit Desa
BKP	: Badan Ketahanan Pangan
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS*	: Badan Pusat Statistik
BPS**	: Biro Pusat Statistik
C	: <i>Consumption</i>
CO ₂	: Karbon Dioksida
CBT	: <i>Competency Based Training</i>
CSR	: <i>Coorporate Social Responsibility</i>
D	: <i>Demand</i> (Permintaan)
D-3	: Diploma Tiga
Depkes	: Departemen Kesehatan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DAU	: Dana Alokasi Umum
DHA	: <i>Docosehaxaenoic Acid</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DRI	: <i>Dietary Reference Intake</i>
DKZPG	: Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DRIs	: <i>Dietary Reference Intakes</i>

e0	: <i>Life Expectancy</i>
E	: <i>Equilibrium</i>
E8	: <i>New Roots Herbal's</i>
EAR	: <i>Estimated Average Requirement</i>
EB	: Energi Basal
EER	: <i>Estimated Energy Requirements</i>
EPI	: <i>Environmental Performance Index</i>
EWS	: <i>Early Warning System</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
G*	: <i>Government Expenditure</i> (Pengeluaran Pemerintah)
G/g**	: Gram
GAKY	: Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
GDI	: <i>Gender-related Development Index</i>
GDP	: Gross Domestic Product
GEM	: <i>Gender Empowerment Measure</i>
GII	: <i>Gender Inequality Index</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
GRDP	: <i>Gross Regional Domestic Product</i>
GSFI	: <i>Global Food Security Index</i>
H	: Huruf (bagian/isi Pasal)
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDI	: <i>Human Development Index</i>
HDR	: <i>Human Development Report</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
HPI	: <i>Human Poverty Index</i>
I	: Input
Inpres	: Intruksi Presiden
IBS	: <i>Industry Based Curriculum</i>
IELTS	: <i>International English Language Testing System</i>
IHK	: Indeks Harga Konsumen

IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKP	: Indeks Ketahanan Pangan
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMT/U	: Indeks Massa Tubuh menurut Umur
INFID	: <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
IOM	: <i>Institute of Medicine</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
kkal	: kilo kalori
K	: Kapital (Persediaan Modal)
Kg	: <i>Kilogram</i>
Km/km	: <i>Kilometer</i>
KB	: Keluarga Berencana
KCK	: Kredit Canda Kulak
KEK	: Kurang Energi Kronis
KEP	: Kurang Energi Protein
KHM	: Kebutuhan Hidup Minimum
KK	: Kepala Keluarga
KMP	: Kawasan Mandiri Pangan
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KSS	: Keluarga Sehat Sejahtera
KRPL	: Kawasan Rumah Pangan Lestari
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUD	: Koperasi Unit Desa
KVA	: Kurang Vitamin A
L	: <i>Labour</i> (Angkatan Kerja Agregat)
LILA	: Lingkaran Lengan Atas
mg	: miligram
M/m	: <i>Meter</i>
Men	: Menteri
M _I	: Madrasah ibtidaiyah
MoM	: <i>Month of Month</i>

MA	: Madrasah Aliyah
MC	: <i>Marginal Cost</i>
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MFC	: <i>Marginal Fixed Cost</i>
MFCX	: <i>Marginal Fixed Cost</i> Tenaga Kerja
MENLHK Indonesia	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
M.NAKER	: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
MPC	: <i>Marginal Propensity to Consume</i>
MPL	: <i>Marginal Product Labour</i>
MPTK	: <i>Marginal Product</i> Tenaga Kerja
MP3EI Indonesia	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MP3KI Indonesia	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia
MR	: <i>Marginal Revenue</i>
MRP	: <i>Marginal Revenue Product</i>
MRP	: <i>Marginal Revenue Product</i> Tenaga Kerja
MTs	: Madrasah tsanawiyah
N	: Laba Maksimum
No.	: Nomor
NBDRI	: <i>Nutrients-Based Dietary Reference Intakes</i>
NRVs	: <i>Nutrient Reference Values</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
O	: Output
Oseania	: Kepulauan yang Terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya
P*	: <i>Price</i>
P**	: Produktivitas
Per	: Peraturan
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	: Peraturan Presiden
PforR	: <i>Program for Result</i>
PB	: Panjang Badan

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PHIJSK	: Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKU	: Pengembangan Korporasi Usahatani
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
PSG	: Pemantauan Status Gizi
PQLI	: <i>Physical Quality Life Index</i>
PT*	: Perusahaan Terbuka
PT**	: Perguruan Tinggi
PUG	: Pengarusutamaan <i>Gender</i>
PUGS	: Pedoman Umum Gizi Seimbang
R	: <i>Rate</i> (Suku Bunga)
Risikesdas	: Riset Kesehatan Dasar
Rp	: Rupiah (IDR)
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RCC	: Republik Rakyat Cina
RDA	: <i>Recommended Dietary Allowances</i>
RENI	: <i>Recommended Energy and Nutrient Intake</i>
RI	: Republik Indonesia
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RT	: Rumah Tangga
SAKERNAS	: Survei Angkatan Kerja Nasional
S*	: <i>Saving</i> (Tabungan)
S**	: <i>Supply</i>
SD*	: <i>Standard Deviation</i>
SD**	: Sekolah Dasar

SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	: Sengolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SRI	: <i>Safe Range of Intake</i>
SUPAS	: Survei Penduduk antar Sensus
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
T	: Hidup
TB	: Tinggi Badan
TB/U	: Tinggi Badan menurut Umur
TEE	: <i>Total Energy Expenditure</i>
TEF	: <i>Thermic Effect of Food</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TOEFL	: <i>Test of English as a Foreign Language</i>
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TUL	: <i>Tolerable Upper Level</i>
UI	: Universitas Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UM _n	: Upah Minimum yang akan ditetapkan
UMP	: Upah Minimum Kota/Kabupaten
UMR	: Upah Minimum Regional
UMS	: Upah Minimum Sektoral
UM _t	: Upah Minimum Tahun Berjalan
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programs</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>

USFNB	: <i>US Food and Nutrition Board</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
URT	: Ukuran Rumah Tangga
V	: Bulan Mei (pada Surat)
VIII	: Bulan Agustus (pada Surat)
VMP	: <i>Veneu Marginal Product</i>
W*	: Kekayaan
W**	: <i>Wage</i> (Upah)
W/Y	: <i>Average Propensity to Consume</i>
WCHR	: <i>World Conference on Human Right</i>
WGLH	: <i>Which Growth Labour per Hours</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WHO-NCHS	: <i>World Health Organization-National Center for Health Statistics</i>
WR	: <i>Wage Rate</i>
X*	: Tenaga Kerja
X**	: Bulan Oktober (pada Surat)
Y	: Output (Pendapatan)
YoY	: <i>Year on Year</i>
Z-Score	: <i>Standardized Value</i>

BIODATA PENULIS



Dio Caisar Darma adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda. Lahir di Kota Samarinda, 9 Mei 1990. Lulus dari S1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari FEB Universitas Mulawarman (SE), 2013 dan Master pada Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi (M.Si), 2015. Saat ini, turut aktif sebagai Trainer Jurnal dan Peneliti Mandiri untuk bidang: Makro Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perencanaan Wilayah, Manajemen, dan

bidang lainnya berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa (HMJ) Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman periode 2010-2011, tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia (IMEPI) periode 2010-2014, Remaja Batik Samarinda 2010, Anggota Unit Layanan Strategis-Pengembangan Sumber daya Lokal dan Kawasan (ULS-PASDALOKA) UNMUL, dan Forum Manajemen Indonesia (FMI) Kaltim-Tara.

Beberapa prestasi dalam lingkup akademik yakni: Mahasiswa Berprestasi Tingkat FE-UNMUL 2011, Juara IV Mawapres Tingkat UNMUL 2011, Juara I Lomba Debat tingkat Fakultas Ekonomi UNMUL, 40 Penerima Hibah Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 2011, serta 10 Besar Finalis LKTI berbagai pagelaran IMEPI di beberapa Universitas penyelenggara (IPB, UNBARI, UNLAM, UNAIR). Selain itu, penghargaan dibidang non-akademik berupa: pengabdian masyarakat (Runner Up II Pemilihan Duta Wisata Kota Samarinda 2011 dan The Best Intelligence Duta Kota Samarinda 2012), serta berperan

penting dalam membina kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di STIESAM dan Universitas Mulia PSDKU Samarinda.

Adapun hasil penelitian (kerja sama dan membantu Pemerintah, Jurnal Nasional terindeks SINTA, dan Jurnal International Bereputasi) yang pernah dilaksanakan, antara lain: (1) Kajian Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur; (2) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021; (3) Koordinator Tim Sensus Penduduk 2010 oleh BPS Samarinda; (4) Anggota Tim Sensus Pertanian 2013 oleh BPS Samarinda; (5) Anggota Tim Sensus Ekonomi 2016 oleh BPS Samarinda; (6) Pengumpulan data lapangan terhadap Tenaga Profesional Pendampingan Desa di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu; (7) The Effect of Social Media Marketing, Word of Mouth, and Effectiveness of Advertising on Brand Awareness and Intention to Buy; (8) Why Fiscal Dynamics Occur in Samarinda City?; (9) Investment Development Strategy Management in Mahakam Ulu Regency, Indonesia; (10) Determinant the gross regional domestic product of east kalimantan province: macroeconomic variable review; (11) Underground Economy: The Shadow Effect of Human Trafficking; (12) Connectivity Continuous Improvement Program and Employee Performance; serta (13) Readiness To Face Industry 4.0.

PURWADI memulai karir sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mulawarman tahun 2005. Dengan fokus keahlian pada konsentrasi MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia), Manajemen Pemasaran, dan Manajemen SDA (Sumber Daya Alam), SIM (Sistem Informanajemen), Makro Ekonomi, dan Ekonomi Wilayah, sehingga menempatkannya dalam beberapa kesempatan Staf Ahli DPR (Dewan Perwakilan Daerah) Tingkat Provinsi Kaltim Komisi 2 (Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan) di 2009-2011, serta Komisi 1 (Bidang Pemerintahan) pada 2011-2014. Lulus kuliah di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman (S-1) tahun 1997, serta melanjutkan studi S-2 pada Almamater yang serupa, dan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (lulus pada 2006). Sempat menempuh Program Doktor Ilmu Ekonomi (S-3) di Universitas Hassanudin Makassar, sampai dengan lulus ujian prelium (pra-syarat pengajuan SK Promotor) periode 2009.



Purwadi, Pria kelahiran 9 Juli 1970 di Klaten (Jawa Tengah) silam, di tahun 1990 pernah berperan menjadi Pimpinan Majalah Dinding Fakultas Ekonomi dan menggagas pelatihan jurnalistik se-Kalimantan, tingkat Fakultas, maupun Universitas. Dari pelatihan tersebut, lahirlah beberapa media cetak di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, seperti: Tabloid FOKUS (Forum Komunikasi), Majalah Fitrah kepemilikan PUSDIMA (Pusat Studi Islam Mahasiswa) Universitas Mulawarman, serta Jurnal Forum Ekonomi. Semangat dalam merangkai tinta hitam, mengantarkan beliau di beberapa lomba ilmiah: Juara 1 LKTI tingkat Universitas Mulawarman bertema sosial dengan judul “Pengentasan Kemiskinan melalui Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur”, dan berlanjut pada tingkat Nasional (tuan rumah Universitas Siliwangi) dengan meraih Juara Harapan 1. Tak hanya sampai disitu, ia juga berkesempatan mewakili alamater tercinta sebagai Pembawa Makalah bertemakan “Multi National Company di Indonesia” dibawah naungan ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) berlokasi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 1994, lalu setelahnya mendapat tugas untuk RAKER (Rapat Kerja) ISMEI di Universitas Trisakti. Di tahun 1995, mengikuti Kongres ISMEI (perwakilan Koordinator Wilayah Kalimantan) dengan tuan rumah Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus menjadi narasumber Seminar Nasional. Pertemuan di Universitas Hassanudin dalam rangka pertemuan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) pada 1996. Kembali tahun 1993, ia menjadi Wakil Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman dan 1994-1995 sebagai Ketua Umum BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa). Pengalaman yang paling berkesan adalah saat menerima penghargaan Mahasiswa Teladan tingkat Fakultas Ekonomi dan dilanjutkan seleksi di Universitas Mulawarman berjudul: “Peran Tenaga Kerja Muda dalam Pembangunan di Kalimantan Timur” (1995).

Pengalaman di luar Kampus, sempat bekerja pada posisi marketing di Bank Danamon (1997-1998). Diwaktu yang sama, berpengalaman

menjadi Asisten Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Widayagama Samarinda untuk mengajar beberapa mata kuliah: Ekonomi Internasional, Statistik, dan Perekonomian Indonesia. Selain itu, Sekertaris Umum pernah dipengang bagi HMNI (Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia) periode 2015-2020. Pemerhati terhadap kebijakan Pemerintah (skala Daerah maupun Pusat) yang dimuat melalui media koran (Kaltim Post, Tribun Kaltim, Samarinda Pos, Koran Kaltim, Samarinda TV, dan Kaltim Today). Anggota forum CSR (Corporate Social Responsibility) Kabupaten Mahakam Ulu untuk Bidang Ekonomi pernah dijalani periode 2018-2021, serta diwilayah dan waktu serupa membantu DPRD (Staf Ahli Ketua). Jabatan yang sama untuk Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan juga pernah dilalui di wilayah Kabupaten Berau (2015-2016).

Dipercaya menjadi sekretaris PUSLITBANGWIL (Pusat Penelitian & Pengembangan Wilayah) dibawah naungan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Mulawarman untuk masa 2013-2016. Beliau sebagai pelopor berdirinya lahirnya ULS (Unit Layanan Strategis) di Universitas Mulawarman atas amanah Wakil Rektor IV (Bidang Kerja Sama). Di 2016, mendirikan ULS Pengembangan Ekonomi Regional dan Wilayah (menjabat Sekertaris). Saat ini, aktif di ULS-PASDALOKA (Pengembangan Sumber Daya Alam & Kawasan) Universitas Mulawarman yang dimulai pada 2017 hingga sekarang.

Beberapa hasil pemikiran yang termuat di media cetak, jurnal ilmiah skala nasional, serta internasional antara lain: Kajian sarung samarinda dari prespektif pemangku kepentingan, *Connectivity Continuous Improvement Program and Employee Performance, Investment Development Strategy Management in Mahakam Ulu Regency* (Indonesia), Bukit Soeharto Calon Ibu Kota, Akademisi Unmul Beda Sikap, Benahi Tata Ruang sebelum Pindah Ibu Kota, Simulasi Dianggap Perlu Singkirkan: Kekhawatiran Dampak Tower SUTT PLN, Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda, Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Lurah dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara, Strategi Pengembangan Industri Kecil/Rumah Tangga (UKM) Berbasis

Pertanian, Good Governance Samarinda Masih Jauh Panggang dari Api, The Study of Policy Resource Allocation of Land Use in the Agricultural Development Sector in East Kutai, The Different Attributes Between Visitors Traditional Market and Modern Market Samarinda East Kalimantan, serta lainnya (bisa dilihat pada Google Scholar).



Tri Cicik Wijayanti, wanita kelahiran 12 Desember 1963, Kota Surabaya. Menempuh pendidikan Strata 1 sebanyak 2 kali, pertama di Program Studi Chemical Engineering, Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Surabaya dan lulus pada 1986, serta pada Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahardika Surabaya (lulus tahun 2012). Selanjutnya, Gelar Strata 2 dengan mengambil di Program Studi Manajemen pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (kerjasama dengan Universitas Gajah Mada) dan lulus ditahun 1998. Tak kalah menariknya, di Almamater yang serupa, beliau lulus dari Program Studi Magister Psikologi untuk tahun 2008. Gelar Doktor ia dapatkan saat masa 2012 dengan mengenyam pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang) melalui Program Studi Ilmu Ekonomi.

Kesibukan beliau selama ini telah banyak dihabiskan dengan bekerja di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk kurang lebih 32 tahun (1986-2018) dan pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro. Saat ini, turut aktif sebagai Dosen kontrak tetap bagi Program Pasca Sarjana (Ilmu Manajemen) di Universitas Muhammadiyah Gresik dan beberapa waktu melakukan penelitian, serta pengabdian masyarakat. Selain itu, ia juga berkesempatan dalam beberapa organisasi, seperti: Anggota PII (Persatuan Insinyur Indonesia), ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSSI), dan AIMI (Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia), IDEI (Insani Doktor Ekonomi Indonesia).

Agenda pelatihan berbasis soft skill pernah ia ikuti, antara lain: Pekerti Dosen, Knowledge Management, Manager as coach, TOT (Training of Trainer) sertifikasi kompetensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi

Profesi), Cognitiv Behaviour Theraphy, Develop People at Work, Sertifikasi face psikologi, Hipnosis, Pelatihan manajemen dan psikologi, MS office & Power point, Neuro-Linguistic Programming (NLP) coaching, Desing Out bound training, CTC (Creative Trauma Center), serta Assesment Center di waktu yang berbeda.

Luaran atau gagasan berbentuk buku dan jurnal terindeks skala Nasional maupun Internasional yang pernah dibuat berjudul: (1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Pemakai Semen; (2) Pengaruh Pelatihan Knowledge Management Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk; (3) The Role of Investment And Government Expenditure On GRDP And Human Development In East Kalimantan; (4) Manajemen PT. Neo Global Era (Gojek) Banjarmasin; (5) How to Increase Brand Equity and Brand Loyalty; (6) The effect of knowledge manajement to improve employee performance in PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; dan (7) The Influence of Organizational Culture, Managerial Motivation and Leadership on Corporate Social Responsibility (CSR), Reputation and Performance.

EKONOMIKA GIZI

Dimensi Baru di Indonesia

Ekonomi dan gizi sangatlah erat kaitanya, meskipun secara garis besar ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, maka ia memerlukan pola untuk menselaraskan mana kebutuhan pokok dan prioritas, mana yang tidak, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini manusia sudah pasti memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam pengelolaan (manajemen), modal, waktu, serta beragam indikator lain. Disatu sisi, ilmu gizi membahas bagaimana kecukupan sumber pangan untuk yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga.

Buku ini terdiri atas 6 (enam) bagian, yang mencoba menuntun Anda untuk memahami memahami konsep dan terapan dari Ekonomika Gizi. Bagi seorang akademisi, kiranya membutuhkan sebuah suplemen baru dalam menulis artikel, jurnal, dan mengembangkan pemikiran sesuai dengan kondisi terkini. Tak kalah pentingnya, untuk Pemerintahan sangat penting sekali dalam merubah pola pikir berupa program yang harus bersentuhan langsung dengan ilmu aplikatif seperti yang tertuang dalam pokok bahasan buku ini.



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-7645-29-0

